

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>KEMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 1993 14 Januari 1994	Pengenaan Pajak Secara Progresif terhadap pemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu	L L : 3 hal	
2	No. 2 Tahun 1993 21 Januari 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati Maluku No.2 Tahun 1992 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah Prop. Dati I Maluku dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
3	No. 3 Tahun 1993 27 Januari 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No.16/1990 ttg Perubahan Kedua Perda Prop. Dati I Jabar No.8 Th.1981 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I Jawa Barat	L L : 3 hal	
4	No. 4 Tahun 1993 8 Pebruari 1993 <b>SKB No.002/1993</b>	Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan Pengembangan di Jajaran Depdagri.	L L : 4 hal	
5	No. 5 Tahun 1993 15 Februari 1993	Penataan dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati di Kab. Dati II Tangerang, Cianjur Sukabumi, Indramayu, Sumedang, Tasikmalaya dan Ciamis dalam Wilayah Prop. Daerah Tk.I Jawa Barat.	L L : 9 hal	
6	No. 6 Tahun 1993 15 Pebruari 1993	Data wilayah Administrasi Pemerintahan	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No. Th.1994
7	No. 7 Tahun 1993 15 Pebruari 1993	Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
8	No. 8 Tahun 1993 15 Pebruari 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati.I Sulut No.3/91 ttg Renc.Tata Ruang Wil. Prop. Dati I Sulut.	L L : 11 hal	
9	No. 9 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 9 hal	
10	No. 10 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Badan Kerjasama Perush. Daerah Seluruh Indonesia ( BKS-PDSI ) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Program Kerja Serta Urusan Priode Masa Bhakti 93-94	L L : 3 hal	
11	NO. 11 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Keperguruan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia ( Depemma - PAMSI ) Periode masa Bhakti 1993 - 1998.	L L : 3 hal	
12	No. 12 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II.		Dicabut dg KMDN No.8 Th.1999
13	No. 13 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pejabat penilai & atasan pejabat penilai rangka Pembuatan Daftar Penilaian pelaks. Pekerjaan Bagi Pejabat di Lingk. Pemerintah Prop. Dati I dan Pemerintah Kab./Kotamadya	L L : 3 hal Lamp : 12 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No. 14 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata cara Pengajuan usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural.	L L : 6 hal Lamp : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.16 Th.2003
15	No. 15 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pelaksanaan Pemberian Piagam Tanda Kesetiaan, Ketaatan, Jasa dan Pengabdian Kepada Aparat Pemerintah Desa yang Berjasa dalam Pelaksanaan Tugasnya.	L L : 4 hal	
16	No. 16 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pelaksanaan Pemberian uang sumbangan sbg Penghargaan atas Jasa Kepala Desa dan Perangkat Desa yg Meninggal Dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas Negara.	L L : 4 hal	
17	No. 17 Tahun 1993 27 Pebruari 1993 SKB-No.58/Men/1993	Keputusan Bersama Dep. Trans. & Mendagri ttg Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potential.	L L : 25 hal Lamp : 2 hal	
18	No. 18 Tahun 1993 27 Maret 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.	L L : 17 hal Lamp : 3 hal	
19	No. 19 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pengangkatan Dalam Jabatan Peneliti pada Jajaran Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 hal	
20	No. 20 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Tatacara Pembayaran Ganti Rugi & Kompensasi di Lingk. Pemda atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.	L L : 4 hal	
21	No. 21 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Penetapan Batas Baru secara Pasti Antara Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai dan Kabupaten Dati II Asahan.	L L : 5 hal	
22	No. 22 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Penataan dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah.	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	
23	No. 23 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati di Kab. Dati II Musi Banyu Asin, Kab. Dati II Ogan Komering Ulu dan Penataan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lahat Wil. II dalam Wilayah Prop. Dati I Sumsel.	L L : 5 hal	
24	No. 24 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemda.	L L : 8 hal	
25	No. 25 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pedoman Pembentukan Organisasi KPDE Prop. Dati I Jawa Timur & Sulawesi Selatan.	L L : 8 hal	
26	No. 26 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum DKI Jakarta.	L L : 10 hal	
27	No. 27 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.3 Th.1992 ttg Pembentukan SOTK Dinas Tenaga Kerja Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
28	No. 28 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Keputusan Bersama Mendagri & Menteri Hubungan Batas - Batas Daerah Lingk.Kerja Daratan Pelabuhan Pantoloan/Donggala.	L L : 9 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No. 29 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Batas - batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan & daerah Lingkungan Kerja Daerah Pelabuhan Sorong.	L L : 10 hal	
30	No. 30 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Keputusan Bersama Batas - batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan Daerah Lingk. Kerja Daratan Pelabuhan Ambon.	L L : 11 hal	
31	No. 31 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Keputusan Bersama Mendagri dan Menhub Ttg Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan Daerah Lingk. Kerja Daratan Pelabuhan Kotabaru & Kawasannya.		
32	No. 32 Tahun 1993 31 Maret 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Jawa Barat No.1 Th.1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Dati I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Jawa Barat	L L : 2 hal	
33	No. 33 Tahun 1993 31 Maret 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Jatim No.12 Th. 1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Prop. Prop. Dati I Jatim dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Jawa Timur	L L : 2 hal	
34	No. 34 Tahun 1993 6 April 1994	Pengesahan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.14 Tahun 1991 ttg Perubahan Pertama Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 1992 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perumahan DKI Jakarta	-	
35	No. 35 Tahun 1993 6 April 1993	Pengesahan Perda Kotamadya Daerah Tk.II Manado No. 5 Tahun 1991 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Manado Th.1990 - 2010 (Revisi Rik Manado 1985 - 2005)	L L : 6 hal	
36	No. 36 Tahun 1993 8 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.11 Th.1992 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Lampung No.7/1992 ttg Org. dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Dati I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
37	No. 37 Tahun 1993 12 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 4 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Prop.Dati.I Sulut.	L L : 3 hal	
38	No. 38 Tahun 1993 12 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 3 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Prop. Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
39	No. 39 Tahun 1993 21 April 1993	Penentuan Jumlah dan Tata Cara Pengangkatan anggota DPRD Kotamadya Dati I Tangerang.	L L : 17 hal	
40	No. 40 Tahun 1993 28 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.9 Th.1992 ttg Organisasi & Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Jambi.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No. 41 Tahun 1993 28 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.9 Th.1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Pendidikan & Latihan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal	
42	No. 42 Tahun 1993 28 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.6 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Dan Latihan Prop. Dati I Kaltim.	L L : 3 hal	
43	No. 43 Tahun 1993 28 April 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati Sulut No. 7 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Prop.Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
44	No. 44 Tahun 1993 1 Mei 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.13 Th.1992 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Sekretariat Wil./Daerah Prop. Dati I Sumbar.	L L : 2 hal	
45	No. 45 Tahun 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.14 Th.1992 ttg SOTK Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sumatera Barat.	L L : 2 hal	
46	No. 46 Tahun 1993 7 Mei 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.	L L : 5 hal	Dicabut dg KMDN No.48 Th.1996
47	No. 47 Tahun 1993 7 Mei 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 8 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulut.	L L : 5 hal	
48	No. 48 Tahun 1993 13 Mei 1993 No : 0201/P/1993 No.KP/SK.074A/93/01 No. 99 A Th 1993	Pedoman Pemilihan Guru Teladan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	L L : 44 hal	
49	No. 49 Tahun 1993 21 Mei 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Dati I & Dinas Pariwisata Dati II	L L : 33 hal	
50	No. 50 Tahun 1993 28 Mei 1993	Kriteria Penilaian Dalam Rangka Pemberian Tanda Kehormatan Parasamnya Purnakarya Nugraha Pelita V Tingkat Depdagri.	L L : 11 hal	
51	No. 51 Tahun 1993 31 Juni 1993	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya Tipe B	L L : 5 hal	
52	No. 52 Tahun 1993 5 Juni 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Bengkulu No.10 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 4 hal	
53	No. 53 Tahun 1993 5 Juni 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.10 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Arsip Dati I Sumatera Utara.	L L : 4 hal	
54	No. 54 Tahun 1993 18 Juni 1993 No.247a/K/1993 No.793a/KMK/03/93	Kepber Mendagri, Menteri P & K dan Menkeu RI ttg Penetapan Besarnya Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan SD Negeri TA.1993/1994.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
55	No. 55 Tahun 1993 19 Juni 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.2 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Diklat Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
56	No. 56 Tahun 1993 19 Juni 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.12 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan & Latihan Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal	
57	No. 57 Tahun 1993 19 Juni 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No. 12 Tahun 1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Bali	L L : 2 hal	
58	No. 58 Tahun 1993 19 Juni 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Timtim No.01 Th.1993 ttg Organisasi dan Tata Kerja Diklat Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 2 hal	Dicabut
59	No. 59 Tahun 1993	<b>BATAL</b>		
60	No. 60 Tahun 1993 23 Juni 1993	Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil	L L : 8 hal	
61	No. 61 Tahun 1993 30 Juni 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dati I dan Dinas LLAJ Daerah Tingkat II.	L L : 36 hal	
62	No. 62 Tahun 1993 1 Juli 1993	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Pusat Dalam Negeri	L L : 3 hal	
63	No. 63 Tahun 1993 3 Juli 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No. 6 Th. 1992 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Prop. Dati I Sultra.	L L : 2 hal	
64	No. 64 Tahun 1993 5 Agustus 1993	Penunjukan Pejabat yg diberi Wewenang utk Menandatangani Keputusan Kepegawaian.	L L : 3 hal	
65	No. 65 Tahun 1993 5 Agustus 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.12 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan & Pelatihan Prop. Dati I Sulsel.	L L : 4 hal	
66	No.66 Tahun 1993 5 Agustus 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.10 Th.1992 ttg Organisasi & Tata Kerja Pendidikan & Latihan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 4 hal	
67-68		<b>KOSONG</b>		
69	No.69 Tahun 1993 16 Agustus 1993	Pengesahan Perda Prop. DI Aceh No. 4 Tahun 1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. DI Aceh.	L L : 3 hal	
70	No.70 Tahun 1993 20 Agustus 1993	Pengesahan Perda Prop. DI Yogyakarta No.3 Th.1993 ttg SOTK Sekretariat Wil./ Daerah Prop. DIY dan Sekretariat DPRD Prop. DIY.	L L : 3 hal	
71	No.71 Tahun 1993 20 Agustus 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.6 Th.1993 ttg Organisasi & Tatakerja Set. Wil./ Daerah & Sekretariat DPRD Prop.Tk.I Jateng.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
71 A	No.71A Tahun 1993 31 Agustus 1993 No.2862 - K/841/M. PE/1993	KEPBER Mendagri - Pertambahan Tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembangunan Rekening Listrik Pemerintah Daerah.	L L : 5 hal	Dicabut dg Kepmen No.10 Th.2002
72	No.72 Tahun 1993 1 September 1993	Pemberian Penghargaan Asthabrata kepada Wisudawan terbaik STPDN.	L L : 2 hal	
73	No.73 Tahun 1993 1 September 1993	Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri	L L : 20 hal	
74	No.74 Tahun 1993 7 September 1993 SKB NO.480/Kpts-II/1993 SKB.69/MEN/1993	Kep. Bersama Menteri kehutanan, Mendagri, Menteri Trans.& Pembinaan Perambah Hutan ttg Penanganan Perambah Hutan & Perladangan Berpindah, Menhut, Mendagri & Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.	L L : 9 hal	
75	No.75 Tahun 1993 10 September 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.1 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I NTT	L L : 6 hal	
76	No.76 Tahun 1993 10 September 1993	Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	L L : 4 hal	
77	No.77 Tahun 1993 10 September 1993	Penetapan Batas Baru Secara Pasti Antara Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang	L L : 7 hal	
78	No.78 Tahun 1993 25 September 1993 SKB No.39 Th.1993	Kep. Bersama Mendagri dan Menteri Sosial ttg Pembinaan Organisasi/Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat.	L L : 40 hal	
79	No. 79 Tahun 1993 11 Oktober 1993	Organisasi dan Tatakerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek.	L L : 12 hal	
80	No. 80 Tahun 1993 8 Oktober 1993	Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I dan Kantor PMD Kabupaten/ Kotamadya Dati II.	L L : 57 hal	
81	No. 81 Tahun 1993 8 Oktober 1993	Program Kerja Depdagri Tahun 1993/1994	L L : 306 hal	
82	No. 82 Tahun 1993 8 Oktober 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Tengah No.3 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Elektronik Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 2 hal	
83	No. 83 Tahun 1993 12 Oktober 1993	Penyusunan Perda Prop. Dati I Kalbar No. 5 Tahun 1993 ttg SOTK Setwilda dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Kalbar.	L L : 5 hal	
84	No. 84 Tahun 1993 12 Oktober 1993	Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan	L L : 12 hal	Dicabut dg KMDN No.22 Th.2001
85	No. 85 Tahun 1993 19 Oktober 1993	Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No. 86 Tahun 1993 19 Oktober 1993	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelolaan data Elektronik Prop. Dati I Sumatera Barat, dan DI. Yogyakarta.	L L : 9 hal	
87	No. 87 Tahun 1993 25 Oktober 1993	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Sumsel No. 5 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 4 hal	
88	No. 88 Tahun 1993 25 Oktober 1993 No.....	Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri ttg Pos Kesehatan Hewan.	L L : 8 hal	
89	No. 89 Tahun 1993 1 Nopember 1993	Pengesahan Perda Tk.I Kalsel No. 9 Th 1992 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas LLAJ prop. Dati I Kalsel.	L L : 7 hal	
90	No. 90 Tahun 1993 2 Nopember 1993	Pembentukan Inspektorat Wil. Kotamadya Bitung, Kotamadya Denpasar dan Kab. Lampung Barat.	L L : 5 hal	
91	No. 91 Tahun 1993 3 Nopember 1993	Organisasi & Tatakerja Kantor Ketentraman dan Ketertiban DKI Jakarta.	L L : 10 hal	
92	No. 92 Tahun 1993 3 Nopember 1993	Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah.	L L : 39 hal	
93	No. 93 Tahun 1993 4 Nopember 1993	Penentuan Jumlah dan Tatacara Pengangkatan Pengangkatan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Mataram.	L L : 15 hal	
94	No. 94 Tahun 1993 8 Nopember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No. 1 Th.1991 ttg Pembentukan Susunan Org. dan Tatakerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Bali.	L L : 7 hal	
95	No. 95 Tahun 1993 8 Nopember 1993	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalsel No.9 Th.1992 ttg Pembentukan SOTK Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Kalsel.		
96	No. 96 Tahun 1993 17 Nopember 1993	Pembentukan Tim Pembina dan Evaluasi Penataan Wil. Desa (PWD) TA. 1993/1994.	L L : 4 hal	
97	No. 97 Tahun 1993 26 Nopember 1993	Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.	L L : 44 hal	
98	No. 98 Tahun 1993 29 Nopember 1993	Petunjuk Teknis Iuran Pelayanan Irigasi.	L L : 4 hal	
99	No. 99 Tahun 1993 3 Desember 1993	Penentuan Jumlah dan Tatakerja Pengangkatan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Jayapura.	L L : 15 hal	
100	No.100 Tahun 1993 10 Desember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No. 6 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Penghubung Pemerintah Dati I Kalteng di Jakarta.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
101	No.101 Tahun 1993 21 Desember 1993	Pengesahan Perda Dati I Jambi No. 3 Tahun 1989 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas LLAJR Prop. Dati I Jambi.	L L : 9 hal	
102	No.102 Tahun 1993 27 Desember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.6 Th.1993 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah/Daerah Tk.I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 2 hal	
103	No.103 Tahun 1993 31 Desember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.6 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja DIKLAT Prop. Dati I Kalbar.	L L : 4 hal	
104	No.104 Tahun 1993 31 Desember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Selatan No.13 Th.1993 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I & Sekretariat DPRD Tk.I Sumatera Selatan.	L L : 4 hal	
105	No.105 Tahun 1993 31 Desember 1993	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jatim No.10 Th.1992 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jatim.	L L : 5 hal	
106	No.106 Tahun 1993 31 Desember 1993	Pengesahan Perda DKI.Jakarta No.5 TH.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta.	L L : 4 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1993 8 Pebruari 1993	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Harga Gabah	L L : 3 hal.	
2.	No. 2 Tahun 1993 8 Pebruari 1993	Pelaksanaan MDN No.92 Th.1992 di Lingkungan Setjen Depdagri	L L : 6 hal.	
2 A.	No.2A Tahun 1993 18 Pebruari 1993	Inber Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan, & Mendagri ttg Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah satu atap dalam pengeluaran surat tanda nomor Kendaraan bermotor (STNK) bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) tanda nomor kendr. bermotor (TNKB) pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) & sumbangan wajib dana kecelekaan lalu lintas jalan (SWKLLJ)	L L : 9 hal.	
3.	No. 3 Tahun 1993 22 Pebruari 1993	Pelaksanaan Tata Niaga Garam dan Garam Beryodium hasil Produksi Dalam Negeri	L L : 3 hal.	
4.	No. 4 Tahun 1993 22 Pebruari 1993	Peningkatan penyelenggaraan, pengembangan & pembiayaan perpustakaan lingkungan pemerintah daerah.	L L : 3 hal.	
5.	No. 5 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pendayagunaan Alumni Kursus Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri.	L L : 3 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5A	No.5A Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Dewan Kesenian.	L L : 2 hal.	
5B	No.5B Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Petunjuk Pelaksanaan Pilot Proyek Sistem Informasi Manajemen Pajak Pembangunan (SIMPP b 1).	L L : 6 hal.	
6.	No. 6 Tahun 1993 4 Maret 1993	Pelaksanaan Kepmendagri No.92 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Depdagri.	L L : 12 hal.	
7.	No. 7 Tahun 1993 5 Maret 1993	Pelaksanaan PP No.12 Th.1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.	LL : 4 hal	
8.	No. 8 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaks. Proyek-Proyek Pembangunan TA 1993/1994 di Lingkungan Depdagri.	LL : 3 hal	
9.	No. 9 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Taman Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Kode Proyek 07.1.03.145669.100.12.6 Lokasi Proyek : Prop. Dati I Bengkulu.	LL : 5 hal	
10.	No.10 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Taman Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Lokasi Proyek : Prop. Dati I Sumatera Barat.	LL : 10 hal	
11.	No.11 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Lokasi Proyek : Prop. D.I. Aceh.	LL : 10 hal	
12.	No.12 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Proyek Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Lokasi Proyek : Prop. Dati I Jambi.	LL : 10 hal	
13.	No.13 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek2 Penanganan Masalah Pembangunan Proyek PLTA Kota Panjang Riau TA '93/'94 di lingk. Depdagri Lokasi Proyek Prop. Dati I Riau.	LL : 8 hal	
14.	No.14 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Proyek Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Lokasi Proyek Prop. Dati I Sumatera Utara.	LL : 9 hal	
15.	No. 15 Tahun 1993 8 Maret 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Penanganan Masalah Proyek Nasional TA 1993/1994 di Lingkungan DDN Lokasi Proyek Prop. Dati I Sumatera Selatan.	LL : 8 hal	
16.	No. 16 Tahun 1993 31 Maret 1993	Petunjuk Pelaksanaan Proyek Perencanaan Umum TA 1993/1994 di Lingkungan DDN.	LL : 8 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
17.	No. 17 Tahun 1993 24 April 1993	Pelaksanaan Program <sup>2</sup> Pembangunan di Lingkungan DDN Th.1993/1994.	LL : 3 hal	
18.	No. 18 Tahun 1993 26 April 1993	Penataran Pelaksanaan P4 di Daerah Seluruh Indonesia TA. 1993/1994.	LL : 16 hal	
19.	No. 19 Tahun 1993 3 Mei 1993	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesatrian STPDN di Jatinangor Jawa Barat TA. 1993/1994.	LL : 7 hal	
20.	No. 20 Tahun 1993 15 Mei 1993	Penyelenggaraan Geladi Bina Praja II dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	LL : 3 hal	
21.	No. 21 Tahun 1993 15 Mei 1993	Pendataan Penduduk Orang Asing Cina.	LL : 12 hal	
22.	No. 22 Tahun 1993 15 Mei 1993	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.24 Th.1993 ttg Pedoman Organisasi & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.	LL : 3 hal	
23.	No. 23 Tahun 1993 31 Mei 1993	Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Dati I dan Dinas Dati II	LL : 3 hal	
24.	No. 24 Tahun 1993 17 Juni 1993	Pelaksanaan KMDN No.83 Th.1992 ttg Penyelenggaraan Organisasi Bid. Tugas DPRD Tk.I & Anggota DPRD Tk.II Hasil Pemilu Th.1992	LL : 3 hal	
25.	No. 25 Tahun 1993 19 Juni 1993	Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Peneliti pada Jajaran Depdagri	LL : 6 hal	
26.	No. 26 Tahun 1993 8 Juli 1993	Pelaksanaan Kepmendagri No.46 Th.1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.	LL : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.48 Th.1996
27.	No. 27 Tahun 1993 12 Juli 1993	Petunjuk Pelaksanaan UU No.2 Th.1993 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang	LL : 4 hal	
28.	No. 28 Tahun 1993 12 Juli 1993	Penyelenggaraan Geladi Bina Praja III dalam Lingkungan Depdagri.		*
29.	No. 29 Tahun 1993 12 Juli 1993	Penetapan Dati II di Prop. Dati I Lampung sebagai tempat pelaksanaan dan pelaku Gladi Bina Praja III	LL : 2 hal	
30.	No. 30 Tahun 1993 3 Agustus 1993	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.91 Th.1991 tentang Pasar Desa	LL : 12 hal	
31.	No. 30 Tahun 1993 3 Agustus 1993	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.91 Th.1991 tentang Pasar Desa	LL : 12 hal	
32.	No. 32 Tahun 1993 20 Nopember 1993	Pelaksanaan Kepmendagri No.50 Th.1992 ttg Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi	LL : 3 hal	
33.	No. 33 Tahun 1993 13 Desember 1993	Petunjuk Pelaksanaan UU No.6 Th.1993 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Jayapura	LL : 7 hal	
34.	No. 34 Tahun 1993 13 Desember 1993	Petunjuk Pelaksanaan UU No.4 Th.1993 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram	LL : 6 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>TAHUN 1994</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No.1 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pedoman Pungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum	LL : 9 hal	
2.	No.2 Tahun 1994 5 Oktober 1994	Pelaksanaan APBN Daerah	LL : 42 hal	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1994 5 Januari 1994	Pedoman Nama <sup>2</sup> Jabatan Non Struktural Umum dilingk. Setwilda & sekretariat DPRD pada Prop. Dati I dan Kab/ Kotamadya Dati II.	L L : 4 hal	
2	No. 2 Tahun 1994 11 Januari 1994	Uraian Tugas Sub Bagian, Pemeriksa, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Depdagri.	L L : 4 hal Lamp : 24 hal	Dicabut dg KMDN No.31 Th.2001
3	No. 3 Tahun 1994 26 Juni 1994	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab/Kodya Tipe C menjadi Kantor CatatanSipil Kab./ Kotamadya Tipe B.	L L : 5 hal	
4	No. 4 Tahun 1994 26 Januari 1994	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tipe A	L L : 4 hal	
5	No. 5 Tahun 1994 27 Januari 1994	Buku Harian Camat & Register Kecamatan	L L : 3 hal	
6	No. 6 Tahun 1994 3 Pebruari 1994	Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah.	L L : 36 hal	
7	No. 7 Tahun 1994 3 Pebruri 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakkerja Dinas Perkebunan Daerah.	L L : 36 hal	
8	No. 8 Tahun 1994 5 Pebruari 1994	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur & Jambi.	L L : 9 hal	
9	No. 9 Tahun 1994 12 Pebruari 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakkerja Dinas Peternakan Daerah.	L L : 34 hal ( tidak ada)	
10	No. 10 Tahun 1994 12 Pebruari 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakkerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah	L L : 34 hal	
11	No. 11 Tahun 1994 14 Pebruari 1994	Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Proyek Pendukung Pemanetapan Penataan		
12	No. 12 Tahun 1994 22 Pebruari 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.3 th.1993 ttg Susunan Organisasi & Tatakkerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Sumbar.	L L : 6 hal	
13	No. 13 Tahun 1994 24 Pebruari 1994	Sepuluh Sukses	L L : 13 hal	Dicabut dg Kepmen No.123 Th.1997

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No. 14 Tahun 1994 9 Pebruari 1994	Anggota Pembantu Seksi-seksi Organizing Committee	( tidak ada )	
15	No. 15 Tahun 1994 5 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop. DI. Aceh No.11 Th.1993 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. DI Aceh No.7 Th. 1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wil./Daerah Prop. DI. Aceh & Sekretariat DPRD Prop. DI Aceh.	L L : 2 hal	
16	No. 16 Tahun 1994 5 Maret 1994	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat	L L : 10 hal	
17	No. 17 Tahun 1994 5 Maret 1994	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Kalimantan Barat & Timor Timur.	L L : 9 hal	
18	No. 18 Tahun 1994 5 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.9 Th. 1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat di Jakarta.	L L : 5 hal	
19	No. 19 Tahun 1994 5 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.7 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Kalimantan Selatan.	L L : 3 hal	
20	No. 20 Tahun 1994 10 Maret 1994	Organisasi dan Tatakerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tk.I dan Kantor Bina Sosial Politik Kab/Kodya Dati II.	L L : 57 hal	
21	No. 21 Tahun 1994 22 Maret 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan.	L L : 28 hal	
22	No. 22 Tahun 1994 22 Maret 1994	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.	L L : 20 hal	Dicabut dg KMDN No.1 Tahun 2002
23	No. 23 Tahun 1994 22 Maret 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.	L L : 8 hal	
24	No. 24 Tahun 1994 22 Maret 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekolah Kesehatan dan Akademi Kesehatan.	( tidak ada )	
25	No. 25 Tahun 1994 25 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop.DI Yogyakarta No.8 Th.1993 ttg Org. dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. DI Yogyakarta.	L L : 2 hal	
26	No. 26 Tahun 1994 26 Maret 1994	Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Golongan C.	( tidak ada )	
27	No. 27 Tahun 1994 28 Maret 1994	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati Lampung No.G/070/B.XII/Hk/1992 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kab. Lampung Barat.	L L : 2 hal	
28-29		KOSONG		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No. 30 Tahun 1994 3 Maret 1994	Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Pelaks. Program bantuan Pembangunan Perkotaan Tingkat Pusat TA. 1993/1994.		
31	No. 31 Tahun 1994 5 Maret 1994	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilik Tanah Milik Dep. Dalam Negeri kepada Sdr. Iyap Hardasmal.( tidak ada)		
32	No. 32 Tahun 1994 31 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.6 Th. 1993 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor PDE Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
33	No. 33 Tahun 1994 31 Maret 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I No.7 Th.1993 ttg Organisasi &Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Bali di Jakarta	L L : 5 hal	
34	No. 34 Tahun 1994 31 Tahun 1994	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten / Kotamadya Dati II	L L : 9 hal	
35	No. 35 Tahun 1994 5 April 1994	Penetapan Desa/Kelurahan tertinggal Th. 1993/1994	L L : 3 hal	
36	No. 36 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.8 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Pendidikan & Latihan Prop. Dati I	L L : 2 hal	
37	No. 37 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No. 8 Tahun 1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Kalsel.	L L : 2 hal	
38	No. 38 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.07 Th.1993 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Pendidikan & Latihan Prop.Dati I Sumut.	L L : 2 hal	
39	No. 39 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.2 Th.1993 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Sumbar.	L L : 3 hal	
40	No. 40 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.07/1993 ttg Organisasi & Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
41	No. 41 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Utara No. 8 Tahun 1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Pelantikan ( Diklat ) Prop. Dati I NTB	L L : 2 hal	
42	No. 42 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Utara No. 8 Tahun 1993 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Sumut	L L : 4 hal	
43	No. 43 Tahun 1994 13 April 1994	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Timor - Timur No.08 Th.1993 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Timor-Timur.	L L : 2 hal	Tidak berlaku lagi

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
44	No. 44 Tahun 1994 15 April 1994	Penyelenggaraan Khusus Orientasi manajemen Pemerintahan bagi Para Bupati / Walikota/madya Kdh Tk. II	L L : 3 hal	
45	No. 45 Tahun 1994 20 April 1994	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sulsel No.11 Th.1993 ttg Perubahan Pertama Perda Prop.Dati I Sulawesi Selatan No. 6 Th. 1992 ttg Organisasi & Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Dati I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 2 hal	
46	No. 46 Tahun 1994 22 April 1994	Perencanaan, Penganggaran dan Penata Usahaan Iuran Pelayanan Irigasi	L L : 10 hal Lamp : 8 hal	
47	No. 47 Tahun 1994 25 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.1 Th. 1994 ttg Pembentukan, Organisasi & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 3 hal	
48	No. 48 Tahun 1994 25 April 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.2 Th.1994 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 3 hal	
49	No. 49 Tahun 1994 2 Mei 1994	Pengesahan Perda Prop. DI Aceh No. 10 Th.1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.	L L : 3 hal	
50	No. 50 Tahun 1994 9 Mei 1994	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	L L : 3 hal	Dicabut dg KMDN No.148 Th.1994
51	No. 51 Tahun 1994 9 Mei 1994	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani salinan dan petikan Surat-Surat Keputusan Kepegawaan yang menjadi wewenang Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 hal	
52	No. 52 Tahun 1994 10 Mei 1994 No.230/Kpts-III/1994	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan ttg Penyelenggaraan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II.	L L : 18 hal	
53	No. 53 Tahun 1994 11 Mei 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Selatan No.3 Th.1993 ttg Struktur Tata Ruang Prop. Dati I Kalimantan Selatan.	L L : 6 hal	
54	No. 54 Tahun 1994 11 Mei 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.5 Th.1993 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Maluku.	L L : 6 hal	
55	No. 55 Tahun 1994 30 Mei 1994	Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata	L L : 4 hal	
56	No. 56 Tahun 1994 6 Juni 1994	Pedoman Organisasi dan Tata kerja Perpustakaan Umum Kab/Kotamadya Dati II	L L : 16 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No. 57 Tahun 1994 6 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 8 Th.1993 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemda Prop. Dati I Sulut.	L L : 4 hal	
58	No. 58 Tahun 1994 6 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.8 Th.1993 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Kalimantan Barat	L L : 3 hal	
59-61		KOSONG		
62	No. 62 Tahun 1994 15 Juni 1994	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.8 /1993 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum DKI Jakarta.	L L : 5 hal	
63	No. 63 Tahun 1994 16 Juni 1994	Pedoman Uraian Tugas Sub. Bagian pada Sekretariat Wilayah/Dati I dan Sekretariat DPRD Tingkat I.	L L : 143 hal	
64	No. 64 Tahun 1994 16 Juni 1994	Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dati II & Sekretariat DPRD Tk.I.	L L : 59 hal	
65	No. 65 Tahun 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No. 5 Tahun 1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Bali Tahun 1993/1998.	L L : 5 hal	
66	No. 66 Tahun 1994	DIBATALKAN		
67	No. 67 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1993 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 8 hal	
68	No. 68 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No.5 Th.1993 ttg Rencana Struktur Tata Ruang Prop. Dati I Kalimantan Tengah.	L L : 9 hal	
69	No. 69 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.7 Th.1993 ttg Pembentukan Susunan Org. & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Kalimantan Timur di Jakarta	L L : 4 hal	
70	No. 70 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja N0.2/1994 ttg Pembentukan, Organisasi & Tata Kerja Kantor Penghub. Pemerintah Prop. Dati I Irja.	L L : 2 hal	
71	No. 71 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.12 Th.1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulteng	L L : 4 hal	
72	No. 72 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.4 Th.1993 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah	L L : 3 hal	
73	No. 73 Tahun 1994 20 Juni 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik DKI Jakarta.	L L : 13 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
74	No. 74 Tahun 1994 25 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No. 10 Tahun 1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur	L L : 2 hal	
75	No. 75 tahun 1994 28 Juni 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timtim No. 07 Tahun 1993 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Timor Timur	L L : 2 hal	Dicabut
76	No. 76 Tahun 1994 4 Juli 1994	Penngesahan Perda Kotamadya Bandung No.2 Th.1992 ttg Perubahan Pertama Perda Kotamadya Dati II Bandung NO.3 Th.1986 ttg Renc. Induk Kota Kotamadya Bandung	L L : 4 hal	
77	No. 77 Tahun 1994 4 Juli 1994	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.10 /1993 ttg Pola Dasar Pembangunan DKI Jakarta Tahun 1994/1995 - 1998/1999	L L : 7 hal	
78	No. 78 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jatim No.3 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Jatim Th.1994/1995 - 1998/1999.	L L : 8 hal	
79	No. 79 tahun 1994 4 Juli 1994	Pembentukan Inspektorat Wilayah Kab. Halmahera Tengah dan Kotamadya Batam	L L : 4 hal	
80	No. 80 Tahun 1994 5 Juli 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.	L L : 269 hal	
81	No. 81 Tahun 1994 7 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jatim No.4 Th.1994 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 5 hal	
82	No. 82 Tahun 1994 7 Juli 1994	Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya di DKI Jakarta.	L L : 26 hal	
83	No. 83 Tahun 1994 8 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Barat No. 5 Tahun 1974 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Kalbar	L L : 3 hal	
84	No. 84 Tahun 1994 12 Juli 1994	Penundaan Penghapusan Bidang Lintas Pelayanan Pada Kantor Catatan Sipil Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	L L : 3 hal	
85	No. 85 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. D.I Yogyakarta No.7 Th.1993 ttg Pembentukan Pendidikan dan Latihan Prop. D.I Yogyakarta.	L L : 2 hal	
86	No. 86 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.3 Th.1994 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Jatim.	L L : 2 hal	
87	No. 87 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.2 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja DIKLAT Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
88	No. 88 Tahun 1994 12 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati.I Sulteng No.13 Th.1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 2 hal	
89	No. 89 Tahun 1994 16 Juli 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.11 Th.1993 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 3 hal	
90	No. 90 Tahun 1994 18 Juli 1994	Penetapan Nilai dan Ranking (peningkat) 10 Prop. Dati I terbaik setelah Penelitian Tahap/ penilaian Tahap II Pelaksanaan Pelita V Daerah dalam rangka Penganugerahan Tanda Kehormatan Parasannya Purna Karya.	L L : 4 hal	
91	No. 91 Tahun 1994	KOSONG		
92	No. 92 Tahun 1994 30 Juli 1994	Pengangkatan dan Penguahan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 2 hal	
93	No. 93 Tahun 1994 30 Juli 1994	Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.	L L : 3 hal	Dicabut dg Kepmen No.27 Th.2002
94	No. 94 Tahun 1994 2 Agustus 1994	Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor utk menghitung BBN -KB Tahun Pajak 1994.	L L : 7 hal	
95	No. 95 Tahun 1994 4 Agustus 1994	Pemberian Penghargaan Kartika Astra Brata Kepada Lulusan terbaik STPDN.		
96	No. 96 Tahun 1994 4 Agustus 1994	Pedoman Pengelolaan Pinjaman Pemerintah Daerah.	L L : 6 hal	
97	No. 97 Tahun 1994 12 Agustus 1994	Pedoman Pemberian Keringanan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat berat yang tidak dioperasikan di jalan umum.	L L : 3 hal	
98	No. 98 Tahun 1994	BATAL KOSONG		
99	No.99 Tahun 1994 15 Agustus 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No. 08 Tahun 1993 ttg SOTK Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 4 hal	
100	No.100 Tahun 1994 25 Agustus 1994 No. 0203/P/1994 No.KP/SK.119/VII/94/01 No.296 Tahun 1994	Kep. Bersama Mendikbud, Mendagri Menlu, Men. Agama dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ttg Penetapan Guru Teladan Tahun 1994.	L L : 39 hal	
101	No.101 Tahun 1994 8 September 1994	Penyertaan Pemerintah Prop. Dati I dalam Pembangunan Lanjutan Kesatriaan Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN).	L L : 7 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
102	No.102 Tahun 1994 12 Tahun 1994	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. DI. Yogyakarta No. 5 Tahun 1992 ttg Rencana Struktur Tata Ruang Prop. DI. Yogyakarta.	L L : 8 hal	
103	No.103 Tahun 1994 13 September 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No. 9 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Dasar Prop. Dati I Lampung.	L L : 12 hal	
104	No.104 Tahun 1994 13 September 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.11 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 13 hal	
105	No.105 Tahun 1994 3 Oktober 1994	Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.	L L : 3 hal	
106	No.106 Tahun 1994 6 Oktober 1994	Penetuan Jumlah & Tata cara Pengangkatan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Palu.	L L : 15 Hal	
107	No.107 Tahun 1994 13 Oktober 1994	Pengesahan Perda Bersama Pemerintah Prop. Dati I Jabar & Pemerintah DKI Jakarta No.8 Th. 1994 ttg Org. & Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek.	L L : 8 hal	
108	No.108 Tahun 1994 15 Oktober 1994	Insentif/uang perangsang pemungutan bea motor & bea balik nama kendaraan bermotor	L L : 3 hal	Dicabut dg Kepmen No.27 Th.2002
109	No.109 Tahun 1994 15 Oktober 1994	Pengesahan Perda Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 1994 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata DKI Jakarta	L L : 9 hal	
110	No.110 Tahun 1994 17 Oktober 1994	Pencabutan Kepmendagri No. 973.05 - 602 tgl. 1 Agustus 1989 ttg Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran STNK Pembayaran Pajak Kendaraan Ber Motor (BBNKB) & Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)	L L : 2 hal	
111	No.111 Tahun 1994 25 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No. 5 Th. 1994 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Sultra.	L L : 2 hal	
112	No.112 Tahun 1994 25 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.4 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat.	L L : 4 hal	
113	No.113 Tahun 1994 25 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No.12 Tahun 1993 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Kalteng	L L : 2 hal	
114	No.114 Tahun 1994 25 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor-Timur No.1 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Timor - Timur	L L : 9 hal	Dicabut

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
115	No.115 Tahun 1994 28 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No. 9 Th. 1993 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur	L L : 6 hal	
116	No.116 Tahun 1994 28 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No. 5 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor PDE Prop. Dati I Jambi.	L L : 4 hal	
117	No.117 Tahun 1994 28 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.10 Th.1994 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemprop Dati I Lampung	L L : 3 hal	
118	No.118 Tahun 1994 28 Oktober 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.11 Th.1993 ttg Pembentukan, Susunan Org. dan Tatakerja kantor Penghubung Pemda Prop. Dati I Jambi di Jakarta.	L L : 5 hal	
119	No.119 Tahun 1994 29 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. DI. Yogyakarta.	L L : 7 hal	
120	No.120 Tahun 1994 1 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.3 Th.1994 ttg Org.& Tata kerja Kantor Penghub. Pemerintah Prop. Dati I Sumsel di Jakarta.	L L : 3 hal	
121	No.121 Tahun 1994 1 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 2 Tahun 1994 ttg Pembentukan, Susunan Daerah Prop. Dati I Riau.	L L : 3 hal	
122	No.122 Tahun 1994 1 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.5 Th.1994 ttg Pembentukan SOTK Kantor Penghubung Pemda Prop. Dati I Sumbar.	L L : 3 hal	
123	No.123 Tahun 1994 5 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.13 Th.1994 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal	
124	No.124 Tahun 1994 5 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.11 Th.1994 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
125	No.125 Tahun 1994 5 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.04 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Kaltim.	L L : 2 hal	
126	No.126 Tahun 1994 19 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.11 Th.1992 ttg SOTK Rumah Sakit Paru-Paru Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 4 hal	
127	No.127 Tahun 1994 21 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.6 Th.1994 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 4 hal	
128	No.128 Tahun 1994 21 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.4 Th.1993 ttg SOTK Rumah Sakit Umum Prop. Dati I Bengkulu	L L : 6 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
129	No.129 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Pengesahan Perda prop. Dati I Jawa Barat No.13 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Jabar Th.94/95 - 98/99.	L L : 8 hal	
130	No.130 Tahun 1994 24 Tahun 1994	Pengesahan Perda prop. Dati I Sumbar No.7 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Sumbar (1 April '94 - 31 Maret	L L : 13 hal	
131	No.131 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Pengesahan Prop. Dati I Kalimantan Selatan No.11 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Kalsel Th.1994-1999.	L L : 7 hal	
132	No.132 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.3 Tahun 1993 ttg Pola dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 21 hal	
133	No.133 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalteng No.2 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Kalimantan Tengah.	L L : 7 hal	
134	No.134 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.1 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Dati I Sulawesi Selatan Th.1994-1999.	L L : 8 hal	
135	No.135 Tahun 1994 14 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.8 Th.1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Dati I NTT Tahun 1994 - 1999	L L : 7 hal	
136	No.136 Tahun 1994 24 Tahun 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.9 No.9 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 16 hal	
137	No.137 Tahun 1994 30 Nopember 1994	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalteng No.11 Th.1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Kalsel.	L L : 2 hal	
138	No.138 Tahun 1994 5 Desember 1994 No. KM 86 Th 1994	Kepber Mendagri dan Menhub ttg Batas-batas daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tegal.	L L : 11 hal	
139	No.139 Tahun 1994 5 Desember 1994 No.137..A Th 1994 No. 516 Th 1994 KEP/14/XII/1994	Kep. Bersama Mendagri, Menteri Agama & Panglima ABRI ttg Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara melalui Operasi Bhakti ABRI manunggal Aksara.	L L : 7 hal	
140	No.140 Tahun 1994 7 Desember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.19 Th. 1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I NTB.	L L : 10 hal	
141		KOSONG		
142	No.142 Tahun 1994 15 Desember 1994	Pengesahan Perda Dati I Kalbar No.3/1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalbar.	L L : 8 hal	
143	No.143 Tahun 1994 15 Desember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.01 Th.1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Maluku.	L L : 7 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
144	No.144 Tahun 1994 15 Desember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 8 Tahun 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Riau	L L : 9 hal	
145	No.145 Tahun 1994 15 Desember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Aceh No. 01 Tahun 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Aceh.	L L : 12 hal	
146	No.146 Tahun 1994 15 Desember 1994	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 1 Th.1994 ttg Pembentukan Susunan Org. dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prop. Dati I Riau.	L L : 4 hal	
147	No.147 Tahun 1994 22 Desember 1994	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Kalteng, Sumut, Lampung dan NTB.	L L : 9 hal	
148	No.148 Tahun 1994 27 Desember 1994	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	L L : 13 hal	Dicabut dg KMDN No.26 Th.1995
149	No.149 Tahun 1994 28 Desember 1994 No. 0342/U/1994 No. Kep. II/XII/1994	Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Mendagri Ttg Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara.	L L : 19 hal	
*	No.690.900-327 Th.1994	Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.		Dicabut dg KMDN No.47 Th.1999
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1994 21 Januari 1994	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.80 Th.1993 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Dati II.	L L : 9 hal	
2.	No. 2 Tahun 1994 22 Januari 1994	Pelaksanaan Kepmendagri No.30 Th.1992 ttg Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan Kartu Pemilih setelah selesai Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	L L : 12 hal	
3.	No. 3 Tahun 1994 28 Januari 1994	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 5 Th.1994 ttg Buku Harian Camat dan Register Kecamatan.	L L : 9 hal	
4.	No. 4 Tahun 1994 2 Pebruari 1994	Petunjuk Pelaksanaan pola hidup sederhana bagi Aparatur Negara di Jajaran Depdagri.	L L : 3 hal Lamp.: 9 hal.	
5.	No. 5 Tahun 1994 1 Maret 1994	Pelaksanaan Kepmendagri No.92 Th.1993 ttg Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana	L L : 3 hal	
6.	No. 6 Tahun 1994 2 Maret 1994	Petunjuk Pelaksanaan Proyek Sistem Informasi Manajemen Kependudukan tahap I (Aplikasi KTP dan kelengkapannya).	L L : 3 hal Lamp.: 7 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7.	No. 7 Tahun 1994 29 Maret 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Crash Program Pembenahan Aparatur Propinsi Dati I Timor Timur Th.1993/1994	L L : 7 hal	
8.	No. 8 Tahun 1994 24 Maret 1994	Pelaksanaan Permendagri No.4 Th.1993 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat	L L : 2 hal	Dicabut dg Permen No.2 Th.2000
9.	No. 9 Tahun 1994 25 Maret 1994	Pelaksanaan Penilaian tahap II terhadap 10 Propinsi Dati I terbaik	L L : 2 hal	
10.	No. 10 Tahun 1994 10 Maret 1994	Pedoman Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dati I di Bidang Pertambangan kepada Dati II	L L : 3 hal	
11	No. 11 Tahun 1994 28 Maret 1994	Petunjuk Operasional Pelaks. Proyek Proyek Pembangunan TA '94/95 di Lingk. Depdagri	L L : 22 hal	
12	No. 12 Tahun 1994 28 Maret 1994	Petunjuk Operasional Pelaks. (PO) Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Depdagri TA 94/95 di Lingkungan Depdagri	L L : 15 hal	
13	No. 13 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan (PO) Proyek Koordinasi Penanganan Kawasan Khusus TA. 1994/1995 di Lingk. Depdagri	L L : 15 hal	
14	No. 14 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan (PO) Proyek Koordinasi Pembangunan Desa-desa Tertinggal TA. 1994/1995 di Lingk. Depdagri	L L : 15 hal	
15	No. 15 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Perencanaan Umum Pemerintahan & Pembinaan Politik TA. '94/95	L L : 15 hal	
16	No. 16 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan/Koordinasi Proyek PLTA Kota Panjang TA. 1994/1995	L L : 13 hal	
17.	No. 17 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan/Koordinasi Penanganan Taman Nasional dan Transabangdep TA 1994/1995	L L : 2 hal Lamp. : 32 hal.	
18	No. 18 Tahun 1994 2 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan Sistem Informasi Program Lintas Sektor TA 1994/1995	L L : 2 hal Lamp. : 32 hal.	
19	No. 19 Tahun 1994 4 April 1994	Peningkatan dan Pemantapan Penataan Informasi Desentralisasi (P4ID) di Lingkungan Depdagri TA. 1994/1995	L L : 2 hal	
20.	No. 20 Tahun 1994 4 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Peningkatan Manajemen Kepegawaian Dinas Tingkat I dan Tingkat II TA. 1994/1995	L L : 10 hal	
21.	No. 21 Tahun 1994 4 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Peningkatan Administrasi Kepegawaian TA. 1994/1995	L L : 13 hal	
22.	No. 22 Tahun 1994 4 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pelayanan Bantuan Hukum TA 1994/1995 di Lingkungan Depdagri	L L : 10 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23.	No. 23 Tahun 1994 4 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan, Penyuluhan dan Pelaksanaan Peraturan Per-UU-an TA.1994/1995 di Lingkungan Depdagri	L L : 12 hal	
24.	No. 24 Tahun 1994 4 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan hukum di Bid. Pemerintahan TA.1994/1995 di Lingkungan Depdagri	L L : 13 hal	
25.	No. 25 Tahun 1994 8 April 1994	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan Pers, Komunikasi dan Informasi TA.1994/1995 di Lingkungan Setjen DDN	L L : 2 hal	
26.	No. 26 Tahun 1994 13 April 1994	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Jajaran DDN	L L : 4 hal	
27.	No. 27 Tahun 1994 26 April 1994	Pelaksanaan Program <sup>2</sup> Pembangunan di Lingkungan Depdagri Th. 1994/1995	L L : 3 hal	
28.	No. 28 Tahun 1994 26 April 1994	Pelaksanaan Penataran P4 di Daerah Seluruh Indonesia TA 1994/1995	L L : 4 hal Lamp. : 12 hal.	
29.	No. 29 Tahun 1994 27 April 1994	Larangan untuk Berburu Semua Jenis Burung.	L L : 3 hal	
30.	No. 30 Tahun 1994 16 Mei 1994	Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sistem Kode Pos Indonesia	L L : 3 hal	
31.	No. 31 Tahun 1994 27 Mei 1994	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.20 Th.1994 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Prop. Dati I dan Kantor Bina Sosial Politik Kab./Kotamadya Dati II	L L : 6 hal	
32.	No. 32 Tahun 1994 14 Juni 1994	Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin UU Gangguan bagi Perusahaan Industri	L L : 10 hal	
33.	No. 33 Tahun 1994 16 Juni 1994	Pelaks. Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa & pembinaan perlindungan Masy. di Daerah Seluruh Indonesia TA. 1994/1995	L L : 18 hal	
34.	No. 34 Tahun 1994 6 Juli 1994	Biaya penunjang Operasional Pendidikan Praja STPDN TA. 1994/1995	L L : 3 hal	
35.	No. 35 Tahun 1994 8 Juli 1994	Penempatan Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri	L L : 2 hal	
36.	No. 36 Tahun 1994 12 Juli 1994	Koordinasi dan Keterpaduan Pembangunan Pangan dan Gizi	L L : 5 hal	
37.	No. 37 Tahun 1994 12 Juli 1994	Penetapan Dati II di Prop. Dati I Sulawesi Utara sebagai Tempat Pelaksanaan dan Pelaku Gladi Bina Praja IV	L L : 2 hal	
38.	No. 38 Tahun 1994 14 Juli 1994	Penyelenggaraan Gladi Bina Praja IV dalam Lingkungan Depdagri	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
39.	No. 39 Tahun 1994 14 Juli 1994	Penetapan Daerah Tingkat II di Prop. Dati I Sulawesi Utara sebagai tempat Pelaksanaan dan pelaku Geladi Bina Praja IV	L L : 2 hal	
40.	No. 40 Tahun 1994 21 Juli 1994	Petunjuk Operasional Pembinaan Hansip Timor Timur Tahun 1994/1995.	L L : 4 hal	Dicabut
41.	No. 41 Tahun 1994 30 Juli 1994	Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) hari Kerja di lingkungan Setjen Depdagri	L L : 3 hal	
42.	No. 42 Tahun 1994 30 Juli 1994	Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) hari Kerja di lingkungan Depdagri	L L : 3 hal	
43.	No. 43 Tahun 1994 30 Juli 1994	Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) hari Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	L L : 3 hal	
44.	No. 44 Tahun 1994 10 Oktober 1994	Petunjuk Pelaksanaan UU No.4 Th.1994 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Palu	L L : 6 hal	
45.	No. 45 Tahun 1994 11 Oktober 1994	Pembentukan Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah pada Dati II	L L : 4 hal	
46.	No. 46 Tahun 1994 7 Nopember 1994	Pemasyarakatan Pola Tata Desa	L L : 12 hal	
47.	No. 47 Tahun 1994 18 Nopember 1994	Penyelenggaraan Geladi Bina Praja V dalam lingkungan Depdagri.	L L : 4 hal	
48.	No. 48 Tahun 1994 19 Nopember 1994	Penetapan Dati II di Prop. Dati I Sumatera Selatan sebagai tempat Pelaksanaan dan Pelaku Geladi Bina Praja V.	L L : 2 hal	
49.	No. 49 Tahun 1994 19 Nopember 1994	Pelaksanaan proyek Pengembangan Pembangunan Kesatrian STPDN Jatinangor Jawa Barat Th.1994/1995.	L L : 15 hal	
<b>TAHUN 1995</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1995 27 Maret 1995	Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 1 - 6	
1A	No. 1A Tahun 1995 2 Januari 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dlm kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 7 - 19	Dicabut dg Permen No.28 Th.2005
2.	No. 2 Tahun 1995 27 Maret 1995	Perubahan Permendagri No.690-1572 Th.1985 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 20 - 21	
3.	No. 3 Tahun 1995 10 April 1995	Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 22 - 30	
4.	No. 4 Tahun 1995 20 April 1995	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 31 - 49	Dicabut dg KMDN No.2 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5.	No. 5 Tahun 1995 21 April 1995	Kedudukan dan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 50 - 61	Dicabut dg KMDN No.2 Th.2000
6.	No. 6 Tahun 1995 24 April 1995	Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.	L L : 16 hal	Dicabut dg KMDN No.3 Th.2000
7.	No. 7 Tahun 1995 31 Juli 1995	Pedoman Pemungutan Pajak Reklame.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 1 - 9	
8.	No. 8 Tahun 1995 11 Agustus 1995	Tanda Penghargaan Madya Karya Karya Praja.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 10 - 15	
9.	No. 9 Tahun 1995 16 Agustus 1995	Perubahan Sebutan Nomor Pokok Penduduk yang tercantum dalam Permendagri No.1A Th.1995 ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 16 - 17	Dicabut dg Permen No.28 Th.2005
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1995 16 Januari 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bengkulu No.12 Th.1993 Ttg Rencana Struktur Tata Kerja Ruang Propinsi Dati I Bengkulu.	L L : 9 hal	
1A	No. 1A Tahun 1995 30 Januari 1995	Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 77 - 151	Dicabut dg Permen No.28 Th.2005
2	No. 2 Tahun 1995 5 Januari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor-Timur No. 03 Th 1993 ttg Rencana Struktur Tata Ruang Prop. Dati I Timor-Timur.	L L : 9 hal	Tidakberlaku lagi
2A	No. 2A Tahun 1995 16 Pebruari 1995	Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dlm kerangka sistem Informasi manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 152 - 353	Dicabut dg Permen No.28 Th.2005
3	No. 3 Tahun 1995 5 Januari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat No. 11 Th 1993 ttg Rencana Struktur Tata Ruang Prop. Dati I NTB.	L L : 7 hal	
4	No. 4 Tahun 1995 17 Januari 1995	Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 360 - 365	
5	No. 5 Tahun 1995 10 Pebruari 1995	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Jambi No. 9 Th 1993 ttg Rencana Tata Ruang Prop. Dati I Jambi	L L : 7 hal	
6	No. 6 Tahun 1995 10 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.10 Th 1993 ttg Rencana Struktur Tata Ruang Prop. Dati I Lampung.	L L : 8 hal	
7	No. 7 Tahun 1995 10 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Selatan No. 5 Th 1994 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop.Dati I Sumatera Selatan.	L L : 7 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No. 8 tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.12 Th 1994 ttg Pola dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Irian Jaya Th 1994/1995 - 1998/1999.	L L : 8 hal	
9	No. 9 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.5/ 1993 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Jambi Th 1994/1995-1998/1999.	L L : 8 hal	
10	No. 10 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.3 Th 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Sulteng.	L L : 7 hal	
11	No. 11 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Tengah No. 2 Th 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 10 hal	
12	No. 12 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel. No.4 Th 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 21 hal	
13	No. 13 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.4/1994 ttg Pembentukan, Organisasi Tata kerja Dinas Kebudayaan Prop.Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal	
14	No. 14 Tahun 1995 13 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalsel No.7 Th.1994 ttg SOTK Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop.Dati I Kalimantan Selatan.	L L : 2 hal	
15	No. 15 Tahun 1995 22 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.12 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Olah Raga Prop. Dati I Sulut.	L L : 4 hal	
16	No. 16 Tahun 1995 23 Pebruari 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.12 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
17	No. 17 Tahun 1995 7 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop.DI Aceh No.7 Th.94 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. DI Aceh.	L L : 2 hal	
18	No. 18 Tahun 1995 7 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.5 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Kalimantan Timur.	L L : 2 hal	
19	No. 19 Tahun 1995 7 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Selatan No.12 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 2 hal	
20	No. 20 Tahun 1995 7 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No.4 Th.1994 ttg Pembentukan dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Kalteng.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20A	No.20A Tahun 1995 7 Maret 1995	Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (Siskomdagri)	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 360-365	
21	No. 21 Tahun 1995 10 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No. 4 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masy. Desa Prop. Dati I Jambi.	L L : 2 hal	
21A	No.21A Tahun 1995 9 Maret 1995 No.214/Menkes/SKB/III/1995	Kepber Mendagri-RI dan Menkes RI ttg Pengalihan Status Kepegawaian PNS pada PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia menjadi Pegawai PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 366 - 371	
22	No.22 Tahun 1995 14 Maret 1995	Pengesahan Perda Dati I Sumatra Barat No. 12 Th 1994 ttg Pembentukan Susunan Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sumatra Barat	L L : 5 hal	
23	No.23 Tahun 1995 14 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatra Barat No. 9 Th 1994 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Dati I Sumatra Barat	L L : 3 hal	
24	No.24 Tahun 1995 31 Maret 1995	Program Kerja Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 372 - 375	
25	No.25 Tahun 1995 31 Maret 1995	Pembentukan Inspektorat Wil. Kotamadya Mataram dan Kotamadya Jayapura.	L L : 4 hal	
26	No.26 Tahun 1995 3 April 1995	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 376 - 379	Dicabut dg KMDN No.66 Th.1996
27	No.27 Tahun 1995 3 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 3 Th.1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Pendidikan & Latihan Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
28	No.28 Tahun 1995 3 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No. 5 / 1993 ttg Organisasi & Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I NTT.	L L : 2 hal	
29	No.29 Tahun 1995 3 Maret 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.2 Th.1994 ttg Pembentukan Org. dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop. Dati I Sultra.	L L : 3 hal	
30	No.30 Tahun 1995 4 April 1995	Pengesahan Kep. Gubernur KDH Tk.I Sumsel No.010 Th.1993 ttg Pembentukan Org. & Tata kerja Kantor Pembantu Bupati Musi Banyuasin.	L L : 3 hal	
31	No. 31 Tahun 1995 4 April 1995	Pengesahan Kep.Gubernur KDH.Tk.I Sumsel No.11 Th.1993 ttg Pembentukan Org.& Tata kerja Kantor Pembantu Bupati Ogan Komering Ulu.	L L : 3 hal	
32	No. 32 tahun 1995 4 April 1995	Pengesahan Perda Dati I Sumatera Barat No.11/994 ttg Pembentukan SOTK Kantor Pengolahan Data Elektronik Dati I Sumbar.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No. 33 Tahun 1995 5 April 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.12 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop.Dati I Nusa Tenggara Barat.	L L : 9 hal	
34	No. 34 Tahun 1995 10 April 1995	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati.I Bali No. 81 Th 1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Denpasar.	L L : 3 hal	
35	No. 35 Tahun 1995 10 April 1995	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 380 - 390	Dicabut dg Permen No.20 Th.2005
36	No. 36 Tahun 1995 24 April 1995	Pedoman Tata-tertib Pemilihan Calon Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 391 - 398	
37	No. 37 Tahun 1995 26 April 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.11 Th.1994 ttg Org.& Tatakerja Kantor Pembangunan Organisasi Desa Prop. Dati I Jabar.	L L : 2 hal	
38	No. 38 Tahun 1995 26 April 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.10 Th.1994 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 2 hal	
39	No. 39 Tahun 1995 26 April 1995	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.4 Th.' 94 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor PMD Prop. DKI Jakarta.	-	
40	No. 40 Tahun 1995 26 April 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No. 8 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masy. Desa Prop.Dati I Bali.	L L : 2 hal	
41	No. 41 Tahun 1995 7 Maret 1995 <b>No.20 A Th 1995</b>	Batal Diganti No. 20 A Th.1995 Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (Siskomdagri).	L L : 5 hal	
42	No. 42 Tahun 1995 26 April 1995	Pedoman Penyusunan Perda ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dlm Kerangka Sistem Reformasi Menejmen Kependudukan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 399 - 458	Dicabut dg Permen No.28 Th.2005
43	No. 43 Tahun 1995 26 Mei 1995	Pengesahan Daerah Propinsi Dati I Jabar No.7 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pem. Prop.Dati I Jabar	L L : 3 hal	
44	No. 44 Tahun 1995 1 Juni 1995	Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Dati.II Percontohan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 459 - 462	
45	No. 45 Tahun 1995 1 Juni 1995	Pedoman Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam & dari jabatan Struktural & Fungsional pada 26 (duapuluh enam) Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 463 - 472	
46	No. 46 Tahun 1995 6 Juni 1995	SKB Menteri Perindustrian, Menkes, Mendag. dan Mendagri ttg Pencabutan Kepber Menteri Perindustrian, Menkes, Menteri Perdagangan & Mendagri No.185/01/SK/5/1995, No.242A/Menkes/SKB/V/1985, No.No.756 A/KPB/V/85 dan No.22 Th.1985 ttg Garam Beryodiuom	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 473 - 477	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No. 47 Tahun 1995 12 Juni 1995	Penyelenggaraan Semiloka Pemilihan Umum Yang Berkualitas	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 478 - 480	
48	No. 48 Tahun 1995 14 Juni 1995	Biaya Pemerintahan Penguasa Tunggal	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 481 - 485	
49	No. 49 Tahun 1995 14 Juni 1995	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata kerja KPDE Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 8 hal	
50	No. 50 Tahun 1995 14 Juni 1995	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Dati II.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 486 - 497	
51	No. 51 Tahun 1995 19 Juni 1995	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe B.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 498 - 504	
52	No. 52 Tahun 1995 19 Juni 1995	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab./ Kotamadya Tipe B menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 505 - 509	
53	No. 53 Tahun 1995 19 Juni 1995	Pengesahan Daerah Propinsi Dati I Sultra No.8 Th.1994 ttg Pembentukan Org. & Tata kerja Kantor Penghubung Pemda Tk.I Sultra.	L L : 3 hal	
54	No. 54 Tahun 1995 19 Juni 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No.3 Th. 1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 6 hal	
55	No. 55 Tahun 1995 19 Juni 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
56	No. 56 Tahun 1995 21 Juni 1995	SKB Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1995	L L : 11 hal	
57	No. 57 Tahun 1995 22 Juni 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.10 Tahun 1994 ttg SOTK Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dati I Sumatra Barat.	L L : 3 hal	
58	No. 58 Tahun 1995 10 Juli 1995	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Bali, Kaltim, Sultra & D.I Aceh.	L L : 2 hal	
59	No. 59 Tahun 1995 10 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No. 5 Th.1994 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop.Dati I Jabar.	L L : 3 hal	
60	No. 60 Tahun 1995 13 Juli 1995	Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 18 - 45	Dicabut dg KMDN No.31& 45 Th.2000
61	No. 61 Tahun 1995 14 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop/ Dati I Jawa Barat No.3 Tahun 1995 ttg Rencana Tataruang Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 6 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62	No. 62 Tahun 1995 14 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.2 Th.1994 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 8 hal	
63	No. 63 Tahun 1995 14 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.12 Th.1993 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Kalimantan Timur.	L L : 9 hal	
64	No. 64 Tahun 1995 14 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 10 Tahun 1994 ttg Rencana Tata ruang Wilayah Prop. Dati I Riau.	L L : 7 hal	
65	No. 65 Tahun 1995 14 Juli 1995	Pedoman Program Pendidikan & Pelatihan Manajemen bagi Aparat Pengelola Perkotaan pd Pemerintah Dati I & Pemerintah Dati II.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 46 - 59	
66	No. 66 Tahun 1995 17 Juli 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.6 Tahun 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja RSU Daerah dr. Oi.Haulussy.	L L : 3 hal	
67	No. 67 Tahun 1995 17 Juli 1995 No. 0210 /VI/1995	Kepber Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan ttg Administrasi Kepegawaian Sekolah Dasar di Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 60 - 72	
68	No. 68 Tahun 1995 24 Juli 1995	Pengangkatan dan Penguksuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 73 - 75	
69	No. 69 Tahun 1995 24 Juli 1995	Pedoman Pelaksanaan Wisuda Ahli Madya Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 4 hal	
70	No. 70 Tahun 1995 26 Juli 1995	Pembentukan 69 (Enampuluh Sembilan)/ Kantor Arsip Daerah Kab./Kotamadya Dati II.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 76 - 82	
71	No. 71 Tahun 1995 31 Juli 1995	Pedoman Tarip Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 83 - 88	
72	No. 72 Tahun 1995 1 Agustus 1995	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 89 - 98	Dicabut dg KMDN No.38 Th.2002
73	No. 73 Tahun 1995 2 Agustus 1995	Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Daerah Periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) di Lingk. Departemen Dalam Negeri.	L L : 8 hal	
74	No. 74 Tahun 1995 8 Agustus 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Selatan No.13 Tahun 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Keselatan Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 3 hal	
75	No. 75 Tahun 1995 11 Agustus 1995	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Padang No.4 Th.1992 ttg Evaluasi Revisi Rencana Induk (Moster Plan) Kotamadya Kotamadya Dati II Padang Th 1983-2003.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
76	No. 76 Tahun 1995 11 Agustus 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Timur No.7 Th 1994 ttg Pola Dasar Pembangunan Daerah Prop. Dati I Kaltim.	L L : 4 hal	
77	No. 77 Tahun 1995 15 Agustus 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jatim No. 20 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur .	L L : 4 hal	
78	No. 78 Tahun 1995 15 Agustus 1995	Penetapan Guru Teladan Tingkat Nasional		
79	No. 79 Tahun 1995 16 Agustus 1995	Kep.Bersama Mendagri & Menhub ttg Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingk. Kepentingan Pelabuhan Bandanaira.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 99 - 108	
80	No. 80 Tahun 1995 16 Agustus 1995 No. SK.5/AL 106/PBH-1995	Keputusan Bersama Mendagri dan Menhub ttg Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 109 - 120	
81	No. 81 Tahun 1995 24 Agustus 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.9 Th 1994 ttg Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur.	L L : 6 hal	
82	No. 82 Tahun 1995 28 Agustus 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.10 Th.1995 ttg Pembentukan Susunan Org. dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Kalimantan Barat.	L L : 3 hal	
83	No. 83 Tahun 1995 1 September 1995	Penetapan dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati di Kab. Dati II Wajo, Bone, Gowa Selayar, Polewali Mamasa, Pinrang & Bulukumba dlm wil. Prop. Dati I Sulsel.	L L : 14 hal	
84	No. 84 Tahun 1995 30 Agustus 1995	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 121 - 149	
85	No. 85 Tahun 1995 1 September 1995	Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 150 - 168	Dicabut dg KMDN No.31 Th.2000
86	No. 86 Tahun 1995 5 September 1995 No. 411/KMK,03/95	Administrasi Pengelolaan Subsidi Bagi PNS Daerah Pada Daerah Uji Coba.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 169 - 177	
87	No. 87 Tahun 1995 6 September 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 6 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 5 hal	
88	No. 88 Tahun 1995 11 September 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Selatan No. 8 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Perhubungan Masyarakat Desa Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 2 hal	
89	No. 89 Tahun 1995 11 September 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.13 Th.1994 ttg Org. dan Tata Kerja Kantor PMD Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
90	No. 90 Tahun 1995 13 September 1995	Pengesahan Perda Prop.Dati I Lampung No.9 Th.1995 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop.Dati I Lampung.		
91	No. 91 Tahun 1995 18 September 1995	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No. 8 Th 1994 ttg Pencabutan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No. 1 Th 1989 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum.	L L : 2 hal	
92	No. 92 Tahun 1995 18 September 1995	Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.	L L : 3 hal.	
93	No. 93 Tahun 1995 21 September 1995	Pengesahan PERDA Propinsi Dati I Kalbar No.7 Th.1995 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.	L L : 2 hal.	
94	No. 94 Tahun 1995 3 Oktober 1995	Penentuan Jumlah Dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Kendari.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 178 - 192	
95	No. 95 Tahun 1995 4 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. DI. Yogyakarta No.7 Th.1994 Tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi DI Yogyakarta.	L L : 3 hal.	
96	No. 96 Tahun 1995 5 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalbar No.4 Th.1995 Tentang SOTK Rumah sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak.	L L : 3 hal.	
97	No. 97 Tahun 1995 5 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumsel No.2/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Sumsel.	L L : 3 hal.	
98	No. 98 Tahun 1995 5 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Timtim No.5 Th.1994 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Timor Timur.	L L : 3 hal.	Tidak Berlaku
99	No. 99 Tahun 1995 5 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jambi No.13 Th.1994 ttg Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prop. Dati I Jambi.	L L : 3 hal.	
100	No.100 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. D.I.Y No.1/1995 ttg Pembentukan Kantor Penghubung Pemda Prov. DIYogyakarta di Jakarta.	L L : 3 hal.	
101	No.101 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Selatan No.9 Th.1994 Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Sulsel.	L L : 7 hal.	
102	No.102 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumatera Barat No.13 Th.1994 Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Sumbar.	L L : 7 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
103	No.103 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I NTT No.2 Th.1994 Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah.	L L : 7 hal.	
104	No.104 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pedoman Pembentukan Komisi Analis mengenai Dampak Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 193 - 202	
105	No.105 Tahun 1995 9 Oktober 1995	Pedoman Pembentukan Komisi Analis mengenai Dampak Lingkungan Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 203 - 212	
106	No.106 Tahun 1995 10 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Barat No.10 Th.1994 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati.I Jawa Barat.	LL : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 1995 10 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Barat No.5 Th.1995 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prop. Dati.I Jawa Barat.	LL : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 1995 10 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Irian Jaya No.3 Th.1994 tentang Pembentukan, Organisasi & Tatakerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Dati.I Irian Jaya.	LL : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 1995 10 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.24 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Prop. Dati.I Jawa Timur.	LL : 3 Hal.	
110	No.110 Tahun 1995 10 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.23 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Prop. Dati.I Jawa Timur.	LL : 5 Hal.	
111	No.111 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kaltim No.10 Th.1994 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati.I Kaltim.	LL : 4 Hal.	
112	No.112 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Barat No.3 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas PU Pengairan Prop. Dati.I Jawa Barat.	LL : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan Keputusan KDH Tk.I Maluku No.061.1/SK/491/92 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Maluku Tengah.	LL : 2 Hal.	
114		KOSONG		
115	No.115 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan Keputusan KDH Tk.I Maluku No.061.1/SK/519/92 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Maluku Tenggara.	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
116	No.116 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan Keputusan KDH Tk.I Maluku No.061.1/SK/520/92 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Halmahera Tengah.	LL : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan Keputusan KDH Tk.I Maluku No.061.1/SK/521/92 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Ambon.	LL : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tengah No.10 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati.I Sulawesi Tengah.	LL : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Irian Jaya No.2 Th.1995 tentang Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati.I Irian Jaya.	LL : 2 Hal.	
120	No.120 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pembentukan BP-7 Kab.Dati II Halmahera Tengah, Kab.Dati II Lampung Barat, Kotamadya Dati II Bitung dan Kotamadya Dati II Denpasar.	LL : 4 Hal.	
121	No.121 Tahun 1995 11 Oktober 1995	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop.Dati I Sulsel, NTB, Bali, Lampung dan Jambi.	LL : 8 Hal.	
122	No.122 Tahun 1995 13 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I NTT No.5 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati.I NTT	LL : 2 Hal.	
123	No.123 Tahun 1995 13 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bali No.7 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati.I Bali.	LL : 2 Hal.	
124	No.124 Tahun 1995 13 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.21 Th.1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Prop. Dati.I Jawa Timur.	LL : 3 Hal.	
125	No.125 Tahun 1995 13 Oktober 1995.	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Para Kepala Dinas Di Daerah Tingkat II Percontohan Pelaksanaan Titik Berat Otonomi.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 213 - 216	
126	No.126 Tahun 1995 13 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.22 Th.1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Prop. Dati.I Jawa Timur.	LL : 3 Hal.	
127	No.127 Tahun 1995 17 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Yogyakarta No.8 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. D.I. Yogyakarta.	LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
128	No.128 Tahun 1995 18 Oktober 1995.	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 217 - 223	
129	No.129 Tahun 1995 25 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Utara No.11 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati.I Sulawesi Utara.	LL : 3 Hal.	
130	No.130 Tahun 1995 25 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Barat No.4 Th.1995 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop. Dati.I Jawa Barat.	LL : 2 Hal.	
131	No.131 Tahun 1995 25 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No.6 Th.1995 ttg Pembentukan, Organisasi & Tatakerja Dinas Perindustrian Dati I Sulawesi Tenggara.	LL : 2 Hal.	
132	No.132 Tahun 1995 25 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No.2 Th.1995 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Prop. Dati.I Sulawesi Tenggara.	LL : 2 Hal.	
133	No.133 Tahun 1995 25 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No.3 Th.1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	LL : 2 Hal.	
134	No.134 Tahun 1995 30 Oktober 1995.	Desa Kelurahan Pelopor P4.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 224 - 232	
135		KOSONG		
136	No.136 Tahun 1995 30 Oktober 1995.	Santiaji Politik bagi Aparatur Pemerintah di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 233 - 236	
137	No.137 Tahun 1995 30 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I NTB No.3 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I NTB.	LL : 4 Hal.	
138	No.138 Tahun 1995 30 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bengkulu No.13 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Bengkulu.	LL : 4 Hal.	
139	No.139 Tahun 1995 30 Oktober 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Lampung No.8 Th.1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek.	LL : 4 Hal.	
140	No.140 Tahun 1995 1 Nopember 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Timtim No.10/1994 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Pengolah Data Elektronik Prop. Dati I Timtim.	LL : 6 Hal.	
141	No.141 Tahun 1995 1 Nopember 1995.	Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 237 - 253	Dicabut dg KMDN No.62 Th.1999

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
142	No.142 Tahun 1995 1 Nopember 1995	Pengesahan PERDA Prov. Dati I Jambi No.15 Th.1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prov. Dati I Jambi.	LL : 4 Hal.	
143		KOSONG		
144	No.144 Tahun 1995 <small>No.829A/MENKES/SKB/VIII/95</small> NO. 123 B/1995 7 Nopember 1995.	Kenaikan pangkat Istimewa Dokter dan Para Medis serta Bidan di Desa Teladan Th.1995 (SKB MENKES dan MENDAGRI)	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 254 - 257	
145	No.145 Tahun 1995 No.KM.50 Th.1995 20 - 11 -1995	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bima (KEPBER. MENDAGRI dan MENHUB)	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 285 - 270	
146	No.146 Tahun 1995 No.KM.51 Th.1995 20 - 11 -1995	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Biak (KEPBER. MENDAGRI dan MENHUB)	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 271 - 285	
147	No.147 Tahun 1995 No.KM.52 Th.1995 20 - 11 -1995	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Toli-Toli (KEPBER. MENDAGRI dan MENHUB)	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 286 - 300	
148	No.148 Tahun 1995 28 Nopember 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I NTB No.20 Th.1994 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I NTB.	LL : 4 Hal.	
149	No.149 Tahun 1995 8 Desember 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bengkulu No.9 Th.1995 tentang Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Bengkulu	LL : 2 Hal.	
150	No.150 Tahun 1995 11 Desember 1995	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumsel No.1/1994 ttg Perubahan Pertama PERDA Prop. Dati I Sumatera Selatan No.6/1979 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perburuhan Prov. Dati I Sumatera Selatan.	LL : 2 Hal.	
151	No.151 Tahun 1995 11 Desember 1995	Pengesahan PERDA Prov. Dati I Jawa Timur No.25 Th.1994 tentang Perubahan Pertama PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.9/1978 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Dinas Perburuhan Daerah Prop. Dati.I Jatim.	LL : 2 Hal.	
151A	No.151 A Thn 1995 <small>No.1236 A/Menkes/ SKB/ XII/1995</small> 15 Desember 1995	Perubahan atas Kepber Menkes & Mendagri No. 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan No.440/4689/ PUOD ttgTarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 300 - 302	
152	No.152 Tahun 1995 18 Desember 1995	Pengesahan PERDA DKI Jakarta No.14 Th.1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolah Data Elektronik DKI Jakarta.	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
153	No.153 Tahun 1995 No.KEP/12/XII/95 26 Desember 1995	Petunjuk Pelaks. Perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No.5 PNPS Tahun 1993 ttg Kegiatan Politik.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 303 - 319	
154	No.154 Tahun 1995 27 Desember 1995	Pengesahan PERDA DKI Jakarta No.9/1995 ttg OTK Dispenda DKI Jakarta.	LL : 2 Hal.	
154A	No.154A Tahun 1995 27 Desember 1995	Pegawai Bank Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 320 - 340	
155	No.155 Tahun 1995 29 Desember 1995	Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1996	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 341 - 346	
156	No.156 Tahun 1995 29 Desember 1995	Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 348 - 360	Diubah dg KMDN No.7 Th.1999 Dicabut dg Permen No.5 Th.2004
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1995 27 Januari 1995	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.13 Th.1994 tentang Sepuluh Sukses.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 510 - 561	
2.	No. 2 Tahun 1995 6 Pebruari 1995	Pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 562 - 568	
3.	No. 3 Tahun 1995 7 Pebruari 1995	Biaya penunjang Operasional Pendidikan Praja STPDN TA. 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 569 - 572	
4.	No. 4 Tahun 1995 7 Pebruari 1995	Penyertaan Pemerintah Prop. Dati I Dalam Pembangunan Lanjutan Kesatريان STPDN TA. 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 573 - 576	
5.	No. 5 Tahun 1995 13 Maret 1995	Penghapusan Cabang Dinas Dati I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tk. I pada Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 573 - 579	
5A	No. 5 Tahun 1995 13 Maret 1995	Penyertaan Pemerintah Dati I dan Dati II dalam pembangunan Sistem Komunikasi Depdagri (Siskomdagri).	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 580 - 583	
6.	No. 6 Tahun 1995 22 Maret 1995	Pelaksanaan Penataran P4 di Daerah seluruh Indonesia TA.1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 584 - 593	
7.	No. 7 Tahun 1995 22 Maret 1995	Pelaks. Pembinaan Persatuan & kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masy. di daerah seluruh Indonesia TA. 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 594 - 610	
8.	No. 8 Tahun 1995 27 Maret 1995	Penghematan Pemakaian Air Bersih dan Peningkatan kemampuan Perusda Air Minum.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 511 - 613	
9.	No. 9 Tahun 1995 27 Maret 1995	Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.4 Th.1990 ttg Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dg Pihak Ketiga.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 614 - 620	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10.	No. 10 Tahun 1995 31 Maret 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek <sup>2</sup> Pembangunan di Lingk. DDN TA.1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 621 - 640	
10.A	No.10 A Tahun 1995 3 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan (PO) Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Depdagri TA.1995/1996 di Lingkungan Depdagri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 641 - 643	
11.	No. 11 Tahun 1995 20 April 1995	Proyek Pengembangan Wawasan Gender pada Perencanaan Pembangunan di Lingk. Depdagri TA. 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 644 - 649	
12.	No. 12 Tahun 1995 20 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pelayanan bantuan Hukum TA 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 650 - 660	
12A	No. 12 A Tahun 1995 20 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Peningkatan Administrasi Kepegawaian TA 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 661 - 663	
13.	No. 13 Tahun 1995 21 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan SARLITA dan Program Pembangunan TA. 1995/1996 di Lingkungan Depdagri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 664 - 666	
14.	No. 14 Tahun 1995 24 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Khusus Taman Nasional dan Transabangdep TA. 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 667 - 669	
15.	No. 15 Tahun 1995 24 April 1995	Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.4 Th.1995 ttg Tata cara pencalonan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Permendagri No.5 Th.1995 ttg Kedudukan dan Tata Cara Pencalonan, Pangkat dan Pemberhentian Wakil Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 670 - 677	
16.	No. 16 Tahun 1995 25 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan Pers, Komunikasi dan Informasi TA.1995/1996 di Lingk. Setjen DDN.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 678 - 686	
17.	No. 17 Tahun 1995 26 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek peningkatan Manajemen Kepegawaian Dinas Tingkat I dan Tingkat II TA.1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 687 - 689	
18.	No. 18 Tahun 1995 13 Maret 1995	Penyertaan Pemerintah Dati I dan Dati II dalam Pembangunan Sistem Komunikasi Depdagri (Siskomdagri).	L L : 2 hal. Lamp. : 5 hal.	
19.	No. 19 Tahun 1995 28 April 1995	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek perenc. umum pemerintah & pembinaan Politik TA.1995/1996 di Lingk. Depdagri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 690 - 692	
20.	No. 20 Tahun 1995 2 Mei 1995	Implementasi sistem penyelenggaraan pendaftaran penduduk dlm kerangka sistem informasi manajemen kependudukan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 693 - 696	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
21.	No. 21 Tahun 1995 11 Mei 1995	Petunjuk operasional pelaks.proyek koord. penanganan kawasan khusus TA.1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 697 - 705	
22.	No. 22 Tahun 1995 16 Mei 1995	Petunjuk operasional pelaksanaan proyek pembangunan Lanjutan STPDN Jatinangor Jawa Barat Tahun 1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 706 - 716	
23.	No. 23 Tahun 1995 9 Juni 1995	Petunjuk operasional pelaksanaan proyek Koordinasi Pembangunan Desa <sup>2</sup> Tertinggal TA.1995/1996 di Lingkungan Depdagri.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 717 - 719	
24.	No. 24 Tahun 1995 9 Juni 1995	Pedoman Penganggaran dan Penata-usahaan APBD serta Pengelolaan Barang Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 720 - 744	
24.A	No.24 A Tahun 1995 9 Juni 1995	Penciptaan dan Pemeliharaan Situasi dan kondisi masyarakat & daerah utk Menunjang Suksesnya Pemilihan Umum Th.1997.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 745 - 757	
25.	No. 25 Tahun 1995 12 Juni 1995	Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warganegara RI yang Terlibat G.30.S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu Th.1997.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 758 - 774	
26.	No. 26 Tahun 1995 12 Juni 1995	Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 775 - 790	
27.	No. 27 Tahun 1995 14 Juni 1995	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.18 Th.1992 ttg Pemasarakatan & pemanfaatan Teknologi tepat guna di Pedesaan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 791 - 802	
28.	No. 28 Tahun 1995 14 Juni 1995	Penyediaan Dana Pembiayaan Pembinaan Pemerintahan.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 803 - 806	
29.	No. 29 Tahun 1995 28 Juni 1995	Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan Proyek Pendayagunaan Sistim Akuntansi Pemerintah Depdagri TA.1995/1996.	HPPU-DDN 1 1995 Hal.: 807 - 809	
30.	No. 30 Tahun 1995 4 Juli 1995	Petunjuk Pelaksanaan PP No.2 Th.1995 ttg Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dan Kabupaten Dati II Bogor.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 361 - 367	
31.	No. 31 Tahun 1995 4 Juli 1995	Petunjuk Pelaksanaan PP No.3 Th.1995 ttg Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sukabumi dan Kabupaten Dati II Sukabumi.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 368 - 374	
32.	No. 32 Tahun 1995 15 Juli 1995	Pelaksanaan SENSUS Ekonomi 1996.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 375 - 377	
33.	No. 33 Tahun 1995 6 Juli 1995	Pelaksanaan Program <sup>2</sup> Pembangunan di Jajaran DDN TA.1995/1996.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 378 - 382	
34.	No. 34 Tahun 1995 31 Juli 1995	Dana Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan STPDN.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 383 - 385	
35.	No. 35 Tahun 1995 21 Agustus 1995	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 386 - 394	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36.	No. 36 Tahun 1995 21 Agustus 1995	Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Tugas Gubernur KDH Tk.I & Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 395 - 408	
37.	No. 37 Tahun 1995 25 Agustus 1995	Petunjuk Pelaksanaan PP No.14 Th.1995 ttg Pindahan Ibukota Kab. Dati II Tangerang dari Wil. Kotamadya Dati II Tangerang ke Kec. Tigaraksa di Wil. Kab. Dati II Tangerang.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 409 - 418	
38.	No. 38 Tahun 1995 28 Agustus 1995	Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dlm Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 419 - 421	
39.	No. 39 Tahun 1995 28 Agustus 1995	Penyus. Neraca Kualitas Lingk. Hidup Daerah dan Neraca SDA Spasial Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 422 - 431	
40.	No. 40 Tahun 1995 5 September 1995	Upaya dan Langkah-langkah Pembinaan Gerakan Koperasi di Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 432 - 434	
41.	No. 41 Tahun 1995 8 September 1995	Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 435 - 441	
42.	No. 42 Tahun 1995 22 September 1995	Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.12 Th.1992 ttg Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 442 - 446	
43.	No. 43 Tahun 1995 26 September 1995	Pemilihan Pokmas Terbaik untuk Menerima Penghargaan Presiden.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 447 - 451	
44.	No. 44 Tahun 1995 3 Oktober 1995	Petunjuk Pelaksanaan UU No.6 Th.1995 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 452 - 460	
45.	No. 45 Tahun 1995 18 Oktober 1995	Petunjuk Operasional Pembinaan Hansip Timor Timur Tahun 1995/1996.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 461 - 462	
46.	No. 46 Tahun 1995 30 Oktober 1995	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.136 Th.1995 ttg Santiaji Politik Bagi Aparatur Pemerintah di jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 463 - 470	
47.	No. 47 Tahun 1995 7 Nopember 1995	Penerapan Hasil Analisis Jabatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 471 - 487	
48.	No. 48 Tahun 1995 18 Desember 1995	Pembentukan Kantor Komunikasi Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 488 - 492	
49.	No. 49 Tahun 1995 18 Desember 1995	Pelaksanaan Kepmendagri No.82 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya di DKI Jakarta.	HPPU-DDN 2 1995 Hal.: 493 - 497	
<b>TAHUN 1996</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1996 1 Februari 1996	Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Lembaga dan atau Badan Non Pemerintah Luar Negeri dengan Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 3 - 11	Dicabut dg Permen No.15 Th.2009

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2.	No. 2 Tahun 1996 8 Maret 1996	Perubahan Permendagri No.2 Th.1994 ttg Pelaksanaan APBD.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 12 - 28	
3.	No. 3 Tahun 1996 2 April 1996	Pencabutan semua Permendagri tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 29 - 31	
4.	No. 4 Tahun 1996 15 April 1996	Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 32 - 60	
5.	No. 5 Tahun 1996 12 Agustus 1996	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 3 - 26	
6.	No. 6 Tahun 1996 12 Agustus 1996	Badan Pertimbangan Daerah	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 27 - 32	
7.	No. 7 Tahun 1996 12 Agustus 1996	Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 33 - 36	
8.	No. 8 Tahun 1996 16 Agustus 1996	Kedudukan & Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala -kepala Dusun.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 37 - 43	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
9.	No. 9 Tahun 1996 16 Agustus 1996	Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 44 - 100	
10.	No. 10 Tahun 1996 18 Agustus 1996	Kepengurusan dan Mekanisme Kerja Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi).	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 101 - 108	
11.	No. 11 Tahun 1996 11 Oktober 1996	Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 109 - 115	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
12.	No. 12 Tahun 1996 14 Oktober 1996	Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 116 - 140	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1996 16 Januari 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumsel No.9 Th.1995 Ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas PU Bina Marga Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
2	No. 2 Tahun 1996 16 Januari 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumatera Selatan No.10 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 2 hal	
3	No. 3 Tahun 1996 16 Januari 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sumsel No.11 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Pengairan Propinsi Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
4	No. 4 Tahun 1996 17 Januari 1996	Wilayah Kerja Pembantu Bupati Malang Wilayah Pujon Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4a	No. 4A Tahun 1996 22 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 18 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Prop.Dati I Jabar.	L L : 3 hal	
5	No. 5 Tahun 1996 22 Januari 1996	Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 61 - 66	Dicabut dg KMDN No.6 Th.2002
6	No. 6 Tahun 1996 23 Januari 1996	Pembentukan 61(enam puluh satu) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/ Kotamadya Dati II.	L L : 6 hal	
7	No. 7 Tahun 1996 24 Januari 1996	Pengesahan Perda DKI Jakarta No. 4 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan DKI Jakarta.	L L : 3 hal	
8	No. 8 Tahun 1996 31 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No. 5 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Lampung.	L L : 5 hal	
9	No. 9 Tahun 1996 31 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No. 2 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal	
10	No. 10 Tahun 1996 31 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.1 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
11	No. 11 tahun 1996 31 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.3 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal	
12	No. 12 Tahun 1996 31 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.4 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal	
13	No. 13 Tahun 1996 1 Pebruari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.3 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Prop. Dati I Jateng	L L : 4 hal	
14	No. 14 Tahun 1996 5 Pebruari 1996	Perubahan Lampiran I Keputusan Mendagri No. 2 A Th 1995 ttg Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dlm kerangka sistem Informasi manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 67 - 69	
15	No. 15 Tahun 1996 5 Pebruari 1996	Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 70 - 71	Dicabut dg Permen No.38 Th.2005
16	No. 16 Tahun 1996 5 Pebruari 1996	Harga Blanko dan Formulir - formulir yang dipergunakan dlm Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 72 - 73	Dicabut dg Permen No.38 Th.2005
17	No. 17 Tahun 1996 5 Pebruari 1996	Keputusan Bersama Menkes & Mendagri RI ttg Pedoman Pelaks. Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pd Puskesmas.	L L : 7 hal Lamp : 2	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No. 18 Tahun 1996 7 Februari 1996	Pengesahan Perda prop. Dati I Bengkulu No.12 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 4 hal	
19	No. 19 Tahun 1996 12 Februari 1996	Pengesahan Perda Prop. DI Aceh No. 8 Th.1995 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Prop. DI Aceh.	L L : 4 hal	
20	No. 20 Tahun 1996 12 Februari 1996	Pengesahan Prop. Dati I Jambi No.16/1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Jambi.	L L : 4 hal	
21	No. 21 Tahun 1996 12 Februari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.5 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal	
22	No. 22 tahun 1996 12 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatra Selatan.	L L : 4 hal	
23	No. 23 Tahun 1996 12 Januari 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat.	L L : 3 hal	
24	No. 24 Tahun 1996 13 Februari 1996	Pengesahan Perda Prop. DIY No.2/1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemda Prop. DI Yogyakarta di Jakarta.	L L : 3 hal	
25	No. 25 Tahun 1996 13 Februari 1996	Data Dasar Profil Desa/Kelurahan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 74 - 81	
26	No. 26 Tahun 1996 14 Februari 1996	Standarisasi Ruangan Kantor, alat perlengkapan Kantor, Rumah dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di jajaran DEPDAGRI.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 82 - 170	Dicabut dg Permen No.7 Th.2006
27	No. 27 Tahun 1996 1 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Barat No.5 Th 1995 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Kalimantan Barat.	L L : 2 hal	
28	No. 28 Tahun 1996 4 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.6/1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
29	No. 29 Tahun 1996 7 Maret 1996	Pembinaan Kawasan Khusus.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 171 - 173	
30	No. 30 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop.Dati I Kalteng.	L L : 9 hal	
31	No. 31 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pengesahan Perda Dati I Sulsel No.9 Th 1995 ttg Pembentukan Org. dan Tatakerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 2 hal	
32	No. 32 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.7 Th.1995 ttg Org. dan Tatakerja Dinas LLLAJ Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No. 33 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No. 6 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Kalteng.	L L : 2 hal	
34	No. 34 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.11 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Kalteng	L L : 2 hal	
35	No. 35 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pengesahan Kep.Gubernur Kepala Dati I Riau No.KPTS. 669/X/1994 ttg Org. dan tata kerja Inspektorat wilayah kotamadya Batam.	L L : 3 hal	
36	No. 36 Tahun 1996 12 Maret 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulteng No.6/1994 ttg Organisasi dan tatakerja Dinas Lalulintas dan angkutan jalan Dati I Sulteng.	L L : 3 hal	
37	No. 37 Tahun 1996 12 Maret 1996	Pengesahan Perda DKI.Jakarta No.13/1994 ttg OTK pemerintah kelurahan DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
37A	No.37A Tahun 1996 25 Oktober 1996	Kepegawaian Negara ttg Tatacara Pemberian Tunjangan Pengabdian bagi PNS & Anggota ABRI yg bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil.	L L : 2 hal	
38	No. 38 Tahun 1996 18 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.4/1995 ttg SOTK dinas tenaga kerja Tk.I Sumatera Barat.	L L : 3 hal	
39	No. 39 Tahun 1996 18 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.4 Th 1995 ttg SOTK Dinas Sosial Tk.I Sumbar.	L L : 3 hal	
40	No. 40 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.13 Th.1995 ttg Perubahan Pertama Perda Prop Dati.I Sulteng No.7/1984 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pariwisata Prop. Dati I Sultra.	L L : 2 hal	
41	No. 41 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jambi No.4 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas LLAJ Prop.Dati.I Jambi.	L L : 2 hal	
42	No. 42 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.21 Th 1995 ttg Perubahan Pertama Perda Prop dati I Sumsel No.18/1987 ttg Pembentukan, SOTK cabang dinas kehutanan /kesatuan pemangkuan Hutan di Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
43	No. 43 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.20 Th 1995 ttg Pencabutan Perda Prop. Dati I Sumsel No.5/1987 ttg Pembentukan SOTK Cabang Dinas Pariwisata Prop. Dati I Sumsel di Dati II dalam Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
44	No. 44 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.18 Th.1995 ttg Perubahan kedua Perda Prop. Dati.I Sumsel No.11/1988 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
45	No. 45 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.8 Th.1995 ttg Pembentukan, Organisasi & Tata kerja Dinas TenagaKerja Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
46	No. 46 tahun 1996 22 Maret 1996	Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemda DKI Jakarta	L L : 22 hal	Dicabut dg Kepmen No.42 Th.1998
47	No. 47 Tahun 1996 22 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Tingkat I NTB No.10 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I NTB.	L L : 2 hal	
48	No. 48 Tahun 1996 26 Maret 1996	Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 174 - 195	Dicabut dg KMDN No.158 Th.2004
49	No. 49 Tahun 1996 1 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.4 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor PDE Prop. Dati I Sumut.	L L : 2 hal	
50	No. 50 Tahun 1996 1 Maret 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.12 Th 1995 ttg Pembentukan, Organisasi & Tatakerja Kantor PDE Prop. Dati I Kalteng.	L L : 3 hal	
50A	No.50A Tahun 1996 1 April 1996	Program Kerja	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 196 - 199	
51	No. 51 tahun 1996 1 April 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.16 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I NTB.	L L : 4 hal	
52	No. 52 tahun 1996 2 April 1996	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemda Kota Administratip.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 200 - 238	
53	No. 53 Tahun 1996 2 April 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.5 Th.1995 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Jambi.	L L : 3 hal	
54	No. 54 Tahun 1996 10 April 1996	Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. (Kepber MDN & Menteri Pertanian)	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 239 - 252	
55	No. 55 Tahun 1996 10 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bali.	L L : 4 hal.	
56	No. 56 Tahun 1996 12 April 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jabar No.15 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 2 hal.	
57	No. 57 Tahun 1996 12 April 1996	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Jabar No.16 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tan. Pangan Prop. Dati I Jabar.	L L : 2 hal.	
58	No. 58 Tahun 1996 12 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Barat No.17 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 2 hal.	
59	No. 59 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 4 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
60	No. 60 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalimantan Timur.	L L : 4 hal.	
61	No. 61 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JATIM No.13 Th.1991 ttg Perubahan Kedua PERDA Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 12 hal.	
62	No. 62 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JATIM No.16 Th.1991 ttg Perubahan Kedua PERDA Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 11 hal.	
63	No. 63 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JATIM No.15 Th.1991 ttg Perubahan Kedua PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No.4 Th.1979 Ttg Dinas Perikanan Daerah Prop. Dati I Jatim.	L L : 13 hal.	
64	No. 64 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JATIM No.41 Th.1991 ttg Perubahan Ketiga PERDA Prop. Dati I Jamur No.3 Th.1979 Ttg Dinas Pert. Tan. Pangan Daerah Prop. Dati I Jatim	L L : 13 hal.	
65	No. 65 Tahun 1996 15 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JABAR No.18 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Jabar.	L L : 2 hal.	
66	No. 66 Tahun 1996 16 April 1996	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 253 - 255	Dicabut dg KMDN No.10 Th.1998
67	No. 67 Tahun 1996 17 April 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.05 Th.1995 ttg Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Kelurahan Kodya Batam.	L L : 2 hal	
68	No. 68 Tahun 1996 19 April 1996	Pengesahan perda Prop. Dati I Jambi No. 6 Th.1995 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Jambi.	L L : 2 hal	
69	No. 69 Tahun 1996 19 April 1996	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tataloka Nagaratama.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 256 - 263	
70	No. 70 Tahun 1996 22 April 1996	Pedoman Nama <sup>2</sup> Jabatan Non Struktural Dibawah Eselon IV Lingk. Kantor Pusat DDN	L L : 4 hal Lamp.: 105 hal.	
71	No. 71 Tahun 1996 22 April 1996	Penentuan Jumlah & Tatacara Pengangkatan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Kupang.	L L : 15 hal	
72	No. 72 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA DKI Jakarta No.7 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian DKI Jakarta.	L L : 3 hal	
73	No. 73 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA DKI Jakarta No.6 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan DKI Jakarta.	L L : 3 hal	
74	No. 74 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jambi No.3 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Perikanan Prop. Dati I Jambi.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
75	No. 75 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I KALTENG No.15 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Daris Syeroamus Palangkaraya Kelas C.	L L : 3 hal	
76	No. 76 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Aceh No. 2 Th.1995 ttg Penghapusan Cab. Dinas Prop. Prop. D.I. Aceh yang Berada di Kab. Dati II Aceh Utara.	L L : 3 hal	
77	No. 77 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bali No.11 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Bali.	L L : 3 hal	
78	No. 78 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulsel No.6 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
79	No. 79 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I NTB No.17 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Mataram.	L L : 3 hal	
80	No. 80 Tahun 1996 23 April 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalbar No.2/91 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Kalbar No. 9 Th.1980 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pert. Tan. Pangan Prop.Dati I Kalbar.	L L : 13 hal	
81	No. 81 Tahun 1996 1 Mei 1996	Pola Tarip Pajak Reklame.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 264 - 268	
82	No. 82 Tahun 1996 2 Mei 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I JATIM No.9 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Prop. Dati I Jatim.	L L : 3 hal	
83	No. 83 Tahun 1996 2 Mei 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Maluku No. 07 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
84	No. 84 Tahun 1996 2 Mei 1996	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Maluku No. 12 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
85	No. 85 Tahun 1996 6 Mei 1996	Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 269 - 280	Dicabut dg Permen No.38 Th.2005
86	No. 86 Tahun 1996 6 Mei 1996 No.322.K/60/M.PE/1996	Kep. Ber. Menteri Pertambangan dan Energi dan Mendagri tg Program Diklat teknis di Bid. Geologi dan Pertambangan Bagi Aparatur Dinas Pertambangan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 281 - 285	
87	No. 87 Tahun 1996	KOSONG (BATAL)		
88	No. 88 Tahun 1996 13 Mei 1996 No.34/HUK/1996 No.0129/U/1996 No.195 Tahun 1996	Bantuan Thd Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak Yang Bertempat Tinggal Di Daerah Terpencil Dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 286 - 295	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
89	No. 89 Tahun 1996 13 Mei 1996	Kurikulum Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 5 hal. Lamp. : 35 Hal.	
90	No. 90 Tahun 1996 13 Mei 1996	Rencana Induk Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 2 hal. Lamp. : 26 Hal.	
91	No. 91 Tahun 1996 13 Mei 1996	Pedoman pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan STPDN	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 335 - 358	
92	No. 92 Tahun 1996 13 Mei 1996	Statuta Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 359 - 389	
93	No. 93 Tahun 1996 15 Mei 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.8 Th.1995 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas PU Pengairan Prop.Dati I Sumbar.	L L : 2 hal	
94	No. 94 Tahun 1996 15 Mei 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.5 Th.1995 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas PU Cipta Karya Prop.Dati I Sumbar.	L L : 2 hal	
95	No. 95 Tahun 1996 15 Mei 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumbar No.10 Th.1995 ttg Susunan Organisasi Tatakerja Dinas PU Bina Marga Prop. Dati I Sumbar.	L L : 2 hal	
96		BATAL		
97	No. 97 Tahun 1996 27 Mei 1996	Pengesahan Perda Prop. DI.Aceh No.9/95 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. DI Aceh.	L L : 14 hal	
97A	No.97A Tahun 1996 4 Juni 1996 510/MENKES/SKB/VI/1996	Kepber Menkes dan Mendagri ttg Perubahan Kedua Kepber Menkes & Mendagri No.1203/ Menkes/SKB/XII/1993 dan No.440/ 4689/ PUOD ttg Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi peserta PT.Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 390 - 408	
98	No. 98 Tahun 1996 5 Juni 1996	Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Bapedalda.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 409 - 438	
99	No. 99 Tahun 1996 7 Juni 1996	Pengesahan Kep. Gub. KDH Tk.I Lampung No.1/96 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaks. Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Kab. Dati.II di Lampung Barat.	L L : 2 hal	
100	No.100 Tahun 1996 26 Juni 1996	Pedoman Org. dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dati II di Kecamatan.	L L : 7 hal Lamp : 8	
101	No.101 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.17 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Irja.	L L : 2 hal	
102	No.102 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.18 Th 1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Sumbar.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
103	No.103 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Kalimantan Barat No. 9 Th 1994 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dati I Kalimantan Barat.	L L : 2 hal	
104	No.104 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.11 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 2 hal	
105	No.105 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.18 Th 1994 ttg Organisasi Desa Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 2 hal	
106	No.106 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor Timur No.11 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 2 hal	Dicabut
107	No.107 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.05 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
108	No.108 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.12 Th.1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 2 hal	
109	No.109 Tahun 1996 1 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 10 Th 1994 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 2 hal	
110	No.110 Tahun 1996	BATAL		
111	No.111 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati Sulut No.1 No.1 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Sulawesi Utara	L L : 4 hal	
112	No.112 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.09 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
113	No.113 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.18 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal	
114	No.114 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.19 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal	
115	No.115 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.20/95 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal	
116	No.116 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.08 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Maluku.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
117	No.117 Tahun 1996 17 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.16 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
118	No.118 Tahun 1996 26 Juli 1996	Kep. Bersama Menteri Agama, Mendagri & Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Haji Indonesia.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 141 - 152	
119	No.119 Tahun 1996 29 Juli 1996	Pembentukan Tim Studi Mengenai Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 153 - 156	
120	No.120 Tahun 1996 29 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.03 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
121	No.121 Tahun 1996 29 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.3 Th.1995 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati.I Riau.	L L : 2 hal	
122	No.122 Tahun 1996 29 Juli 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.10 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. Dati I NTT.	L L : 2 hal	
123	No.123 Tahun 1996 1 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.14 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.	L L : 2 hal	
124	No.124 Tahun 1996 1 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.15 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I NTT.	L L : 2 hal	
125	No.125 Tahun 1996 1 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.16 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I NTT	L L : 2 hal	
126	No.126 Tahun 1996 1 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.17 Th.1995 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I NTT	L L : 2 hal	
127	No.127 Tahun 1996 1 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.18 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I NTT.	L L : 2 hal	
128	No.128 Tahun 1996 5 Agustus 1996	Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran DEPDAGRI.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 157 - 166	
129	No.129 Tahun 1996	SKB (di Arsip)		
130	No.130 Tahun 1996 7 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.1 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
131	No.131 Tahun 1996 7 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.2 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Labuang Baji Ujung Pandang.	L L : 3 hal	
132	No.132 Tahun 1996 7 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.3 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Haji Ujung Pandang.	L L : 3 hal	
133	No.133 Tahun 1996 13 Agustus 1996	Perubahan Atas KEPMENDAGRI No.61 Th.1992 ttg Pedoman Peraturan Tata Tertib DPRD.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 167 - 172	
134	No.134 Tahun 1996 13 Agustus 1996	Pedoman Pemberian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 173 - 176	
135	No.135 Tahun 1996	SKB ( belum ada ) SK nya di Arsip		
136	No.136 Tahun 1996 15 Agustus 1996	Pengesahan Perda Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Pemakaman Umum.	L L : 2 hal	
137	No.137 Tahun 1996 19 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Maluku No.10 Th 1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Maluku	L L : 3 hal	
138	No.138 Tahun 1996 19 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Maluku No.06 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
139	No.139 Tahun 1996 19 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Maluku No.05 Th 1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
140	No.140 Tahun 1996 19 Agustus 1996	Perda Prop Dati I Maluku No. 11 Th 1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
141		BATAL		
142	No.142 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Bengkulu, Irian Jaya & Sumsel.	L L : 9 hal	
143	No.143 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.7 Th 1995 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dati I Jawa Timur.	L L : 2 hal	
144	No.144 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.8 Th 1995 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.23 Th 1987 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Prop. Dati I Jatim.	L L : 2 hal	
145	No.145 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Kalimantan Barat No. 2 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas PU Prop. Dati I Kalbar.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
146	No.146 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I DI Yogyakarta No.10 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Prop. DIY.	L L : 2 hal	
147	No.147 Tahun 1996 20 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I N.T.B No. 20 Th 1995 ttg Penghapusan Cabang Dinas Kehutanan dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I N.T.B di Dati II Lombok Tengah.	L L : 2 hal	
148	No.148 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Kalimantan Timur No.04 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Kalimantan Timur.	L L : 3 hal	
149	No.149 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Riau No.2 Th 1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prop. Tk I Riau Pekanbaru.	L L : 3 hal	
150	No.150 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Pembentukan Inspektorat Wilayah Kotamadya Palu.	L L : 3 hal	
151	No.151 Tahun 1996 22 Agustus 1996	Penomoran Untuk Nomor Induk Penduduk Sementara, No. Kartu keluarga, No. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap & Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 177 - 180	Dicabut dg Permen No.38 Th.2005
152	No.152 Tahun 1996 23 Agustus 1996	Pengangkatan, Kedudukan,Hak, Kewajiban Kepangkatan dan Pemberhentian Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 181 - 190	Dicabut dg KMDN No.19 Th.2003
153	No.153 Tahun 1996 26 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Kalimantan Barat No.1 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Kalbar.	L L : 2 hal	
154	No.154 Tahun 1996 26 Agustus 1996	Perda Prop. Dati I Sumbar No.17 Th.1995 ttg SOTK Dinas Tanaman Pangan Dati.I Sumbar.		
155	No.155 Tahun 1996 29 Agustus 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng.	L L : 4 hal	
156	No.156 Tahun 1996 20 September 1996 No. 028a/K/1996 No.577/KWK.03/1996	Keputusan Bersama, Mendagri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan RI. Ttg Subsidi Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 191 - 197	
157	No.157 Tahun 1996 4 September 1996	Pembentukan Tim Pembina Subsidi Daerah Otonom dan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 198 - 203	
158	No.158 Tahun 1996	Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran Depdagri.		Dicabut dg Permen No.2 Th.2008
159		KOSONG		
160	No.160 Tahun 1996	BATAL		
161	No.161 Tahun 1996 11 September 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Palembang No.5 Th.1995 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Palembang Tahun 1995 - 2005.	L L : 5 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
162	No.162 Tahun 1996 11 September 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Yogyakarta No.6 Th.1994 ttg Rencana Umum Tata Ruang Tahun 1994 - 2004.	L L : 4 hal	
163	No.163 Tahun 1996 20 September 1996	Perda Prop Dati I Kalimantan Tengah No.2 Th.1996 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Perindustrian Prop Dati I Kalimantan Tengah.	L L : 2 hal	
164	No.164 Tahun 1996 20 September 1996	Perda Prop Dati I Irian Jaya No.5 Th 1994 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal	
165	No.165 Tahun 1996 20 September 1996 No. 602/KMK/03/1996 No.1049/MENKES/ SKB/IX/1996	Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan ttg Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit Daerah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 204 - 210	
166	No.166 Tahun 1996 26 September 1996	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 211 - 216	
167	No.167 Tahun 1996 26 September 1996	Penelitian dan Pengembangan di jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 217 - 223	Dicabut dg KMDN No.40 Th.2000
168	No.168 Tahun 1996 2 Oktober 1996	Perda Prop. Dati I Jateng No.14 Th.1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Jateng.	L L : 3 hal	
169	No.169 Tahun 1996 2 Oktober 1996 SKB No.KM.63 Th 1996	SKB Menteri Dalam Negeri, Perhubungan Batas2 Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 224 - 240	
170	No.170 Tahun 1996 2 Oktober 1996 SKB No. KM.64 Th 1996	SKB Mendagri, Menteri Perhubungan Batas - batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kendari.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 241 - 256	
171	No.171 Tahun 1996 2 Oktober 1996 SKB No. KM.65/1996	SKB Mendagri, Menteri Perhub. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingk. Kepentingan Pelabuhan Gorontalo.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 257 - 267	
172	No.172 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Pencabutan Kep. Mendagri No. 821.26-769 Th 1984 ttg Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati di Kab. Dati I Paniai.	L L : 2 hal	
173	No.173 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Perubahan Kepmendagri No. 821.26-769 Tahun 1984 ttg Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak utk Wilayah Mimika & Pembantu Bupati Merauke untuk Wil.	L L : 2 hal	
174	No.174 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Penataan Wil. Kerja Pembantu Gubernur Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
175	No.175 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Perubahan Surat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 16/2/21 tgl 16 Juni 1969 Perihal Pengesahan Pembentukan Perwakilan Kab. Aceh Selatan di Singkil dan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat di Sinabang.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
176		KOSONG		
177	No.177 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Pembagian Tugas Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Irian Jaya.	L L : 5 hal	
178	No.178 Tahun 1996 20 Oktober 1996	Percontohan Otonomi Daerah Pada Kab./ Kotamadya Dati II.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 268 - 274	Diubah dg KMDN No.194 Th.1996
179	No.179 Tahun 1996 23 Oktober 1996	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air .	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 275 - 288	
180	No.180 Tahun 1996 28 Oktober 1996	Tatacara Pembayaran & Penggunaan Bagian Penerimaan Pemda dari Hasil Pungutan Negara di Bidang Pertambangan.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 308 - 311	
181	No.181 Tahun 1996 28 Oktober 1996 SKB =	SKB = Menteri Pertambangan dan Energi Menkeu dan Mendagri ttg Pencabutan Surat Kepber Menteri Pertambangan, Menkeu & Mendagri No.137/Kpts/M/Pertamb/1975 No. KEP.354/MK/IV/4/1975 No.55 Th.1975 ttg Tatacara Pembayaran & Pembagian Hasil luran dr Pemegang Kuasa Pertambangan.	L L : 2 hal	
182	No.182 Tahun 1996 28 Oktober 1996	Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil pada Dati I Percontohan.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 312 - 322	
183	No.183 Tahun 1996 1 Nopember 1996	Pedoman & Tatacara Penetapan Wilayah Terpencil.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 323 - 328	
184	No.184 Tahun 1996 4 Nopember 1996	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Sumsel No.1 Th 1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
185	No.185 Tahun 1996 4 Nopember 1996	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Jateng No. 13 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas LLAJ Prop. Dati I Jateng.	L L : 2 hal	
186	No.186 tahun 1996 7 Nopember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.1 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Dati I Bengkulu.	L L : 2 hal	
187	No.187 Tahun 1996 7 Nopember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.2 Th 1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tan.Pangan Dati I Bengkulu.	L L : 2 hal	
188	No.188 Tahun 1996 7 Nopember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.9 Th 1996 ttg Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal	
189	No.189 Tahun 1996 7 Nopember 1996	Penghapusan Kantor Catatan Sipil dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pada Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 329 - 330	
190	No.190 Tahun 1996 13 Nopember 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Surabaya No. 11Th 1992 ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit-unit Pengembangan didalam Kawasan Surabaya Barat.	L L : 7 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
191	No.191 Tahun 1996 13 Nopember 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Jayapura No.16 Th 1995 ttg Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Jayapura.	L L : 3 hal	
192	No.192 Tahun 1996 13 Nopember 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Tk.II Mataram No.23 Th.1995 ttg Rencana Umum Tata Ruang Wil.Kotamadya Dati II Mataram Th' 95	L L : 3 hal	
193	No.193 Tahun 1996 13 Nopember 1996	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Bengkulu No.01 Th 1995 ttg Rencana Umum Tata Ruang Wil. Kotamadya Dati II Bengkulu Th 1994/1995 - 2004/2005.	L L : 3 hal	
194	No.194 Tahun 1996 25 Nopember 1996	Perubahan Keputusan Mendagri No. 178 Th 1996 ttg Percontohan Otda Pada Kabupaten Kotamadya Dati II.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 331 - 332	
195	No.195 Tahun 1996 28 Nopember 1996	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 333 - 342	Dicabut dg KMDN No.10 Th.1998
196	No.196 Tahun 1996 2 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.1 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tan. Pangan Prop. Dati I Jateng.	L L : 2 hal	
197	No.197 Tahun 1996 2 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No. 2 Th 1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 2 hal	
198	No.198 Tahun 1996 2 Desember 2996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.11 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 2 hal	
199	No.199 Tahun 1996 10 Desember 1996	Wilayah Kerja Pembantu Bupati Semarang Wil. ttg dalam Wilayah Prop. Dati I Jateng.	L L : 3 hal	
200	No.200 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.7 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Sumut.	L L : 3 hal	
201	No.201 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.8/ 1996 ttg Susunan Organisasi Tatakerja RSU Dr. Pringadi Medan Prop. Dati I Sumut.	L L : 3 hal	
202	No.202 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumut No.9/ 1996 ttg Susunan Organisasi Tatakerja RSU Pematangsiantar Prop. Dati I Sumut.	L L : 2 hal	
203	No.203 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumut No.10 Th 1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja RSU Tarutung Prop. Dati I Sumut.	L L : 3 hal	
204	No.204 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumut No.11 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja RSU pada Sidempuan Prop. Dati I Sumut.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
205	No.205 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.12 Th 1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Sumut.	L L : 4 hal	
206	No.206 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.13 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Sumut.	L L : 3 hal	
207	No.207 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No. 14 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I.		
208	No.208 Tahun 1996 9 Desember 1996	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.15 Th 1996 ttg SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Sumatera Utara.	L L : 3 hal	
209	No.209 Tahun 1996 13 Desember 1996	Pembentukan 48 ( Empat Puluh Delapan ) Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kab./ Kotamadya Dati II.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 343 - 348	
210	No.210 Tahun 1996 30 Desember 1996 No. KM.72 Th 1996	Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Perhubungan ttg Batas - batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Badas.	L L : 10 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1996 8 Januari 1996	Biaya Penunjang Operasional Pendidikan Praja STPDN TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 465 - 469	
2.	No. 2 Tahun 1996 8 Januari 1996	Penyertaan Pemerintah Prop. Dati I dalam Pembangunan Lanjutan Kesatrian STPDN TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 470 - 474	
3.	No. 3 Tahun 1996 23 Januari 1996	Dukungan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah untuk Program2 Depdagri di daerah.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 475 - 495	
4.	No. 4 Tahun 1996	Kosong		
5.	No. 5 Tahun 1996 23 Januari 1996	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.5 Th.1996 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 496 - 518	Dicabut dg KMDN No.6 Th.2002
6.	No. 6 Tahun 1996 25 Januari 1996	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.21 Th.1994, No.22 1994 dan No.23 Th.1994.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 519 - 532	
7.	No. 7 Tahun 1996 25 Januari 1996	Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 533 - 536	
8.	No. 8 Tahun 1996 14 Pebruari 1996	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.25 Th.1996 ttg data dasar profil Desa/Kelurahan.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 537 - 540	
9.	No. 9 Tahun 1996 1 April 1996	Pelaksanaan Kepmendagri No.56 Th.1994 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 541 - 549	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10.	No. 10 Tahun 1996 1 April 1996	Petunjuk Operasional (PO) Pelaks. Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Depdagri TA. 1996/1997 di Lingk. Depdagri.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 550 - 552	
11.	No. 11 Tahun 1996 1 April 1996	Pedoman Penetapan Flora dan Fauna Identitas Dati II dan Kotamadya.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 553 - 564	
12.	No. 12 Tahun 1996 19 April 1996	Keringanan untuk tidak memungut Retribusi atas izin membangun rumah sederhana dan Rumah sangat sederhana.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 565 - 567	
13.	No. 13 Tahun 1996 22 April 1996	Pelaksanaan Penetapan P4 di Daerah seluruh Indonesia TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 568 - 580	
14.	No. 14 Tahun 1996 22 April 1996	Pelaksanaan Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah seluruh Indonesia TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 581 - 589	
15.	No. 15 Tahun 1996 22 April 1996	Pelaksanaan Pembinaan perlindungan masy. di daerah seluruh Indonesia TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 590 - 601	
16.	No. 16 Tahun 1996 22 April 1996	Petunjuk Pelaksanaan UU No.5 Th.1996 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Kupang.	L L : 8 hal.	
17.	No. 17 Tahun 1996 2 Mei 1996	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan peranan wanita dalam Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 602 - 621	
18.	No. 18 Tahun 1996 31 Mei 1996	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Lanjutan STPDN Jatinangor Jawa barat Th.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1996 Hal.: 622 - 625	
19.	No. 19 Tahun 1996 10 Juni 1996	Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Tingkat II.	L L : 11 hal.	
20.	No. 20 Tahun 1996 3 Juli 1996	Penyusunan Buku Petunjuk Pelayanan Perijinan di Daerah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 365 - 367	
21.	No. 21 Tahun 1996 22 Juli 1996	Petunjuk Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Pihak Swasta.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 368 - 370	
22.	No. 22 Tahun 1996 19 Agustus 1996	Pengadaan, Pengelolaan & Pengembangan Tanah Kas Desa.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 371 - 378	
23.	No. 23 Tahun 1996 22 Agustus 1996	Sistem Pendataan Kegiatan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan melalui Program Komputerisasi.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 379 - 385	
24.	No. 24 Tahun 1996 22 Agustus 1996	Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.9 Th.1996 ttg Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 386 - 389	
25.	No. 25 Tahun 1996 9 September 1996	Petunjuk Pelaksanaan Keppres No.56 Th.1996 ttg Bukti Kewarganegaraan RI.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 390 - 393	
26.	No. 26 Tahun 1996 11 September 1996	Tugas Pertahanan Sipil Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 394 - 406	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
27.	No. 27 Tahun 1996 24 September 1996	Petunjuk Pelaksanaan PP No.53 Th.1996 ttg Pembentukan Kabupaten Simeulue di wilayah Prop. DI. Aceh.	L L : 2 hal. Lamp. : 2 hal.	
28.	No. 28 Tahun 1996 27 September 1996	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.167 Th.1996 ttg penelitian dan pengembangan di jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 407 - 417	Dicabut dg KMDN No.40 Th.2000
29.	No. 29 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Petunjuk Pelaksanaan PP No.52 Th.1996 ttg Pembentukan Kab. Puncak Jaya, Kab. Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di wilayah Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 2 hal. Lamp. : 5 hal.	
30.	No. 30 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Petunjuk Pelaksanaan PP No.54 Th.1996 ttg Pembentukan Kab. Mimika di wilayah Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 6 hal.	
31.	No. 31 Tahun 1996 4 Oktober 1996	Perubahan Inmendagri No.5A Th.1995 ttg Penyertaan Pemerintah Daerah Tk.I dan Daerah Tk. II dalam Pembangunan Sistem Komunikasi Depdagri.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 418 - 421	
32.	No. 32 Tahun 1996 14 Oktober 1996	Pelaksanaan Kepmendagri No.18 Th.1993 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 422 - 425	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
33.	No. 33 Tahun 1996 21 Oktober 1996	Pembentukan Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 426 - 431	
34.	No. 34 Tahun 1996 25 Nopember 1996	Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah.	HPPU-DDN 2 1996 Hal.: 432 - 434	
<b>TAHUN 1997</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1997 10 Januari 1997	Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 3 - 21	Dicabut dg Permen DN No.3 Th.2000
2.	No. 2 Tahun 1997 8 Januari 1997	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 22 - 30	
3.	No. 3 Tahun 1997 14 Pebruari 1997	Pemberdayaan & Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 31 - 40	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
4.	No. 4 Tahun 1997 11 Juni 1997	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 41 - 56	Dicabut dg Permen DN No.1 Th.2003
5.	No. 5 Tahun 1997 23 Juli 1997	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 3 - 26	
6.	No. 6 Tahun 1997	Kosong/Batal		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7.	No. 7 Tahun 1997 14 Agustus 1997	Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 27 - 51	Dicabut dg Permen DN No.1 Th.2001
8.	No. 8 Tahun 1997 25 September 1997	Pencabutan Permendagri No.9 Th.1984 ttg Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa/Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 52 - 53	
9.	No. 9 Tahun 1997 10 Oktober 1997	Penerimaan Sumbangan dari Masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 54 - 58	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1997 2 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop. Tk.I Bali No.2 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Bali.	L L : 6 hal	
2	No. 2 Tahun 1997 2 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Kalimantan Timur No.08 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Daerah Tk. I Kalimantan Timur.	L L : 3 hal	
3	No. 3 Tahun 1997 2 Januari 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Jambi, No. 6 Tahun 1996 Ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jambi.	L L : 3 hal	
4	No. 4 Tahun 1997 2 Januari 1997	Pembentukan 52 (lima Puluh Dua) Kantor Arsip Daerah Kab./Kotamadya Dati.II.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 57 - 63	
5	No. 5 Tahun 1997 13 Januari 1997	Pengesahan PERDA Propinsi Dati I Sultra No.20 Tahun 1995 Ttg Rencana Tata Ruang Wil. Prop. Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara.	L L : 10 hal	
6	No. 6 Tahun 1997 14 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalsel No.3 Th.1996 Ttg Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 2 hal	
7	No. 7 Tahun 1997 14 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Lampung No.2 Th.1996 Ttg Pembentukan,Organisasi & Tatakerja Arsip Daerah Prop. Dati I Lampung.	L L : 4 hal	
8	No. 8 Tahun 1997 15 Januari 1997	Pengesahan Kep. Gubernur KDH Tk.I Maluku No.23 Th.1996 Ttg Pembentukan OTK Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Dati I Halmahera Tengah.	L L : 2 hal	
9	No. 9 Tahun 1997 20 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop. DI Yogyakarta No.4 Th.1996 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Prop. DI Yogyakarta.	L L : 2 hal	
10	No. 10 Tahun 1997 27 Januari 1997	Batas Wilayah Lima Puluh Tiga Kec. di Wil. Kab. Dati II Jayawijaya,Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak, Puncak Wijaya & Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 7 hal Lamp. : 47 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No. 11 Tahun 1997 20 Januari 1997	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Maluku No.16 Th.1995 Ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Maluku No.2 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Prop. Dati I Maluku & Sekretariat DPRD Prop. Dati I Maluku.	L L : 2 hal	
12	No. 12 Tahun 1997 20 Pebruari 1997	Penyertaan Pemerintah Daerah Tk.I dalam Pembangunan Lanjutan Kesatrian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 64 - 70	
13	No. 13 Tahun 1997 24 Pebruari 1997	Jumlah & Tata Cara Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Dati II Tulang Bawang Untuk Pertama Kali.	L L : 11 hal	
14	No. 14 Tahun 1997 24 Pebruari 1997	Jumlah & Tata Cara Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Dati II Tanggamus Utk Pertama	L L : 11 hal	
15	No. 15 Tahun 1997 24 Pebruari 1997	Pencabutan KEPMENDAGRI No.114 Th.' 79 Ttg Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan Untuk Wil. Kota Agung, Pembantu Bupati Lampung Utara Utk Wilayah Liwa & Pembantu Bupati Lampung Utara untuk Wilayah Menggala.	L L : 2 hal	
16	No. 16 Tahun 1997 24 Pebruari 1997 No.027a/U/1997	Keputusan Bersama Mendikbud & Mendagri Pedoman Administrasi Sekolah Dasar Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 71 - 75	
17	No. 17 Tahun 1997	KOSONG		
18	No. 18 Tahun 1997 2 Pebruari 1997 No.SK 11/Men/1997	SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan Ttg Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Desa Transmigrasi.		
19	No. 19 Tahun 1997 1 Maret 1997	Pengesahan PERDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.14 Th.1996 Ttg Pembentukan, Organisasi & Tata Kerja Dinas Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
20	No. 20 Tahun 1997 12 Maret 1997	Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 76 - 174	
21	No. 21 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pedoman Organisasi dari tata kerja dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 175 - 228	
22	No.22 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No 8 Tahun 1993 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Arsip Dati I NTB.	L L : 9 hal	
23	No. 23 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalimantan Timur Nomor : 07 Th.1996 Ttg Organisasi Tahun 1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja & Tata Kerja PU Prop. Dati I Kaltim.	L L : 2	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No. 24 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Di. Aceh No. 7 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Prop. D.I. Aceh.	L L : 2 hal	
25	No. 25 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Di. Aceh No. 8 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Prop. D.I. Aceh.	L L : 3 hal	
26	No. 26 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Thn 1996 ttg Susunan Pekerjaan Umum Prop. D.I.Aceh.	L L : 7 hal Lamp. : 47 hal	
27	No. 27 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Aceh No.11 Th.1996 ttg SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi D.I. Aceh.		
28	No. 28 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Di. Aceh No.12 Th.1996 ttg SOTK Dinas Perkebunan Daerah Prop. D.I. Aceh.	L L : 2 hal	
29	No. 29 Tahun 1997 13 Maret 1997	Pengesahan Perda Propinsi Di. Aceh Perwakilan Rakyat Propinsi Di. Aceh.	L L : 2 hal	
30	No. 30 Tahun 1997 14 Maret 1997	Jumlah & Tata cara Pengangkatan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Bekasi untuk Pertama Kali.	L L : 11 hal	
31	No. 31 Tahun 1997 1 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.5 Thn 1996 ttg Pembentukan Organisasi Dati I Sultra & Tata Kerja Dinas PU Propinsi.	L L : 2 hal	
32	No. 32 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.11 Th.1996 ttg SOTK Dinas Perkebunan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 2 hal	
33	No. 33 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No. 3 Th.1996 ttg Org.& Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Jambi.	L L : 3 hal	
34	No. 34 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta No.3 Th. 1996 ttg Pembentukan Dinas Peternakan Prop. D.I. Yogyakarta	L L : 2 hal	
35	No. 35 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No. 7 Th.1996 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Sultra No.3 Th.1980 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Sultra.	L L : 3 hal	
36	No. 36 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No. 8 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Kalbar.	L L : 2 hal	
37	No. 37 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Barat No.4 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dati I Sumatera Barat.	L L : 33 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No. 38 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat No.5 Thn 1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dati I Sumatera Barat.	L L : 3 hal	
39	No. 39 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Sumbar No.6 Th.1996 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Perkebunan Dati I Sumbar.	L L : 3 hal	
40	No. 40 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara No.1 Th.1996 tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara No.5 Th.1996 ttg Pembentukan Susunan Organisasi & Tata Cara Kerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 4 hal	
41	No. 41 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.2 Th.1996 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Sultra No. 9 Th.1979 ttg Pembentukan SOTK Dinas Peternakan Prop. Dati I Sultra.	L L : 3 hal	
42	No. 42 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara No.10 Th.1979 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 3 hal	
43	No. 43 Tahun 1997 20 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumbar No.3 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Tingkat I Sumatera Barat.	L L : 3 hal	
44	No. 44 Tahun 1997 20 Maret 1997	Pengesahan Perda Propinsi Sulteng No.4 Th.1996 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Kesehatan Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 3 hal	
45	No. 45 Tahun 1997 17 Maret 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.6 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Pam.	L L : 3 hal	
46	No. 46 Tahun 1997 21 Maret 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur No. 5 Th.1994 ttg Kawasan Lindung Di Propinsi Dati I NTT.	L L : 7 hal	
47	No. 47 Tahun 1997 24 Maret 1997	Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dati I.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 229 - 235	
48	No. 48 Tahun 1997 31 Maret 1997	Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 236 - 259	
49	No. 49 Tahun 1997 7 April 1997	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Riau No.20 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
50	No. 50 Tahun 1997 15 April 1997	Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi Isteri Peserta Pendidikan & Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat I di Jajaran Dep. Dalam Negeri.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
51	No. 51 Tahun 1997 17 April 1997	Pembentukan 7 (Tujuh) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 264 - 270	
52	No. 52 Tahun 1997 21 April 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.12 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Riau.	L L : 3 hal.	
53	No. 53 Tahun 1997 21 April 1997	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Aceh No.6 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. D.I. Aceh.	L L : 2 hal.	
54	No. 54 Tahun 1997 25 April 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Lampung No.1/1997 ttg Perubahan Kedua Perda Prov. Dati I Lampung No.7 Th.1992 ttg Org. & Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Prop. Dati I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Lampung.	L L : 3 hal.	
55	No. 55 Tahun 1997 25 April 1997 SKB No. 144/Kpts/1997	Pengaturan Organisasi Proyek & Pengalihan Pegawai serta Pelimpahan Barang/ Kekayaan Negara dari Proyek2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Bantuan Prasarana Dasar Permukiman di Daerah Perkotaan.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 271 - 228	
56	No. 56 Tahun 1997 9 Mei 1997	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Bali No.4 Th.1996 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Dati I Bali.	L L : 11 hal.	
57	No. 57 Tahun 1997 12 Mei 1997 SKB No.145/MPP/ Kpts/5/1997	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri ttg Penataan & Pembinaan Pasar & Pertokoan.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 271 - 228	
58	No. 58 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan Perda Prop.Dati.I Lampung No.1 Th.96 ttg Penghapusan Cabang Dinas Dati I yang berada di Kab. Dati II Lampung Tengah.	L L : 2 Hal	
59	No. 59 tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor - Timur No. 02 Th 1996 ttg Organisasi & tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Timor - Timur.	L L : 2 hal	
60	No. 60 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timtim No.03 Th 1996 ttg Org.& Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Timor - Timur.	L L : 2 hal	
61	No. 61 tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor - Timur No. 04 Th 1996 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Timor - Timur.	L L : 2 Hal	
62	No. 62 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulteng No.5 Th 1996 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 3 hal	
63	No. 63 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Tim-Tim No.05 Th.1996 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Timor - Timur.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
64	No. 64 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I TimTim No.06 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Timor - Timur.	L L : 3 Hal.	
65	No. 65 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan Perda Prop.Dati I Tim-Tim No.07 Th.1996 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Tim-Tim.	L L : 2 hal	
66	No. 66 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.9 Th 1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Bali.	L L : 2 Hal.	
67	No. 67 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.9 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
68	No. 68 Tahun 1997 12 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No 11 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
69-70		K O S O N G		
71	No.71 Tahun 1997 14 Mei 1997	Penyelenggaraan Geladi Manajemen Pemerintahan Bagi Aparatur Pemerintah Kab./Kotamadya Dati II Percontohan Otonomi.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 285 - 302	
72	No.72 Tahun 1997 14 Mei 1997	Pola Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan antara Departemen Dalam Negeri dengan Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen dan Perguruan Tinggi.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 303 - 312	
73	No.73 Tahun 1997 14 Mei 1997	Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang & Hutang Piutang pada Perusahaan Daerah yg baru dibentuk.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 313 - 318	
74	No. 74 Tahun 1997 21 Mei 1997	Penyelenggaraan Orientasi Pembekalan & Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 319 - 323	
75	No.75 Tahun 1997 26 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.15 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Riau.	L L : hal	
76	No.76 Tahun 1997 26 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.16 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Riau.	L L : hal	
77	No.77 Tahun 1997 26 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.17 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Riau.	L L : hal	
78	No.78 Tahun 1997 26 Mei 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Riau No.18 Th.1996 Ttg Pembentukan, Pembinaan, dan Penyerahan Desa Transmigrasi.	L L : hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
79	No.79 Tahun 1997 27 Mei 1997	Disiplin Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 324 - 332	Dicabut dg KMDN No.19 Th.2003
80	No.80 Tahun 1997 27 Mei 1997	Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman disiplin Praja STPDN	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 333 - 335	Dicabut dg KMDN No.19 Th.2003
81	No.81 Tahun 1997 30 Mei 1997	Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dati I.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 336 - 339	
82	No.82 Tahun 1997 4 Juni 1997	Pedoman Organisasi & Tata Kerja Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 340 - 379	Dicabut dg KMDN No.31 Th.2000
83	No.83 Tahun 1997 9 Juni 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Bali No.5 Th.1996 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Bali.	L L : 2 hal	
84	No.84 Tahun 1997 16 Juni 1997	Pengesahan PERDA Propinsi Dati I Riau No.04 Th.1995 ttg Organisasi & Tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Batam.	L L : 2 hal	
85	No.85 Tahun 1997 19 Juni 1997	Pengesahan PERDA DKI Jakarta No.4 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta.	L L : 3 hal	
86	No.86 Tahun 1997 19 Juni 1997	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Riau dan Sulawesi Tengah.	L L : 9 hal	
87	No.87 Tahun 1997 23 Juni 1997	Perubahan Kedua KEPMENDAGRI No.61 Th.1992 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib PPRD Sebagaimana Tlh Diubah dengan KEPMENDAGRI No.133 Th 1996	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 380 - 382	
88	No.88 Tahun 1997 30 Juni 1997 SKB No. 88 Th 1997 No.01/SKB/M/VI/1997	Kepber Mendagri & Menkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil ttg Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 383 - 392	
89	No.89 Tahun 1997 30 Juni 1997	Perlindungan Asuransi atas Barang Milik Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 393 - 402	
90	No.90 Tahun 1997 8 Juli 1997 SKB : No.239/MPR/KEP/7/1997/No.313/ KMK. 01/1997	SKB : Menperindag, MENDAGRI, dan Menkeu RI ttg : Subsidi Ongkos barang-barang Kebutuhan masyarakat Pedalaman Kalimantan Timur.	L L : 8 hal	
91	No.91 Tahun 1997 9 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Irian Jaya No.4 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
92	No.92 Tahun 1997 9 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jambi No.10 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Prop. Dati I Jambi.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
93	No.93 Tahun 1997 9 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulut No.12 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 3 hal	
94	No.94 Tahun 1997 9 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulut No.13 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 3 hal	
95	No.95 Tahun 1997 9 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulut No.14 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dati I Sulawesi Utara di Kotamadya Dati II Bitung.	L L : 3 hal	
96	No.96 Tahun 1997 11 Juli 1997	Tata Naskah Dinas Di Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek.	-	
97	No.97 Tahun 1997 11 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No. 7 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja RSU Daerah Dr. Soetomo Prop. Dati I Jatim.	L L : 2 hal	
98	No.98 Tahun 1997 15 Juli 1997	Pengesahan PERDA Prop. DIY No.5 Th.1997 ttg Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop.DI. Yogyakarta.	L L : 2 hal	
99	No.99 Tahun 1997 15 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Yogyakarta No. 6 Th 1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Kantor PMD Prop. DIY.	L L : 2 hal	
100	No.100 Tahun 1997 18 Juli 1997	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Dati I Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat & Sumatera Utara.	L L : 9 hal Lamp : 1	
101	No.101 Tahun 1997 24 Juli 1997	Pembentukan Wilayah kerja Pembantu Bupati di Kab. Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal Lamp : 2	
102	No.102 Tahun 1997 28 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jatim No.9 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas PU Pengairan Dati I Jawa Timur	L L : 2 hal	
103	No.103 Tahun 1997 28 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.19 Tahun 1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Riau.	L L : 2 Hal	
104	No.104 Tahun 1997 28 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No. 8 Th 1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas LLAJ Daerah Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 3 Hal	
105	No.105 Tahun 1997 31 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.1 Tahun 1997 ttg SOTK Dinas Peternakan Prop. Dati I Kalimantan Barat.	L L : 3 Hal	
106	No.106 Tahun 1997 28 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.19 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Prop. Dati I Riau.	L L : 2 Hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
107	No.107 Tahun 1997 31 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Tengah No.9 Tahun 1996 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 3 Hal	
108	No.108 Tahun 1997 31 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop.Dati.I Bali No.9/1996 ttg Menyatakan tidak berlaku lagi Perda Prop. Dati I Bali No.13 Th 1988 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Prop. Dati I Bali.	L L : 2 Hal	
109	No.109 Tahun 1997 31 Juli 1997	Tanda Pengukuhan Pamong Praja muda bagi lulusan STPDN.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 59 - 63	
110A	No.110.A Tahun 1997 1 Agustus 1997	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 64 - 66	
111	No.111 Tahun 1997 31 Juli 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.12 Th.1996 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Kalbar.	L L : 2 hal	
112	No.112 Tahun 1997 1 Agustus 1997	Penetapan Batas Wilayah antara Prop. Dati I Sulteng dengan Prop. Dati I Sulawesi Tenggara di Desa Molere.	L L : 3 hal	
113	No.113 Tahun 1997 7 Agustus 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.8 Th.1996 ttg Pembentukan, Org. & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Kalteng.	L L : 4 hal	
114	No.114 Tahun 1997 7 Agustus 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.7/96 ttg Pembentukan, SOTK Ktr. Arsip Dati I Bali.	L L : 6 hal	
115	No.115 Tahun 1997 8 Agustus 1997	Pembentukan Forum Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 67 - 70	
116	No.116 Tahun 1997 11 Agustus 1997 (SKB :No.180/P/1997 No.Sk.127 A/KP/III/1997/01 No. 150 A Th 1997 No.168 A Th 1997	SKB.Mendikbud, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menpan ttg Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional Th 1997.	-	
117	No.117 Tahun 1997 12 Agustus 1997	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Medan No.4/1995 ttg Renc. Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Dati II Medan Th.2005.	L L : 5 hal	
118	No.118 Tahun 1997 15 Agustus 1997 SKB : No.189/P/1997 No. 118 Tahun 1997 No.SK.128/KP/III/1997/01 No. 600 Th 1997 No. 170 Th 1997	Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menpan Tentang Penetapan Guru Teladan Tingkat Nasional Tahun 1997.		
119	No.119 Tahun 1997 15 Agustus 1997	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pembidangan Tugas, Wewenang & Jabatan Kepala Daerah & Wkl.Kepala Drh.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 71 - 74	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
120	No.120 Tahun 1997 15 Agustus 1997	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati.I Kalimantan Timur No. 13 Th 1996 ttg Organisasi dan Tatkerja Pemerintahan Kota Administratip Bontang.	L L : 3 hal	
121	No.121 Tahun 1997 15 Agustus 1997	Pengesahan Perda Dati I Maluku No.35/1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratip Ternate.	L L : 4 hal	
122	No.122 Tahun 1997 15 Agustus 1997	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati.I Lampung No.27 Th.1996 ttg Organisasi & Takerja Pemerintahan Kotip. Metro.	L L : 3 hal	
123	No.123 tahun 1997 15 Agustus 1997	Program Sepuluh Sukses.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 75 - 84	
124	No.124 tahun 1997 15 Agustus 1997	Petunjuk Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Auditor di di Lingkungan Depdagri dan Pemda.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 85 - 91	
125	No.125 Tahun 1997 18 Agustus 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.1 Tahun 1997 ttg Organisasi dan Takerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 3 hal	
126	No.126 Tahun 1997 18 Agustus 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Tengah No.3 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muwardi Surakarta Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 3 hal	
127	No.127 tahun 1997 18 Agustus 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.4 Th.1997 ttg Organisasi dan Takerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Prop. Dati I Jateng.		
128	No.128 Tahun 1997 18 Agustus 1997	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan & Bendaharawan Kepada Gubernur Kepala Dati.I & Bupati/Walikota Kepala Dati.II.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 92 - 94	
129	No.129 Tahun 1997 26 Agustus 1997	Keputusan Gubernur Kepala Dati I Sulut No.151 Th.1996 ttg Susunan Organisasi Tata kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kotamadya Dati II Bitung.	L L : 4 hal	
130	No.130 Tahun 1997 29 Agustus 1997	Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tingkat I Maluku.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 95 - 98	
131	No.131 Tahun 1997 3 September 1997	Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 99 - 141	Dicabut dg KMDN No.54 Th.1999
132	No.132 Tahun 1997 3 September 1997	Pengelolaan Blanko Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 142 - 161	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
133	No.133 Tahun 1997 5 September 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.2 Th.1997 ttg Pembentukan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prop.Dati I Jatim.	L L : 2 hal	
134	No.134 Tahun 1997 5 September 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 3 Tahun 1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Dati I Jawa Barat.	L L : 2 hal	
135	No.135 Tahun 1997 8 September 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.21 Tahun 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prop. Dati I Sumatra Utara.	L L : 2 hal	
136	No.136 Tahun 1997 8 September 1997	Pengesahan Perda Dati I Sumatra Utara No. 19 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop. Dati I Sumatra Utara	L L : 2 hal	
137	No.137 Tahun 1997 8 September 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatra Utara No.20 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prop. Dati I Sumatra Utara	L L : 2 hal	
138	No.138 tahun 1997 8 September 1997	Program Kerja Dep.Dalam Negeri Th.1997/1998	-	
139	No.139 Tahun 1997 17 September 1997 SKB :No.902/Kpts/PL 420/9/1997 No.03.SKB/M/IX/1997	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi ttg Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 162 - 170	
140	No.140 Tahun 1997 17 September 1997	Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Depdagri.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 171 - 176	
141	No.141 Tahun 1997 18 September 1997	Pengesahan Perda Prop.Dati I Lampung No.2 Th 1997 ttg Pembentukan OTK Dinas Pemda dan Olah Raga Prop. Dati I Lampung.		
142	No.142 Tahun 1997 22 September 1997	Lembaga Pembantu Gubernur.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 177 - 179	
143	No.143 Tahun 1997 22 September 1997	Pedoman Pendelegasian Sebagian Wewenang Gubernur Kepala Wilayah kepada Pembantu Gubernur.	L L : 3 hal	
144	No.144 Tahun 1997 26 September 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irian Jaya No.5 Th 1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemuda & Olah Raga Prop. Dati I Irian Jaya	L L : 2 Hal	
145	No.145 Tahun 1997 26 September 1997	Kerjasama antara Desa dan atau antar Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 183 - 187	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
146	No.146 Tahun 1997 26 September 1997	Penyelesaian Perselisihan antara Desa dan atau antar Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 188 - 191	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
147	No.147 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Pengesahan Perda Dati I Kalimantan Barat No. 11 Th 1996 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Kalbar	L L : 2 hal	
148	No.148 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Pengesahan Perda Dati I Lampung No.08 Th.1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prop. Dati I Lampung	L L : 2 hal	
149	No.149 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.09 Th 1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
150	No.150 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.10 Th 1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prop. Dati I Lampung.	L L : 2 hal	
151	No.151 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No. 7 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Sulut.	L L : 2 hal	
152	No.152 Tahun 1997 1 Oktober 1997	Perbaikan Keputusan Mendagri No.146 Th.1996 ttg Pengesahan Perda Prop. DIY No.10 1996 ttg Pengesahan Perda Prop. DIY No.10 Th 1995 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.	L L : 9 hal Lamp : 1	
153	No.153 Tahun 1997 6 Oktober 1997	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Timor Timur Kalimantan Timur dan Maluku.	L L : 9 hal Lamp : 1	
154	No.154 Tahun 1997 7 Oktober 1997	Pedoman Pembuatan Daftar Susunan Pegawai di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 192 - 206	
155	No.155 Tahun 1997 7 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 2 Th.1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Suku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I Riau di Kotamadya Batam.	L L : 2 hal	
156	No.156 Tahun 1997 7 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.2 Th.1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I NTT.	L L : 4 hal	
157	No.157 Tahun 1997 13 Oktober 1997 <b>SKB : No.....Th 1997</b>	SKB Mendagri dan Meneg Agraria Kepala BPN Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Kas Desa.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 207 - 210	
158	No.158 Tahun 1997 14 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. DI Aceh No.17 Th.1996 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Prop. DI Aceh.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
159	No.159 Tahun 1997 16 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.8 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Prop. Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
160	No.160 Tahun 1997 16 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.9 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
161	No. 161 Tahun 1997 16 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.10 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
162	No.162 Tahun 1997 16 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.11 Th.1996 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 3 hal	
163	No.163 Tahun 1997 20 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.17 Th.1996 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 3 hal	
164	No.164 Tahun 1997 21 Oktober 1997	Kekayaan Kelurahan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 211 - 214	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
165	No.165 Tahun 1997 23 Oktober 1997	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 215 - 223	
166	No.166 Tahun 1997 28 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 7 Th 1997 ttg Penghapusan cabang Sosial Prop. Dati I Jawa Barat Kab. Bandung dan Kota Administrasi CIMAHI.	L L : 2 hal	
167	No.167 Tahun 1997 28 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No. 3 Th 1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 3 hal	
168	No.168 Tahun 1997 28 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Timur No. 05 Th 1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Tarakan.	L L :3 hal	
169	No.169 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya Batam.	L L : 11 hal Lamp : 1	
170	No.170 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 224 - 237	
171	No.171 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 238 - 243	
172	No.172 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Kriteria Wajib Pajak Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukaan.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 244 - 246	
173	No.173 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Tata cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 247 - 257	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
174	No.174 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 258 - 266	
175	No.175 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 267 - 278	
176	No.176 Tahun 1997 30 Oktober 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.3 Th.1997 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jambi No.2 Th 1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Dati I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop. Dati I Jambi.	L L : 2 hal	
177	No.177 Tahun 1997 10 Nopember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.13 Th.1996 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur.	L L : 3 hal	
178	No.178 Tahun 1997 10 Nopember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.12 Th.1996 ttg Penghapusan Cabang Dinas Kehutanan dan Cabang NTB.	L L : 2 hal	
179	No.179 Tahun 1997 11 Nopember 1997	Pengesahan Perda Prop. DI. Aceh No. 16 Th 1996 ttg Pembentukan SOTK Badan Pengendalian Dampak Lingk. daerah Prop. DI. Aceh.	L L : 5 hal	
180	No.180 Tahun 1997 11 Nopember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.11 Th 1997 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah Prop. Dati I Lampung.	L L : 4 hal	
181	No.181 Tahun 1997 12 Nopember 1997	Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Dasar Negeri di wilayah DKI Jakarta.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 279 - 282	
182	No.182 Tahun 1997 1 Desember 1997	Organisasi dan Tatakerja Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa.	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 283 - 292	Dicabut dg KMDN No.12 Th.2000
183	No.183 Tahun 1997 4 Desember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No. 6 Th 1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Sulteng.	L L : 3 hal	
184	No.184 Tahun 1997 4 Desember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.13 Th.1997 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I NTB	L L : 4 hal	
185	No.185 Tahun 1997 5 Desember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.18 Th.1996 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I Sumatera Utara	L L : 2 hal	
186	No.186 Tahun 1997 11 Desember 1997	Penentuan Jumlah dan Tata Cara Pengangkatan anggota DPRD Tk.II Tarakan	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 293 - 308	
187	No.187 Tahun 1997 12 Desember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.1 Th.1997 ttg Pembentukan, Org. & Tatakerja RSU Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
188	No.188 Tahun 1997 12 Desember 1997	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.15 Th.1996 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I No.6/1980 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I Sulawesi Tenggara	L L : 3 hal	
189	No.189 Tahun 1997 12 Desember 1997	Uraian Tugas Urusan dan Subseksi Pada Organisasi Pemerintah Kecamatan	HPPU-DDN 2 1997 Hal.: 309 - 386	
190	No.190 Tahun 1997 23 Desember 1997	Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah (BAPEDALDA) DI. Yogyakarta.	L L : 3 hal	
191	No.191 Tahun 1997 29 Desember 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalsel No.10 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 3 hal	
192	No.192 Tahun 1997 29 Desember 1997	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalsel No.9 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 3 hal	
193	No. 193 Tahun 1997 29 Desember 1997	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Jogjakarta No.22 Th.1996 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I D.I. Jogjakarta.	L L : 3 hal	
194	No.194 Tahun 1997 29 Desember 1997	Pengesahan PERDA Prop. D.I. Jogjakarta No.10 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I D.I. Jogjakarta.	L L : 3 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1997 2 Januari 1997	Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan dan Penerapan Sistem Komunikasi Depdagri.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 403 - 406	
2.	No. 2 Tahun 1997 2 Januari 1997	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Penerapan Sistem Komunikasi Depdagri di Pusat dan Bagian-bagian Proyek Pembangunan & Penerapan Sistem Komunikasi Depdagri di Daerah TA.1996/1997.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 407 - 409	
3.	No. 3 Tahun 1997 3 Januari 1997	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lindung dan Wilayah Sekitarnya.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 410 - 422	
4.	No. 4 Tahun 1997 14 Pebruari 1997	Larangan,Pengawasan,Penertiban Peredaran & Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 423 - 435	
5.	No. 5 Tahun 1997 20 Pebruari 1997	Biaya Penunjang Operasional Pendidikan Praja STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) TA. 1997/1998.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 436 - 439	
6.	No. 6 Tahun 1997 20 Pebruari 1997	Pedoman Penyusunan APBD TA.1997/1998.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 440 - 443	
7.	No. 7 Tahun 1997 24 Pebruari 1997	Petunjuk Pelaksanaan UU No.2 Th.1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kab. Dati II Tanggamus.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 444 - 455	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8.	No. 8 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pembentukan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 456 - 460	
9.	No. 9 Tahun 1997 14 Maret 1997	Petunjuk Pelaksanaan UU No.9 Th.1996 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 461 - 470	
10.	No. 10 Tahun 1997 24 Maret 1997	Pembinaan & Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 471 - 482	
11.	No. 11 Tahun 1997 24 Maret 1997	Petunjuk Pelaks. KMDN No.98 Th.1996 ttg Pedoman Pembentukan, OTK Bapedalda.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 483 - 492	
12.	No. 12 Tahun 1997 27 Maret 1997	Pedoman Umum Pengelolaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 493 - 497	
13.	No. 13 Tahun 1997 1 Mei 1997	Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Warganegara Indonesia Keturunan.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 498 - 504	
14.	No. 14 Tahun 1997 5 Mei 1997	Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Penerapan SISKOMDAGRI.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 505 - 507	
15.	No. 15 Tahun 1997 19 Mei 1997	Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 508 - 517	Dicabut dg Permen No.63 Th.2010
16.	No. 16 Tahun 1997 23 Mei 1997	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.74 Th.1997 ttg Penyelenggaraan Orientasi Pembekalan dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Hasil Pemilu Th.1997.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 518 - 542	
17.	No. 17 Tahun 1997 11 Juni 1997	Pembinaan Penyelenggaraan Lomba Taman di Daerah.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 543 - 549	
18.	No. 18 Tahun 1997 24 Juni 1997	Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD.	HPPU-DDN 1 1997 Hal.: 550 - 566	Dicabut dg Inmen No.26 Th.1999
19.	No. 19 Tahun 1997 1 Juli 1997	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.89 Th.1997 ttg Perlindungan Asuransi Atas Bank Milik Pemerintah Daerah.	Hal. : 4 hal.	Dicabut dg Inmen No.2 Th.2006
20.	No. 20 Tahun 1997 15 Juli 1997	Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah.	Hal. : 3 hal. Lamp.: 18 hal.	Dicabut dg KMDN No.21 Th.2003
21.	No. 21 Tahun 1997 24 Juli 1997	Petunjuk Pelaks. Permendagri No.5 Th.1997 ttg Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.	Hal. : 3 hal.	
22.	No. 22 Tahun 1997 14 Agustus 1997	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.123 Th.1997 ttg Program Sepuluh Sukses.	Hal. : 2 hal. Lamp. : 45 hal.	
23.	No. 23 Tahun 1997 5 September 1997	Percepatan Pembangunan dan Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	Hal. : 3 hal. Lamp. : 53 hal.	
24.	No. 24 Tahun 1997 15 September 1997	Petunjuk Teknis Permendagri No.2 Th.' 94 ttg Pelaksanaan APBD dan Permendagri No.2 Th.1996 ttg Perubahan Permendagri No.2 Th.1994 ttg Pelaksanaan APBD.	Hal. : 4 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
25.	No. 25 Tahun 1997 22 September 1997	Petunjuk Teknis Kepmendagri No.143/1997 ttg Pedoman Pendelegasian sbg Wewenang Gub. Kepala Wil. kpd Pembantu Gubernur.	Hal. : 2 hal.	
26.	No. 26 Tahun 1997 24 September 1997	Penetapan Jalur Hijau Mangrove.	Hal. : 2 hal. Lamp. : 3 hal.	
27.	No. 27 Tahun 1997 29 September 1997	Petunjuk Pelaksanaan KMDN No.8 Th.1997 ttg Kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan.	Hal. : 2 hal. Lamp. : 4 hal.	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
28.	No. 28 Tahun 1997 13 Oktober 1997	Peningkatan Gerakan Disiplin Nasional.	Hal. : 3 hal.	
29.	No. 29 Tahun 1997 15 Oktober 1997	Penyediaan Dana Pembinaan Manajemen Unit Swadana Daerah.	Hal. : 3 hal.	
30.	No. 30 Tahun 1997 15 Oktober 1997	Biaya Penunjang Operasional Pemeliharaan dan Pengembangan Sistim Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah.	Hal. : 4 hal. Lamp. : 8 hal.	
31.	No. 31 Tahun 1997 27 Oktober 1997	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.48 Th.1997 ttg Pakaian Dinas Pegawai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Hal. : 2 hal. Lamp.: 3 hal.	
32.	No. 32 Tahun 1997 4 Nopember 1997	Pelaksanaan Kepmendagri No.48 Th.1996 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.	Hal. : 2 hal. Lamp.: 3 hal.	Dicabut dg KMDN No.158 Th.2004
33.	No. 33 Tahun 1997 17 Nopember 1997	Tata Cara Penyaluran Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Promosi Kepariwisatan.	Hal. : 4 hal. Lamp.: 3 hal.	
34.	No. 34 Tahun 1997 11 Desember 1997	Petunjuk Pelaksanaan UU No.29 Th.1997 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Tarakan.	Hal. : 2 hal. Lamp.: 7 hal.	
35.	No. 35 Tahun 1997 11 Desember 1997	Pembinaan Pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah.	Hal. : 2 hal. Lamp.: 4 hal.	
<b>TAHUN 1998</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1998 4 Pebruari 1998	Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 1 - 6	
2.	No. 2 Tahun 1998 23 Pebruari 1998	Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 7 - 14	
3.	No. 3 Tahun 1998 24 Pebruari 1998	Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 15 - 20	
4.	No. 4 Tahun 1998 5 April 1998	Pedoman Penyusunan Pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketujuh Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 21 - 24	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5.	No. 5 Tahun 1998 10 September 1998	Perubahan Permendagri No.4 Th.1995 ttg Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 25 - 28	
6.	No. 6 Tahun 1998 23 September 1998	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED - SP)	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 29 - 36	
7.	No. 7 Tahun 1998 15 Nopember 1998	Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 37 - 46	Dicabut dg Permen No.2 Th.2007
8.	No. 8 Tahun 1998 11 Desember 1998	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 47 - 66	
9.	No. 9 Tahun 1998 11 Desember 1998	Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.	HPPU-DDN 1 1998 Hal.: 67 - 90	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1998 2 Januari 1998	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Dati I dan Dati II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 91 - 114	
2	No. 2 Tahun 1998 6 Januari 1998	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Jawa Timur No.4 Th.1996 Ttg Rencana Tata Ruang Wil. Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 2 hal	
3	No. 3 Tahun 1998 6 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.4 Th.1997 Ttg Perubahan Ketiga Perda Prop. Dati I Sumsel No.11/1988 Ttg Pembentukan, SOTK Cab. Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 2 hal	
4	No. 4 Tahun 1998 8 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No. 8 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 2 hal	
5	No. 5 Tahun 1998 8 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. DI. Yogyakarta No.16 Th.1996 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan DIY.	L L : 4 hal	
6	No. 6 Tahun 1998 8 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. DI. Yogyakarta No.18 Th.1996 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. DI Yogyakarta.	L L : 4 hal	
7	No. 7 Tahun 1998 8 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. DI. Yogyakarta No.20 Th.1996 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. DI Yogyakarta.	L L : 4 hal	
8	No. 8 Tahun 1998 8 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.3 Th.1997 ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 4 hal	
9	No. 9 Tahun 1998 8 Januari 1998	Organisasi & Tata Kerja Kantor Ketentrman dan Ketertiban DKI Jakarta.	L L : 13 hal Lamp. : 1 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10	No. 10 Tahun 1998 8 Januari 1998	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 hal Lamp. : 14 hal	Dicabut dg KMDN No.152 Th.1998
11	No. 11 Tahun 1998 9 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.9 Th.1997 Ttg Pembentukan OTK Dinas Pemuda dan Olahraga Prop. Dati I Sumsel.	L L : 2 hal	
12	No. 12 Tahun 1998 9 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.1 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Suku Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Riau di Kotamadya Batam.	L L : 2 hal	
13	No. 13 Tahun 1998 11 Januari 1998	Pengesahan PERDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Bangunan DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
14	No. 14 Tahun 1998 11 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.7 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas PU Cipta Karya Prop. Dati I Sulsel.	L L : 2 hal	
15	No. 15 Tahun 1998 11 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No. 8 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas PU Bina Marga Prop. Dati I Sulsel.	L L : 2 hal	
16	No. 16 Tahun 1998 11 Januari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.9 Th.1997 ttg OTK Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prop. Dati I Sulsel.	L L : 2 hal	
17	No. 17 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Pada Dinas Kesehatan Dati I.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 115 - 124	
18	No. 18 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Barat No. 45 Th.1997 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Singkawang.	L L : 4 hal	
19	No. 19 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat No. 10 Th.1997 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Pariaman.	L L : 4 hal	
20	No. 20 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Selatan No. 15 Th.1997 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Palopo.	L L : 4 hal	
21	No. 21 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Kep.Gubernur KDH Tk.I Sumsel No.15 Th.1996 Ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Prabumulih, Baturaja, Pagar Alam dan Lubuk Linggau.	L L : 3 hal	
22	No. 22 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulsel No.10 Th.1997 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No. 23 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I Sumsel No.3 Th.1997 Ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 3 hal	
24	No. 24 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Maluku.	L L : 8 hal Lamp. : 1 hal	
25	No. 25 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I D.I. Yogyakarta No.9 Th.1996 Ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop.Dl. Yogyakarta.	L L : 7 hal	
26	No. 26 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I D.I.Y. No.8 Th.1996 ttg Pembentukan Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. D.I. Yogyakarta.	L L : 3 hal	
27	No. 27 Tahun 1998 14 Januari 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I Bengkulu No.6/97 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Bengkulu No.6/1992 Ttg OrK Setwilda Tk.I dan Set. DPRD Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal	
28	No. 28 Tahun 1998 16 Januari 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.8 Th.' 97 Ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
29	No. 29 Tahun 1998 19 Januari 1998	Perubahan Kepmendagri No.896-2253 Ttg Pedoman Pemberian Honorarium bagi Dosen/ Pelatih Pengasuh serta Honorarium Karya Tulis Ilmiah Pembuatan Modul, GBPP/ Sap dan Vakasi Ujuihan Semester/Ujian Akhir pada STPDN.	L L : 12 hal	
30	No. 30 Tahun 1998 23 Januari 1998 No.SK.006A/EK/I/98/01	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Luar Negeri RI Ttg Potensi Ekonomi Daerah di Luar Negeri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 125 - 101	
31	No. 31 Tahun 1998	<b>B a t a l</b>		
32	No. 32 Tahun 1998 27 Januari 1998	Manual Administrasi Barang Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 131 - 134	Dicabut dg KMDN No.7 Th.2002
32 A	No. 32A Th. 1998 5 Pebruari 1998	Harga Blangko dan Formulir-formulir Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pendaf - taran Penduduk & Catatan Sipil & Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 135 - 138	
33	No. 33 Tahun 1998 9 Pebruari 1998	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Dati I Jawa Tengah.	L L : 10 hal	
34	No. 34 Tahun 1998 9 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I Sulsel No.3 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 3 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
35	No. 35 Tahun 1998 9 Februari 1998	Pengesahan Pengesahan Perda Prov. Dati I Sulsel No.5 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
36	No. 36 Tahun 1998 9 Februari 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No.4/1997 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Sulsel.	L L : 3 hal	
37	No. 37 Tahun 1998 9 Februari 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No.2 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Sulawesi Selatan.	L L : 3 hal	
38	No. 38 Tahun 1998 19 Februari 1998 No.031/U/Th.1998	SKB Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri Ttg Pengembangan Sistim Pendataan Siswa Sekolah Dasar.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 139 - 142	
39	No. 39 Tahun 1998 9 Februari 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.7 Th.' 97 ttg Organisasi & Tatakerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta.	L L : 5 hal	
40	No. 40 Tahun 1998 12 Februari 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Bali No.5 Th. 1997 Ttg Organisasi & Tatakerja Bapedalda Prop. Dati I Bali.	L L : 4 hal	
41	No. 41 Tahun 1998 12 Februari 1998	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bali No.526 Th.1996 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 Kotamadya Dati.II Denpasar.	L L : 3 hal	
42	No. 42 Tahun 1998 16 Februari 1998	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Propinsi Tk.I.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 143 - 152	Dicabut dg Kepmen No.48 Th.2000
43	No. 43 Tahun 1998 16 Februari 1998	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk.II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 153 - 164	Dicabut dg Kepmen No.48 Th.2000
44	No. 44 Tahun 1998 16 Februari 1998	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Kecamatan.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 165 - 174	
45	No. 45 Tahun 1998 16 Februari 1998	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Desa/Kelurahan.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 175 - 182	
46	No. 46 Tahun 1998 23 Februari 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No. 6 Th.1997 ttg Org. & Tatakerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
47	No. 47 Tahun 1998 25 Februari 1998	Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wil. Kotamadya Batam.	L L : 17 hal Lamp.: 1 hal	
48	No. 48 Tahun 1998 25 Februari 1998	Pengesahan Perda Daerah Prop. Dati I Jatim No.11 Th.1997 Ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jatim No.1 Th.1994 Ttg Pembentukan Org. & Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Prop. Dati I Jawa Timur di Jkt.	L L : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No. 49 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Prop. DI Aceh No. 8 Th.1997 Tentang Organisasi & Tatakerja RS Umum Dokter Zaenoel Abidin Banda Aceh.	L L : 2 hal	
50	No. 50 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Tengah No. 11 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Dati I Sulteng.	L L : 2 hal	
51	No. 51 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pedoman Pelaksanaan Tugas2 Kehumasan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 183 - 190	Dicabut dg Permen No.13 Th.2011
52	No. 52 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Daerah Prop. Dati I Riau No.9/1997 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Riau No.11/1996 Ttg Org. & Tata Kerja Dinas PU Prop. Dati I Riau.	L L : 2 hal	
53	No. 53 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Perda Prop. Dati I Jatim No.10 Th.1997 Ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 3 hal	
54	No. 54 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.13 Th.1997 Ttg OTK Kantor Penghubung Pemerintah Prop.Dati I Lampung di Jkt.	L L : 2 hal	
55	No. 55 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pedoman Penilaian Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita VI.	L L : 3 hal Lamp. : 22 hal	
56	No. 56 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pedoman Sistim Pembinaan Pelatihan di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 191 - 192	
57	No. 57 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pola Umum Pembinaan Karier PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	L L : 10 hal Lamp.: 5 hal	
58	No. 58 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 193 - 206	Dicabut dg KMDN No.106 Th.2004
59	No. 59 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Jajar DDN.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 207 - 218	
60	No. 60 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Daerah Prop. Dati I Jawa Timur No. 12 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 4 hal	
61	No. 61 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No. 8 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Riau.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62	No. 62 Tahun 1998 25 Februari 1998	Sistim Informasi Manajemen Perlengkapan Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 219 - 222	
63	No. 63 Tahun 1998 8 April 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.5 Th.1997 Ttg OTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Kalsel.	L L : 2 hal	
64	No. 64 Tahun 1998 17 April 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.4 Th.' 98 Ttg Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
65	No. 65 Tahun 1998 20 April 1998	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Bandung No.2 Th.1996 Ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Dati II Bandung.	L L : 3 hal	
66	No. 66 Tahun 1998 20 April 1998	Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Aceh Utara No.5 Th.1997 Ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Lhokseumawe dan Wil. Sekitarnya sampai dengan Th.2006.	L L : 3 hal	
67	No. 67 Tahun 1998 20 April 1998	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Balikpapan No.1 Th.1997 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Balikpapan Th.1994 - 2004.	L L : 3 hal	
68	No. 68 Tahun 1998 21 April 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Barat No. 8 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.	L L : 2 hal	
69	No. 69 Tahun 1998 21 April 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Barat No. 7 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukit Tinggi.	L L : 2 hal	
70	No. 70 Tahun 1998 21 April 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Barat No. 9 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.	L L : 2 hal	
71	No. 71 Tahun 1998 21 April 1998	Pengangkatan dan Pemindahan Camat.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 223 - 228	
72	No. 72 Tahun 1998 21 April 1998	Pedoman Pemilihan Camat Teladan	HPPU-DDN 1998 Hal.: 229 - 236	
73	No. 73 Tahun 1998 21 April 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No. 6 Th.1997 Ttg Pengelolaan Kawasan Industri Solok.	L L : 3 hal	
74	No. 74 Tahun 1998 4 Mei 1998	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Margasatwa Ragunan DKI Jkt.	L L : 10 hal Lamp. : 1 hal	
75	No. 75 Tahun 1998 4 Mei 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I Riau No.7/97 ttg Pembentukan Org. dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop.Dati I Riau.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
76	No. 76 Tahun 1998 5 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Irian Jaya No.5 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
77	No. 77 Tahun 1998 5 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Irian Jaya No.7 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.	L L : 2 hal	
78	No. 78 Tahun 1998 5 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Irian Jaya No.8 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.	L L : 2 hal	
79	No. 79 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sumut No.14 Th.1997 Ttg Pembentukan OTK Dinas Pemuda dan Olah Raga Prop. Dati I Sumut.	L L : 2 hal	
80	No. 80 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Tengah No. 8 Th.1997 Ttg Organisasi & Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Sulteng.	L L : 3 hal	
81	No. 81 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Sulawesi Utara No. 10 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah Prop. Dati I Sulut.	L L : 4 hal	
82	No. 82 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Bengkulu No.10 Th.1997 ttg Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 3 hal	
83	No. 83 Tahun 1998 8 Mei 1998	Pengesahan Perda Prop.Dati I Irja No.6 Th.1997 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prop. Dati I Irja.	L L : 4 hal	
84	No. 84 Tahun 1998 13 Mei 1998	Pedoman Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan di Lingkungan Dep. Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 237 - 248	
85	No. 85 Tahun 1998 18 Mei 1998	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Jabar No.3 Th.1998 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Dati I Jawa Barat.	L L : 3 hal	
86	No. 86 Tahun 1998 1 Juni 1998	Pencabutan Kepmendagri No.30 Th.1991 ttg Sumbangan Sebagai Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemda Tk. II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 249 - 250	
87	No. 87 Tahun 1998 10 Juni 1998	Pengesahan Perda Prov. Dati I Riau No.10 Th.1997 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya Batam.	L L : 3 hal	
88	No. 88 Tahun 1998 18 Juni 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.9 Th.1997 ttg Organisasi dan Tatakerja Dinas Olah Raga DKI Jakarta.	L L : 17 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
89	No. 89 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.17/1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Dan Pengajaran DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
90	No. 90 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.16 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Banjarbaru.	L L : 2 hal	
91	No. 91 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Selatan No.19 Th.1998 Ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Bapedalda.	L L : 4 hal	
92	No. 92 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.7 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I NTT.	L L : 5 hal	
93	No. 93 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumbar No.10 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Sumbar.	L L : 5 hal	
94	No. 94 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.9 Th.1997 Ttg Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop.Daerah Tk.I Jawa Timur.	L L : 4 hal	
95	No. 95 Tahun 1998 19 Juni 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.15 Th.1997 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 5 hal	
96	No. 96 Tahun 1998 23 Juni 1998	Peningkatan Pola Organisasi Kota Administratip Banjar Baru dan Kota Administratip Dili dari Minimal Menjadi Maksimal.	L L : 2 hal Lamp.: 2 hal	
97	No. 97 Tahun 1998 23 Juni 1998	Penetapan Pola Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Sorong.	L L : 2 hal Lamp.: 2 hal	
98	No. 98 Tahun 1998 12 Juli 1998	Pelaksanaan Akutansi Keuangan Daerah Berdasarkan Sistim Akuntansi dan Pengendalian Anggaran.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 251 - 258	
99	No. 99 Tahun 1998 7 Juli 1998	Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tk.I Jambi dan Timor Timur.	L L : 3 hal	
100	No.100 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No.4 Th.1998 Ttg Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 5 hal	
101	No.101 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No.1 Th.1998 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Kalbar.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
102	No.102 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Tengah No.15 Th.1997 Ttg Pembentukan, Organisasi & Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Kalimantan Tengah.	L L : 4 hal	
103	No.103 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Selatan No.1 Th.1998 Ttg Pembentukan Organisasi & Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Kalimantan Selatan.	L L : 8 hal	
104	No.104 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Timur No.01 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi & Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Kalimantan Timur.	L L : 5 hal	
105	No.105 Tahun 1998 3 Agustus 1998	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 259 - 262	
106	No.106 Tahun 1998 23 Juli 1998 No.NBK/02/P/VII/1998 No.M.42-PR.09.03 Th.'98 No.SK.108/Po/VII/1998/01 No.21/KEP/MEMPERTA/ VII/1998 No.KEP-065/JA/7/1998	Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, Jaksa Agung Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tgl 13 - 15 Mei 1998.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 263 - 272	
107	No.107 Tahun 1998 23 Juli 1998	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.5 Th.' 98 Ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta.	L L : 7 hal	
108	No.108 Tahun 1998 23 Juli 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.2 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi & Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Sulsel.	L L : 8 hal	
109	No.109 Tahun 1998 24 Juli 1998	Analisis Jabatan di Jajaran Depdagri	HPPU-DDN 1998 Hal.: 273 - 280	Dicabut dg Permen No.4 Th.2005
110	No.110 Tahun 1998 29 Juli 1998	Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 281 - 330	
111	No.111 Tahun 1998 11 Agustus 1998	Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 331 - 336	
112	No.112 Tahun 1998 19 Agustus 1998	Biaya Penunjang Pendidikan Kader Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati.I TA. 1998/1999.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 337 - 340	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
113	No.113 Tahun 1998 19 Agustus 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Maluku No.15 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati.I Maluku.	L L : 3 hal	
114	No.114 Tahun 1998 19 Agustus 1998	Pedoman Pelaksanaan Urusan Pembangunan Masyarakat Desa Yang Diserahkan Kepada Dati II Percontohan.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 341 - 356	
115	No.115 Tahun 1998 19 Agustus 1998	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 357 - 362	Dicabut dg KMDN No.48 Th.2001
116	No.116 Tahun 1998 24 Agustus 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Tengah No.8 Th.1997 ttg Pembentukan Organisasi & tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 6 hal	
117	No.117 Tahun 1998 19 Agustus 1998	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Berwawasan Jender Bagi Aparat Perencana di Lingkungan Depdagri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 363 - 366	
118	No.118 Tahun 1998 24 Agustus 1998	Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Planetorium & Observatorium Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 8 hal Lamp. : 1 hal	
119	No.119 Tahun 1998 25 Agustus 1998	Ruang Lingkup & Jenis-jenis Retribusi Dati I dan Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 367 - 376	
120	No.120 Tahun 1998 3 September 1998	Pengesahan Perda Prop. DI Yogyakarta No.2 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. DI Yogyakarta.	L L : 3 hal	
121	No.121 Tahun 1998 3 September 1998	Pengesahan Perda Prop. DI Yogyakarta No. 5 Th.1998 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. DI Yogyakarta.	L L : 2 hal	
122	No.122 Tahun 1998 3 September 1998	Pengesahan Perda Prop. DI Yogyakarta No.6 Th.1998 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebudayaan Prop. DI Yogyakarta.	L L : 2 hal	
123	No.123 Tahun 1998 3 September 1998	Pengesahan Perda Prop. DI Yogyakarta No.7 Th.1998 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas ..... Prop. DI Yogyakarta.	L L : 2 hal	
124	No.124 Tahun 1998 22 September 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumatera Utara No.2 Th.1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prop. Dati I Sumatera Utara.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
125	No.125 Tahun 1998 23 September 1998	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Sosial Politik Bagi Pejabat di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 377 - 380	
126	No.126 Tahun 1998 1 Oktober 1998 No.174 Th.1998	Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri Dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tentang Program Pramuka Peduli Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 381 - 384	
127	No.127 Tahun 1998 12 Oktober 1998	Peningkatan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 385 - 386	
128	No.128 Tahun 1998 19 Oktober 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.6 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Takerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Dati I Jambi.	L L : 4 hal	
129	No.129 Tahun 1998 19 Oktober 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jateng No.3 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Takerja Bapedalda Dati I Jawa Tengah.	L L : 7 hal	
130	No.130 Tahun 1998 22 Oktober 1998	Pedoman Penerbitan di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 387 - 390	
131	No.131 Tahun 1998 28 Oktober 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.6 Th.1998 ttg Pembentukan Org. dan Takerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Dati I Kalteng.	L L : 2 hal	
132	No.132 Tahun 1998 28 Oktober 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.3 Th.1998 ttg Pembentukan Organisasi dan Takerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Sulawesi Tengah.	L L : 5 hal	
133	No.133 Tahun 1998 2 Nopember 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.05 Th.1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Takerja Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djati Bowo Balikpapan.	L L : 3 hal	
134	No.134 Tahun 1998 10 Nopember 1998	Pedoman Penyusunan Perda ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I & Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 391 - 420	Dicabut dg Permen No.47 Th.2012
135	No.135 Tahun 1998 10 Nopember 1998	Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh di Jajaran Departemen Dalam Negeri	HPPU-DDN 1998 Hal.: 421 - 426	
136	No.136 Tahun 1998 12 Nopember 1998	Pembentukan 10 (sepuluh) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dati II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 427 - 432	
137	No.137 Tahun 1998 16 Nopember 1998	Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 433 - 436	
138	No.138 Tahun 1998 23 Nopember 1998	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara No. 9 Tahun 1998 ttg Organisasi dan Takerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Dati I Sulawesi Utara.	L L : 6 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
139	No.139 Tahun 1998 1 Desember 1998	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 6 hal Lamp : 2	
140	No.140 Tahun 1998 1 Desember 1998	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Balai Pengujian Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.		
141	No.141 Tahun 1998 3 Desember 1998	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Sulawesi Utara No. 8 Tahun 1998 ttg Organisasi dan tata kerja Rumah sakit Umum Noongan Propinsi Dati I Sulut.	L L : 3 hal	
142	No.142 Tahun 1998 7 Desember 1998	Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Arsip DKI Jakarta	L L : 10 hal Lamp : 1	
143	No.143 Tahun 1998 13 Desember 1998	SKB Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri ttg Pembinaan dan Pengembangan Klinik Konsultasi Bisnis di Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 437 - 442	
144	No.144 Tahun 1998 21 Desember 1998	Pengesahan Perda Prop. Dati. I Jateng No. 2 Th.1998 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Perindustrian Prop. Dati.I Jateng		
145	No.145 Tahun 1998 21 Desember 1998	Pengesahan Perda Prop. DIY No.11 Th.1998 ttg Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sermo pada Dinas PU Prop. DIY		
146	No.146 Tahun 1998 21 Desember 1998	Pengesahan Perda Prop. DI. Yogyakarta No.12 Th.1998 ttg Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sermo pada Dinas PU Prop. DIY	L L : 2	
147	No.147 Tahun 1998 21 Desember 1998	Komponen Penetapan tarif Retribusi	HPPU-DDN 1998 Hal.: 443 - 452	Dicabut dg KMDN No.245 Th.2004
148	No.148 Tahun 1998 28 Desember 1998	Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 453 - 458	
149	No.149 Tahun 1998 28 Desember 1998	Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan di jajaran Depdagri	HPPU-DDN 1998 Hal.: 459 - 472	
150	No.150 Tahun 1998 28 Desember 1998	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Dati II.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 473 - 492	
151	No.151 Tahun 1998 28 Desember 1998	Kriteria Penetapan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II	HPPU-DDN 1998 Hal.: 493 - 500	
151A	No.151A Tahun 1998 28 Desember 1998 2002 K/20/MPE/98 23/SKB/M/XII/98	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui usaha Pertambangan Skala Kecil.	HPPU-DDN 1998 Hal.: 501 - 510	
152	No.152 Tahun 1998 31 Desember 1998	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	HPPU-DDN 1998 Hal.: 511 - 528	Dicabut dg KMDN No.75 Th.1999

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>INMENDAGRI</b>			
1.	No. 1 Tahun 1998 5 Januari 1998	Pedoman Penyusunan APBD TA.1998/1999	L L : 85 hal	
2.	No. 2 Tahun 1998 5 Pebruari 1998	Perubahan Inmendagri No.23 Th.1997 ttg Percepatan Pembangunan dan Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.	L L : 3 hal Lamp. : 36 Hal.	
3.	No. 3 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Siskomdagri.	L L : 100 hal	
4.	No. 4 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Petunjuk Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Air Perusahaan Daerah Air Minum.	L L : 4 hal Lamp. : 7 hal.	
5.	No. 5 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pembentukan Panitia Penilai Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Nugraha Pelita VI Tingkat Propinsi Dati I.	L L : 3 hal	
6.	No. 6 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan di Daerah.	L L : 4 hal Lamp. : 13 hal.	
7.	No. 7 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Pembinaan Umum Badan Amal, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS)	L L : 3 hal	
8.	No. 8 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.	L L : 3 hal Lamp. : 24 hal.	
9.	No. 9 Tahun 1998 23 Maret 1998	Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang Barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Dati I dan Dati II/Pulau.	L L : 2 hal.	
10.	No. 10 Tahun 1998 23 Maret 1998	Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tk.II ttg Pajak daerah dan Retribusi Daerah.	L L : 2 hal. Lamp. : 5 hal.	
11.	No. 11 Tahun 1998 29 April 1998	Petunjuk Pelaksanaan PP No.7 Th.1998 ttg Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Tapanuli Tengah dari Wilayah Kotamadya Dati II Sibolga ke Kota Pandan di Wilayah Kec. Sibolga Kab. Dati II Tapanuli Tengah.	L L : 4 hal. Lamp. : 6 hal.	
12.	No. 12 Tahun 1998 29 April 1998	Petunjuk Pelaksanaan PP No.8 Th.1998 ttg Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Agam dari Wilayah Kotamadya Dati II Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kec. Lubuk Basung Kab. Dati II Agam	L L : 4 hal. Lamp. : 6 hal.	
13.	No. 13 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pemasyarakatan Hasil Sidang Umum MPR-RI Th.1998 bagi Aparatur Pemerintah di Jajaran Depdagri	L L : 4 hal. Lamp. : 9 hal.	
14.	No. 14 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pembinaan Pengelolaan Situ-situ di Wilayah Jabotabek	L L : 4 hal. Lamp. : 6 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15.	No. 15 Tahun 1998 1 Juli 1998	Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.3 Th.1997 ttg Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah	L L : 3 hal. Lamp. : 5 hal.	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
16.	No. 16 Tahun 1998 8 Juli 1998	Pelaksanaan Kepmendagri No.300 Th.1982 ttg Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Depdagri yang telah diubah dengan Kepmendagri No.97 Th.1990	L L : 3 hal. Lamp. : 2 hal.	
17.	No. 17 Tahun 1998 27 Juli 1998 No.81/MEN/1998	Inst. Bersama Mentrans & Mendagri Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi & Pemukiman Perambah Hutan & Mendagri No.SK B 11/MEN/1997 dan No.18 Th.1997 ttg Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Desa Transmigrasi.	L L : 3 hal. Lamp. : 19 hal.	
18.	No. 18 Tahun 1998 24 Agustus 1998	Petunjuk Pelaksanaan PP No.65 Th.1998 ttg Pindahan Ibukota Kab. Dati II Ngada dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa	L L : 4 hal. Lamp. : 6 hal.	
19.	No. 19 Tahun 1998 24 Agustus 1998	Petunjuk Pelaksanaan PP No.66 Th.1998 ttg Pindahan Ibukota Kab. Dati II Sukabumi dari Wil. Kotamadya Dati II Sukabumi ke Kota Pelabuhan Ratu di Wil. Kec.Pelabuhan Ratu.	L L : 4 hal. Lamp. : 7 hal.	
20.	No. 20 Tahun 1998 2 September 1998	Penghapusan Surat Persetujuan Prinsip dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.	L L : 2 hal.	
21.	No. 21 Tahun 1998 24 September 1998	Petunjuk Pelaks. KMDN No.125 Th.1998 ttg Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Sosial Politik bagi Pejabat di jajaran Depdagri.	L L : 2 hal.	
22.	No. 22 Tahun 1998 2 Oktober 1998	Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.	L L : 2 hal. Lamp. : 20 Hal.	
23.	No. 23 Tahun 1998 4 Oktober 1998	Pembentukan Tim Pangan dan Gizi di Daerah.	L L : 21 hal.	
24.	No. 24 Tahun 1998 10 Nopember 1998	Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa	L L : 2 hal. Lamp. : 5 hal.	
25.	No. 25 Tahun 1998 27 Nopember 1998	Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah Desa	L L : 3 hal.	
26.	No. 26 Tahun 1998 11 Desember 1998	Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	L L : 5 hal. Lamp. : 15 Hal.	
27.	No. 27 Tahun 1998 14 Desember 1998	Pelaksanaan PP No.77 Th.1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima.	L L : 6 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28.	No. 28 Tahun 1998 29 Desember 1998	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.149 Th.1998 tentang Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan di Jajaran DDN	L L : 2 hal. Lamp. : 24 hal.	
<b>TAHUN 1999</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No.1 Tahun 1999 14 Januari 1999	Perubahan atas Permendagri No.8 Th.1992 ttg Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan UU No.7 Th.1992 tentang Perbankan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 1 - 3	
2.	No.2 Tahun 1999 2 Maret 1999	Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Th.1974 ttg Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekretaris Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 4 - 6	
3.	No.3 Tahun 1999 22 Maret 1999	Pencabutan Permendagri No.1 Th.1979 ttg Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 7 - 9	
4.	No.4 Tahun 1999	Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan UU No.5 Th.1979 ttg Pemerintahan Desa.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 10 - 16	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1999 11 Januari 1999 No.KM.1/KS001/MPSB-99 No.001/01/1999	Kep. Bersama Menteri Pariwisata, Seni & Budaya, Menteri Pendidikan & Kebudayaan & Menteri Dalam Negeri Ttg Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 17 - 26	
2	No.2 Tahun 1999 3 Pebruari 1999	Tata Cara Pemungutan dan Pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 27 - 33	
3	No. 3 Tahun 1999 3 Pebruari 1999	Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 34 - 48	
4	No. 4 Tahun 1999 11 Pebruari 1999	Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Koja Pasar Rebo & Tarakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 3 hal	
5	No. 5 Tahun 1999 11 Pebruari 1999	Jabatan Struktural Eselon Dua Ke Bawah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 49 - 58	Diubah dg KMDN No.67 Th.1999 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
6	No. 6 Tahun 1999 11 Pebruari 1999	Pendelegasian Wewenang Pemberian Dan Penolakan Izin Menjadi Anggota Partai Politik, Bagi PNS Di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 59 - 62	
7	No. 7 Tahun 1999 2 Maret 1999	Perubahan Kepmendagri No. 156 Th.1995 ttg Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 63 - 66	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No. 8 Tahun 1999 2 Maret 1999	Pengangkatan & Pemberhentian Sekretaris Wilayah/Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 67 - 71	
9	No. 9 Tahun 1999 2 Maret 1999	Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Th.1999 Ttg Upaya Menyukkseskan Pemilu 9 Juni 1999.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 72 - 73	
10	No. 10 Tahun 1999 3 Maret 1999	Pakaian Dinas Dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja.		dicabut dg Permen No.35 Th.2005
11	No. 11 Tahun 1999 3 Maret 1999	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Per-UU-an di Jajaran Depdagri.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 74 - 77	
12	No. 12 Tahun 1999 5 Maret 1999	Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 78 - 91	
13	No. 13 Tahun 1999 8 Maret 1999	Pengesahan Perda Prov. DIY No.14 Th.1998 ttg Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah Prop. DI Yogyakarta.	L L : 3 hal	
14	No. 14 Tahun 1999 8 Maret 1999	Pengesahan Perda Prov. D.I Yogyakarta No.15 Th.1998 ttg Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. DI Yogyakarta.	L L : 3 hal	
15	No. 15 Tahun 1999 8 Maret 1999	Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 92 - 97	
16	No. 16 Tahun 1999 22 Maret 1999	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th. 1999.	L L : 5 hal	Dicabut dg KMDN No.1 Th.2000
17	No. 17 Tahun 1999 23 Maret 1999	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati.I Jatim No.10 Th.1998 Ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Timur No.23 Th.1994 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Pengairan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur.	LL : 4 hal Lamp. : 2 hal	
18	No. 18 Tahun 1999 23 Maret 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No. 9 Tahun 1998 Ttg Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 2 hal	
19	No. 19 Tahun 1999 24 Maret 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jawa Timur No. 8 Tahun 1998 Ttg Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Daerah Kediri Prop. Dati I Jawa Timur.	L L : 2 hal	
20	No. 20 Tahun 1999 24 Maret 1999	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Umum.	L L : 28 hal	
21	No. 21 Tahun 1999 24 Maret 1999	Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri	HPPU-DDN 1999 Hal.: 98 - 103	Dicabut dg KMDN No.168 Th.2004
22	No. 22 Tahun 1999 24 Maret 1999	Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.	L L : 6 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No. 23 Tahun 1999 7 April 1999	Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dati II	HPPU-DDN 1999 Hal.: 104 - 108	
24	No. 24 Tahun 1999 7 April 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Maluku No. 20 Tahun 1998 Ttg Organisasi & Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingk.Daerah (BAPEDALDA) Prop. Dati I Maluku.	L L : 3 hal	
25	No. 25 Tahun 1999 12 April 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 1998 Ttg Organisasi & Tata Kerja RSUD Uli Banjarmasin.	L L : 3 hal.	
26	No. 26 Tahun 1999 12 April 1999	Data Jumlah Penduduk Desa / Kelurahan Di Seluruh Indonesia.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 109 - 110	
27	No. 27 Tahun 1999 14 April 1999	Pengesahan PERDA Prop. DI Yogyakarta No. 16 Tahun 1998 Ttg Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo Pd Dinas PU Prop.DI Yogyakarta.	L L : 2 hal.	
28	No. 28 Tahun 1999 14 April 1999	Pengesahan PERDA Prop. DI Yogyakarta No.17 Tahun 1998 Ttg Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wil. Sungai Progo Opak Oyo Pada Dinas PU Prop. DIY.	L L : 2 hal.	
29	No. 29 Tahun 1999 14 April 1999	Penyusunan Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 111 - 115	
30	No.30 Tahun 1999 19 April 1999	Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingk. Pemerintah Daerah	HPPU-DDN 1999 Hal.: 116 - 127	
31	No.31 Tahun 1999 19 April 1999	Pelantikan Dan Sumpah / Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingk. Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 128 - 138	Dicabut dg Kepmen No.6 Th.2003
32	No.32 Tahun 1999 19 April 1999	Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 139 - 144	
33	No. 33 Tahun 1999 29 April 1999	Pengesahan PERDA Prop. Daerah Tingkat I Maluku No. 21 Th.1998 Ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektroni Prop. Dati I Maluku.	L L : 5 Hal	
34	No. 34 Tahun 1999 21 April 1999	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.13/1998 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Margasatwa Ragunan DKI Jakarta.	L L : 4 hal	
34A	No.34A Thn.1999 26 April 1999 No.148a/KMK.03/1999	Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 145 - 152	
35	No. 35 Tahun 1999 21 April 1999	Pedoman Pembentukan Org. dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 153 - 161	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36	No. 36 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.22 Th. 1997 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratip Lhokseumawe dan Langsa.	L L.: 4 hal	
37	No. 37 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Timor Timur No.13 Th.1999 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratip Dili.	L L.: 7 hal	Tidak berlaku lagi
38	No. 38 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan No.195 Th.' 97 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratip Watampone.	L L.: 3 hal	
39	No. 39 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Kep. Gubernur KDH Tk.I Sultra No.609 Th.98 Ttg Organisasi & Tatakerja Pemerintah Kota Administratip Bau - Bau.	L L.: 3 hal	
40	No. 40 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah No.3 Th. 1999 Ttg Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Kota Cilacap, Kotip Purwokerto dan Kotip. Klaten.	L L.: 4 hal	
41	No. 41 Tahun 1999 5 Mei 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Jateng No.1 Th.1999 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Prop. Dati I Jawa Tengah	L L : 2 hal	
42	No. 42 Tahun 1999 17 Mei 1999	Pencabutan KMDN No.239 Th.1980 ttg Organisasi & Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dati I dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 162 - 164	
43	No. 43 Tahun 1999 17 Mei 1999	Sistim Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 165 - 226	
44	No. 44 Tahun 1999 17 Mei 1999	SKB Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri PU, Menteri Pertanian & Menteri Dalam Negeri Ttg Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air melalui Koperasi.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 227 - 231	
45	No. 45 Tahun 1999 17 Mei 1999 No.03/SKB/M/V/99	SKB Mendagri dan Menteri Koperasi Pengusahaan Kecil dan Menengah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 232 - 237	
46	No. 46 Tahun 1999 18 Mei 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Sulawesi Tenggara No.6 Th.1996 Ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Sultra.	L L : 4 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No. 47 Tahun 1999 31 Mei 1999	Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 238 - 251	
48	No. 48 Tahun 1999 4 Juni 1999	Persiapan dan Implementasi UU No.22 / ' 99 Ttg Pemerintahan Daerah dan UU No.25 / 99 Ttg Keuangan Pusat dan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 252 - 262	
49	No. 49 Tahun 1999 4 Juni 1999	Pembentukan tim Persiapan & Implementasi UU No.22/99 ttg Pemerintahan Daerah & UU No.25 / 99 ttg Keuangan Pusat dan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 263 - 275	
50	No. 50 Tahun 1999 8 Juni 1999	Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah	HPPU-DDN 1999 Hal.: 276 - 288	
51	No. 51 Tahun 1999 14 Juni 1999	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTB No. 14 Th. 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Bima.	L L.: 4 hal	
52	No. 52 Tahun 1999 14 Juni 1999	Pengesahan Kep.Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara No.061/008/K/ Th.1999, No.061/009/K/Th.1999 dan No.061/010/K/ Th.1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotip. Padang Sidempuan, Kotip. Rantau Prapat & Kotip. Kisaran.	L L.: 5 hal	
53	No. 53 Tahun 1999 29 Juni 1999	Pemberlakuan Peraturan Per-UU-an yg Mengatur Mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 289 - 290	Dicabut dg KMDN No.74 Th.1999
54	No. 54 Tahun 1999 29 Juni 1999	Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 291 - 304	Dicabut dg Kepmen No.56 Th.2001 & No.38 Th.2005
55	No. 55 Tahun 1999 22 Juli 1999	Pengucapan Sumpah / Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 305 - 306	Dicabut dg KMDN No.3 Th.2000
56	No. 56 Tahun 1999 22 Juli 1999	Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah Dengan Menggunakan Sestim Informasi Manajemen Barang Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 307 - 312	Dicabut dg KMDN No.49 Th.2001
57	No. 57 Tahun 1999 23 Juli 1999	Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah	HPPU-DDN 1999 Hal.: 313 - 315	Dicabut dg KMDN No.74 Th.1999
58	No. 58 Tahun 1999 27 Juli 1999	Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 316 - 341	
59	No. 59 Tahun 1999 2 Agustus 1999	Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD	HPPU-DDN 1999 Hal.: 342 - 354	Dicabut dg PP No.25 Th.2004
60	No. 60 Tahun 1999 18 Agustus 1999	Pengesahan PERDA Prop.Dati I Timor Timur No.01 Th.1999 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 6 hal	Tidak Berlaku lagi

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
61	No. 61 Tahun 1999 18 Agustus 1999	Pendelegasian Wewenang Pemberhentian Dari Jabatan Pegawai Negeri, Pemberian Uang Tunggu Bagi Pegawai Negeri Sipil yg Menjadi Anggota Partai Politik & Pengaktifan Kembali sebagai PNS yg Telah Melepaskan Keanggotaannya Dari Partai Politik Di Lingk. Kantor Pusat DEPDAGRI dan Pemerintah	HPPU-DDN 1999 Hal.: 355 - 358	
62	No. 62 Tahun 1999 2 September 1999	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 359 - 368	
63	No. 63 Tahun 1999 6 September 1999	Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 369 - 374	
64	No. 64 Tahun 1999 6 September 1999	Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa	HPPU-DDN 1999 Hal.: 375 - 399	
65	No. 65 Tahun 1999 6 September 1999	Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 400 - 405	Dicabut dg Permen No.31 Th.2006
66	No. 66 Tahun 1999 15 September 1999	Pengesahan PERDA Prop. Dati I Kalsel No.5 Th.1999 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Daerah Prov. Dati I Kalimantan Selatan.	L L : 2 hal	
67	No. 67 Tahun 1999 30 September 1999	Perubahan Kepmendagri No.5 Th.1999 Ttg Jabatan Struktural Eselon Dua Ke Bawah Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 406 - 422	
68	No. 68 Tahun 1999 2 Agustus 1999	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.		
69	No. 69 Tahun 1999 30 September 1999	Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Jajaran Depdagri dan Pemerintah Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 423 - 442	
70	No. 70 Tahun 1999 30 September 1999 Kep-235/MEN/1999	Pencabutan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri.	L L : 3 hal	
71	No. 71 Tahun 1999 30 September 1999	Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 443 - 449	
72	No. 72 Tahun 1999 30 September 1999	Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 450 - 456	
73	No. 73 Tahun 1999 30 September 1999	Pedoman Penyelenggaraan Perpikiran di Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 457 - 463	
74	No. 74 Tahun 1999 24 Nopember 1999	Pencabutan KEPMENDAGRI No.53 Th.1999 Ttg Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah serta Kepmendagri No.57 Th.1999 Ttg Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 464 - 465	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
75	No. 75 Tahun 1999 23 Desember 1999	Data Wilayah Administrasi Pemerintah.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 466 - 467	Dicabut dg KMDN No.42 Th.2000
76	No. 76 Tahun 1999 24 Desember 1999	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Th.1999/2000	HPPU-DDN 1999 Hal.: 468 - 472	
<b>77</b>	<b>No. 77 s/d 98</b>	<b>K O S O N G</b>		
99	No. 99 Tahun 1999 29 Desember 1999	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri	L L : 125 hal	Dicabut dg KMDN No.1 Th.2001
-	No.892.22.68 Th.1999	Pengangkatan dan Penguukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN	L L : 3 hal	
-	No.061/2743/SJ Th.1999	Sebutan-sebutan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.	L L : 3 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 1999 12 Januari 1999	Upaya Menyukkseskan Pemilu 9 Juni Th.1999	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.9 Th.1999
2.	No. 2 Tahun 1999 25 Januari 1999	Penerimaan dan Penggunaan Dana Partisipasi Praja dalam Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri	HPPU-DDN 1999 Hal.: 473 - 476	
3.	No. 3 Tahun 1999 26 Januari 1999	Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak	HPPU-DDN 1999 Hal.: 477 - 485	
4.	No. 4 Tahun 1999 11 Pebruari 1999	Pedoman Penyusunan APBD TA.1999/2000	HPPU-DDN 1999 Hal.: 486 - 489	
5.	No. 5 Tahun 1999 3 Maret 1999	Upaya Menyukkseskan Pemilu 7 Juni 1999	HPPU-DDN 1999 Hal.: 490 - 491	
6.	No. 6 Tahun 1999 5 Maret 1999	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.11 Th.1999 ttg Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Per-UU-an di Jajaran Depdagri	HPPU-DDN 1999 Hal.: 492 - 505	
7.	No. 7 Tahun 1999 17 Maret 1999	Tugas Pertahanan Sipil Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Th.1999 (batal/diganti Inmendagri No.11 Th.1999)	L L : 4 hal	
8.	No. 8 Tahun 1999 22 Maret 1999	Petunjuk Pelaks. Kepmendagri No.130/1998 ttg Pedoman Penerbitan di Jajaran Depdagri	HPPU-DDN 1999 Hal.: 506 - 512	
9.	No. 9 Tahun 1999 8 April 1999	Petunjuk Pelaksanaan PP No.82 Th.1998 ttg Pindahan Ibukota Kab. Dati II Bekasi	HPPU-DDN 1999 Hal.: 513 - 521	
10.	No. 10 Tahun 1999	Batal/Kosong		
11.	No. 11 Tahun 1999 8 April 1999	Tugas Pertahanan Sipil dalam Pengamanan Penyelenggraan Pemilihan Umum Th.1999	HPPU-DDN 1999 Hal.: 522 - 538	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12.	No. 12 Tahun 1999 15 April 1999	Petunjuk Pelaks. KMDN No.29 Th.1999 ttg Penyusunan Laporan Kualitas SDA dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 539 - 587	
13.	No. 13 Tahun 1999 16 April 1999	Instruksi Bersama Petunjuk Pelaks. Kepber Mendagri dg Mendikbud No.111 Th.1998 No.198/V/1998 ttg Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang Pembangunan Masyarakat Desa.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 588 - 602	
14.	No. 14 Tahun 1999 16 April 1999	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 603 - 605	
15.	No. 15 Tahun 1999 30 April 1999	Alokasi Penyertaan Modal Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dati II pada Yayasan Purna Bhakti.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 606 - 609	
16.	No. 16 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.9 Th.1999 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Banjarbaru.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 610 - 616	
17.	No. 17 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.10 Th.1999 ttg Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang.	L L : 3 hal Lamp. : 7 hal.	
18.	No. 18 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.11 Th.1999 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Ternate.	L L : 3 hal Lamp. : 5 hal.	
19.	No. 19 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaks. UU No.12 Th.1999 ttg Pembentukan Kab. Dati II Way Kanan, Kab. Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro.	L L : 3 hal Lamp. : 9 hal.	
20.	No. 20 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.13 Th.1999 ttg Pembentukan Kab. Dati II Luwu Timur.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 617 - 626	
21.	No. 21 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.14 Th.1999 ttg Pembentukan Kab. Dati II Aceh Singkil.	L L : 3 hal Lamp. : 6 hal.	
22.	No. 22 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.15 Th.1999 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan Kotamadya Dati II Cilegon.	L L : 3 hal Lamp. : 6 hal.	
23.	No. 23 Tahun 1999 5 Mei 1999	Petunjuk Pelaksanaan UU No.16 Th.1999 ttg Pembentukan Kotamadya Dati II Dumai.	L L : 3 hal Lamp. : 6 hal.	
24.	No. 24 Tahun 1999 17 Mei 1999	Langkah <sup>2</sup> Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum pada Masa Krisis.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 627 - 630	
25.	No. 25 Tahun 1999 26 Mei 1999	Petunjuk Pelaks. Permendagri No.7 Th.1998 ttg Kepengurusan Perusahaan Air Minum.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 631 - 638	
26.	No. 26 Tahun 1999 2 Agustus 1999	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keaggotaan dan Pimpinan DPRD	HPPU-DDN 1999 Hal.: 639 - 661	
27.	No. 27 Tahun 1999 23 Agustus 1999	Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Dati.II Oleh DPRD Kabupaten/ Kotamadya Dati.II Hasil Pemilu 1999.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 662 - 667	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28.	No. 28 Tahun 1999 27 September 1999	Penertiban Administrasi Inventaris Barang Milik Negara di Lingk. Kantor Pusat Depdagri.	HPPU-DDN 1999 Hal.: 668 - 670	
29-30		Kosong/Batal		
31.	No. 31 Tahun 1999 14 Oktober 1999	Petunjuk Pelaksanaan PP No.70 Th.1999 ttg Pemindahan Ibukota Daerah Kab. Simalungun dari Wilayah daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.	L L : 2 hal Lamp.: 4 Hal.	
32.	No. 32 Tahun 1999 14 Oktober 1999	Petunjuk Pelaksanaan PP No.71 Th.1999 ttg Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah daerah daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala.	L L : 2 hal Lamp.: 5 Hal.	
33	No. 33 Tahun 1999 29 Nopember 1999	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.84 Th.1999 ttg Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam.	L L : 5 hal	
<b>TAHUN 2000</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No. 1 Tahun 2000 25 Januari 2000	Pencabutan Permendagri No.2 Th.1993 ttg Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Permendagri No.138-210 Th.1982 ttg Tata Cara Pembentukan Kec. & Perwakilan Kec.	L L : 2 hal	
2.	No. 2 Tahun 2000 27 Juli 2000	Pencabutan Permendagri No.4 Th.1993 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat	L L : 2 hal	
3.	No. 3 Tahun 2000 4 September 2000	Pencabutan Permendagri No.1 Th.1997 ttg Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.	L L : 2 hal	
4	No. 4 Tahun 2000 3 Nopember 2000	Pencabutan Permendagri No.4 Th.1990 ttg Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.	L L : 1 hal	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2000 14 Januari 2000	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000.	L L : 5 hal	Dicabut dg KMDN No.10 Th.2001
2	No.2 Tahun 2000 19 Januari 2000	Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 10 hal	
3	No. 3 Tahun 2000 20 Januari 2000	Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah & Kepala Wakil Kepala Kepala Daerah.	L L : 7 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 2000 26 Januari 2000	Pedoman Pembentukan Kecamatan	L L : 3 hal	
5	No. 5 Tahun 2000 31 Januari 2000	Perubahan atas Kepmendagri No.2 Th.2000 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 3 Hal	Dicabut dg KMDN No.10 Th.2001
6	No. 6 Tahun 2000 4 Pebruari 2000	Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Perubahan Undang <sup>2</sup> Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	L L : 3 Hal	
7	No. 7 Tahun 2000	Batal/Kosong		
8	No. 8 Tahun 2000 1 Maret 2000	Perubahan SK Mendagri No.950-176A /1999 ttg Penunjukan Pejabat yg ditugaskan sbg Ordonatur Dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Lanjutan Kesatrian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 3 Hal	
9	No. 9 Tahun 2000 1 Maret 2000	Perubahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.950 - 2 Th.1999 Ttg Pengangkatan Pejabat sbg Ordonatur, Pembantu Ordonatur dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Sistim Komunikasi Depdagri.	L L : 3 Hal	
10	No. 10 Tahun 2000 10 Mei 2000	Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.	L L : 211 Hal Lamp. : 51 hal	
11	No. 11 Tahun 2000	Batal/Kosong		
12	No. 12 Tahun 2000 15 Mei 2000	Organisasi & Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa.	L L : 7 Hal Lamp. : 2 hal	Dicabut dg Permen No.21 Th.2006 & No.49 Th.2012
13	No. 13 Tahun 2000 17 Mei 2000	Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	L L : 7 hal	
14	No. 14 Tahun 2000 25 Mei 2000	Pemberian Kuasa Kepada Pejabat-Pejabat di Lingk. Depdagri untuk & Atas Nama Mendagri Menanda tangani Surat Keputusan Salinan & Petikan Surat Kep. Mutasi di Bidang Kepegawaian kpd Presiden serta Formulir Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.	L L : 3 hal Lamp. : 6 hal	
15	No. 15 Tahun 2000 23 Mei 2000	Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.	L L : 8 Hal	
16	No. 16 Tahun 2000 24 Mei 2000	Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.30 Th.2005
17	No. 17 Tahun 2000 30 Mei 2000	Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	L L : 25 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 2000 8 Juni 2000	Perubahan Kepmendagri No. 5 Th.1999 Ttg Jabatan Struktural Eselon II ke Bawah di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah Pertama Kali dg Kepmendagri No.67 Th.1999.	L L : 2 hal	
19	No.19 Tahun 2000 16 Juni 2000	Pedoman Pemilihan Wakil-wakil Daerah sbg Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Drh.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.30 Th.2005
20	No.20 Tahun 2000 20 Juni 2000	Penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	L L : 8 hal	
21		Kosong		
22	No.22 Tahun 2000	<i>Surat Keputusan yg sifatnya perorangan</i>		
23	No.23 Tahun 2000	<i>Surat Keputusan yg sifatnya perorangan</i>		
24	No.24 Tahun 2000 3 Agustus 2000	Pengangkatan dan Penguahan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN	L L : 3 hal	
25	No.25 Tahun 2000 18 Juli 2000	Perubahan Kepmendagri No.99 Th.1999 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Depdagri.	L L : 3 hal	Dicabut dg Kepmen No.1 Th.2001
26	No.26 Tahun 2000 18 Juli 2000	Perubahan Jabatan Struktural Eselon II Ke Bawah Dlm Lamp. I Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Bbrp Kali Diubah Terakhir Dng Keppres No.38 Th.1996 dan Kepmendagri No.18 Th.2000.	L L : 4 hal	Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
27	No.27 Tahun 2000 18 Juli 2000	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.	L L : 9 hal Lamp. : 2 hal	
28	No.28 Tahun 2000	KOSONG		
29	No.29 Tahun 2000 27 Juli 2000	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah & Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk.	L L : 3 hal Lamp.: 11 hal	
30	No.30 Tahun 2000 27 Juli 2000	Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.22 Th.2006
31	No.31 Tahun 2000 27 Juli 2000	Pencabutan Kepmendagri No.60 Th.1995 Ttg Direksi & Dewan Pengawas Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, KMDN N0.85 Th.1995 Ttg Pegawai Perusahaan Drh Bank Perkreditaan Rakyat & Kepmendagri No.82 Th. ' 97 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat.	L L : 3 hal	
32	No.32 Tahun 2000 30 Agustus 2000	Petunjuk Pelaksanaan Impassing/ Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Depdagri.	L L : 5 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 2000	KOSONG		
34	No.34 Tahun 2000 4 September 2000	Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.	WPU.1992 L L : 6 hal (D1 - D2)	Dicabut dg Permen No.2 Th.2007
35	No.35 Tahun 2000 4 September 2000	Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD di Provinsi dan Kab./ Kota Yg Dibentuk Setelah Pemilu 1999.	WPU.1995 L L : 3 hal/Lamp.:35	
36	No.36 Tahun 2000 4 September 2000	Formulir Pengisian Keanggotaan DPRD Prov. dan Kabupaten/Kota Yang dibentuk Setelah Pemilu Th. 1999.	L L : 4 hal Lamp. : 56 hal	
37	No.37 Tahun 2000 4 September 2000	Bentuk dan Ukuran Cap Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yg Dibentuk Setelah Pemilu Th.1999.	WPU.1994 L L : 4 hal (D1 - D2)	
37A	No.37A Tahun 2000 September 2000	Pemberhentian Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)	L L :	Dicabut dg KMDN No.19 Th.2003
38	No.38 Tahun 2000 18 September 2000	Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Depdagri dan Otda serta Pemerintah Daerah.	Buku Implementasi UU No.22 Th. 1999	
39	No.39 Tahun 2000 9 Oktober 2000	Perubahan KEPMENDAGRI & OTDA No.35 Th.2000 Ttg Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD di Prov. & Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu Th. 1999 (Jambi)	L L : 4 hal	
39 A	No.39A Th. 2000 11 Nopember 2000	Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional & MENDAGRI dan Otonomi Daerah Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.	L L : 4 hal	
40	No.40 Tahun 2000 12 Nopember 2000	Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Otda & Pemerintah Daerah.	L L : 7 hal	Dicabut dg Permen No.33 Th.2007
41	No.41 Tahun 2000 11 Nopember 2000	Perubahan KEPMENDAGRI & OTDA No.35 Th.2000 Ttg Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD di Prov. & Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu Th. 1999. (Riau)	L L : 3 hal	
42	No.42 Tahun 2000 27 Nopember 2000	Data Jumlah Wilayah Pemerintahan dan Wilayah Kerja.	L L : 2 hal Lamp. : 27 hal	Dicabut dg KMDN No.13 Th.2001
43	No.43 Tahun 2000 6 Nopember 2000	Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.	L L : 6 hal	
44	No.44 Tahun 2000 6 Nopember 2000	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	L L : 29 hal Lamp. : 3 hal	Dicabut dg Permen No.22 Th.2006
45	No.45 Tahun 2000 6 Nopember 2000	Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	L L : 17 hal	Dicabut dg Permen No.22 Th.2006

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No.46 Tahun 2000 6 Nopember 2000	Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.	HPPU DDN 2000 Hal.: 372 - 375	Dicabut dg Permen No.22 Th.2006
47	No.47 Tahun 2000 7 Nopember 2000	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi.	L L : 8 hal Lamp.: 127 hal	Dicabut dg Permen No.2 Th.2005
48	No.48 Tahun 2000 7 Nopember 2000	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.	L L : 10 hal Lamp.: 144 hal	Dicabut dg Permen No.3 Th.2005
49	No.49 Tahun 2000	K O S O N G		
50	No.50 Tahun 2000 17 Nopember 2000	Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	2 Buku	
51	No.51 Tahun 2000 14 Desember 2000	Pedoman Penyelenggaraan Tata Usaha Bendaharawan Barang di Lingkungan Dep. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.	HPPU DDN 2000 Hal.: 359 - 371	
52	No.52 Tahun 2000 19 Desember 2000	Program Kerja Departemen Dalam Negeri	HPPU DDN 2000 Hal.: 372 - 375	
53	No.53 Tahun 2000 21 Desember 2000	Gerakan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga.	HPPU DDN 2000 Hal.: 376 - 384	Dicabut dg Permen No.1 Th.2013
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2000 1 Pebruari 2000	Intensifikasi Pemungutan & Penyetoran pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan Nilai (PPN) & pajak penjualan atas barang mewah (PPN-BM) yg dipungut oleh Bendaharawan Daerah & Pemegang Kas Daerah terhadap pelaksanaan APBD.	HPPU DDN 2000 Hal.: 385 - 393	
2	No. 2 Tahun 2000 29 Mei 2000	Petunjuk Pelaksanaan (PO) Biaya Seminar Nasional Rakyat Irian Jaya (Papua) Th.2000 di Jakarta.	L L : 1 hal. Lamp. : 1 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2000 31 Mei 2000	Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh (Joint Understanding on Humanitarian Pouse Year Aceh).	HPPU DDN 2000 Hal.: 394 - 415	
4	No. 4 Tahun 2000 8 Agustus 2000	Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.	HPPU DDN 2000 Hal.: 416 - 431	
5	No. 5 Tahun 2000 25 Agustus 2000	Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis.	HPPU DDN 2000 Hal.: 432 - 435	
6	No. 6 Tahun 2000 25 September 2000	Petunjuk Operasional (P.O) Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri TA.2000	HPPU DDN 2000 Hal.: 436 - 438	
7.	No. 7 Tahun 2000 16 Nopember 2000	Petunjuk Operasional (PO) Dana Operasional Mendagri dan Otda Th.2000.	L L : 2 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 2001</b>			
	<b>PERMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 2001 29 Januari 2001	Pencabutan Permendagri No.7 Th.1997 ttg Pengelolaan Barang Daerah.	L L : 2 hal.	
	<b>KEPMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 2001 5 Januari 2001	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.	Buku : 300 hal	Dicabut dg KMDN No.40 Th.2001
2	No.2 Tahun 2001 5 Januari 2001	Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan.	L L : 18 hal	
3	No. 3 Tahun 2001 8 Januari 2001	Perpustakaan Desa / Kelurahan.	L L : 5 hal	
4	No. 4 Tahun 2001 8 Januari 2001	Penerapan Teknologi Tepat Guna.	L L : 4 hal	
5	No. 5 Tahun 2001 8 Januari 2001	Penanggulangan Pekerja Anak.	L L : 4 hal	Dicabut dg Permen No.6 Th.2009
6	No. 6 Tahun 2001 8 Januari 2001	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.	L L : 3 hal	
7	No. 7 Tahun 2001 8 Januari 2001	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan Kesetiaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.	L L : 3 hal	
8	No. 8 Tahun 2001 8 Januari 2001	Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa.	L L : 4 hal	
9	No. 9 Tahun 2001 8 Januari 2001	Kader Pemberdayaan Masyarakat.	L L : 4 hal	Dicabut dg Permen No.7 Th.2007
10	No. 10 Tahun 2001 17 Januari 2001	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001.	L L : 123 hal	Dicabut dg KMDN No.11 Th.2002
11	No. 11 Tahun 2001 1 Pebruari 2001	Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.	L L : 20 hal	Dicabut dg KMDN No.152 Th.2004
12	No. 12 Tahun 2001 28 Pebruari 2001	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah & Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kab./Kota yg dibentuk Setelah Pemilu 1999.	L L : 4 hal	
13	No. 13 Tahun 2001 27 Maret 2001	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 hal Lamp.: 1 buku	Dicabut dg KMDN No.5 Th.2002
14	No. 14 Tahun 2001 6 April 2001	Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan DEPDAGRI & OTDA.	L L : 7 hal Lamp. 18 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No. 15 Tahun 2001 1 Juni 2001	Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Istri Peserta Pendidikan dan Pelatihan SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II di Jajaran DDN dan OTDA.	L L : 4 hal Lamp. : 3 hal	
16	No. 16 Tahun 2001 27 Juni 2001	Perubahan Atas Kepmendagri & Otda No.2 Th. 2001 Ttg Organisasi dan Tata Kerja IIP.	L L : 9 hal Lamp. : 3 hal	
17	No. 17 Tahun 2001 12 Juli 2001	Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur.	L L : 3 hal	
18	No. 18 Tahun 2001 16 Juli 2001	Pedoman Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.	L L : 6 hal Lamp. : 49 hal	Dicabut dg Permen No.19 Th.2007
19	No.19 Tahun 2001 No.121/KP/VII/2001/01 No.M-01.UM.01.10 Th.2001 No.414/KMK.01/2001 No.144A/MEN/2001	SKB Mendagri & Otda, Menlu, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ttg Pembentukan Tim Penanggulangan Permasalahan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.	L L : 6 hal	
20	No.20 Tahun 2001 18 Juli 2001	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 3 hal	
21	No.21 Tahun 2001 18 Juli 2001	Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.	L L : 2 hal Lamp. : 32 hal	
22	No.22 Tahun 2001 18 Juli 2001	Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.	L L : 2 hal Lamp. : 15 hal	Dicabut dg Permen No.15 Th.2006
23	No.23 Tahun 2001 18 Juli 2001	Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.	L L : 5 hal	Dicabut dg Permen No.16 Th.2006
24	No.24 Tahun 2001 18 Juli 2001	Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.17 Th.2006
25	No.25 Tahun 2001 20 Juli 2001	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dep. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.	L L : 9 hal	Dicabut dg Permen No.1 Th.2005
26	No.26 Tahun 2001 20 Juli 2001	Perubahan Atas Kepmendagri dan Otda No.1 Th. 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otda.	L L : 9 hal Lamp. : 1	Diubah dg KMDN No.40 Th.2001 Dicabut dg KMDN No.130 Th.2003
27	No.27 Tahun 2001 20 Juli 2001	Rencana Strategis DEPDAGRI dan OTDA Tahun 2001 - 2004.	L L : 3 hal	Dicabut dg KMDN No.43 Th.2002
28	No.28 Tahun 2001 20 Juli 2001	Perubahan Kepmendagri No. 73 Th. 1993 Ttg Organisasi & Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 6 hal Lamp. : 1	
29	No.29 Tahun 2001 20 Juli 2001	Perubahan Atas Kepmendagri No.27 Th.2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.	L L : 3 hal Lamp. : 2	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No. 30 Tahun 2001 23 Juli 2001	Pedoman Pengajuan & Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.	L L : 5 hal	Dicabut dg Permen No.32 Th.2005
31	No.31 Tahun 2001 20 Juli 2001	Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Depdagri dan Otda.	L L : 4 hal	
32	No.32 Tahun 2001 10 September 2001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rutin dan Program Pembangunan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 hal Lamp. : 18 hal	
33	No.33 Tahun 2001 18 September 2001	Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 8 hal	
34	No.34 Tahun 2001 29 September 2001	Pengaman Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasian.	L L : 10 hal	
35	No.35 Tahun 2001 1 Nopember 2001	Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah DDN	L L : 6 hal	Dicabut dg Kepmen No.27 Th.2002
36-39	No.36, 37,38 ,39	Kosong		
40	No.40 Tahun 2001 Nopember 2001	Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri.	L L : 320 hal	Dicabut dg KMDN No.130 Th.2003
41	No.41 Tahun 2001 28 Nopember 2001	Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.	L L : 6 hal	Ttg Pengawasan dicabut dg Permen No.53 Th.2007
42	No.42 Tahun 2001 24 Nopember 2001	Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang pada Daerah yg Baru Dibentuk.	L L : 5 hal	
43	No.43 Tahun 2001 4 Desember 2001 No.1013/MENKES/SKB/XI/2001	Keputusan Bersama Menkes & Mendagri ttg Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia & Anggota Keluarga.	L L : 18 hal	Dicabut dg KMDN No.155A Th.2004
44	No.44 Tahun 2001 7 Desember 2001	Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 hal	
45	No.45 Tahun 2001 7 Desember 2001	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdagri	L L : 5 hal	
46	No.46 Tahun 2001 7 Desember 2001	Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Depdagri.	L L : 3 hal Lamp.: 1	
47	No.47 Tahun 2001 7 Desember 2001	Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Depdagri.	L L : 7 hal	Dicabut dg Permen No.34 Th.2012
48	No.48 Tahun 2001 7 Desember 2001	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 hal	Dicabut dg Permen No.34 Th.2010
49	No.49 Tahun 2001 7 Desember 2001	Sistim Informasi Manejemen Barang Daerah.	L L : 5 hal	
50	No.50 Tahun 2001 14 Desember 2001	Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.	L L : 10 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2001 10 Mei 2001	Pelaksanaan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.	HPPU DDN 2001 Hal.: 1 - 4	
<b>TAHUN 2002</b>				
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2002 24 Januari 2002	Pedoman Susunan Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.	L L : 7 hal	
2	No.2 Tahun 2002 11 Pebruari 2002	Pedoman Penetapan Eselon II ke Bawah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 3 hal	
3	No.3 Tahun 2002 20 Pebruari 2002	Pencabutan Peraturan MENDAGRI No.2 Th.1992 Ttg Lembaga Musyawarah Kota Di Kotamadya Dalam Wilayah DKI Jakarta.	L L : 2 hal	
4	No. 4 Tahun 2002 11 Maret 2002	Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.68 Th.2009
5	No. 5 Tahun 2002 11 Maret 2002	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.109 A Th.2003
6	No. 6 Tahun 2002 12 Maret 2002	Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.	L L : 15 hal	
7	No. 7 Tahun 2002 18 Maret 2002	Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	L L : 3 hal	
8	No. 8 Tahun 2002 22 April 2002	Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 20 hal	Dicabut dg Permen No.68 Th.2009
9	No. 9 Tahun 2002 22 April 2002	Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 hal	Dicabut dg Permen No.68 Th.2009
9A	No.9A Tahun 2002 22 April 2002	Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Sub bidang di Lingk. Departemen Dalam Negeri	L L : .. hal	
10	No. 10 Tahun 2002 30 April 2002	Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.	L L : 4 hal	
11	No. 11 Tahun 2002 30 April 2002	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.	L L : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.15 Th.2003
12	No. 12 Tahun 2002 30 April 2002	Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi & Gas Alam.	L L : 4 hal	Diubah dg KMDN No.93 Th.2003
13	No. 13 Tahun 2002 30 April 2002	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2002.	L L : 3 hal	Dicabut dg KMDN No.14 Th.2003

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No. 14 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.21 Th. 2000 Tentang Retribusi Kartu Ternak.	L L : 2 hal	
15	No. 15 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan PERDA Kab. Bengkulu Selatan No.23 Th. 2000 ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah.	L L : 2 hal	
16	No. 16 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan PERDA Kab.Bengkulu Selatan No.22 Th. 2000 ttg Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kab. Bengkulu Selatan.	L L : 2 hal	
17	No. 17 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.25 Th.2000 Ttg Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Drh Kab.Bengkulu Sel.	L L : 2 hal	
18	No. 18 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.06 Th. 2001 Tentang Pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil /CPO) & Biji Sawit Dalam Kab.Bengkulu Selatan.	L L : 2 hal	
19	No. 19 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.08 Th.2001 Ttg Retribusi Produksi Kayu Atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanah Milik.	L L : 2 hal	
20	No. 20 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.10 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai.	L L : 2 hal	
21	No. 21 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Th. 2001 Tentang Retribusi Asal Komoditas.	L L : 2 hal	
22	No. 22 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Perda Kabupaten Bondowosa No.10 Th.2000 Ttg Retribusi Identitas Ternak.	L L : 2 hal	
23	No. 23 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Hasil Usaha Perkebunan.	L L : 2 hal	
24	No. 24 Tahun 2002 10 Mei 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.3 Th.2000 Ttg Retribusi Kebersihan/ Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 hal	
25	No. 25 Tahun 2002 14 Mei 2002	Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.	L L : 3 hal	
26		Batal/Kosong		
27	No. 27 Tahun 2002 25 Mei 2002	Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.	L L : 5 hal	Diubah dg Kepmen No.35 Th.2002

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No. 28 Tahun 2002 28 Mei 2002	Tata Cara Pemungutan, Penyetaraan dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	L L : 7 hal	Diubah dg KMDN No.165 Th.2004
29	No. 29 Tahun 2002 10 Juni 2002	Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.	L L : 49 hal	
30	No. 30 Tahun 2002 19 Juni 2002	Pembatalan PERDA Prov. Riau No.9 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor yg Tidak Terdaftar.	L L : 2 hal	
31	No. 31 Tahun 2002 19 Juni 2002	Pembatalan Perda Kab.Aceh Singkil No.7 Th.2000 Ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kpd Pemerintah Kab.Aceh Singkil.	L L : 2 hal	
32	No. 32 Tahun 2002 19 Juni 2002	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.20 Th.2000 Ttg Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dlm Wil. Kota Samarinda.	L L : 2 hal	
33	No. 33 Tahun 2002 19 Juni 2002	Pembatalan PERDA Kab. Kampar No.23 Th.2000 ttg Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemda Kab.Kampar.	L L : 2 hal	
34	No. 34 Tahun 2002 9 Juli 2002	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 3 hal	
35	No. 35 Tahun 2002 16 Juli 2002	Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.	L L : 5 hal	Diubah dg Permen No.6 Th.2004
36	No. 36 Tahun 2002 17 Juli 2002	Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.	L L : 4 hal	Dicabut dg Permen No.9 Th.2006
37	No.37 Tahun 2002 30 Agustus 2002	Kesehatan Pondok Pesantren dan Institusi Keagamaan Lainnya.	L L : 4 hal	
38	No.38 Tahun 2002 6 September 2002	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Depdagri & Daerah.	L L : 58 hal	
39	No.39 Tahun 2002 9 September 2002	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 11 Tahun 2002 ttg Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.	L L : 2 hal	
40	No.40 Tahun 2002 10 September 2002	Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu ttg Mekanisme Penyaluran Pemberian Uang Kehormatan kpd Eks Anggota DPRD Prop. Timtim & Kabupaten se Propinsi Timor Timur.		
41	No.41 Tahun 2002 9 Oktober 2002	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi Kab./Kota.	L L : 5 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No.42 Tahun 2002 22 Oktober 2002	Pembatalan PERDA Kab. Bima No.16/2002 ttg Pajak Pengeluaran Hasil Bumi,Hutan,Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam lainnya.	L L : 2 hal	
43	No.43 Tahun 2002 27 Nopember 2002	Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2001-2004.	L L : 3 hal	Dicabut dg Permen No.44 Th.2005
44	No.44 Tahun 2002 3 Desember 2002	Pembatalan Perda Kab. Kuningan No.6/2001 ttg Retribusi Iuran Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.	L L : 2 hal	
45	No.45 Tahun 2002 3 Desember 2002	Pembatalan Perda Kab. Kuningan No.7/2001 ttg Retribusi Bongkar atau Muat Barang.	L L : 2 hal	
46	No.46 Tahun 2002 3 Desember 2002	Pembatalan Perda Kab. Kuningan No. 23 Th.2000 ttg Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.	L L : 2 hal	
47	No.47 Tahun 2002 13 Desember 2002	Pedoman Administrasi Desa.	L L : 4 hal Lamp : 18	Dicabut dg Permen No.32 Th.2006
48	No.48 Tahun 2002 13 Desember 2002	Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.	L L : 3 hal Lamp : 19	Dicabut dg Permen No.29 Th.2006
	No.130/383/SJ 20 Februari 2002	Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten & Kota per Bidang dari Departemen / LPND.	L L : 90 hal	
<b>TAHUN 2003</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2003 6 Februari 2003	Pencabutan Permendagri No.4 Th.1997 ttg Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.	L L : 2 Hal.	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2003 23 Januari 2003	Pembatalan PERDA Kab.Sanggau No.9/2001 ttg Retribusi Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2003	B A T A L/Kosong		
3	No. 3 Tahun 2003 28 Januari 2003	Pembatalan PERDA Kab. Ketapang No.26 Th.2000 ttg Pengelolaan Hutan & Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2003 29 Januari 2003	Program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) Di STPDN.	L L : 7 Hal	
5	No. 5 Tahun 2003 5 Februari 2003	Izin Tertulis Bagi PNS di Lingk. Depdagri yg Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah.	L L : 4 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 2003 6 Pebruari 2003	Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Pemerintah Daerah.	L L : 10 hal. Lamp.: 6 hal.	
7	No. 7 Tahun 2003 6 Pebruari 2003	Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.	L L : 5 hal. Lamp.: 9 hal.	
8	No. 8 Tahun 2003 6 Pebruari 2003	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah.	L L : 6 hal. Lamp.: 8 hal.	Dicabut dg Permen No.31 Th.2009
9	No. 9 Tahun 2003 10 Pebruari 2003	Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Calon PNS Yg Diangkat Menjadi PNS Di Lingkungan Depdagri.	L L : 5 hal. Lamp.: 1 hal.	
10	No.10 Tahun 2003 10 Pebruari 2003	Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS di Lingkungan Depdagri.	L L : 5 hal. Lamp.: 1 hal.	Dicabut dg Permen No.76 Th.2007
11	No. 11 Tahun 2003	BATAL/KOSONG		
12	No. 12 Tahun 2003 24 Pebruari 2003	Pedoman Penilaian Barang Daerah.	L L : 6 Hal.	
13	No. 13 Tahun 2003 10 Maret 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Indramayu No.25 Th.2002 Tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.	L L : 2 Hal.	
14	No. 14 Tahun 2003 15 April 2003	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2003.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg KMDN No.68 Th.2004
15	No. 15 Tahun 2003 15 April 2003	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2003.	L L : 5 Hal.	Dicabut dg KMDN No.69 Th.2004
16	No. 16 Tahun 2003 21 April 2003	Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.	L L : 7 Hal. Lamp.: 17 Hal.	Dicabut dg Permen No.5 Th.2005
17	No. 17 Tahun 2003 24 April 2003 01/SKB/M.PAN/4/2004	Keputusan Bersama MENPAN dan MDN Ttg Petunjuk Pelaksanaan PP No.8 Th.2003 Ttg Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & PP No.9 Th.2003 Ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, & Pemberhentian PNS.	L L : 2 hal Lamp.: 22 hal.	
18	No. 18 Tahun 2003 No.160a/KMK.02/2003 29 April 2003	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ttg Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	L L : 4 hal	
19	No. 19 Tahun 2003 7 Mei 2003	Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)	L L : 8 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No. 20 Tahun 2003 14 Mei 2003	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 3 hal	
21	No. 21 Tahun 2003 19 Mei 2003	Pencabutan Keputusan Menteri Dlm Negeri No.50 Th.1983 Ttg Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan DEPDAGRI.	L L : 2 hal	
22	No. 22 Tahun 2003 30 Juni 2003	Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas & Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota.	L L : 6 hal	
23	No. 23 Tahun 2003 1 Juli 2003	Pembatalan PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 08 Th.2003 Ttg Batas Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidempuan.	L L : 2 hal	
24	No. 24 Tahun 2003 Juli 2003	Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 7 hal	
25	No. 25 Tahun 2003 22 Juli 2003	Kep. Ber Mendagri dan Dirut Perum Bulog Tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin.	L L : 5 Hal.	
26	No. 26 Tahun 2003 23 Juli 2003	Kep. Ber Pendidikan Nasional, MenKes, MenAg, dan Mendagri tentang Pembinaan & Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.	L L : 7 Hal.	
27	No. 27 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.16 Th.2001 ttg Retribusi Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan Milik Perorangan.	L L : 2 Hal.	
28	No. 28 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.26 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, Pemasaran Bahan Bakar Khusus serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.	L L : 2 Hal.	
29	No. 29 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.28 Th.2001 ttg Retribusi Lalu Lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun.	L L : 2 Hal.	
30	No. 30 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.39 Th.2001 ttg Kontribusi Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Perkebunan Swasta kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.	L L : 2 Hal.	
31	No. 31 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.33 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Media Film, Video dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No. 32 Tahun 2003 3 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Sanggau No.15 Th.2000 ttg Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
33	No. 33 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 11 Th.2001 ttg Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
34	No. 34 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 24 Th.2000 ttg Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Bekasi.	L L : 2 Hal.	
35	No. 35 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Bondowoso No.10 Tahun 2000 tentang Kartu Identitas Ternak.	L L : 2 Hal.	
36	No. 36 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Magetan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Kepemilikan Kartu Ternak.	L L : 2 Hal.	
37	No. 37 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Magetan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
38	No. 38 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Probolinggo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak.	L L : 2 Hal.	
39	No. 39 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Probolinggo Nomor 04 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kab. Probolinggo.	L L : 2 Hal.	
40	No. 40 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penebangan Pohon Yang Tumbuh Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Probolinggo.	L L : 2 Hal.	
41	No. 41 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan.	L L : 2 Hal.	
42	No. 42 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Pasuruan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak.	L L : 2 Hal.	
43	No. 43 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab.Kapuas No.10 Th.2000 ttg Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Kayu Keluar Daerah Kabupaten Kapuas.	L L : 2 Hal.	
44	No. 44 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab.Kapuas No.16 Th.2000 ttg Pungutan Daerah atas Kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas.	L L : 2 Hal.	
45	No. 45 Tahun 2003 9 September 2003	Pembatalan Perda Kab.Kapuas No.14/2000 ttg Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Kapuas.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No. 46 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Prov. Kalimantan Selatan No.1 Th.2000 ttg Larangan Minuman Beralkohol.	L L : 2 Hal.	
47	No. 47 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Tapin No.05 Th.2000 ttg Sumbangan Pihak Ketiga atas Hasil Tambang Batubara yang dibawa keluar dari Areal Pertambangan.	L L : 2 Hal.	
48	No. 48 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Giayar No.7 Tahun 2000 ttg Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Bambu Rakyat.	L L : 2 Hal.	
49	No. 49 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Tanggamus No.3 Tahun 2000 ttg Retribusi pembinaan Assosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
50	No. 50 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Tanggamus No.7 Tahun 2000 ttg Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian.	L L : 2 Hal.	
51	No. 51 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Tanggamus No.20 Tahun 2000 ttg Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus.	L L : 2 Hal.	
52	No. 52 Tahun 2003 11 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Tanggamus No.38 Tahun 2000 ttg Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.	L L : 2 Hal.	
53	No. 53 Tahun 2003 15 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Cilacap No.1 Th.2003 ttg Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
54	No. 54 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kota Samarinda No.18 Th.2000 ttg Perubahan Pertama Perda Kotamadya Tk.II Samarinda No.15 Th.1998 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	L L : 2 Hal.	
55	No. 55 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kota Ternate No.06 Tahun 2000 ttg Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.	L L : 2 Hal.	
56	No. 56 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak dari dan ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan & Pengobatan Hewan Ternak.	L L : 2 Hal.	
57	No. 57 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Buol No.06 Tahun 2001 ttg Retribusi Pengairan.	L L : 2 Hal.	
58	No. 58 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Buol No.40 Tahun 2002 ttg Retribusi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
59	No. 59 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Bantaeng No.13 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Registrasi dan Pencapan Hewan.	L L : 2 Hal.	
60	No. 60 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Blora No.16 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.	L L : 2 Hal.	
61	No. 61 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung No.18 Tahun 2001 ttg Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.	L L : 2 Hal.	
62	No. 62 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung No.19 Tahun 2001 ttg Izin Pemanfaatan Kayu.	L L : 2 Hal.	
63	No. 63 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.20 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Lalu Lintas Hasil Buah-buahan/ Hortikultura dan Buah Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.	L L : 2 Hal.	
64	No. 64 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.22 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Dispensasi Jalan Angkutan Berat/ Khusus Kabupaten Ogan Komering Ilir.	L L : 2 Hal.	
65	No. 65 Tahun 2003 18 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.17 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Usaha Media Penerangan Elektronik.	L L : 2 Hal.	
66	No. 66 Tahun 2003	Kosong/Batal		
67	No. 67 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Propinsi Jawa Timur No.9 Th.2002 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
68	No. 68 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Sumenep No.7 Tahun 2002 ttg Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
69	No. 69 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Bangkalan No.5 Tahun 2002 ttg Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat.	L L : 2 Hal.	
70	No. 70 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Sragen No.10/2001 ttg Retribusi Izin Tebang dan Izin Angkut Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Olahan.	L L : 2 Hal.	
71	No. 71 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Purbalingga No.10 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu.	L L : 2 Hal.	
72	No. 72 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Kepulauan Sangihe dan Talaud No.07/2002 ttg Izin Pemasukan Minuman Keras dan Retribusi Atasnya.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
73	No. 73 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kota Manado No.05 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Kota Manado.	L L : 2 Hal.	
74	No. 74 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Lampung Barat No.08 Th. 2001 ttg Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa.	L L : 2 Hal.	
75	No. 75 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Lubuk Linggau No.13 Th.2001 ttg Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,Non Kayu pd Tanah Milik/Hutan Rakyat.	L L : 2 Hal.	
76	No. 76 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Angka 2 pada Kegiatan Pokok Program Pembangunan Daerah Perda Kabupaten Asahan No.6 Tahun 2001 ttg Program Pembangunan Daerah (Propeda).	L L : 2 Hal.	
77	No. 77 Tahun 2003 24 September 2003	Pembatalan Perda Kab.Musi Banyuasin No.47/2002 ttg Retribusi Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	L L : 2 Hal.	
78	No. 78 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Gunungkidul No.05 Tahun 2002 ttg Izin Pemilikan, Retribusi Izin Penjualan, dan Pembelian Ternak di Kabupaten Gunungkidul.	L L : 2 Hal.	
79	No. 79 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Tabanan No.05/2002 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Sumber <sup>2</sup> Air.	L L : 2 Hal.	
80	No. 80 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Tabanan No.22 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Penjualan & Penyewaan VCD, LD, DVD dan Sejenisnya.	L L : 2 Hal.	
81	No. 81 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Cilacap No.09 Tahun 2001 ttg Pajak Televisi.	L L : 2 Hal.	
82	No. 82 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kota Palu No.23 Th.2001 ttg Retribusi Perdagangan Ekspor Melalui Penerbitan Certificate of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal Barang (SKA).	L L : 2 Hal.	
83	No. 83 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Banggai No.31 Th.2001 ttg Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarana Produksi Pertanian Kab. Banggai.	L L : 2 Hal.	
84	No. 84 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Pontianak No.19 Tahun 2001 ttg Retribusi Peredaran Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
85	No. 85 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No.15 Tahun 2002 ttg Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No. 86 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kota Banjarbaru No.09 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Pengambilan/ Pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Diluar Kaw. Hutan & Hasil Kayu Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
87	No. 87 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.13 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Usaha Industri Penggajian Kayu.	L L : 2 Hal.	
88	No. 88 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Solok No.14 Th.2001 ttg Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Industri Penggajian Kayu Hulu (sawmill).	L L : 2 Hal.	
89	No. 89 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Bantaeng No.07 Th.2001 ttg Retribusi Izin dan Pengawasan Ternak Keluar Daerah.	L L : 2 Hal.	
90	No. 90 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.22/2001 ttg Retribusi angkutan hasil alam.	L L : 2 Hal.	
91	No. 91 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.29 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.	L L : 2 Hal.	
92	No. 92 Tahun 2003 30 September 2003	Pembatalan Perda Kabupaten Lampung Timur No.09 Tahun 2002 ttg Retribusi Lalu Lintas Ternak dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
93	No. 93 Tahun 2003 30 September 2003	Perubahan atas Kepmendagri No.12 Th.2002 ttg Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.	L L : 3 Hal.	
94	No. 94 Tahun 2003 30 September 2003	Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.	L L : 11 Hal. Lamp.: 13 Hal.	
95	No. 95 Tahun 2003 3 Oktober 2003	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pd Saat Menjelang & Sesudah Pelaksanaan PEMILU 2004.	L L : 11 Hal. Lamp.: 13 Hal.	
96	No. 96 Tahun 2003 21 Nopember 2003	Nota Kesepahaman Mendagri dan Sekretaris Negara tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIPNAS).	L L : 4 Hal.	
97	No. 97 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kab.Tulungagung No.49 Th.2001 Tentang Retribusi Kartu Identitas Ternak dan Perubahan Kepemilikan Ternak.	L L : 2 Hal.	
98	No. 98 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hulu No.13 Th.2002 Tentang Retribusi Pemakaian Jalan Dalam Wilayah Kab. Indragiri Hulu.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
99	No. 99 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hulu No.16 Th.2002 ttg Dispensasi Penggunaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kab.Indragiri Hilir No.26 Th.2001 ttg Perubahan Atas PERDA No.59 Th.2000 ttg Retribusi Pemakaian Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
102	No.102 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.19 Th.2001 Tentang Tonase dan Portal.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Bojonegoro No.13 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pemberian Kartu Ternak Yang Dimiliki Atau Dipelihara.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Bojonegoro No.20 Th.2001 Tentang Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Ciamis No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Bone No.4 Th.2000 Ttg Retribusi Hasil-hasil Bumi dan Perairan yg Diperdagangkan Keluar Daerah.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Bone No.5 Th.2000 Ttg Retribusi Izin dan Pengawasan Ternak Keluar Daerah.	L L : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Pembatalan Perda Kab. Lombok Barat No.16 Th.2001 ttg Retribusi Kartu Pemilikan Ternak.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2003 28 Oktober 2003	Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PNS Daerah Menjadi PNS DEPdagRI.	L L : 4 Hal.	Dicabut dg Permen No.10 Th.2006
109A	No.109A Tahun 2003 3 Nopember 2003	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	Buku I s/d XXXII	Dicabut dg Permen No.18 Th.2005
110	No.110 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 PERDA Kabupaten Gresik No.03 Th.2001 Ttg Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Th.2000 s/d Th.2010.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan Keputusan Bupati Gresik No.83 Th.2001 Ttg Ijin Pemakaian Dermaga PT. PLN Pembangkitan Jawa dan Bali 2 Unit Pembangkitan Gresik.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
112	No.112 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Kota Cilegon No.1 Th.2001 Ttg Kepelabuhanan di Kota Cilegon.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Ciamis No.10 Th.2001 Tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Tengah No.16 Th.2001 Tentang Retribusi Pelayanan Air Irigasi Tanaman.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Pelalawan No.08 Th.2001 ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2003 6 Nopember 2003	Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota.	L L : 4 Hal. Lamp. : 2 hal.	
117	No.117 Tahun 2003 7 Nopember 2003	Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Warga Negara Indonesia Lainnya di Daerah Bergolak Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	L L : 4 Hal.	
118	No.118 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pedoman Organisasi Kecamatan. (dibatalkan)	L L : 7 Hal. Lamp.: 1 hal.	BATAL
119	No.119 Tahun 2003 17 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Th.2001 Tentang Retribusi Jasa atas Pekerjaan.	L L : 2 Hal.	
120	No.120 Tahun 2003 17 Nopember 2003	Pembatalan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No.10 Th.2001 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	L L : 2 Hal.	
121-124		Kosong/Batal		
125	No.125 Tahun 2003 21 Nopember 2003	Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.	L L : 4 Hal.	
126	No.126 Tahun 2003 3 Desember 2003	Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa.	L L : 2 Hal. Lamp.: 17 hal	
127	No.127 Tahun 2003 15 Desember 2003	Keputusan Bersama Menteri PAN, MDN dan Kepala Kepolisian Negara RI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.	L L : 3 Hal. Lamp.: 3 hal.	
128	No.128 Tahun 2003 15 Desember 2003	Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja STPDN.	L L : 2 Hal.	
129	No.129 Tahun 2003 16 Desember 2003	Pembentukan Lembaga Pengkajian Di Lingkungan STPDN.	L L : 3 Hal. Lamp.:1 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
130	No.130 Tahun 2003 22 Desember 2003	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.	L L :	Diubah dg Permen No.25 & No.50 Th.2008
131	No.131 Tahun 2003 24 Desember 2003	Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.	L L : 3 Hal. Lamp.: 22 hal	
132	No.132 Tahun 2003 29 Desember 2003	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.	L L : 9 Hal.	Dicabut dg Permen No.15 Th.2008
133	No.133 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PERDA Kota Bitung No.5 Th.2003 Tentang Retribusi Pertambangan Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
134	No.134 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PERDA Kota Bitung No.6 Th.2003 Tentang Retribusi Ketenagalistrikan Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
135	No.135 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Tebo No.20 Th.2001 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
136	No.136 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Tebo No.21 / 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
137	No.137 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Tebo No.24 Th.2001 Tentang Retribusi Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
138	No.138 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Muaro Jambi No.21 Th.2002 Tentang Retribusi Hasil Hutan (RHH).	L L : 2 Hal.	
139	No.139 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan Ketentuan Pasal I Huruf K, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 & 35 PERDA Kabupaten Tuban No.9 Th.2003 ttg Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
140	No.140 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan Keputusan Bupati Seruyan No.27 Th.2003 ttg Penetapan Perubahan Dana Kontribusi Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan No.39 Th.2003 ttg Penetapan Perubahan Besarnya Dana Kontribusi Pembangunan daerah (DKPD) yg berlaku di Kab. Seruyan berdasarkan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2001.	L L : 2 Hal.	
141	No.141 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Gresik No.19 Th.2001 ttg Kepelabuhanan di Kab. Gresik.	L L : 2 Hal.	
142	No.142 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.16 Th.2001 ttg Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan hasil Hutan Kab. Kotawaringin Timur.	L L : 2 Hal.	
143	No.143 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Selatan No.14 Th.2000 ttg Pemeriksaan Kesehatan Lalu Lintas Ternak di Kab. Lampung Selatan.	L L : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
144	No.144 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Sintang No.9 Th.2002 ttg Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan.	L L : 2 Hal.	
145	No.145 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kabupaten Lampung Barat No.10 Th.2002 Tentang Pajak Huller.	L L : 2 Hal.	
146	No.146 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kota Manado No.9 Th.2002 Tentang Pajak Undian.	L L : 2 Hal.	
147	No.147 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab. Bojonegoro No.6 Th.2001 Tentang Pajak Pembuatan Film.	L L : 2 Hal.	
148	No.148 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kota Mataram No.11 Th.2001 Tentang Pajak Atas Pengiriman Barang antar Pulau.	L L : 2 Hal.	
149	No.149 Tahun 2003 30 Desember 2003	Pembatalan PERDA Kab.Maluku Utara No.12 Th.2002 ttg Pajak Pengeluaran Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
150	No.150 Tahun 2003 30 Desember 2003	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 Hal.	Dicabut dg Permen No.18 Th.2005
<b>TAHUN 2004</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2004 6 Mei 2004	Pencabutan Permendagri No.3/1990 ttg Peng- elolaan Barang Daerah Milik Perush. Daerah.	L L : 2 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2004 21 Juli 2004	Pedoman Penyusunan Program Legislasi Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2004 22 Nopember 2004	Pembayaran Gaji PNS di Lingk. Depdagri yg Dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian dan Mengajukan Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.	HPPU-DDN 2004 Hal.: 1204 - 1206	
4	No. 4 Tahun 2004 22 Nopember 2004	Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi PNS di Lingkungan Depdagri dan PNS Daerah.	HPPU-DDN 2004 Hal.: 1207 - 1210	
5	No. 5 Tahun 2004 22 Nopember 2004	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Depdagri.	HPPU-DDN 2004 Hal.: 1211 - 1216	
6	No. 6 Tahun 2004 15 Desember 2004	Perubahan KMDN No.35/2002 ttg Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.	HPPU-DDN 2004 Hal.: 1217 - 1218	
7	No. 7 Tahun 2004 15 Desember 2004	Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor.	L L : -- Hal.	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan Pasal 10 Huruf P Angka 5 Perda Kab.Tanjung Jabung Barat No.10 Th. 2002 tentang LEGES.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Th. 2003 Tentang Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta.	L L : 2 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Singingi No.5 Th. 2003 ttg Retribusi Izin Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Mesin.	L L : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Serang No.2 Th.2003 Ttg Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan.	L L : 2 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Bojonegoro No.12 Th.2003 ttg Perubahan PERDA Kab. Bojonegoro No.17 Th.2001 ttg Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu dari Tempat Penimbunan Kayu.	L L : 2 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Barito Selatan No.03 Th.2003 Ttg Retribusi Daerah Atas Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Barito Selatan.	L L : 2 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Kotabaru No.14 Th.2002 Ttg Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.	L L : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan Perda Kota Banjarbaru No.7/2001 ttg Retribusi Izin Penumpukan Barang.	L L : 2 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan Perda Kab. Manggarai No.7/2002 ttg Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi.	L L : 2 Hal.	
10	No. 10 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kota Kupang No.10 Th.2002 Tentang Retribusi Pasar.	L L : 2 Hal.	
11	No. 11 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kota Jayapura No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
12	No. 12 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sorong No.40 Th.2002 Ttg Retribusi Kartu Ternak.	L L : 2 Hal.	
13	No. 13 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sorong No.44 Th.2002 Ttg Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak.	L L : 2 Hal.	
14	No. 14 Tahun 2004 6 Januari 2004	Pembatalan Perda Kab.Sorong No.49/2002 Ttg Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Atas Tanaman Pangan Serta Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ke dan dari Kab. Sorong.	L L : 2 Hal.	
15	No. 15 Tahun 2004 6 Januari 2004	Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon I dan II yang Telah Mencapai Usia 56 Tahun Ke Atas Di Lingkungan Depdagri.	L L : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
16	No. 16 Tahun 2004 9 Pebruari 2004	Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri.	L L : 8 Hal.	
17	No. 17 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan Pasal 1,8,9,10,14,16,17,19,20,21,22,23,26,27,29,31,34, 36 dan 40 PERDA Kota Dumai No.2 Th.2003 tentang Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
18	No. 18 Tahun 2004 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Dairi No.05 Th.2002 tentang Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
19	No. 19 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Musi Banyuasin No.19 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
20	No. 20 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Bekasi No.5 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
21	No. 21 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Banjarbaru No.10 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
22	No. 22 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Manado No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	L L : 2 Hal.	
23	No. 23 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Manado No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Penempatan dan Perlindungan Hubungan Kerja Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
24	No. 24 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bitung No.13 Th.2001 Ttg Retribusi Ketenagakerjaan Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
25	No. 25 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bontang No.6 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
26	No. 26 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Makassar No.3 Th.2002 Ttg Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar.	L L : 2 Hal.	
27	No. 27 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Mamuju No.9 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
28	No. 28 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Simalungun No.25 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum.	L L : 2 Hal.	
29	No. 29 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sawahlunto Sijunjung No.13 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No. 30 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Ogan Komering Ulu No.5 Th.2001 Ttg Penerimaan Sumbangan PT.Semen Baturaja kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	L L : 2 Hal.	
31	No. 31 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Lampung Barat No.7 Th.2001 Ttg Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.	L L : 2 Hal.	
32	No. 32 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Ciamis No.19 Th.2001 ttg Retribusi Pemberian Izin & Biaya Pembongkaran Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.	L L : 2 Hal.	
33	No. 33 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Ciamis No.22 Th.2001 Ttg Izin Usaha Jasa Traktor.	L L : 2 Hal.	
34	No. 34 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Ketapang No.9 Th.2001 Ttg Pungutan Terhadap Hasil Produksi Tandan Buah Segar.	L L : 2 Hal.	
35	No. 35 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Ketapang No.10 Th.2001 Ttg Pungutan Terhadap Hasil Produksi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit.	L L : 2 Hal.	
36	No. 36 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bitung No.14 Th.2002 ttg Reribusi Izin Berjualan Keliling & berjualan di tempat tertentu dlm Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
37	No. 37 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab.Gowa No.15 / 2001 ttg Retribusi Penjualan Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
38	No. 38 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Manggarai No.7 Th.2001 Ttg Retribusi Usaha Perfilman.	L L : 2 Hal.	
39	No. 39 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Kepulauan Riau No.6 Th.2002 Ttg Tenaga Kerja Lokal.	L L : 2 Hal.	
40	No. 40 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Batam No.19 Th.2001 Ttg Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam.	L L : 2 Hal.	
41	No. 41 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Dumai No.15/2000 ttg Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan	L L : 2 Hal.	
42	No. 42 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Kerinci No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
43	No. 43 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Serang No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	L L : 2 Hal.	
44	No. 44 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bandung No.19 Th.2002 Ttg Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
45	No. 45 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Sukoharjo No.32 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	L L : 2 Hal.	
46	No. 46 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Blitar No.7 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Kerja Tertentu.	L L : 2 Hal.	
47	No. 47 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.10 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
48	No. 48 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Kutai No.12 Th.2001 Ttg Pemberian Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendetang.	L L : 2 Hal.	
49	No. 49 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Banjarmasin No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
50	No. 50 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bitung No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pengelolaan Perfilman di Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
51	No. 51 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bitung No.19 Th.2001 ttg Retribusi Daerah di sektor Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
52	No. 52 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perfilman.	L L : 2 Hal.	
53	No. 53 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Makassar No.5 Th.2002 Ttg Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar.	L L : 2 Hal.	
54	No. 54 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Gowa No.20 Th.2001 Ttg Pembinaan Usaha Industri dan Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
55	No. 55 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara No.02 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Peredaran & Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	L L : 2 Hal.	
56	No. 56 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara No.06 Th.2002 ttg Retribusi Izin Kerja Tenaga Asing.	L L : 2 Hal.	
57	No. 57 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Mataram No.10 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video.	L L : 2 Hal.	
58	No. 58 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Tapanuli Utara No.26 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
59	No. 59 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Solok No.13 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Di Bidang Pertanahan.	L L : 2 Hal.	
60	No. 60 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Aceh Tengah No.35 Th.2001 Ttg Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kab. Aceh Tengah.	L L : 2 Hal.	
61	No. 61 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Aceh Tengah No.36 Th.2001 Ttg Retribusi Surat Kepemilikan Ternak.	L L : 2 Hal.	
62	No. 62 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Garut No.8 Th.2001 Tentang Retribusi Pelayanan Izin Penggunaan Jalan Diluar Kepentingan Lalu Lintas.	L L : 2 Hal.	
63	No. 63 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sragen No.16 Th.2001 tentang Retribusi Ijin Angkut Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
64	No. 64 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Gresik No.8 Th.2001 Ttg Retribusi Jalan Kabupaten.	L L : 2 Hal.	
65	No. 65 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Pontianak No.20 Th.2001 Ttg Retribusi Pengganti Nilai Tegakan.	L L : 2 Hal.	
66	No. 66 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Morowali No.57 Th.2001 Ttg Retribusi Pemotongan Hewan Ternak Kabupaten Morowali.	L L : 2 Hal.	
67	No. 67 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Luwu Utara No.39 Th.2001 Ttg retribusi Pemakaian dan Perlengkapan Jalan Daerah Kab.Luwu Utara.	L L : 2 Hal.	
68	No. 68 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2004.	LL : 4 Hal Lamp.: 9 Hal	Dicabut dg Permen No.17 Th.2005
69	No. 69 Tahun 2004 11 Pebruari 2004	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004.	L L : 6 Hal.	Dicabut dg Permen No.16 Th.2005
70	No. 70 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Simalungun No.15 Th.2001 Ttg Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu.	L L : 2 Hal.	
71	No. 71 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Simalungun No.22 Th.2001 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang.	L L : 2 Hal.	
72	No. 72 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Simalungun No.24 Th.2001 Ttg Retribusi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri.	L L : 2 Hal.	
73	No. 73 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Simalungun No.41 Th.2001 Ttg Peizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
74	No. 74 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Tapanuli Selatan No.18 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan Dan Gudang.	L L : 2 Hal.	
75	No. 75 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bijai No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Wajib Pendaftaran Tidak Bermotor Di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
76	No. 76 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Solok No.12 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Di Bidang Kehutanan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
77	No. 77 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Pangkal Pinang No.09/2000 ttg Sumbangan Wajib Pengusaha Sarang Burung Walet dan Pelestariannya.	L L : 2 Hal.	
78	No. 78 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Timur No.10 Th.2000 Ttg Retribusi Atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	L L : 2 Hal.	
79	No. 79 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Garut No.7 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
80	No. 80 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Garut No.9 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik.	L L : 2 Hal.	
81	No. 81 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Luwu Utara No.40 Th.2001 ttg Retribusi Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Tidak Bermotor Kabupaten Luwu Utara.	L L : 2 Hal.	
82	No. 82 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.59 Th.2001 Ttg Tempat Pendaratan Kapal Kabupaten Morowali.	L L : 2 Hal.	
83	No. 83 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Deli Serdang No.28 Th.2000 Ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pihak Pemerintah.	L L : 2 Hal.	
84	No. 84 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Asahan No.29 Th.2000 Ttg Sumbangan Wajib Perusahaan Perkebunan Negara/Daerah Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Di Daerah Asahan.	L L : 2 Hal.	
85	No. 85 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Toba Samosir No.16/2001 Ttg Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kpd Pemerintah Kab. Toba Samosir.	L L : 2 Hal.	
86	No. 86 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Sumbawa No.20 Th.2001 ttg Pajak Pengiriman Barang/Bahan.	L L : 2 Hal.	
87	No. 87 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Timor Tengah Utara No.38 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Kulit.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
88	No. 88 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Gorontalo No.13 Th.2000 Ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.	L L : 2 Hal.	
89	No. 89 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sumbawa No.33 Th.2001 Ttg Retribusi Pendaftaran Ternak.	L L : 2 Hal.	
90	No. 90 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Bima No.15 / 2000 Ttg Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
91	No. 91 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang No.31 Th.2001 Ttg Partisipasi dan Sumbangan Pihak Ketiga.	L L : 2 Hal.	
92	No. 92 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Banggai No.12 Th.2001 Ttg Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan & Hasil Industri.	L L : 2 Hal.	
93	No. 93 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.32 Th.2000 Ttg Retribusi Pemberian Izin & Biaya Pembongkaran Reklame dalam Wilayah Kab. Tasikmalaya.	L L : 2 Hal.	
94	No. 94 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.34 Th.2000 Ttg Retribusi Penggunaan Bon Kontan Perusahaan/Toko Dalam Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.	L L : 2 Hal.	
95	No. 95 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Jombang No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Penggunaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
96	No. 96 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Blitar No.23 Th.2000 Ttg Retribusi Kartu Ternak.	L L : 2 Hal.	
97	No. 97 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Blitar No.24 / 2000 Ttg Pemeriksaan daging yang berasal dari Luar Daerah dan Dipasarkan Di Kab. Blitar.	L L : 2 Hal.	
98	No. 98 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Flores Timur No.2 Th.2000 Ttg Sumbangan Atas Pengumpulan Dan Atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan & Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian.	L L : 2 Hal.	
99	No. 99 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Prov. Sulawesi Tengah No.02 Th.2000 Ttg Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Poso No.30 Th.2001 Tentang Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Chain Saw).	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2004 12 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.6 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Rumah Kost/Pemondokan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
102	No.102 Tahun 2004 19 Pebruari 2004	Pembatalan Psl 5 Ayat (2) Perda Kab.Gresik No.5 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Gangguan.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2004 19 Pebruari 2004	Pembatalan Pasal 4, 7 dan 9 PERDA Kab. Gresik No.39 Th.2000 Ttg Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kab. Gresik.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2004 19 Pebruari 2004	Pembatalan Pasal 3 dan 4 PERDA Kab. Gresik No.10 Th.2001 Ttg Pajak Parkir.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2004 19 Pebruari 2004	Pembatalan Pasal 10 PERDA Kab. Gresik No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2004 24 Pebruari 2004	Jabatan Peneliti di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah.	L L : 14 Hal.	
107	No.107 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kab. Maluku Utara No.18 Th.2002 ttg Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Laut.	L L : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bitung No.17 Th.2002 ttg Retribusi Jasa Pelayanan di Bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah di Kota Bitung.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Banjarbaru No.7 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Bima No.7 Th.2001 Tentang Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Bojonegoro No.14 Th.2001 ttg Retribusi Penggunaan Tempat Menaikan dan Menurunkan Ternak di Pasar Hewan dan Tempat Lain.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Bojonegoro No.10 Th.2001 ttg Retribusi Pemeiksaan Ternak Besar Betina Bertanduk Tidak Produktif dgn Tanda Pemeriksaan (Cap S).	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Rembang No.9 Th.2002 ttg Izin Bongkar Muat.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bandung No.31 Th.2001 ttg Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.6 Th.2002 Tentang Iuran Wajib Atas Usaha Komoditas Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Musi Banyuasin No.32 Th.2002 Ttg Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Musi Banyuasin.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
117	No.117 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Karo No.24 / 2001 Ttg Pajak Usaha Pemanfaatan Hasil Bumi.	L L : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Karo No.41 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.	L L : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.6 Th.2002 ttg Retribusi Ijin Usaha Peternakan dan Peredaran Sarana Produksi Peternakan.	L L : 2 Hal.	
120	No.120 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Pontianak No.23 Th.2001 ttg Retribusi Pemeriksaan Ternak.	L L : 2 Hal.	
121	No.121 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.66 Th.2001 ttg Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai Kabupaten Morowali.	L L : 2 Hal.	
122	No.122 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.68 Th.2001 ttg Penarikan Sumbangan Pihak Ketiga kpd Pemerintah Daerah Kab. Morowali.	L L : 2 Hal.	
123	No.123 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Deli Serdang No.27 Th.2000 ttg Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Negara/Daerah, Perusahaan Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat di Kab. Seli Serdang.	L L : 2 Hal.	
124	No.124 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Tapanuli Selatan No.11 Th.2001 ttg Pajak Produksi Hasil Tanaman dan Hortikultura.	L L : 2 Hal.	
125	No.125 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Toba Samosir No.6 Th.2001 ttg Retribusi Pengawasan & Pemeriksaan Kualitas Air.	L L : 2 Hal.	
126	No.126 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Prov.Jambi No.8 Th.2001 ttg sumbangan wajib pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sektor Kehutanan.	L L : 2 Hal.	
127	No.127 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Prov. Jambi No.9/2001 ttg sumbangan wajib pembangunan Prov. (SWPP) Jambi dari Sub Sektor Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
128	No.128 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Serang No.7 Th.2001 ttg Retribusi Kayu.	L L : 2 Hal.	
129	No.129 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Serang No.8 Th.2001 ttg Retribusi Pemeriksaan Hewan, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
130	No.130 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Provinsi Jawa Barat No.23 Th.2000 ttg Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat.	L L : 2 Hal.	
131	No.131 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Provinsi Jawa Barat No.24 Th.2000 ttg Usaha Pengolahan Teh.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
132	No.132 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Bandung No.22 Th.2000 ttg Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
133	No.133 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kab.Cianjur No.03 Th.2000 ttg Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Produksi Teh Rakyat.	L L : 2 Hal.	
134	No.134 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Indramayu No.12 Th.2001 ttg Retribusi Dispensasi Jalan.	L L : 2 Hal.	
135	No.135 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kab.Gorontalo No.65/2000 ttg Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
136	No.136 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Singingi No.13 Th.2000 ttg Retribusi Pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak & hasil ikutannya.	L L : 2 Hal.	
137	No.137 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hulu No.6 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perfilman.	L L : 2 Hal.	
138	No.138 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.46/2001 ttg Retribusi Pengiriman/ surat keterangan asal (SKA) hasil perikanan.	L L : 2 Hal.	
139	No.139 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kab.Sawahlunto/Sijunjung No.9/2001 ttg Retribusi Pemangkalan Hasil Bumi.	L L : 2 Hal.	
140	No.140 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab. Indramayu No.5 Th.2002 ttg Ketenagalistrikan.	L L : 2 Hal.	
141	No.141 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kota Manado No.10 Th.2002 ttg Retribusi Pengamanan dan Pengawasan Serta Pembinaan Agribisnis.	L L : 2 Hal.	
142	No.142 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan Perda Kota Manado No.14/2002 ttg retribusi pelayanan & pembinaan koperasi, pengusaha kecil & menengah di kota Manado	L L : 2 Hal.	
143	No.143 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.16 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.	L L : 2 Hal.	
144	No.144 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.20 Th.2001 ttg Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan.	L L : 2 Hal.	
145	No.145 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembatalan PERDA Kab.Maluku Utara No.17 th.2002 ttg Retribusi Pengusahaan Perikanan.	L L : 2 Hal.	
146	No.146 Tahun 2004 1 Maret 2004	Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wkl Walikota & Penetapan Sekda sbg Pelaksana Tugas Pemerintahan dlm Rangka Kampanye Pemilu.	L L : 5 Hal. Lamp. : 15 Hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
147	No.147 Tahun 2004 5 Maret 2004	Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.	L L : 9 Hal	Dicabut dg Permen No.50 Th.2009
148	No.148 Tahun 2004 12 Maret 2004	Pembatalan PERDA Kota Medan No.12 Th.2004 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS).	L L : 2 Hal.	
149	No.149 Tahun 2004 12 Maret 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Tanah Datar No.4 Th.2002 ttg Retribusi Sertifikasi Kepemilikan dan Pas Ternak.	L L : 2 Hal.	
150	No.150 Tahun 2004 12 Maret 2004	Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.101 Th.2001 ttg Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 2 Hal.	
151	No.151 Tahun 2004 12 Maret 2004	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna.	L L : 5 Hal.	
152	No.152 Tahun 2004 6 Mei 2004	Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.	L L : 15 Hal.	Dicabut dg Permen No.17 Th.2007.
153	No.153 Tahun 2004 6 Mei 2004	Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.	L L : 10 Hal.	
154	No.154 Tahun 2004 17 Mei 2004	Penilaian Pemberian Tanda2 Kehormatan dari Negara Kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan PNS.	L L : 4 Hal.	
155	No.155 Tahun 2004 31 Mei 2004	Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.	L L : 11 Hal.	
155A	No.155A Tahun 2004 2004 No.616.A/ Menkes/SKB/VI/2004	Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) & Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.	L L : -- Hal.	Diubah dg Permen No.24 Th.2005 Dicabut dg Permen No.12 Th.2009
156	No.156 Tahun 2004 No.01/SKB/M.KUKM/VI/2004 9 Juni 2004	Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.	L L : 5 Hal.	
157	No.157 Tahun 2004 11 Juni 2004	Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri.	L L : 12 Hal.	
158	No.158 Tahun 2004 24 Juni 2004	Pedoman Organisasi Kecamatan.	L L : 7 Hal. Lamp.: 4 hal.	
159	No.159 Tahun 2004 24 Juni 2004	Pedoman Organisasi Kelurahan.	L L : 5 Hal. Lamp.: 2 hal.	
160	No.160 Tahun 2004 25 Juni 2004	Kurikulum Pendidikan Tinggi Kedinasan di Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 Hal. Lamp.: 5 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
161	No.161 Tahun 2004 7 Juli 2004	Pengangkatan dan Penguukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 3 Hal.	
162	No.162 Tahun 2004 12 Juli 2004	Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	L L : 60 Hal.	
163	No.163 Tahun 2004 15 Juli 2004	Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kab. Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan Sekitarnya.	L L : 3 Hal. Lamp.: 5 hal.	
164	No.164 Tahun 2004 3 Agustus 2004	Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 318 Hal.	Diubah dg Permen No.51 Th.2008
165	No.165 Tahun 2004 4 Agustus 2004	Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.28 Th.2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	L L : 3 Hal.	
166	No.166 Tahun 2004 20 Agustus 2004	Pembatalan PERDA Kota Makassar No.8 Th.2003 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Rangka Pembentukan PT.Jangkar Utama Perdana dan Penetapan Jalan Lingkar Tengah Sebagai Jalan Khusus Serta Pengean Tarif Retribusi Jasa Usaha.	L L : 2 Hal.	
167	No.167 Tahun 2004 26 Agustus 2004	Pedoman Pembinaan Hukum.	L L : 5 Hal.	
168	No.168 Tahun 2004 26 Agustus 2004	Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah.	L L : 5 Hal. Lamp.: 6 hal.	Dicabut dg Permen No.2 Th.2014
169	No.169 Tahun 2004 26 Agustus 2004	Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.	L L : .4 Hal. Lamp.: 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2011
170	No.170 Tahun 2004 26 Agustus 2004	Pembatalan PERDA Kab.Bangka No.8/2003 ttg Retribusi Pelayanan Bid.Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
171	No.171 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Dumai No.14 Th.2000 tentang Pembinaan Kesejahteraan Buruh di Wilayah Kota Dumai.	L L : .2 Hal.	
172	No.172 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Ogan Komering Ilir No.15 Th.2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah Dalam Kabupaten OKI.	L L : .2 Hal.	
173	No.173 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Lahat No.28/2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.	L L : .2 Hal.	
174	No.174 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Propinsi Sumatera Utara No.4 Th.2003 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.	L L : .2 Hal.	
175	No.175 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Sumedang No.6 Th.2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
176	No.176 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Indramayu No.6 Th.2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
177	No.177 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Cimahi No.29 Th.2003 tentang Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
178	No.178 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Karawang No.11 Th.2001 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur	L L : .2 Hal.	
179	No.179 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Karawang No.22 Th.2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
180	No.180 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Tangerang No.13 Th.2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
181	No.181 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Jepara No.15 Th.2001 tentang Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Buruh.	L L : .2 Hal.	
182	No.182 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Magelang No.20 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
183	No.183 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Jember No.12 Th.2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
184	No.184 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Madiun No.08 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
185	No.185 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan Perda Prop. Kaltan No.7/2002 ttg Pengujian Mutu Mata Dagangan Ekspor.	L L : .2 Hal.	
186	No.186 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Banjarmasin No.5 Th.2001 tentang Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan.	L L : .2 Hal.	
187	No.187 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Kota Baru No.7 Th.2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
188	No.188 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab.Sambas No.11 Th.2002 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman.	L L : .2 Hal.	
189	No.189 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Murung Raya No.22 Th.2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
190	No.190 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kab. Pasir No.7 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
191	No.191 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.1 Th.2003 ttg Perubahan Perda Kota Palu No.20 Th.2001 ttg Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau.	L L : .2 Hal.	
192	No.192 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.3 Th.2003 tentang Perubahan PERDA Kota Palu No.23 Th.2001 ttg Retribusi Perdagangan Ekspor Melalui Penerbitan Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal (SKA).	L L : .2 Hal.	
193	No.193 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.11/2003 ttg Retribusi Perdagangan Impor melalui Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan Barang Impor.	L L : .2 Hal.	
194	No.194 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Kota Kendari No.11 Th.2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Dibidang Syarat-syarat Kerja.	L L : .2 Hal.	
195	No.195 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Prov. Gorontalo No.15 Th.2003 ttg Retribusi Usaha Dibidang Perdagangan.	L L : .2 Hal.	
196	No.196 Tahun 2004 30 September 2004	Pembatalan PERDA Prov. Gorontalo No.25 Th.2003 ttg Retribusi Penempatan Tenaga Kerja.	L L : .2 Hal.	
197	No.197 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Deli Serdang No.22 Th.2003 tentang Pajak Parkir.	L L : .2 Hal.	
198	No.198 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Ogan Komering Ilir No.16 Th.2001 ttg Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri & Izin tanda Daftar Gudang.	L L : .2 Hal.	
199	No.199 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Perda Kab. Langkat No.05/2003 ttg Retribusi Pendaftaran Perusahaan.	L L : .2 Hal.	
200	No.200 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Lahat No.29 Th.2001 tentang Pajak Hasil Bumi.	L L : .2 Hal.	
201	No.201 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Perda Kab.Prabumulih No.41 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
202	No.202 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Perda Kota Bandar Lampung No.10 Th.2003 ttg Retribusi Bidang Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
203	No.203 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Bandar Lampung No.10 Th.2000 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : .2 Hal.	
204	No.204 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Kep. Bupati Lampung Selatan No.11 Th.2002 ttg Uji Mutu Produk Perikanan.	L L : .2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
205	No.204 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tulang Bawang No.11 Th.2003 tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber daya Alam Daerah untuk Usaha Bidang Perkebunan.	L L : .2 Hal.	
206	No.206 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Lampung Selatan No.21 Th.2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.	L L : .2 Hal.	
207	No.207 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Surabaya No.1 Th.2003 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
208	No.208 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Kediri No.8 / 2003 tentang retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
209	No.209 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Barito Selatan No.6 Th.2003 tentang Retribusi Izin Industri Kayu.	L L : .2 Hal.	
210	No.210 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.18 Th.2001 tentang Izin Undian dan Pajak Hadiah Undian dalam rangka Pengumpulan Sumbangan untuk Kesejahteraan Sosial.	L L : .2 Hal.	
211	No.211 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Mataram No.7 Th.2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
212	No.212 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Mataram No.8 Th.2002 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	L L : .2 Hal.	
213	No.213 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Barat No.21 Th.2001 tentang Retribusi Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu.	L L : .2 Hal.	
214	No.214 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Barat No.27 Th.2001 tentang Pajak Pengiriman Barang Antar Pulau.	L L : .2 Hal.	
215	No.215 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Pare-pare No.4 Th.2004 tentang Usaha Kepariwisataaan.	L L : .2 Hal.	
216	No.216 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Prop. Sulawesi Utara No.2 Th.2002 ttg Retribusi Pengawasan Mutu & Pengembangan Produksi Cengkih & Pala.	L L : .2 Hal.	
217	No.217 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Maros No.5 Th.2002 tentang Retribusi Izin tempat Usaha.	L L : .2 Hal.	
218	No.218 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Perda Kab.Maros No.09 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : .2 Hal.	
219	No.219 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Maros No.10 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	L L : .2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
220	No.220 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Maros No.18 Th.2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : .2 Hal.	
221	No.221 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.4 Th.2003 tentang Perubahan Perda Kota Palu No.19 Th.2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.	L L : .2 Hal.	
222	No.222 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.5 Th.2003 tentang Perubahan Perda Kota Palu No.9 Th.2001 tentang Retribusi Surat Izin Industri (SIUI).	L L : .2 Hal.	
223	No.223 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Nunukan No.16 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	L L : .2 Hal.	
224	No.224 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Balikpapan No.16 Th.2003 tentang Retribusi Izin Bidang	L L : .2 Hal.	
225	No.225 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Benkayang No.1 Th.2001 tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan.	L L : .2 Hal.	
226	No.226 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Banjar Baru No.4 Th.2002 tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan.	L L : .2 Hal.	
227	No.227 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Prov. Sumatera Selatan No.21 Th.2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sumsel dibidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum Serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik.	L L : .2 Hal.	
228	No.228 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Kendari No.2 Th.2002 ttg Surat Izin Usaha Perdagangan.	L L : .2 Hal.	
229	No.229 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palu No.9 Th.2003 ttg Retribusi tanda daftar keagenan/distributor barang Jasa Produksi Dalam & Luar Negeri.	L L : .2 Hal.	
230	No.230 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.29 Th.2002 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik.	L L : .2 Hal.	
231	No.231 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Kerinci No.14 Th.2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Berambu.	L L : .2 Hal.	
232	No.232 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Timur No.07 Th.2000 tentang Pajak Reklame.	L L : .2 Hal.	
233	No.233 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan Perda Kab.Bengkulu Utara No.13 Th.2002 ttg Retribusi Minyak Kelapa Sawit.	L L : .2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
234	No.234 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Murung Raya No.18 Th.2003 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang.	L L : .2 Hal.	
235	No.235 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Tulang Bawang No.18 Th.2001 tentang Perubahan I Perda No.30 Th.1998 tentang Pajak Reklame.	L L : .2 Hal.	
236	No.236 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab.Tulang Bawang No.12 Th.2003 ttg Perubahan I Perda No.21 Th.1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : .2 Hal.	
237	No.237 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab.Lahat No.34 / 2001 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan.	L L : .2 Hal.	
238	No.238 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab.Indragiri Hilir No.56 Th.2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan.	L L : .2 Hal.	
239	No.239 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Mataram No.22 Th.2001 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan Jalan.	L L : .2 Hal.	
240	No.240 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Sintang No.13 Th.2002 tentang Izin Bengkel.	L L : .2 Hal.	
241	No.241 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Selatan No.11 Th.2002 tentang Perubahan Pertama Perda Kab. Dati II Lampung Selatan No.02 Th.1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : .2 Hal.	
242	No.242 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Prov. Kalimantan Tengah No.4 Th.2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Muatan.	L L : .2 Hal.	
243	No.243 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.15 Th.2001 tentang Retribusi Angkutan Barang di Jalan.	L L : 2 Hal.	
244	No.244 Tahun 2004 7 Oktober 2004	Pembatalan PERDA Propinsi NTT No.7 Th.2001 tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
245	No.245 Tahun 2004 14 Oktober 2004	Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.	L L : 2 Hal. Lamp. : 43 hal.	
246	No.246 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.	L L : 2 Hal. Lamp. : 3 Hal.	
247	No.247 Tahun 2004	Susunan Panitia Rapat Kerja Teknis Kepala Daerah Dalam Rangka Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004.	L L : Hal. Lamp. : Hal.	
248	No.248 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Prov. Sumatera Barat No.1 Th. 2004 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Provinsi Sumatera Barat.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
249	No.249 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Prop. Riau No.7 Th.2000 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
250	No.250 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No.32 Th.2002 ttg Retribusi Jasa Pemeriksaan Uju Mutu Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
251	No.251 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Prop. Kep. Bangka Belitung No.5 Th.2003 tentang Pengendalian Pencemaran Air Dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.	L L : 2 Hal.	
252	No.252 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Deli Serdang No.12 Th.2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengawasan dan Penyediaan Racun Api.	L L : 2 Hal.	
253	No.253 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.47 Th.2001 tentang Retribusi Pengujian Kapal Ikan.	L L : 2 Hal.	
254	No.254 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Bangka No.13 Th.2003 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat.	L L : 2 Hal.	
255	No.255 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Indramayu No.33 Th.2002 tentang Pajak Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	L L : 2 Hal.	
256	No.256 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Karawang No.15 Th.2001 tentang Pengendalian, Perizinan dan Retribusi Limbah Padat.	L L : 2 Hal.	
257	No.257 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Temanggung No.1 Th.2003 tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
258	No.258 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan Keputusan Bupati Gresik No.33 Th.2003 tentang Penjabaran Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya.	L L : 2 Hal.	
259	No.259 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kabupaten Nunukan No.43 Th.2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
260	No.260 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kab. Cilacap No.56 Th.2003 tentang Ketenagalistrikan.	L L : 2 Hal.	
261	No.261 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.22 Th.2000 tentang Retribusi Pengelolaan Lingkungan Hidup.	L L : 2 Hal.	
262	No.262 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.03 Th.2001 tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
263	No.263 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kab. Murung Raya No.21/2003 ttg Retribusi Izin Keselamatan & Kesehatan Kerja di Kabupaten Murung Raya.	L L : 2 Hal.	
264	No.264 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan PERDA Kota Bontang No.9 Th.2002 tentang Retribusi Ijin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
265	No.265 Tahun 2004 24 Desember 2004	Pembatalan Perda Kota Bontang No.7/2004 ttg Retribusi Ijin Bidang Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2004 5 Januari 2004	Konsolidasi Dukungan Penyelenggaraan PEMILU 2004 oleh Jajaran Pemda.	L L : 5 Hal. Lamp. : 4 hal	
2	No.2 Tahun 2004 19 Maret 2004	Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.	L L : 4 Hal.	
3	No.3 Tahun 2004 5 Mei 2004	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	L L : -- Hal.	
4	No.4 Tahun 2004 2 Juni 2004	Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.	L L : -- Hal.	
5	No.5 Tahun 2004 26 Juli 2004	Stabilitas dan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Provinsi NAD.	L L : -- Hal.	
6	No.6 Tahun 2004 27 Oktober 2004	Tindak Lanjut Arahan Presiden kepada Gubernur dan Hasil Rapat Kerja Gubernur se Indonesia tgl. 25 Oktober 2004.	L L : -- Hal.	
7	No.7 Tahun 2004 27 Oktober 2004	Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.	L L : -- Hal.	
8	No.8 Tahun 2004 30 Desember 2004	Langkah-langkah Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara.	L L : -- Hal.	
<b>TAHUN 2005</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2005 3 Januari 2005	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 179 Hal.	Dicabut dg Permen No.55 Th.2010
2	No. 2 Tahun 2005 3 Januari 2005	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.	L L : 179 Hal.	Dicabut dg Permen No.54 Th.2009
3	No. 3 Tahun 2005 3 Januari 2005	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.	L L : 179 Hal.	Dicabut dg Permen No.54 Th.2009

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 2005 19 Januari 2005	Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.	L L : 13 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2005 20 Januari 2005	Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Prov. dan Kab./Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.	L L : 18 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2005 25 Januari 2005	Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.	L L : 7 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2005 25 Januari 2005	Batas Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen.	L L : 3 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2005 28 Januari 2005	Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.	L L : 4 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2005 24 Pebruari 2005	Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 5 Hal.	
10	No.10 Tahun 2005 24 Pebruari 2005	Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah.	L L : 5 Hal. Penj.: 7 hal.	Dicabut dg Permen No.11 Th.2010
11	No.11 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 8 Hal. Lamp. : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.4 Th.2006
12	No.12 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 12 Hal. Lamp. 34 Hal.	Diubah dg Permen No.21 Th.2005
13	No.13 Tahun 2005 17 Maret 2005	Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.	L L : 7 Hal. Lamp.: 14 Hal.	Dicabut dg Permen No.13 Th.2007
14	No.14 Tahun 2005 7 Maret 2005	Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 tentang APBD Prov. Sulawesi Barat TA.2005.	L L : 4 Hal.	
15	No.15 Tahun 2005 13 April 2005	Batas Wilayah Kab. Mamasa dengan Kabupaten Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polewalimamasa Prov. Sulawesi Barat.	L L : 5 Hal.	
16	No.16 Tahun 2005 21 April 2005	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005.	L L : 4 Hal. Lamp.: 294 Hal.	Diubah dg Pemen No.27 Th.2005 Dicabut dg Permen No.2 Th.2006
17	No.17 Tahun 2005 21 April 2005	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005.	L L : 3 Hal. Lamp.: 9 Hal.	Dicabut dg Permen No.3 Th.2006
18	No.18 Tahun 2005 28 April 2005	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 Hal.	Dicabut dg Permen No.6 Th.2008

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
19	No.19 Tahun 2005 10 Mei 2005	Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingk. DDN.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.5 Th.2006
20	No.20 Tahun 2005 12 Mei 2005	Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingk. DDN, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.	L L : 6 Hal. Lamp.: 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.11 Th.2011
21	No.21 Tahun 2005 25 Mei 2005	Perubahan atas Permendagri No.12 Th.2005 ttg Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 6 Hal. Lamp.: 3 Hal.	
22	No.22 Tahun 2005	Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.43 Th.2005
23	No.23 Tahun 2005	BATAL		
24	No.24 Tahun 2005 16 Juni 2005	Perubahan atas Kepber Menkes & Mendagri RI No.616.A/Menkes/SKB/VI/2004 & No.155A Th.2004 ttg Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) & Anggota Keluarganya di Puskesmas & RS Daerah.	L L : 6 Hal.	Dicabut dg Permen No.12 Th.2009
25	No.25 Tahun 2005 17 Juni 2005	Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.	L L : 4 Hal.	
26	No.26 Tahun 2005 17 Juni 2005	Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.	L L : 3 Hal. Lamp.: 28 Hal.	
27	No.27 Tahun 2005 21 Juni 2005	Perubahan Permendagri No.16 Th.2005 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005.		Dicabut dg Permen No.2 Th.2006
28	No.28 Tahun 2005 5 Juli 2005	Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.		Dicabut dg Permen No.19 Th.2010
29	No.29 Tahun 2005 22 Juli 2005	Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 20 Hal. Lamp.: 10 Hal.	
30	No.30 Tahun 2005 26 Juli 2005	Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari unsur Perwakilan Pemda, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan.	L L : 4 Hal.	
31	No.31 Tahun 2005 26 Juli 2005	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.	L L : 7 Hal.	
32	No.32 Tahun 2005 28 Juli 2005	Pedoman Pengajuan, penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.	L L : 8 Hal. Lamp. : 3 hal	Diubah dg Permen No.25 Th.2006 Dicabut dg Permen No.24 Th.2009
33	No.33 Tahun 2005 1 Agustus 2005	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg Belum Diatur dlm Permendagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005.	L L : 2 Hal. Lamp. : 2 hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
34	No.34 Tahun 2005 3 Agustus 2005 <small>No.1138/MENKES/PB/VIII/05</small>	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.	L L : 7 Hal. Lamp. : 54 hal	
35	No.35 Tahun 2005 18 Agustus 2005	Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.	L L : 18 Hal. Lamp. : 20 hal	Dicabut dg Permen No.19 Th.2013
35A	No.35A Tahun 2005 25 Agustus 2005	Perubahan atas Kepmendagri No.94 Th.2003 ttg Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Rigieter Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.	L L : 3 Hal. Lamp. : 2 hal	
36	No.36 Tahun 2005 8 September 2005	Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi.	L L : 3 Hal.	
37	No.37 Tahun 2005 27 September 2005	Perubahan atas Permendagri No.33 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg Belum Diatur dlm Permendagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005.	L L : 2 Hal. Lamp. : 2 hal	
38	No.38 Tahun 2005 4 Oktober 2005	Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 Hal.	Dicabut dg Permen No.78 Th.2012
39	No.39 Tahun 2005 4 Oktober 2005	Pedoman Tata Kearsipan di Daerah.	L L : 4 Hal.	Dicabut dg Permen No.78 Th.2012
40	No.40 Tahun 2005 11 Nopember 2005	Perubahan atas Permendagri No.16 Th.2005 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.	L L : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2005 28 Nopember 2005	Perubahan atas Kedua atas Permendagri No.33 Th.2005 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum diatur dalam Permendagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.	L L : 2 Hal.	
42	No.42 Tahun 2005 5 Desember 2005	Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	L L : 13 Hal.	
43	No.43 Tahun 2005 30 Desember 2005	Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.36 Th.2009
44	No.44 Tahun 2005 30 Desember 2005	Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2005 - 2009.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>KEPMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 2005 13 Januari 2005	Pembatalan Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.23 Th.2001.	L L : 2 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2005 1 Pebruari 2005	Pembatalan Kepala Bupati Tapanuli Utara No.14 Th.2003.	L L : 2 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2005 1 Pebruari 2005	Pembatalan SK Bupati Simalungun No.522.21/5781/ Tahun 2001.	L L : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Pertanian dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Hijauan Makanan Ternak.	L L : 2 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Perdagangan Ternak, Produksi Ternak, Hewan Piara dan Bahan Asal Hewan.	L L : 2 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Pare-Pare No.5 Tahun 2004 tentang Usaha Peternakan dan Pemeliharaan Ternak.	L L : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Propinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2005 3 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo.	L L : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Prov. Lampung No.10 Th.2000 ttg Retribusi Pelayanan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Antar Area.	L L : 2 Hal.	
11	No.11 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Lampung Timur No.10 Th.2002 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan.	L L : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Lampung Timur No.15 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/Bibit serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan.	L L : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Merangin No.34 Th.2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.	L L : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.19 Th.2000 ttg Usaha Perikanan, Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Perdagangan Daging Dalam Wilayah Kota Samarinda.	L L : 2 Hal.	
15	No.15 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Bontang No.7 Th.2002 tentang Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan.	L L : 2 Hal.	
16	No.16 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Bengkayang No.3 Th.2001 tentang Retribusi Telur Ayam Buras.	L L : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2005 14 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Pontianak No.7 Th.2003 tentang Perubahan Pertama atas PERDA Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit.	L L : 2 Hal.	
18	No. 18 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Propinsi Lampung No.1 Th.2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
19	No. 19 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Bandar Lampung No.9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.	L L : 2 Hal.	
20	No. 20 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Bandung No.26 Th.2001 ttg Pelayanan di Bidang Pertanian.	L L : 2 Hal.	
21	No. 21 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Karawang No.3 Th.2002 tentang Retribusi Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan Hewan, Hasil Ternak serta Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
22	No. 22 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Tangerang No.9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tata Niaga Ternak.	L L : 2 Hal.	
23	No. 23 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jateng No.21 Th.2002 ttg Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.	L L : 2 Hal.	
24	No. 24 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab.Sragen No.20/2001 ttg Retribusi Ijin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	L L : 2 Hal.	
25	No. 25 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Sleman No.11 Th.2001 ttg Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
26	No. 26 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Temanggung No.14 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
27	No. 27 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Temanggung No.15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Peternakan.	L L : 2 Hal.	
28	No. 28 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab.Temanggung No.17 Th.2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan.	L L : 2 Hal.	
29	No. 29 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Tulungagung No.48 Th.2001 tentang Retribusi Tuberkuliasi pada Sapi Perah.	L L : 2 Hal.	
30	No. 30 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab.Madiun No.13/2002 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan.	L L : 2 Hal.	
31	No. 31 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Sampang No.23 Th.2002 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Atas Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	L L : 2 Hal.	
32	No. 32 Tahun 2005 16 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Blitar No.20 Th.2000 tentang Retribusi Pemberian Ijin Usaha bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	L L : 2 Hal.	
33	No. 33 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Deli Serdang No.22 Th.2000 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
34	No. 34 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab.Deli Serdang No.25 Th.2000 ttg Pajak Produksi Hasil Tambak.	L L : 2 Hal.	
35	No. 35 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Langkat No.33 Th.2002 tentang Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
36	No. 36 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Langkat No.35 Th.2002 ttg Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
37	No. 37 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.09 Th.2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
38	No. 38 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No.29/2002 ttg Izin Usaha Perikanan	L L : 2 Hal.	
39	No. 39 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Nunukan No.25 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
40	No. 40 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Nunukan No.24 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai.	L L : 2 Hal.	
41	No. 41 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.18 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan & Izin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Hasil Perikanan yg diperdagangkan keluar Daerah dan Karantina Ikan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No. 42 Tahun 2005 21 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Pontianak No.12 Th.2002 ttg Retribusi Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
43	No. 43 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Tabanan No.26 Th.2002 ttg Retribusi Ijin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
44	No. 44 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Tengah No.17 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
45	No. 45 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Kupang No.12 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan.	L L : 2 Hal.	
46	No. 46 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Gowa No.19 Th.2001 ttg Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan.	L L : 2 Hal.	
47	No. 47 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.47 Th.2001 ttg Pajak Alat Tangkap Ikan.	L L : 2 Hal.	
48	No. 48 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.69 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
49	No. 49 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Buol No.2 Th.2001 ttg Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan.	L L : 2 Hal.	
50	No. 50 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Manado No.15 Th.2001 ttg Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya dan Fasilitas Umum di Bidang Perikanan dan Kebaharian.	L L : 2 Hal.	
51	No. 51 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kab. Jeneponto No.12 Th.2003 ttg Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
52	No. 52 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Prov. Maluku Utara No.9 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
53	No. 53 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan Perda Kab. Maluku Tengah No.4 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
54	No. 54 Tahun 2005 29 Maret 2005	Pembatalan PERDA Kota Ambon No.14 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha dan Pungutan Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
55	No. 55 Tahun 2005 4 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jawa Tengah No.3 Th.2004 ttg Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kab./Kota di Prov. Jateng.	L L : 2 Hal.	
56	No. 56 Tahun 2005 6 April 2005	Pembatalan Kep. Gubernur Jambi No.274 Th.2001 ttg Sumbangan Pihak Ketiga dari Para Pemilik/Penguasa Kendaraan Bermotor Luar Daerah yg Dioperasikan di Prov. Jambi.	L L : 2 Hal.	
57	No. 57 Tahun 2005 6 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Selayar No.17 Th.2003 ttg Pemanfaatan Kaw. Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
58	No. 58 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Aceh Singkil No.6 Th.2004 ttg Pajak Hasil Bumi.	L L : 2 Hal.	
59	No. 59 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Deli Serdang No.30 Th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.	L L : 2 Hal.	
60	No. 60 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Langkat No.6 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
61	No. 61 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Simalungun No.5 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
62	No. 62 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Asahan No.5 Th.2000 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
63	No. 63 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Asahan No.6 Th.2000 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	L L : 2 Hal.	
64	No. 64 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Labuhan Batu No.16 Th.2002 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
65	No. 65 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Kampar No.07 Th.2003 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
66	No. 66 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Bataghari No.11 Th.1997 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
67	No. 67 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Muaro Jambi No.4 Th.2001 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
68	No. 68 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Tebo No.11 Th.2001 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
69	No. 69 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung No.31 Th.1996 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Prop. Tk.I Lampung No.8 Th.1984 ttg Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur di Prov. Tk.I Lampung.	L L : 2 Hal.	
70	No. 70 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Tulang Bawang No.06 Th.2004 ttg Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka.	L L : 2 Hal.	
71	No. 71 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Tulang Bawang No.13 Th.2004 ttg Pajak Parkir.	L L : 2 Hal.	
72	No. 72 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Way Kanan No.25 Th.2002 ttg Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	L L : 2 Hal.	
73	No. 73 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan Kep. Walikota Bandar Lampung No.820/554/04/2004 ttg Retribusi Pemeriksa- an Kesehatan Ternak yg masuk dan atau keluar dari wilayah Kota Bandar Lampung.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
74	No. 74 Tahun 2005 15 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Buton No.17/2001 ttg Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
75	No. 75 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kota Metro No.04/2004 ttg Retribusi Ijin Bongkar Muat.	L L : 2 Hal.	
76	No. 76 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Musi Banyuasin No.10/2002 ttg Retribusi Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA).	L L : 2 Hal.	
77	No. 77 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kota Metro No.05/2004 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.	L L : 2 Hal.	
78	No. 78 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Lamandau No.19 Th.2004 ttg Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
79	No. 79 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Lamandau No.18 Th.2004 ttg Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
80	No. 80 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Lamandau No.23/2004 ttg Retribusi Parkir Berlangganan.	L L : 2 Hal.	
81	No. 81 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jambi No.5/2004 ttg Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
82	No. 82 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jambi No.2/2004 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan.	L L : 2 Hal.	
83	No. 83 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Natuna No.4/2004 ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.	L L : 2 Hal.	
84	No. 84 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan Kep.Bupati Katingan No.12/2005 ttg Petunjuk Teknis Perda No.8 Th.2004 ttg Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.	L L : 2 Hal.	
85	No.85 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Pelalawan No.12 Th.2003 ttg Retribusi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Sumatera Selatan No.28 Th.2001 ttg Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
87	No.87 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Kalimantan Barat No.3 Th.2004 ttg Pengaturan Kendaraan Bermotor Bukan Baru dari Luar Negeri.	L L : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Maluku No.19 Th.2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
89	No.89 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Maluku No.18 Th.2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
90	No.90 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov. Maluku No.15 Th.2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
91	No.91 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Prov.Maluku No.12/2004 ttg Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi.	L L : 2 Hal.	
92	No.92 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.2 Th.2001 ttg Pajak Sarang Burung Walet, Telur Penyu dan Rumput Laut.	L L : 2 Hal.	
93	No.93 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.13 Th.2004 ttg Izin Usaha Pertambangan.	L L : 2 Hal.	
94	No.94 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Sukoharjo No.7 Th.2004 ttg Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.	L L : 2 Hal.	
95	No.95 Tahun 2005 29 April 2005	Pembatalan PERDA Kab.Wonosobo No.16 Th.2003 ttg Izin Usaha, Izin Perluasan dan Tanda daftar Industri.	L L : 2 Hal.	
96	No.96 Tahun 2005 12 Mei 2005	Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.	L L : 5 Hal.	
97	No.97 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab. Sampang No.20 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Gudang.	L L : 2 Hal.	
98	No.98 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab. Sampang No.21 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha	L L : 2 Hal.	
99	No.99 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Prov. Sumatera Utara No.7 Th.2002 ttg Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab. Siak No.22 Th.2002 ttg Ketentuan Retribusi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Timur No.8 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
102	No.102 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Rote Ndao No.17 Th.2004 ttg Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Jeneponto No.10 Th.2001 ttg Registrasi Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
104	No.104 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kota Cimahi No.26 Th.2003 ttg Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Ijin Usaha Industri.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab.Klaten No.11/2003 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan Perda Kab.Karangayar No.7/02 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kota Magelang No.13 Th.2001 ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab.Jepara No.13/2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan Perda Kab. Wonosobo No.16 Th.2003 Tentang Izin Usaha, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab.Rote Ndao No.34 Th.2004 ttg Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Takalar No.14 Th.2001 ttg Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No.30 Th.2002 ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Prov. Kalimantan Barat No.7 Th.2003 ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Tangerang No.14 Th.2004 ttg Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jambi No.7/ 2001 ttg Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Prov. Jambi No.6 Th.2001 ttg Pungutan Pengusahaan	L L : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kota Pontianak No.14 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum.	L L : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kabupaten Sampang No.7 Th.2003 ttg Retribusi Perlindungan Jalan dari Pemakaian Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 2005 4 Juli 2005	Pembatalan PERDA Kab. Siak No.29 Th.2002 ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.	L L : 2 Hal.	
120		KOSONG		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
121		KOSONG		
122		KOSONG		
123	No.123 Tahun 2005 14 Juli 2005	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN.	L L : 3 Hal.	
124	No.124 Tahun 2005 5 Agustus 2005	Pemberian Penghargaan Astha Brata kepada Wisudawan Terbaik Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Tahun Akademik 2004/2005.	L L : 3 Hal.	
125		KOSONG		
126	No.126 Tahun 2005 8 September 2005	Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	L L : 3 Hal.	
127		KOSONG		
128	No.128 Tahun 2005 8 September 2005	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.28 Th.2000 ttg usaha peternakan, penampungan, pemotongan unggas, peredaran daging dan telur unggas dalam wilayah Kota Samarinda.	L L : 3 Hal.	
129	No.129 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.30 Th.2000 ttg Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal.	L L : 3 Hal.	
130	No.130 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.8 Th.2001 ttg Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang.	L L : 3 Hal.	
131	No.131 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kota Banjarbaru No.9 Th.2002 ttg Retribusi Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.	L L : 3 Hal.	
132	No.132 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kota Bontang No.5 Th.2002 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 3 Hal.	
133	No.133 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kab. Morowali No.15 Th.2003 ttg Pembinaan, Pengawasan Perdagangan Hasil Bumi dan Hasil Industri.	L L : 3 Hal.	
134	No.134 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kab. Enrekang No.32 Th.2001 ttg Retribusi Pembinaan Kepemilikan Alat Ukur, Takar, Timbang serta Perlengkapannya.	L L : 3 Hal.	
135	No.135 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kab. Flores Timur No.7 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 3 Hal.	
136	No.136 Tahun 2005 14 Desember 2005	Pembatalan PERDA Kab. Flores Timur No.2 Th.2004 ttg Retribusi Atas Izin penimbunan dan Penyimpanan BBM.	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2005 21 Februari 2005	Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : -- Hal.	
2	No. 2 Tahun 2005 29 Maret 2005	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat di Lingkungan Depdagri.	L L : -- Hal.	
3	No. 3 Tahun 2005 27 April 2005	Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia.	L L : -- Hal.	
4	No. 4 Tahun 2005 28 Juli 2005	Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.	L L : -- Hal.	
5		KOSONG/BATAL		
6	No. 6 Tahun 2005 9 September 2005	Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemberdayaannya ke Dalam Masyarakat di Prov. Naggroe Aceh Darussalam.	L L : -- Hal.	
7	No. 7 Tahun 2005 27 September 2005	Percepatan Penyusunan Peraturan Per-UU-an Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah.	L L : -- Hal.	
8	No. 8 Tahun 2005 27 September 2005	Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Pondok Pesantren.	L L : -- Hal.	
<b>TAHUN 2006</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2006 12 Januari 2006	Pedoman Penegasan Batas Daerah.	L L : 40 hal.	Dicabut dg Permen No.76 Th.2012
2	No. 2 Tahun 2006 27 Januari 2006	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.	L L : 5 hal. Lamp.:446 hal.	Dicabut dg Permen No.9 Th.2007
3	No. 3 Tahun 2006 27 Januari 2006	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Tahun 2006.	L L : 5 hal. Lamp.: hal.	Dicabut dg Permen No.10 Th.2007
4	No. 4 Tahun 2006 27 Januari 2006	Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 14 hal.	Dicabut dg Permen No.3 Th.2007
5	No. 5 Tahun 2006 27 Januari 2006	Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 hal.	Dicabut dg Permen No.3 Th.2007

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 2006 15 Maret 2006	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	L L : 8 hal.	
7	No. 7 Tahun 2006 15 Maret 2006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	L L : 48 hal.	Diubah dg Permen No.11 Th.2007
8	No. 8 Tahun 2006 21 Maret 2006 Peraturan Bersama dg Menag No.9 Th.2006	Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.	L L : 9 hal.	Mencabut Kepber Menag & MDN No.01/BER/MDN-MAG/1969
9	No. 9 Tahun 2006 5 April 2006	Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.	L L : 4 hal.	
10	No.10 Tahun 2006 8 Mei 2006	Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.	L L : 9 hal.	
11	No.11 Tahun 2006 11 Mei 2006	Komunitas Intelijen Daerah.	L L : 5 hal.	Diubah dg Permen No.16 Th.2011
12	No.12 Tahun 2006 11 Mei 2006	Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.	L L : 7 hal.	
13	No.13 Tahun 2006 15 Mei 2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	L L : 700 hal.	Diubah dg Permen No.59 Th.2007 & No.21 Th.2011
14	No.14 Tahun 2006	Kosong/Batal		
15	No.15 Tahun 2006 19 Mei 2006	Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah	L L : 12 hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2011
16	No.16 Tahun 2006 19 Mei 2006	Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.	L L : 6 hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2011
17	No.17 Tahun 2006 19 Mei 2006	Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	L L : 4 hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2011
18	No.18 Tahun 2006 19 Mei 2006	Batas Daerah Antara Kab.Cilacap Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.	L L : 4 hal.	
19	No.19 Tahun 2006 19 Mei 2006	Batas Daerah Antara Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.	L L : 6 hal.	
20	No.20 Tahun 2006 15 Juni 2006	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.		Dicabut dg Permen No.46 Th.2007
21	No.21 Tahun 2006 22 Juni 2006	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang.	L L : 8 hal.	
22	No.22 Tahun 2006 23 Juni 2006	Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.	L L : 10 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 2006 3 Juli 2006	Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.	L L : 10 hal.	
24	No.24 Tahun 2006 6 Juli 2006	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	L L : 10 hal.	
25	No.25 Tahun 2006 19 Juli 2006	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.	L L : 4 hal.	Dicabut dg Permen No.24 Th.2009
26	No.26 Tahun 2006 1 September 2006	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007	L L : 46 hal.	
27	No.27 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Penetapan dan Penegasan Batas Desa.	L L : 35 hal.	
28	No.28 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.	L L : 8 hal.	
29	No.29 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.	L L : .. hal.	Dicabut dg Permen No.111 Th.2014
30	No.30 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.	L L : 9 hal.	
31	No.31 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.	L L : 5 hal.	
32	No.32 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pedoman Administrasi Desa.	L L : 51 hal.	Psl 2 butir b & Psl 3 ayat (2) dicabut dg Permen No.19/2010
33	No.33 Tahun 2006 18 Oktober 2006	Pedoman Umum Mitigasi Umum.	L L : 32 hal.	
34	No.34 Tahun 2006 18 Oktober 2006	Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.	L L : 8 hal.	
35	No.35 Tahun 2006 7 Nopember 2006	Pemantau Asing Dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh.	L L : 11 hal.	
36	No.36 Tahun 2006 28 Desember 2006	Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali.	L L : 4 hal. Lamp. : 1 peta	
37	No.37 Tahun 2006 29 Desember 2006	Batas Daerah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.	L L : 6 hal. Lamp. : 1 peta	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Solok No.14 Th.2002 ttg Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Prov. Bengkulu No.1 Th.2003 ttg Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan air Permukaan.	L L : 3 Hal.	
3	No.3 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Prov. Bengkulu No.2 Th.2003 ttg Pengusahaan Pertambangan Umum.	L L : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Prov. Bengkulu No.3 Th.2003 ttg Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum, dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.	L L : 3 Hal.	
5	No.5 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Sintang No.7 Th.2000 ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.	L L : 3 Hal.	
6	No.6 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Berau No.18 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 3 Hal.	
7	No.7 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Berau No.19/2002 ttg Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Hewan Ternak & Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak di Kab. Berau.	L L : 3 Hal.	
8	No.8 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Berau No.10 Th.2002 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	L L : 3 Hal.	
9	No.9 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Kotabaru No.10 Th.2002 ttg Retribusi Hasil Produksi Usaha Perkebunan.	L L : 3 Hal.	
10	No.10 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Kotabaru No.3 Th.2003 ttg Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan.	L L : 3 Hal.	
11	No.11 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Serang No.12 Th.2002 ttg Retribusi Penerbitan Daftar Pengkangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutan.	L L : 3 Hal.	
12	No.12 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Prov. Jateng No.6/2002 ttg Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah).	L L : 3 Hal.	
13	No.13 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Kota Pekalongan No.6 Th.2002 ttg Retribusi Izin Dispensasi Jalan.	L L : 3 Hal.	
14	No.14 Tahun 2006 9 Januari 2006	Pembatalan PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No.13 Th.2001 ttg Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.	L L : 3 Hal.	
15	No.15 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Kebumen No.52 Th.2004 ttg Retribusi Ketenagakerjaan.	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
16	No.16 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Kapuas No.9 Th.2003 ttg Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.	L L : 3 Hal.	
17	No.17 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Sikka No.24 Th.2001 ttg Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Ke Luar Negeri.	L L : 3 Hal.	
18	No.18 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kab. Sikka No.23 Th.2001 ttg Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang di Kabupaten Sikka.	L L : 3 Hal.	
19	No.19 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kotamadya Dati II Ujung Pandang No.8 Th.1996 ttg Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Dati II Ujung Pandang.	L L : 3 Hal.	
20	No.20 Tahun 2006 28 Pebruari 2006	Pembatalan PERDA Kota Makassar No.13 Th.2002 ttg Pajak Parkir.	L L : 3 Hal.	
21		KOSONG		
22		KOSONG		
23		KOSONG		
24	No.24 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kota Dumai No.1 Th.2000 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	L L : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Sukabumi No.9 Th.2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan.	L L : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Barru No.12 Th.2001 ttg Retribusi Pengawasan Ternak.	L L : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Barru No.16 Th.2001 ttg Retribusi Dispensasi Jalan Daerah.	L L : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Barru No.8 Th.2002 ttg Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Barru.	L L : 2 Hal.	
29	No.29 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.4 Th.2000 ttg Pajak Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.10 Th.2001 ttg Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
31	No.31 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.16 Th.2003 ttg Retribusi Penyebaran/ Pemasaran Benih Ikan Tawar dalam Kabupaten Tana Toraja.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No.32 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kab. Tana Toraja No.17 Th.2003 ttg Retribusi Pemeriksaan/ Pengujian Mutu Ikan Dalam Kabupaten Tana Toraja.	L L : 2 Hal.	
33	No.33 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.18 Th.2003 ttg Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kota Palopo No.17 Th.2004 ttg Retribusi Registrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	L L : 2 Hal.	
35	No.34 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kota Palopo No.26 Th.2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
36	No.36 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No.7 Th.2004 ttg Retribusi Izin Gangguan.	L L : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kabupaten Indragiri Hilir No.08 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pemancar Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.	L L : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Provinsi Banten No.50 Th.2002 ttg Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.	L L : 2 Hal.	
39	No.39 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Kota Cilegon No.03 Th.2004 ttg Retribusi Izin Gangguan.	L L : 2 Hal.	
40	No.40 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan PERDA Provinsi Jawa Tengah No.14 Th.2003 ttg Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.	L L : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Kendal No.18 Th.2004 ttg Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal.	L L : 2 Hal.	
42	No.42 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Sleman No.9/PER.BUP/2005 ttg Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.	L L : 2 Hal.	
43	No.43 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan No.1A Th.2005 ttg Pemberian Izin Pembangunan Menara Antena/Tower.	L L : 2 Hal.	
44	No.44 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Tabanan No.674 Th.2002 ttg Persetujuan Prinsip Membangun.	L L : 2 Hal.	
45	No.45 Tahun 2006 10 Agustus 2006	Pembatalan Keputusan Bupati Buleleng No.46 Th.2004 ttg Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah atas Keberadaan Tower Telpon Seluler di Kabupaten Buleleng.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No.46 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan.	L L : 2 Hal.	
47	No.47 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat Terhadap Kendaraan Pengangkut Barang.	L L : 2 Hal.	
48	No.48 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
49	No.49 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat.	L L : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kab. Gunung Mas No.18 Tahun 2004 ttg Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	L L : 2 Hal.	
52	No.52 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
53	No.53 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan.	L L : 2 Hal.	
54	No.54 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kab. Sragen No.6 Th.2004 Ttg Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen.	L L : 2 Hal.	
55	No.55 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
56	No.56 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Prov. DI. Yogyakarta No.2 Th.2002 Ttg Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Prov. DIY.	L L : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
58	No.58 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
59	No.59 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah.	L L : 2 Hal.	
60	No.60 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kab. Dompu No.4 Tahun 2004 Tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompu.	L L : 2 Hal.	
61	No.61 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jalan dan Jembatan.	L L : 2 Hal.	
62	No.62 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang.	L L : 2 Hal.	
63	No.63 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kota Bima No. 9 Tahun 2004 Ttg Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Sepeda Motor.	L L : 2 Hal.	
64	No.64 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kab. Belu No.14 Tahun 2004 Ttg Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Republik Demokratik Timor Leste ke Wilayah Kabupaten Belu.	L L : 2 Hal.	
65	No.65 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
66	No.66 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Izin Dispensasi Jalan Daerah.	L L : 2 Hal.	
67	No.67 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Wilayah Kota Makassar.	L L : 2 Hal.	
68	No.68 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Prov. Gorontalo No.42 Th. 2002 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	L L : 2 Hal.	
69	No.69 Tahun 2006 14 Agustus 2006	Pembatalan Perda Kab. Donggala No.29 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
70	No.70 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
71	No.71 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Perda Kota Binjai No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pengangkutan dan Pemasaran Unggas dan Telur dari dan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.	L L : 2 Hal.	
73	No.73 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pas Ternak.	L L : 2 Hal.	
74	No.74 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pematongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging.	L L : 2 Hal.	
75	No.75 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Hewan.	L L : 2 Hal.	
76	No.76 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2001 Ttg Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
77	No.77 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
78	No.78 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab.Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2001 Ttg Keur Hewan, Bahan Asal Dari Hewan dan Ikan.	L L : 2 Hal.	
79	No.79 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 24 Th. 2001 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak.	L L : 2 Hal.	
80	No.80 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Perda Kota Palopo No. 22 Th. 2004 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
81	No.81 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No.7 Th. 2002 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
82	No.82 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No.2 Th. 2001 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak, Hasil Ikutan Ternak, dan Usaha Peternakan.	L L : 2 Hal.	
83	No.83 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari No.12 Th.1999 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
84	No.84 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.6 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.	L L : 2 Hal.	
85	No.85 Tahun 2006 21 September 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No.21 Th.2002 Ttg Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak, Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak dan Sarana Produksi Peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika.	L L : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No.8 Th.2000 Ttg Pajak Gambir.	L L : 2 Hal.	
87	No.87 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.15 Th.2002 Ttg Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Lalu Lintas Hasil Kayu Olahan.	L L : 2 Hal.	
89	No.89 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai No.7 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Peralatan/ Mesin, Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
90	No.90 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab. Sarolangun No.40 Th.2001 Ttg Retribusi Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
91	No.91 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.34 Th.2001 Ttg Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal (SKA) Perikanan.	L L : 2 Hal.	
92	No.92 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab.Tanjung Jabung Timur No.46 Th.2001 Ttg Retribusi Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
93	No.93 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kabupaten Bungo No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
94	No.94 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab. Bangka No.25 Th.2001 Ttg Pajak Tandan Buah Segar (TBS).	L L : 2 Hal.	
95	No.95 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab. Lampung Selatan No.45 Th.2000 Ttg Retribusi Hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan.	L L : 2 Hal.	
96	No.96 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab. Kota Waringin Barat No.16 Th.2003 Ttg Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
97	No.97 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Perda Kab.Seruyan No.3.2004 ttg Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
98	No.98 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No.8 Th.2002 Ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan Kayu Keluar Daerah Kota Palangkaraya.	L L : 2 Hal.	
99	No.99 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Murung Raya No.32 Th.2004 Ttg Pungutan Daerah atas Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Keluar Daerah di Kab.Murung Raya.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur No.25 Th.2005 Ttg Retribusi Atas Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan Yang Diangkut Melalui dan atau Keluar Daerah Kab. Barito Timur.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.21 Th.2004 Ttg Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Industri.	L L : 2 Hal.	
102	No.102 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No.20 Th.2004 Ttg Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hutan Iktan, Perkebunan dan Hasil Industri keluar Daerah Kab. Pulang Pisau.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penimbunan, Pengolahan dan Penjualan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2006 9 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengolahan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan No.07 Tahun 2000 Tentang Peraturan Daerah 02 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat II Asahan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
108	No.108 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Izin Dan Retribusi Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin Dan Retribusi Izin Pergudangan Di Kabupaten Asahan.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kendaraan Umum.	L L : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 2006 10 Oktober 2006	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten Asahan.	L L : 2 Hal.	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2006 19 Januari 2006	Pemberlakuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	L L : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2006 16 Maret 2006	Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah.	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 2007</b>			
	<b>PERMENDAGRI</b>			
1	No.1 Tahun 2007 11 Januari 2007	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.	L L : 10 Hal.	
2	No.2 Tahun 2007 18 Januari 2007	Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.	L L : 15 Hal.	
3	No.3 Tahun 2007 26 Januari 2007	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Dep. Dalam Negeri.	L L : 12 Hal. Lamp.:4 hal.	Diubah dg Permen No.7 Th.2009
4	No.4 Tahun 2007 31 Januari 2007	Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.	L L : 9 Hal.	
5	No.5 Tahun 2007 5 Pebruari 2007	Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.	L L : 11 Hal.	
6	No.6 Tahun 2007 7 Pebruari 2007	Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.	L L : 13 Hal. Lamp.:9 hal.	
7	No.7 Tahun 2007 20 Pebruari 2007	Kader Pemberdayaan Masyarakat.	L L : 7 Hal.	
7A	No.7A Tahun 2007 21 Maret 2007	Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	L L : .. Hal.	
8	No.8 Tahun 2007 26 Pebruari 2007	Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak dan Gas Bumi.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.51 Th.2011
9	No.9 Tahun 2007 13 Maret 2007	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.15 & 43 Th.2007 Dicabut dg Permen No.22 Th.2008
10	No.10 Tahun 2007 13 Maret 2007	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.23 Th.2008
11	No.11 Tahun 2007 12 Pebruari 2007	Perubahan Atas Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.	L L : .. Hal. Lamp.: .. hal.	
12	No.12 Tahun 2007 12 Maret 2007	Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan.	L L : .. Hal. Lamp.: .. hal.	
13	No.13 Tahun 2007 12 Maret 2007	Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.	L L : .. Hal. Lamp.: .. hal.	
14	No.14 Tahun 2007 13 Maret 2007	Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.	L L : .. Hal. Lamp.: .. hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 2007 13 Maret 2007	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg belum tercantum dlm Permen- dagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.	L L : .. Hal. Lamp.: .. hal.	Diubah dg Permen No.22, 32 dan 78 Th.2007
16	No.16 Tahun 2007 20 Maret 2007	Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.36 Th.2011
17	No.17 Tahun 2007 21 Maret 2007	Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.	L L : .. Hal.	
18	No.18 Tahun 2007 26 Maret 2007	Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.	L L : .. Hal.	
19	No.19 Tahun 2007 28 Maret 2007	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.	L L : .. Hal.	
20	No.20 Tahun 2007 17 April 2007	Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah.	L L : .. Hal.	
21	No.21 Tahun 2007 30 April 2007	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung- jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.	L L : .. Hal.	
22	No.22 Tahun 2007 4 Mei 2007	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2007 ttg Penghitungan Dasar Pengeran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.	L L : .. Hal.	
23	No.23 Tahun 2007 22 Mei 2007	Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.8 Th.2009
24	No.24 Tahun 2007 22 Mei 2007	Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.	L L : .. Hal.	
25	No.25 Tahun 2007 22 Mei 2007	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	L L : .. Hal.	
26	No.26 Tahun 2007	KOSONG		
27	No.27 Tahun 2007 25 Mei 2007	Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2007 30 Mei 2007	Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.	L L : .. Hal.	
29	No.29 Tahun 2007 20 Juni 2007	Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.	L L : .. Hal.	
30	No.30 Tahun 2007 20 Juni 2007	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.	Hal.: 3 Hal Lamp.:45 Hal	
31	No.31 Tahun 2007 3 Juli 2007	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.	Hal.: 6 Hal	
32	No.32 Tahun 2007 9 Juli 2007	Perubahan Kedua atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007	Hal.: 3 Hal Lamp.: 5 Hal	
33	No.33 Tahun 2007 24 Juli 2007	Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Hal.: 8 Hal	
34	No.34 Tahun 2007 24 Juli 2007	Pedoman Administrasi Kelurahan.	Hal.: 4 Hal Lamp.:26 Hal	
35	No.35 Tahun 2007 24 Juli 2007	Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	LL : .. Hal	
36	No.36 Tahun 2007 24 Juli 2007	Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah.	LL : .. Hal	
37	No.37 Tahun 2007 24 Juli 2007	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	LL : .. Hal	
38	No.38 Tahun 2007 24 Juli 2007	Kerjasama Desa.	LL : .. Hal	
39	No.39 Tahun 2007 21 Agustus 2007	Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.	LL : .. Hal	
40	No.40 Tahun 2007 2 Agustus 2007	Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan bahasa daerah.	LL : .. Hal	
41	No.41 Tahun 2007 30 Agustus 2007	Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah Kesekretariatan.	LL : .. Hal	
42	No.42 Tahun 2007 11 Sept. 2007	Pengelolaan Pasar Desa.	LL.: 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
43	No.43 Tahun 2007 12 Sept. 2007	Perubahan Ketiga atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Th.2007.	LL.: 4 Hal.	
44	No.44 Tahun 2007 12 Sept. 2007	Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	LL.: 13 Hal.	
45	No.45 Tahun 2007 21 Sept. 2007	Penetapan Kabupaten Siak Sebagai Daerah Penghasil Sumur Minyak Bumi Lapangan Sabak dan Pedada Area.	LL : .. Hal	
46	No.46 Tahun 2007 21 Sept. 2007	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingk. DDN.	LL : .. Hal	
47	No.47 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dgn Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.	LL.: 17 Hal.	
48	No.48 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.	LL.: 5 Hal.	
49	No.49 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.	LL : .. Hal	
50	No.50 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Th.2007 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Peg. Negeri Sipil.	LL.: 10 Hal.	Diubah dg Permen No.21 Th.2008
51	No.51 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.	LL.: 17 Hal.	
52	No.52 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.	LL.: 7 Hal.	
53	No.53 Tahun 2007 1 Oktober 2007	Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	LL.: .. Hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2011
54	No.54 Tahun 2007 4 Oktober 2007	Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.	LL.: .. Hal.	
55	No.55 Tahun 2007 11 Oktober 2007	Kabupaten Batang Dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.	LL.: .. Hal.	
56	No.56 Tahun 2007 22 Oktober 2007	Perubahan Keempat atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.	LL.: 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 2007 23 Oktober 2007	Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.	LL.: 18 Hal.	Diubah dg Permen No.56 Th.2010
58	No.58 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.	LL.: 11 Hal.	
59	No.59 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	LL.: .. Hal.	
60	No.60 Tahun 2007 31 Oktober 2007	Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	LL.: .. Hal.	Diubah dg Permen No.53 Th.2009
61	No.61 Tahun 2007 7 Nopember 2007	Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah.	LL.: .. Hal.	
62	No.62 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Perubahan Kelima atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Th.2007.	LL.: .. Hal.	
63	No.63 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.	LL.: .. Hal.	
64	No.64 Tahun 2007 20 Nopember 2007	Pedoman Teknis Organisasi Dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	LL.: .. Hal.	
65	No.65 Tahun 2007 22 Nopember 2007	Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	LL.: .. Hal.	
66	No.66 Tahun 2007 28 Nopember 2007	Perencanaan Pembangunan Desa.	LL.: .. Hal.	
67	No.67 Tahun 2007 28 Nopember 2007	Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.	LL.: .. Hal.	
68	No.68 Tahun 2007 5 Desember 2007	Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.	LL.: .. Hal.	
69	No.69 Tahun 2007 10 Desember 2007	Kerja sama Pembangunan Perkotaan.	LL.: 11 Hal.	
70	No.70 Tahun 2007 10 Desember 2007	Batas Daerah Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	LL.: 8 Hal.	
71	No.71 Tahun 2007 10 Desember 2007	Batas Daerah Kabupaten Gunung Kidul Dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	LL.: 9 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 2007 10 Desember 2007	Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.	LL.: 9 Hal.	
73	No.73 Tahun 2007 10 Desember 2007	Batas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah.	LL.: 26 Hal.	
74	No.74 Tahun 2007 14 Desember 2007	Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan.	LL.: 8 Hal.	
75	No.75 Tahun 2007 19 Desember 2007	Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.	LL.: 12 Hal.	
76	No.76 Tahun 2007 19 Desember 2007	Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	LL.: 6 Hal.	
77	No.77 Tahun 2007 19 Desember 2007	Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	LL.: 8 Hal.	
78	No.78 Tahun 2007 27 Desember 2007	Perubahan Keenam Atas Permendagri No.15 Tahun 2007.	LL.: 4 Hal.	
79	No.79 Tahun 2007 28 Desember 2007	Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.	LL.: 13 Hal.	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sumatera Utara No.5 Th.2003 Tentang Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.	L L : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang No.25 Th.1998 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	L L : 2 Hal.	
3	No.3 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Dairi No.14 Th.2000 Tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
4	No.4 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Toba Samosir No.13 Th.2001 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
5	No.5 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sawahlunto Sijunjung No.7 Th.2005 Tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
6	No.6 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Pariaman No.35 Th.2004 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No.7 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Lima Puluh Kota No.13 Th.2001 ttg Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Rekomendasi Kredit, Program, Rekomendasi Kredit Lunak Bantuan BUMN Serta Penarikan Dana Pendidikan dan Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi.	L L : 2 Hal.	
8	No.8 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Pangkal Pinang No.09 Th.2005 Tentang Kepelabuhan Di Kota Pangkal Pinang.	L L : 2 Hal.	
9	No.9 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Mukomuko No.33 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI).	L L : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Mukomuko No.34 Th.2004 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	L L : 2 Hal.	
11	No.11 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Mukomuko No.11 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Mukomuko.	L L : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Muara Enim No.7 Th.2005 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	L L : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sintang No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Pendirian Dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Nunukan No.6 Th.2005 ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
15	No.15 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Nunukan No.08 Th.2005 ttg Retribusi Pelayanan Penerbitan Surat-surat, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dan Surat Izin Berlayar (SIB).	L L : 2 Hal.	
16	No.16 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.11 Th.2001 Tentang Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Tangerang No.12 Th.2000 ttg Retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO).	L L : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Bandung No.24 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.4 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Karawang No.23 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.	L L : 2 Hal.	
21	No.21 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Sukabumi No.12 Th.2002 ttg Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.	L L : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Magelang No.11 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	L L : 2 Hal.	
23	No.23 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Magelang No.15 Th.2005 ttg Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
24	No.24 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Bantul No.10 Th.2002 ttg Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul.	L L : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Bantul No.13 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Banyuwangi No.46 Th.2002 ttg Retribusi Izin Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Madiun No.12 Th.2005 ttg Perubahan atas PERDA Kab. Madiun No.16 Th.2002 ttg Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten.	L L : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Jembrana No.10 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
29	No.29 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Sumbawa Barat No.08 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri.	L L : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Sumbawa Barat No.10 Th.2005 ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang.	L L : 2 Hal.	
31	No.31 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Pangkajene dan Kepulauan No.11 Th.2001 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	L L : 2 Hal.	
32	No.32 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Tenggara No.6 Th.2002 ttg Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.	L L : 2 Hal.	
33	No.33 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Jayapura No.5 Th.2005 ttg Retribusi Penumpang Kapal Laut dan Pesawat Udara.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
34	No.34 Tahun 2007 29 Januari 2007	Pembatalan PERDA Kota Sorong No.11 Th.2003 ttg Retribusi Surat Izin Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
35	No.35 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Aceh Tamiang No.19 Th.2005 ttg Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan.	L L : 2 Hal.	
36	No.36 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sambas No.4 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sanggau No.13 Th.2000 ttg Retribusi Pemotongan Hewan dan Lalu Lintas Hewan di Kabupaten Sanggau.	L L : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.18 Th.2002 ttg Usaha Pemotongan Hewan.	L L : 2 Hal.	
39	No.39 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.32 Th.2004 ttg Perubahan Pertama Atas Perda Kota Palangkaraya No.10 Th.1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
40	No.40 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Seruyan No.10 Th.2005 ttg Usaha Pemotongan Hewan.	L L : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kota Balikpapan No.12 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas.	L L : 2 Hal.	
42	No.42 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Barito Kuala No.04 Th.2002 ttg Retribusi Pasar Hewan Ternak, Kartu Pemilikan Ternak dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak serta Pemeliharaan Ternak Besar dan Kecil.	L L : 2 Hal.	
43	No.43 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Tapin No.03 Th.1999 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
44	No.44 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kotamadya Banjarmasin No.1/1993 ttg Penampungan & Pemotongan Daging Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Kotamadya Banjarmasin.	L L : 2 Hal.	
45	No.45 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Jawa Barat No.25 Th.2001 ttg Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Antar Provinsi, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan.	L L : 2 Hal.	
46	No.46 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Magelang No.12 Th.2001 ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No.47 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Kulon Progo No.1/1993 ttg Surat Keterangan Penjualan/ Pembelian Hewan dan Kesehatan Hewan.	L L : 2 Hal.	
48	No.48 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Kulon Progo No.7 Th.1994 ttg Pengiriman/ Pengeluaran Ternak dari Kab. Dati II Kulon Progo ke Dati II Lain Dalam Wilayah Prov. D.I. Yogyakarta.	L L : 2 Hal.	
49	No.49 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No.5 Th.1998 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Pasuruan No.12 Th.2001 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Tuban No.8 Th.2000 ttg Retribusi Ijin Pematongan Ternak Besar Bertanduk Betina Produktif.	L L : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Tuban No.8 Th.2000 ttg Retribusi Ijin Pematongan Ternak Besar Bertanduk Betina Produktif.	L L : 2 Hal.	
52	No.52 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Jembrana No.22 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pematongan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana.	L L : 2 Hal.	
53	No.53 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Gianyar No.6 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
54	No.54 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Klungkung No.2 Th.1998 ttg Perubahan Kedua PERDA Kab. Dati II Klungkung Nomor 4 Th.1979 ttg Retribusi Rumah Potong Umum.	L L : 2 Hal.	
55	No.55 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Buleleng No.9 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengawasan Lalulintas Ternak.	L L : 2 Hal.	
56	No.56 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kota Denpasar No.10 Th.2002 ttg Usaha Pematongan Hewan dan Penyediaan Daging.	L L : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Lombok Timur No.5 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
58	No.58 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Dati II Lombok Barat No.18 Th.1997 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
59	No.59 Tahun 2007 13 Pebruari 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sumbawa No.15 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pematongan Hewan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
60	No.60 Tahun 2007 5 April 2007	Kesepakatan Bersama Menpora, Mendagri dan Mensos ttg Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Berfungsi Sosial di Kawasan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	L L :10 Hal.	
61	No.61 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Bali No.1/2003 ttg Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan.	L L : 2 Hal.	
62	No.62 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Utara No.17 Tahun 2000 ttg Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	L L : 2 Hal.	
63	No.63 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Utara No.6 Tahun 2001 ttg Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.	L L : 2 Hal.	
64	No.64 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Utara No.7 Tahun 2001 ttg Izin Undian.	L L : 2 Hal.	
65	No.65 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Utara No.2 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	L L : 2 Hal.	
66	No.66 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sulawesi Utara No.6 Tahun 2004 ttg Perubahan Pertama Perda Provinsi Sulawesi Utara No.15 Th.2000 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan.	L L : 2 Hal.	
67	No.67 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Gorontalo No.4 Tahun 2003 ttg Retribusi Pengawasan utu dan Perdagangan Komoditas Cengkeh, Kelapa dan Jagung.	L L : 2 Hal.	
68	No.68 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Gorontalo No.5 Th.2003 ttg Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	L L : 2 Hal.	
69	No.69 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Gorontalo No.6 Tahun 2003 ttg Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.	L L : 2 Hal.	
70	No.70 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Maluku No.13 Tahun 2004 ttg Retribusi Biaya Dokumen Lelang.	L L : 2 Hal.	
71	No.71 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.4 Tahun 2004 ttg Tata Niaga Pemasukan dan Pengeluaran Barang melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Asahan No.13 Tahun 2004 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
73	No.73 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Nias No.9 Tahun 2002 ttg Retribusi Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah Kabupaten Nias.	L L : 2 Hal.	
74	No.74 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Padang Pariaman No.11 Tahun 2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
75	No.75 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Sindereng Rappang No.20 Tahun 2001 ttg Retribusi Pengangkutan Produksi Tertentu.	L L : 2 Hal.	
76	No.76 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kab. Pinrang No.11 Tahun 2002 ttg Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Bumi dan Kekayaan Alam Kabupaten Pinrang.	L L : 2 Hal.	
77	No.77 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.17 Tahun 2001 ttg Retribusi Pangkalan dan Hasil Bumi Keluar Daerah.	L L : 2 Hal.	
78	No.78 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Maluku Tengah No.8 Tahun 2003 ttg Retribusi Izin Perdagangan Komoditi Antar Pulau.	L L : 2 Hal.	
79	No.79 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Mimika No.24 Tahun 2003 ttg Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Sarana Produksi Pertanian, Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura ke dan dari Kabupaten Mimika.	L L : 2 Hal.	
80	No.80 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Pesisir Selatan No.13 Tahun 2001 ttg Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
81	No.81 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Pasaman No.6 Tahun 2001 ttg Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
82	No.82 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Kampar No.18 Tahun 2000 ttg Retribusi Penjualan Produksi Usaha di Daerah.	L L : 2 Hal.	
83	No.83 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Kampar No.24 Tahun 2000 ttg Retribusi Izin di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
84	No.84 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.15 Th. 2001 ttg Lalu Lintas & Angkutan Jalan.	L L : 2 Hal.	
85	No.85 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Tanjungpinang No.10 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No.86 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Merangin No.31 Tahun 2001 ttg Retribusi Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	L L : 2 Hal.	
87	No.87 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Batanghari No.24 Tahun 2002 ttg Izin Pemanfaatan Alur Sungai, Dataran Air dan Danau.	L L : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Bungo No.14 Tahun 2000 ttg Izin Penggunaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
89	No.89 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Bungo No.40 Tahun 2000 ttg Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
90	No.90 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.19 Tahun 2002 ttg Izin Usaha Sarana dan Prasarana Sungai, Ekspedisi Laut dan Udara pada Sektor Perhubungan Kota Jambi.	L L : 2 Hal.	
91	No.91 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Sumatera Selatan No.26 Tahun 2001 ttg Retribusi Jasa Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
92	No.92 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Provinsi Kalimantan Barat No.7 Tahun 2001 ttg Retribusi atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan.	L L : 2 Hal.	
93	No.93 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Pati No.3 Tahun 2002 ttg Pajak Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
94	No.94 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Kupang No.5 Tahun 2001 ttg Retribusi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	L L : 2 Hal.	
95	No.95 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Kupang No.4 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Pelabuhan.	L L : 2 Hal.	
96	No.96 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kabupaten Ngada No.22 Tahun 1998 ttg Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	L L : 2 Hal.	
97	No.97 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Palopo No.18/2004 ttg Retribusi Surat Izin Usaha Industri.	L L : 2 Hal.	
98	No.98 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Palopo No.16/2004 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
99	No.99 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kota Palopo No.15/2004 ttg Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kab. Mimika No.26 Th.2003 ttg Pengelolaan dan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2007 13 Juni 2007	Pembatalan PERDA Kab. Mimika No.28/2003 ttg Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
102	No.102 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengusahaan Hasil Bumi, Industri dan Produksi Yang Dibawa Keluar Daerah.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 46 Th.2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.	L L : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2007 24 Oktober 2007	pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuangan Dan Pemanfaatan Air Limbah.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Retribusi Penyimpanan Dan Atau Penyaluran Bahan Migas Dan Non Migas.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
114	No.114 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin/ Pengesahan Penggunaan Peralatan Kerja.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kabupaten Sanggau Nomor 14 Th.2000 tentang Pungutan Daerah dan Penyetoran Iuran Kehutanan dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu.	L L : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.	L L : 2 Hal.	
120	No.120 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Prov. Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2002 ttg Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Khusus Radio Dan Televisi Siaran Lokal.	L L : 2 Hal.	
121	No.121 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kab. Katingan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame.	L L : 2 Hal.	
122	No.122 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 ttg Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/Kota.	L L : 2 Hal.	
123	No.123 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
124	No.124 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal.	L L : 2 Hal.	
125	No.125 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Dermaga.	L L : 2 Hal.	
126	No.126 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Alat Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
127	No.127 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
128	No.128 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Prov. Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
129	No.129 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.	L L : 2 Hal.	
130	No.130 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pembatalan Perda Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas.	L L : 2 Hal.	
131	No.131 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam.	L L : 2 Hal.	
132	No.132 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
133	No.133 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya.	L L : 2 Hal.	
134	No.134 Tahun 2007 1 Nopember 2007	pembatalan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
135	No.135 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
136	No.136 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu/Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
137	No.137 Tahun 2007	Kosong/Batal		
138	No.138 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik.	L L : 2 Hal.	
139	No.139 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Bungo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw Pada Industri Perkayuan Dalam Kabupaten Bungo.	L L : 2 Hal.	
140	No.140 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
141	No.141 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Prop. Lampung No. 7 Th.2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan.	L L : 2 Hal.	
142	No.142 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Prov. Banten No.42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
143	No.143 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Prov. Jawa Timur No.5 Th.2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	L L : 2 Hal.	
144	No.144 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Kupang No.14/2001 ttg Retribusi Izin Pengambilan & Pengeluaran Hasil Hutan & Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
145	No.145 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Tingkat II Kab. Ngada Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
146	No.146 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Sinjai No. 5 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat/Hutan Milik.	L L : 2 Hal.	
147	No.147 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Sinjai No.7 Th.2002 ttg Izin Kayu Yang Masuk Dalam Kabupaten.	L L : 2 Hal.	
148	No.148 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Sinjai No.8 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan.	L L : 2 Hal.	
149	No.149 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Prov. Sulawesi Tengah No.3 Th.2000 ttg Retribusi dan Penarikan Levy and Grant Atas Izin Pemanfaatan Kayu.	L L : 2 Hal.	
150	No.150 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan Pada Hutan Negara.	L L : 2 Hal.	
151	No.151 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Bolaang Mongondow No. 15 Th.2001 tentang Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.	L L : 2 Hal.	
152	No.152 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengujian dan Pengesahan Hasil Hutan dan Perkebunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.	L L : 2 Hal.	
153	No.153 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Mimika Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
154	No.154 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM).	L L : 2 Hal.	
155	No.155 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.18 Th.2000 ttg Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk Mengangkut Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
156	No.156 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Lombok Barat No.15 Th.2001 ttg Pungutan Hasil Perikanan.	L L : 2 Hal.	
157	No.157 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 551/49/Tahun 2004 ttg Pembentukan Pos Pengawasan Terpadu untuk Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Kendaraan Bermotor Angkutan Jalan di Kecamatan Trumon Timur dan Perbatasan Labuhanaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.	L L : 2 Hal.	
158	No.158 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Barat No.79 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat.	L L : 2 Hal.	
159	No.159 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kota Denpasar No.3 Th.2001 tentang Usaha Pemandokan.	L L : 2 Hal.	
160	No.160 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.17 Th.2000 ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan.	L L : 2 Hal.	
161	No.161 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Prov. Sulawesi Selatan No.39 Th.2001 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
162	No.162 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Kampar No.19 Th.2003 ttg Retribusi Limbag Cair.	L L : 2 Hal.	
163	No.163 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Rokan Hulu No. 3 Tahun 2004 ttg Retribusi Izin Pembangunan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu.	L L : 2 Hal.	
164	No.164 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Rokan Hulu No. 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi.	L L : 2 Hal.	
165	No.165 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Rokan Hulu No. 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
166	No.166 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.4.5/303/2004 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Hasil Bumi Menurut Jenis Dalam Kabupaten Aceh Singkil.	L L : 2 Hal.	
167	No.167 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Batanghari No.17 Th.2001 ttg Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Perkebunan Swasta kepada Pemerintah Kab. Batanghari.	L L : 2 Hal.	
168	No.168 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Batanghari No.15 Tahun 2003 ttg Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
169	No.169 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Th.2003 ttg Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
170	No.170 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Tapanuli Selatan No.17 Tahun 2001 ttg Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
171	No.171 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.16 Tahun 2000 ttg Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC).	L L : 2 Hal.	
172	No.172 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kabupaten Batanghari Nomor 35 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
173	No.173 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian.	L L : 2 Hal.	
174	No.174 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Qanun Kab. Nagan Raya No.14 Th.2004 ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kab. Nagan Raya.	L L : 2 Hal.	
175	No.175 Tahun 2007 1 Nopember 2007	Pembatalan Perda Kab. Dompus No.16/2002 tentang Usaha Perikanan dan Kelautan.	L L : 2 Hal.	
<b>TAHUN 2008</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2008 4 Januari 2008	Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.	L L : 11 Hal.	
2	No.2 Tahun 2008 4 Januari 2008	Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 69 Hal.	
3	No.3 Tahun 2008 4 Januari 2008	Pedoman Pelaks. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.	L L : 8 Hal.	
4	No.4 Tahun 2008 17 Januari 2008	Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	L L : 62 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No.5 Tahun 2008 18 Januari 2008	Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 Hal.	
6	No.6 Tahun 2008 31 Januari 2008	Kode dan Data/Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.66 Th.2011
7	No.7 Tahun 2008 8 Pebruari 2008	Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	L L : 26 Hal.	
8	No.8 Tahun 2008 8 Pebruari 2008	Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.	L L : 4 Hal.	
9	No.9 Tahun 2008 13 Pebruari 2008	Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.54 Th.2009
10	No.10 Tahun 2008 13 Pebruari 2008	Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.54 Th.2009
11	No.11 Tahun 2008 20 Pebruari 2008	Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.	L L : 9 Hal. lamp.: 20 hal.	Diubah dg Permen No.80 Th.2014
12	No.12 Tahun 2008 20 Pebruari 2008	Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.	L L : 12 Hal.	
13	No.13 Tahun 2008 25 Pebruari 2008	Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.	L L : 13 Hal.	
14	No.14 Tahun 2008 25 Pebruari 2008	Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.	L L : 4 Hal.	
15	No.15 Tahun 2008 27 Pebruari 2008	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.	L L : 8 Hal.	Diubah dg Permen No.67 Th.2011
16	No.16 Tahun 2008 4 Maret 2008	Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	L L : 3 Hal.	
17	No.17 Tahun 2008 4 Maret 2008	Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	L L : 8 Hal.	
18	No.18 Tahun 2008 13 Maret 2008	Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam.	L L : 4 Hal.	
19	No.19 Tahun 2008 13 Maret 2008	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.	L L : 4 Hal.	
20	No.20 Tahun 2008 13 Maret 2008	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.	L L : 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
21	No.21 Tahun 2008 13 Maret 2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.	L L : 4 Hal.	
22	No.22 Tahun 2008 30 April 2008	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.		
23	No.23 Tahun 2008 30 April 2008	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008.	L L : 4 Hal.	Dicabut dg Permen No.28 Th.2009
24	No.24 Tahun 2008	Kosong		
25	No.25 Tahun 2008 16 Mei 2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 ttg Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 Hal.	
26	No.26 Tahun 2008 29 Mei 2008	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.	L L : 3 Hal.	Diubah dg Permen No.36, No.40, No.54 & No.63 Th.2008
27	No.27 Tahun 2008 29 Mei 2008	Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah penghasil Minyak Bumi Dari Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi.	L L : 3 Hal.	
28	No.28 Tahun 2008 30 Mei 2008	Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang	L L : 10 Hal.	
29	No.29 Tahun 2008 9 Juni 2008	Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.	L L : 9 Hal.	
30	No.30 Tahun 2008 16 Juni 2008	Cadangan Pangan Pemerintah Desa.	L L : 10 Hal.	
31	No.31 Tahun 2008 16 Juni 2008	Penetapan Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu sebagai daerah penghasil minyak bumi dari sumur-sumur Blok Langgak.	L L : 3 Hal.	
32	No.32 Tahun 2008 16 Juni 2008	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.	L L : 13 Hal.	
33	No.33 Tahun 2008 25 Juni 2008	Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	L L : .. Hal.	
34	No.34 Tahun 2008	KOSONG		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
35	No.35 Tahun 2008 14 Juli 2008	Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali.	L L : 3 Hal.	
36	No.36 Tahun 2008 31 Juli 2008	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2008.	L L : 3 Hal.	
37	No.37 Tahun 2008 4 Agustus 2008	Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah.	L L : 7 Hal.	
38	No.38 Tahun 2008 15 Agustus 2008	Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Masyarakat Dari dan Kepada Pihak Asing.	L L : 12 Hal.	
39	No.39 Tahun 2008 15 September 2008	Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.	L L : 6 Hal.	
40	No.40 Tahun 2008 15 September 2008	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2008.	L L : 4 Hal.	
41	No.41 Tahun 2008 16 Oktober 2008	Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.	L L : 6 Hal.	
42	No.42 Tahun 2008 16 Oktober 2008	Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
43	No.43 Tahun 2008 16 Oktober 2008	Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
44	No.44 Tahun 2008 17 Oktober 2008	Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.	L L : .. Hal.	
45	No.45 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 8 Hal.	
46	No.46 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No.47 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	
48	No.48 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	L L : .. Hal.	
49	No.49 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.53 Th.2008
50	No.50 Tahun 2008 27 Oktober 2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 ttg Organisasi dan Tatakerja Depdagri.	L L : .. Hal.	
51	No.51 Tahun 2008 29 Oktober 2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 ttg Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Depdagri.	L L : .. Hal.	
52	No.52 Tahun 2008 29 Oktober 2008	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 3 Hal.	Dicabut dg Permen No.49 Th.2009
53	No.53 Tahun 2008 27 Nopember 2008	Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor PER.16/ MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/ 10/2008 ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.	L L : .. Hal.	
54	No.54 Tahun 2008 1 Desember 2008	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2008.	L L : .. Hal.	
55	No.55 Tahun 2008 1 Desember 2008	Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.	L L : .. Hal.	
56	No.56 Tahun 2008 5 Desember 2008	Batas Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 2008 5 Desember 2008	Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.	L L : .. Hal.	
58	No.58 Tahun 2008 5 Desember 2008	Batas Daerah Kabupaten Karangasem dgn Kabupaten Klungkung Provinsi Jawa Timur.	L L : .. Hal.	
59	No.59 Tahun 2008 5 Desember 2008	Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.4 Th.2013
60	No.60 Tahun 2008 11 Desember 2008	Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.	L L : .. Hal.	
61	No.61 Tahun 2008 16 Desember 2008	Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009	L L : .. Hal.	
62	No.62 Tahun 2008 19 Desember 2008	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.	L L : 15 Hal.	Diubah dg Permen No.69 Th.2012
63	No.63 Tahun 2008 19 Desember 2008	Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2008.	L L : 4 Hal.	
64	No.64 Tahun 2008 19 Desember 2008	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	
65	No.65 Tahun 2008 19 Desember 2008	Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>KEPMENDAGRI</b>			
1	No.1 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Lampiran Romawi I Angka 1 dan Romawi II Angka 1 Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prov. Kep. Bangka Belitung.	L L : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Prov. Kalimantan Tengah No.4 Th.2000 Tentang Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
3	No.3 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Prov. Gorontalo No.27 Th.2002 Tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrolagian.	L L : 2 Hal.	
4	No.4 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Pendaratan & Pelelangan Ikan.	L L : 2 Hal.	
5	No.5 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.13 Th.2003 Tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.	L L : 2 Hal.	
6	No.6 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.18 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Keramaian Umum.	L L : 2 Hal.	
7	No.7 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.19 Th.2003 Ttg Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong.	L L : 2 Hal.	
8	No.8 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	L L : 2 Hal.	
9	No.9 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Usaha Pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Sorong.	L L : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.22 Th.2003 Ttg Retribusi Usaha Peternakan.	L L : 2 Hal.	
11	No.11 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Pembatalan Perda Kota Sorong No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Usaha Pemonudukan di Kota Sorong.	L L : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.25 Th.2003 Ttg Pajak Bangsa Asing.	L L : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.26 Th.2003 Ttg Pajak Usaha Cafeteria dan Katering.	L L : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Sorong No.27 Th.2003 Ttg Penggalian Jalan di Wilayah Kota Sorong.	L L : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sorong No.37 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	L L : 2 Hal.	
16	No.16 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sorong No.57/2002 Ttg Retribusi Pelayaran dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sorong No.27 Th.2002 Ttg Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sorong No.58 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Jayapura No.17 Th.2001 Ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah No.6 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Jayapura No.17 Th.2002 Ttg Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura.	L L : 2 Hal.	
21	No.21 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Biak Numfor No.11 Th.2005 Ttg Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri.	L L : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Kab. Biak Numfor No.13 Th.2005 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja.	L L : 2 Hal.	
23	No.23 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Biak Numfor No.14 Th.2005 Ttg Retribusi Perizinan Usaha Ketenagakerjaan	L L : 2 Hal.	
24	No.24 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Biak Numfor No.17 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Pemberian Fasilitas Minuman Beralkohol.	L L : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bengkayang No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Tempat Izin Usaha.	L L : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Kutai Kertanegara No.2 Th.2001 Ttg Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.	L L : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bangka No.8 Th.2002 Ttg Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bangka Barat No.2 Th.2007 Ttg Izin Usaha Pertambangan Umum.	L L : 2 Hal.	
29	No.29 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.10 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).	L L : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.5 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Tempat Usaha Dalam Kota Pangkalpinang.	L L : 2 Hal.	
31	No.31 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Kulonprogo No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
32	No.32 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Pemalang No.23 Th.2002 Ttg Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
33	No.33 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hulu No.03 Th.2002 Ttg Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	L L : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hulu No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).	L L : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2008 NOMOR: 170/KMK.07/2008 26 Juni 2008	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007-Nomor 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi.	L L : 2 Hal.	
35	No.35 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tuban No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Ketenagalistrikan.	L L : 2 Hal.	
36	No.36 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tuban No.9 Th.2002 Ttg Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan.	L L : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.15 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah.	L L : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.18 Th.2001 Ttg Retribusi Pemasangan Label Pada Minuman Beralkohol Dalam Kaleng.	L L : 2 Hal.	
39	No.39 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.19 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
40	No.40 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Seruyan No.9 Th.2004 Ttg Retribusi Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan Umum.	L L : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Banjar No.3 Th.2005 Tentang Pengolahan Air Bawah Tanah.	L L : 2 Hal.	
42	No.42 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.5 Th.2001 Tentang Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
43	No.43 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.18 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
44	No.44 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.22 Th.2001 Tentang Penetapan, Penataan, Pembinaan Pergudangan dan Pengandangan Hewan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
45	No.45 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.3 Th.2002 ttg Perubahan Pertama Perda Kota Binjai Nomor 14 Th.2001 tentang Pajak Rumah Sewa/Kontark Bangunan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
46	No.46 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.14 Th.2001 Tentang Pajak Rumah Sewa/Kontrak Bangunan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
47	No.47 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dairi No.2 Th.2006 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
48	No.48 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Gresik No.12 Th.2002 Tentang Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.	L L : 2 Hal.	
49	No.49 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sumbawa No.31 Th.2001 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang.	L L : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Pamekasan No.11 Th.2004 Tentang Izin Pembukaan Cabang Perwakilan.	L L : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Bondowoso No.7 Th.1994 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
52	No.52 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Timor Tengah Selatan No.26 Th.2001 Tentang Usahan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
53	No.53 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Pacitan No.14 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
54	No.54 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.9 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
55	No.55 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sampang No.11 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Denpasar No.6 Th.2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Klungkung No.4 Th.1999 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
58	No.58 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tapanuli Selatan No.10 Th.2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
59	No.59 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Binjai No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.	L L : 2 Hal.	
60	No.60 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Bukittinggi No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
61	No.61 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Ponorogo No.8 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
62	No.62 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Tanah Laut No.9 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
63	No.63 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Tabalong No.12 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
64	No.64 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Banjar No.11/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.	L L : 2 Hal.	
65	No.65 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Banjar No.13/2004 Tentang Ketentuan Pebdaftaran Gudang.	L L : 2 Hal.	
66	No.66 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Banjar No.14/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
67	No.67 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Yogyakarta No.3 Th.2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
68	No.68 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Karangasem No.7 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
69	No.69 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Ponorogo No.14 Th.2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
70	No.70 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Jombang No.4 Th.2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
71	No.71 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kotamadya Dati II Kediri No.1 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
72	No.72 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Kediri No.3 Th.2002 Ttg Perubahan Atas Perda Kotamadya Dati II Kediri No.1 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
73	No.73 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sidoarjo No.28/2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
74	No.74 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Nganjuk No.6 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
75	No.75 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Magetan No.2 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
76	No.76 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Bangkalan No.6 Th.1989 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
77	No.77 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Bangkalan No.7 Th.1997 Ttg Perubahan Pertama Perda Kab. Dati II Bangkalan No.6 Th.1989 Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
78	No.78 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Sampang No.22/2002 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG).	L L : 2 Hal.	
79	No.79 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kota Malang No.12 Th.2001 Ttg Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
80	No.80 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sumbawa No.23 Th.2005 Ttg Perubahan Atas Perda No.28 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
81	No.81 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sumbawa No.28 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
82	No.82 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Bima No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
83	No.83 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Belu No.2 Th.2001 Ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
84	No.84 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Belu No.7 Th.2002 Ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C.	L L : 2 Hal.	
85	No.85 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Lembata No.3 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab.Sikka No.9 Th.2002 Ttg Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	L L : 2 Hal.	
87	No.87 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Ngada No.6 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Soppeng No.6 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
89	No.89 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Mamuju No.7 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
90	No.90 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Muna No.2 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol.C.	L L : 2 Hal.	
91	No.91 Tahun 2008 3 Januari 2008	Pembatalan Perda Kab. Dati II Muna No.4 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
92	No.92 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.02 Th.2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
93	No.93 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.31 Th.2002 Tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Labuhan Batu.	L L : 2 Hal.	
94	No.94 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.32 Th.2002 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	L L : 2 Hal.	
95	No.95 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.33 Th.2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	L L : 2 Hal.	
96	No.96 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tebo No.52 Th.2001 ttg Retribusi Pangkalan Hasil Bumi.	L L : 2 Hal.	
97	No.97 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali.	L L : 2 Hal.	
98	No.98 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tanah Laut No.4 Th.2003 Tentang Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor Perairan Daratan dan Kelautan.	L L : 2 Hal.	
99	No.99 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Tapin No.5 Th.2002 ttg Pertambangan Batubara di Kab. Tapin.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Prop. Dati I Bali No.5 Th.1999 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Lombok Tengah No.16 Th.2002 ttg Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Tidak Bermotor.	L L : 2 Hal.	
102	No.102 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Samosir No.6/2007 ttg Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Iar Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.	L L : 2 Hal.	
103	No.103 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Samosir No.9 Th.2007 ttg Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkan Kembali.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Solok No.13 Th.2002 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
105	No.105 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.12 Th.2001 ttg Perizinan dan Pajak Usaha Kelautan dan Perikanan.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Musi Rawas No.8 Th.2006 ttg Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bangka No.7 Th.2003 ttg Retribusi Dokumen Lelang.	L L : 2 Hal.	
108	No.108 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Bolaang Mongondow No.19 Th.2001 ttg Izin Usaha Pertanian dan Peternakan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bone Bolango No.31 Th.2005 ttg Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Biak Numfor No.6 Th.2005 ttg Retribusi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Biak Numfor No.10 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kota Jayapura No.7 Th.2004 ttg Penataan Aksesori Kota.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kota Jayapura No.8 Th.2004 ttg Retribusi izin Usaha Perikanan.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2008 29 Pebruari 2008	Pembatalan Perda Kab. Sorong No.41 Th.2002 ttg Retribusi Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Pengolahan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Brebes No.19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemantauan dan Pengendalian Dampak Pencemaran Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
120	No.120 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Becak.	L L : 2 Hal.	
121	No.121 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
122	No.122 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
123	No.123 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
124	No.124 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Batu Nomor 40 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
125	No.125 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
126	No.126 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Malang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
127	No.127 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Jasa Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
128	No.128 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.	L L : 2 Hal.	
129	No.129 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil).	L L : 2 Hal.	
130	No.130 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Penyiaran.	L L : 2 Hal.	
131	No.131 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
132	No.132 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor.	L L : 2 Hal.	
133	No.133 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
134	No.134 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kab. Gresik Nomor 12 Th.2003 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
135	No.135 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Jasa Titipan.	L L : 2 Hal.	
136	No.136 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di Terminal Rajekwesi Bojonegoro.	L L : 2 Hal.	
137	No.137 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengoperasian Kendaraan Ledog.	L L : 2 Hal.	
138	No.138 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Bojonegoro.	L L : 2 Hal.	
139	No.139 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.	L L : 2 Hal.	
140	No.140 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
141	No.141 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kab. Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
142	No.142 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kab. Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
143	No.143 Tahun 2008 17 Maret 2008	Pembatalan Perda Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi.	L L : 2 Hal.	
144	No.144 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.	L L : 2 Hal.	
145	No.145 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu.	L L : 2 Hal.	
146	No.146 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Tebo No.53 Th.2001 tentang Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
147	No.147 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.17 Th.2002 tentang Perubahan Perda Kab. Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
148	No.148 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No. 43 Th.2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Lokal serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.	L L : 2 Hal.	
149	No.149 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Indragiri Hulu No.03 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
150	No.150 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan	L L : 2 Hal.	
151	No.151 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.	L L : 2 Hal.	
152	No.152 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi atas Penerbitan Badan Hukum Koperasi dan Izin Pembukaan Cabang Koperasi.	L L : 2 Hal.	
153	No.153 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pendaftaran Ulang Koperasi.	L L : 2 Hal.	
154	No.154 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Bau-Bau No.26 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	L L : 2 Hal.	
155	No.155 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Kendari Nomor 5 Th.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
156	No.156 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Barru No.10 Th.2002 tentang Pelayanan Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
157	No.157 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Gowa No.12 Th.2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
158	No.158 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Donggala No.8 Th.2002 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.	L L : 2 Hal.	
159	No.159 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Boalemo No.47 Th.2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
160	No.160 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Boalemo No. 38 Th.2001 tentang Retribusi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	L L : 2 Hal.	
161	No.161 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Gorontalo No.18 Th.2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
162	No.162 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Gorontalo No.17 Th.2001 ttg Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.	L L : 2 Hal.	
163	No.163 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Bolaang Mongondow No.16 Th.2005 ttg Perubahan Atas Perda Kab. Bolaang Mongondow No.13 Th.2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi Atasnya.	L L : 2 Hal.	
164	No.164 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
165	No.165 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Dompu No.19/2001 tentang Retribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
166	No.166 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Bima Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
167	No.167 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
168	No.168 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Samarinda No.16 Th.2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Koperasi dalam Kota Samarinda.	L L : 2 Hal.	
169	No.169 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Nunukan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
170	No.170 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Gunung Mas No.10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pendaftaran, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
171	No.171 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Katingan No.4 Th.2005 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum).	L L : 2 Hal.	
172	No.172 Tahun 2008	Kosong/Batal		
173	No.173 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Kapuas No.13 Th.2002 tentang Pungutan Daerah atas Pelayanan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
174	No.174 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.10 Th.2002 tentang Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum).	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
175	No.175 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Kota Baru No.6 Th.2003 tentang Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
176	No.176 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Hulu Sungai Selatan No.10 Th.2001 ttg Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
177	No.177 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
178	No.178 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Sambas No.12/2002 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi.	L L : 2 Hal.	
179	No.179 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Semarang No.5 Th.2004 ttg Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
180	No.180 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Tebing Tinggi No.9 Th.2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
181	No.181 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Sawahlunto No.8 Th.2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Koperasi dan Perubahanannya.	L L : 2 Hal.	
182	No.182 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Membuka Cabang Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	
183	No.183 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Bukit Tinggi No.07 Th.2002 ttg Retribusi Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.	L L : 2 Hal.	
184	No.184 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Solok No.11 Th.2003 tentang Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
185	No.185 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab.Limapuluh Kota No.11 Th.2003 ttg Retribusi di Bid. Perkoperasian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
186	No.186 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Payakumbuh No.11 Th.2003 ttg Retribusi di Bid. Perkoperasian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
187	No.187 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Metro No.5 Th.2002 tentang Retribusi Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
188	No.188 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Bandar Lampung No.04 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Pengesahan Badan Hukum/Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Ulang dan Usaha Koperasi.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
189	No.189 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kota Bengkulu No.11 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pengesahan Akta dan Daftar Ulang Koperasi.	L L : 2 Hal.	
190	No.190 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Prov.Gorontalo No.26/2002 ttg Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi.	L L : 2 Hal.	
191	No.191 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	L L : 2 Hal.	
192	No.192 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.11 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
193	No.193 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.10 Th.2001 tentang Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati.	L L : 2 Hal.	
194	No.194 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.9 Th.2001 tentang Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar.	L L : 2 Hal.	
195	No.195 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata.	L L : 2 Hal.	
196	No.196 Tahun 2008 29 April 2008	Pembatalan Perda Kab. Toba Samosir No.5 Th.2001 ttg Retribusi Pembinaan Hygiene dan Sanitasi.	L L : 2 Hal.	
197	No.197 Tahun 2008 21 Mei 2008	Pembatalan Perda Kab. Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
198	No.198 Tahun 2008 21 Mei 2008	Pembatalan Perda Kab.Blora No.14 Th.2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
199	No.199 Tahun 2008 9 Juni 2008	Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.	L L : 3 Hal.	
200	No.200 Tahun 2008 17 Juli 2008	Pembatalan Lampiran I Angka 1 dan Lampiran II Angka 1 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	L L : 2 Hal.	
201	No.201 Tahun 2008 17 Juli 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.10 Th. 2001 ttg Pajak Hiburan.	L L : 2 Hal.	
202	No.202 Tahun 2008 17 Juli 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan.	L L : 3 Hal.	
203	No.203 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Perda Kota Tasikmalaya No.6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
204	No.204 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambangan.	L L : 2 Hal.	
205	No.205 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan No.9 Th.2002 ttg Retribusi Surat Izin Usahan Pertambangan Umum.	L L : 2 Hal.	
206	No.206 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Th.2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	L L : 3 Hal.	
207	No.207 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Dana Pengembangan Ketrampilan dan Keahlian (Skill Development Fund) Tenaga Kerja Indonesia.	L L : 2 Hal.	
208	No.208 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan.	L L : 3 Hal.	
209	No.209 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Donggala No.38 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Produksi Penangkaran Benih Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Hijauan Tanaman Makanan Ternak.	L L : 2 Hal.	
210	No.210 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
211	No.211 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pajak Penangkaran Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
212	No.212 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan.	L L : 2 Hal.	
213	No.213 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.6 Th.2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	L L : 2 Hal.	
214	No.214 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Jasa Pariwisata.	L L : 2 Hal.	
215	No.215 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kab. Tapin No.4 Th.2000 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
216	No.216 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tarakan No.23 Th.2001 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
217	No.217 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 51 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.	L L : 2 Hal.	
218	No.218 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru No. 8 Th.2002 tentang Retribusi Kartu Kepemilikan Ternak, Surat Keterangan Jual Beli Ternak, Surat Pemasukan dan Pengeluaran Ternak.	L L : 2 Hal.	
219	No.219 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan, Ternak, Hasil Ternak, dan Hasil Ikutannya.	L L : 2 Hal.	
220	No.220 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
221	No.221 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar Muat.	L L : 2 Hal.	
222	No.222 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dan Pengendalian Pencemaran.	L L : 2 Hal.	
223	No.223 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No.18 Th.2003 ttg Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.	L L : 2 Hal.	
224	No.224 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pasar Modern.	L L : 2 Hal.	
225	No.225 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No.1 Th.1999 ttg Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.3 Th.2003.	L L : 2 Hal.	
226	No.226 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Perda Kab. Kapuas No.8/2003 ttg Perubahan Atas Perda Kab. Dati II Kapuas No.13 Th.1998 tentang Pajak Hiburan dan Kepariwisataaan.	L L : 2 Hal.	
227	No.227 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	L L : 2 Hal.	
228	No.228 Tahun 2008 6 Agustus 2008	Pembatalan Perda Kota Manado No.11/2002 ttg Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
229	No.229 Tahun 2008 2 September 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya No.19 Th.2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
230	No.230 Tahun 2008 2 September 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No.8 Th.2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha dan Trayek Angkutan.	L L : 2 Hal.	
231	No.231 Tahun 2008 2 September 2008	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.18 Th.2007 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	L L : 2 Hal.	
<b>TAHUN 2009</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2009 9 Januari 2009	Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 23 Hal.	Diubah dg Permen No.32 Th.2009
2	No.2 Tahun 2009 12 Januari 2009	Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.	L L : 13 Hal.	
3	No.3 Tahun 2009 12 Januari 2009	Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	L L : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2009 12 Januari 2009	Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	L L : 5 Hal.	
5	No.5 Tahun 2009 12 Januari 2009	Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
6	No.6 Tahun 2009 13 Januari 2009	Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.	L L : 10 Hal.	
7	No.7 Tahun 2009 21 Januari 2009	Perubahan Atas Permendagri No.3 Th.2007 ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingk. Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 Hal.	
8	No.8 Tahun 2009 28 Januari 2009	Perubahan Atas Permendagri No.23 Th.2007 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	L L : 2 Hal.	
9	No.9 Tahun 2009 29 Januari 2009	Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.	L L : 10 Hal.	
10	No.10 Tahun 2009 30 Januari 2009	Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	L L : 11 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 2009 29 Januari 2009	Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.	L L : 5 Hal.	
12	No.12 Tahun 2009 No.138/Menkes/PB/II/2009 16 Februari 2009	Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah.	L L : 22 Hal. Lamp. : 84 hal	
13	No.13 Tahun 2009 27 Februari 2009	Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah Yang dicalonkan Menjadi Presiden atau Wakil Presiden.	L L : 5 Hal.	
15	No.15 Tahun 2009 4 Maret 2009	Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.	L L : 11 Hal.	
16	No.16 Tahun 2009 4 Maret 2009	Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.	L L : 12 Hal.	
17	No.17 Tahun 2009 20 Maret 2009	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.	L L : 8 Hal.	
18	No.18 Tahun 2009 No.07/PRT/M/2009 No.19/PER/M.KOMINFO/2009 No. 3/P/2009 30 Maret 2009	Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.	L L : 15 Hal.	
19	No.19 Tahun 2009 1 April 2009	Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.	L L : 10 Hal.	
20	No.20 Tahun 2009 6 April 2009	Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.	L L : 164 Hal.	Diubah dg Permen No.59 Th.2010
21	No.21 Tahun 2009 8 April 2009	Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.	L L : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2009 22 Mei 2009	Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.	L L : 20 Hal.	
23	No.23 Tahun 2009 22 Mei 2009	Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah.		
24	No.24 Tahun 2009 3 Juni 2009	Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dlm APBD, Pengajuan, Penyaluran, & Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	L L : 12 Hal.	Diubah dg Permen No.26 Th.2013 Dicabut dg Permen No.77 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
25	No.25 Tahun 2009 9 Juni 2009	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2010	L L : 25 Hal.	
26	No.26 Tahun 2009 15 Juni 2009	Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah.	L L : 12 Hal.	
27	No.27 Tahun 2009 19 Juni 2009	Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.	L L : .. Hal.	
28	No.28 Tahun 2009 22 Juni 2009	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air.	L L : 4 Hal. Lamp. 9 Hal.	Dicabut dg Permen No.25 Th.2010
29	No.29 Tahun 2009 22 Juni 2009	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	L L : 5 Hal. Lamp. 205 Hal.	Dicabut dg Permen No.25 Th.2010
30	No.30 Tahun 2009 7Juli 2009	Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat.	L L : 6 Hal.	
31	No.31 Tahun 2009 7Juli 2009	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.	L L : 6 Hal.	
32	No.32 Tahun 2009 7Juli 2009	Perubahan Pertama Atas Permendagri No.1 Th.2009 ttg Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 13 Hal.	
33	No.33 Tahun 2009 7Juli 2009	Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.	L L : 9 Hal.	
34	No.34 Tahun 2009 16 Juli 2009	Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	L L : 13 Hal.	
35	No.35 Tahun 2009 17 Juli 2009	Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.	L L : 5 Hal.	
36	No.36 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 24 Hal.	
37	No.37 Tahun 2009 31 Agustus 2009	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh.	L L : .. Hal.	
38	No.38 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.6 Th.2011
39	No.39 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.60/2010 & No.30/2011
40	No.40 Tahun 2009 8 September 2009	Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No.41 Tahun 2009 8 September 2009	Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 10 Hal.	
42	No.42 Tahun 2009 <i>No.40 Tahun 2009</i> 16 Sept. 2009	Pedoman Pelestarian Kebudayaan.	L L : 10 Hal.	
43	No.43 Tahun 2009 16 Sept. 2009	Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.	L L : 6 Hal.	
44	No.44 Tahun 2009 25 Sept. 2009	Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	L L : 13 Hal.	Diubah dg Permen No.39 Th.2011 & No.20 Th.2013
45	No.45 Tahun 2009 29 Sept. 2009	Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 10 Hal.	
46	No.46 Tahun 2009 29 Sept. 2009	Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 31 Hal.	
47	No.47 Tahun 2009 6 Oktober 2009	Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010.	L L : 8 Hal.	
48	No.48 Tahun 2009 7 Oktober 2009	Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 26 Hal.	
49	No.49 Tahun 2009 16 Oktober 2009	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 Hal.	Diubah dg Permen No.64 Th.2010
50	No.50 Tahun 2009 19 Oktober 2009	Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.	L L : 12 Hal.	
51	No.51 Tahun 2009 19 Oktober 2009	Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 7 Hal.	
52	No.52 Tahun 2009 20 Oktober 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.551 Th.2008 ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah dari Sektor Pertambangan & Pelabuhan Khusus Th.2009.	L L : 2 Hal.	
53	No.53 Tahun 2009 4 Nopember 2009	Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60 Tahun 2007 ttg Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	L L : 5 Hal.	
54	No.54 Tahun 2009 13 Nopember 2009	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.	L L : 128 Hal.	
55	No.55 Tahun 2009 16 Nopember 2009	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Th.2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2009 20 Nopember 2009	Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	L L : 13 Hal.	
57	No.57 Tahun 2009 9 Desember 2009	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	L L : 10 Hal.	
58	No.58 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.	L L : 4 Hal.	
59	No.59 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.	L L : 4 Hal.	
60	No.60 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.	L L : 3 Hal.	
61	No.61 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kab. Kulon Progo dengan Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.	L L : 9 Hal.	
62	No.62 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Probolinggo Dengan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.	L L : 4 Hal.	
63	No.63 Tahun 2009 11 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.	L L : 4 Hal.	
64	No.64 Tahun 2009 14 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
65	No.65 Tahun 2009 14 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Prov. Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
66	No.66 Tahun 2009 14 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.	L L : 6 Hal.	
67	No.67 Tahun 2009 14 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.	L L : 3 Hal.	
68	No.68 Tahun 2009 17 Desember 2009	Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 13 Hal.	Dicabut dg Permen No.88 Th.2013
69	No.69 Tahun 2009 17 Desember 2009	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.	L L : 4 Hal.	
70	No.70 Tahun 2009 29 Desember 2009	Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010.	L L : -- Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
71	No.71 Tahun 2009 29 Desember 2009	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010.	L L : 12 Hal.	
72	No.72 Tahun 2009 31 Desember 2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29/2009 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	L L : 3 Hal.	
73	No.73 Tahun 2009 31 Desember 2009	Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	L L : 12 Hal.	
74	No.74 Tahun 2009 31 Desember 2009	Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.	L L : 11 Hal.	
75	No.75 Tahun 2009 31 Desember 2009	Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.	L L : 3 Hal.	
76	No.76 Tahun 2009 31 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dng Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.	L L : 3 Hal.	
77	No.77 Tahun 2009 31 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.	L L : 3 Hal.	
78	No.78 Tahun 2009 31 Desember 2009	Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dng Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa	L L : 6 Hal.	
<b>TAHUN 2009</b>				
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Jayawijaya No.20 Th.2002 ttg Pungutan Atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Kasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah.	L L : 2 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kepahiang No.27 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Malinau No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pahuwato No.19 Th.2005 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perkoperasian.	L L : 2 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bengkulu Utara No.17 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tuban No.25 Th.2003 Tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2009 8 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Ciamis No.2 Th.2003 Ttg Izin Penyelenggaraan Koperasi.	L L : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.3 Th.2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.15 Th.2005 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate.	L L : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.2 Th.2000 Tentang Pajak Hiburan.	L L : 2 Hal.	
11	No.11 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.21 Th.2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.18 Th.2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte	L L : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pacitan No.5/2000 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pacitan No.9/2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Th.2000 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	L L : 2 Hal.	
15	No.15 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pacitan No.6 Th.2000 Tentang Retribusi Terminal.	L L : 2 Hal.	
16	No.16 Tahun 2009 13 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pacitan No.10 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Manokwari No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	L L : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Manokwari No.4/1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Manokwari No.5 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.	L L : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Manokwari No.6 Th.1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
21	No.21 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.11 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai.	L L : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.27 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.	L L : 2 Hal.	
23	No.23 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.26 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Transportasi Laut.	L L : 2 Hal.	
24	No.24 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.42 Th.2001 ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang.	L L : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.35 Th.2001 ttg Retribusi Pengelolaan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak di Daerah.	L L : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.36 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.	L L : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.44 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata.	L L : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2009 16 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.31 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam.	L L : 2 Hal.	
29	No.29 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Purwakarta No.17 Th.2002 Tentang Pelayanan Pengujian Pengelolaan Kayu Milik.	L L : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kota Cirebon No.9 Th.2002 Tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
31	No.31 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Cirebon No.39 Th.2002 ttg Retribusi Izin Pengelolaan Kayu.	L L : 3 Hal.	
32	No.32 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Majalengka No.22 Th.2001 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kab. Majalengka.	L L : 2 Hal.	
33	No.33 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Purwakarta No.16 Th.2002 Ttg Aneka Hasil Hutan dan Kebun.	L L : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Grobogan No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.	L L : 2 Hal.	
35	No.35 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kendal No.1 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penggunaan Kayu Milik dan Penggunaannya.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36	No.36 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Purworejo No.4 Th.2002 Tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab.Purworejo No.16/2002 ttg Izin Penebangan Kayu Milik Rakyat.	L L : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab.Blitar No.26/2000 ttg Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM)	L L : 2 Hal.	
39	No.39 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Blitar No.27 Th.2000 Tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu.	L L : 2 Hal.	
40	No.40 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Magetan No.10 Th.2003 Tentang Tata Usaha Hutan dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pandeglang No.5 Th.2001 Tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya.	L L : 2 Hal.	
42	No.42 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Lamongan No.16 Th.2003 ttg Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat.	L L : 2 Hal.	
43	No.43 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Probolinggo No.10 Th.1990 ttg Pajak Pengusahaan dan Pemeliharaan Sarang Burung.	L L : 2 Hal.	
44	No.44 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Situbondo No.40 Th.2001 ttg Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
45	No.45 Tahun 2009 19 Pebruari 2009	Pembatalan PERDA Kab. Jembrana No.8 Th.2002 ttg Pajak Atas Pengusahaan Burung Sriti dan/atau Walet di Kab. Jembrana.	L L : 2 Hal.	
46	No.46 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.12 Th.2002 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara.	L L : 2 Hal.	
47	No.47 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.20 Th.2002 ttg Retribusi Pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama di Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
48	No.48 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.21 Th.2002 ttg Retribusi Pengesahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No.49 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.19 Th.2002 ttg Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja melebihi waktu kerja, waktu istirahat & waktu Kerja malam di Perusahaan.	L L : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Donggala No.17 Th.2002 ttg Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus.	L L : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.16 Th.2002 ttg Retribusi Kartu Pencari Kerja.	L L : 2 Hal.	
52	No.52 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab.Donggala No.11/2002 ttg Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja.	L L : 2 Hal.	
53	No.53 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.40 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.	L L : 2 Hal.	
54	No.54 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Donggala No.33 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
55	No.55 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kota Medan No.8/2003 ttg Perizinan Usaha Pertanian & Peternakan.	L L : 2 Hal.	
56	No.56 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Simalungun No.30 Th.2001 ttg Retribusi Izin usaha Penggilingan padi Huller dan Penyosohan beras.	L L : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Simalungun No.8 Th.2000 ttg Pembatalan Psi 14 ayat (2) huruf E PERDA Kab. Simalungun No.8/2000 ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan.	L L : 2 Hal.	
58	No.58 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Deli Serdang No.14 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras.	L L : 2 Hal.	
59	No.59 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Deli Serdang No.11 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Peternakan.	L L : 2 Hal.	
60	No.60 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tebo No.16 Th.2004 ttg Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) hasil Hutan.	L L : 2 Hal.	
61	No.61 Tahun 2009 30 Juni 2009	Pembatalan PERDA Kab. Grobogan No.11 Th.2002 ttg Pajak Sarang Burung Walet.	L L : 2 Hal.	
62	No.62 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kutai Timur No.12 Th.2002 ttg Izin Angkutan Orang.	L L : 2 Hal.	
63	No.63 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Mamuju No.15 Th.2003 ttg Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
64	No.64 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. Alor No.13 Th.2003 ttg Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	L L : 2 Hal.	
65	No.65 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Dati II Sorong No.13 Th.1993 ttg Perubahan kedua PERDA Kab. Dati II Sorong No.11 Th.1976 ttg Retribusi Atas tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
66	No.66 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Padang Sidempuan No.21 Th.2003 ttg Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
67	No.67 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.33 Th.2004 ttg Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kab. Aceh Jaya.	L L : 2 Hal.	
68	No.68 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. Solok No.17/2002 ttg Retribusi Penjualan Produksi Daerah.	L L : 2 Hal.	
69	No.69 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Majalengka No.23 Th.2001 ttg Retribusi Genteng, Batu Alam dan Tegel di kabupaten Majalengka.	L L : 2 Hal.	
70	No.70 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Manado No.4 Th.2001 ttg Retribusi Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado.	L L : 2 Hal.	
71	No.71 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Manado No.16 Th.2001 ttg Pajak Televisi di Kota Manado.	L L : 2 Hal.	
72	No.72 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Muna No.6 Th.2003 ttg Retribusi izin Tempat Jualan dan Pengedaran minuman beralkohol.	L L : 2 Hal.	
73	No.73 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tana Toraja No.12 Th.2003 ttg Perubahan Pertama PERDA Kab. Tana Toraja No.10 Th. 2000 ttg Retribusi Fasilitas Parkir Khusus Untuk Umum.	L L : 2 Hal.	
74	No.74 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banyuasin No.39 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dan Tempat Parkir Khusus.	L L : 2 Hal.	
75	No.75 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Malinau No.16 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	L L : 2 Hal.	
76	No.76 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kutai Timur No.13 Th.2002 ttg Retribusi Parkir.	L L : 2 Hal.	
77	No.77 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab.Sumbawa Barat No.18 Th.2005 ttg Retribusi Jasa Transportasi Laut.	L L : 2 Hal.	
78	No.78 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
79	No.79 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Muna No.3 Th.2004 ttg Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.	L L : 2 Hal.	
80	No.80 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.	L L : 2 Hal.	
81	No.81 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Belu No.8 Th.2005 ttg Perubahan Kedua Atas PERDA No. 5 Tahun 2001 ttg Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
82	No.82 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten DATI II Bogor No.23 Th.1998 ttg Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
83	No.83 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Sumba Barat No.8 Th.2001 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. DATI II Sumba Barat No.22 Th.1998 ttg Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
84	No.84 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten DATI II Polewali Mamasa No.4 Th.1999 ttg Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
85	No.85 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Malinau No.22 Th.2001 ttg Retribusi Izin Trayek.	L L : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten DATI II Trenggalek No.14 Th.1998 ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.	L L : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten DATI II Trenggalek No.14 Th.1998 ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.	L L : 2 Hal.	
87	No.87 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Th.2006 ttg Izin Operasi Angkutan Jalan dan Jaringan Trayek.	L L : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Ciamis No.16 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.	L L : 2 Hal.	
89	No.89 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Muna No.7 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Kendaraan Angkutan Barang.	L L : 2 Hal.	
90	No.90 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Binjai No.21 Th.2001 ttg Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.	L L : 2 Hal.	
91	No.91 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bangka Barat No.4 Th.2007 ttg Retribusi di Bidang Perhubungan.	L L : 2 Hal.	
92	No.92 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Bandung No.11 Th.2001 ttg Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
93	No.93 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Tana Toraja No.10 Th.2003 ttg Retribusi Bongkar Muat.	L L : 2 Hal.	
94	No.94 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Mandailing Natal No.17 TH.2001 ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
95	No.95 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kota Tangerang No.4 Th.2001 ttg Retrib. Izin Bongkar Muat Barang.	L L : 2 Hal.	
96	No.96 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Klaten No.12 Tahun 2000 ttg Retribusi Terminal.	L L : 2 Hal.	
97	No.97 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. DATI II Polewali Mamasa No.2 Th.1999 ttg Retribusi Terminal.	L L : 2 Hal.	
98	No.98 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Malinau No.18 Th.2003 ttg Retribusi Terminal.	L L : 2 Hal.	
99	No.99 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Klungkung No.12 Th.2002 ttg Retribusi Bea Pangkal.	L L : 2 Hal.	
100	No.100 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kab. Ciamis No.11/2003 ttg Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.	L L : 2 Hal.	
101	No.101 Tahun 2009 13 Juli 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Malinau No.5 Th.2005 ttg Retribusi Masuk Bandar Udara.	L L : 2 Hal.	
102	No.102 Tahun 2009 3 Agustus 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bantaeng No.4/2004 ttg Retrib. Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.	L L : 3 Hal.	
103	No.103 Tahun 2009 3 Agustus 2009	Pembatalan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.21 Th.2006 ttg Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Perkebunan.	L L : 2 Hal.	
104	No.104 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kotamadya Dati II Tanjungbalai No.13 Th.1996 ttg Retribusi Penggalian/Pemotongan Jalan Untuk Penanaman Pipa, Kabel, dan Yang Sejenis.	L L : 2 Hal.	
105	No.105 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kota Makassar No.6 Th.2002 ttg Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran dan Percetakan/Grafika Dalam Wilayah Kota Makassar.	L L : 2 Hal.	
106	No.106 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banjar No.8 Th.2006 ttg Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.	L L : 2 Hal.	
107	No.107 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Kapuas Hulu No.2 Th.1998 ttg Pajak Hiburan.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
108	No.108 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Halmahera Utara No.23 Th.2006 ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.	L L : 2 Hal.	
109	No.109 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Merauke No.7 Th.2005 ttg Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran dan Percetakan/Grafika.	L L : 2 Hal.	
110	No.110 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Majene No.3 Th.1998 ttg Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 Hal.	
111	No.111 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kota Tarakan No.21 Th.2001 ttg Pengesahan Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Koperasi.	L L : 2 Hal.	
112	No.112 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Semarang No.10 Th.2004 ttg Pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan.	L L : 2 Hal.	
113	No.113 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kota Banjarbaru No.16 Th.2000 ttg Retribusi Pasar.	L L : 2 Hal.	
114	No.114 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Katingan No.4 Th.2006 ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.	L L : 2 Hal.	
115	No.115 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanah Laut No.7/2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	L L : 2 Hal.	
116	No.116 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kotawaringin Timur No.19 Th.2002 ttg Izin Pengumpulan Uang atau Barang Undian.	L L : 2 Hal.	
117	No.117 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merauke No.12 Th.2007 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Dati II Merauke No.35 Th.1998 ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	L L : 2 Hal.	
118	No.118 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kep. Sula No.5 Th.2006 ttg Retribusi Pembinaan Kehutanan.	L L : 2 Hal.	
119	No.119 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kota Tarakan No.17 Th.2004 ttg Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi di Kota Tarakan.	L L : 2 Hal.	
120	No.120 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab.Murung Raya No.17 Th.2004 ttg pemberian Rekomendasi Thdp Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Murung Raya.	L L : 2 Hal.	
121	No.121 Tahun 2009 7 September 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merauke No.12 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wil. Kab. Merauke.	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
122	No.122 Tahun 2009 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seluma No.30 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu Hutan Hak/Rakyat.		
123	No.123 Tahun 2009 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 ttg Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/ Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.		
124	No.124 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 10 Huruf y, Huruf bb, Huruf dd, dan Huruf ee, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Karta Negara Nomor 5 Tahun 2003 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.		
125	No.125 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m PERDA Kab. Kutai Kartanegara No.13 Th.2002 ttg Pajak Hiburan.		
126	No.126 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 30 ayat (2) huruf e angka 1 PERDA Kab. Kutai No.10/2001 ttg Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai.		
127	No.127 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (6) huruf b PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No.20 Th.2003 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
128	No.128 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah.		
129	No.129 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kutai Kartanegara No.2 Th.2002 ttg Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang melebihi Kelas Jalan.		
130	No.130 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (2) PERDA Kab. Kutai No.32 Th.2000 tentang Ijin Lokasi.		
131	No.131 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) PERDA Kab. Dati II Kutai No.10 Th.1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.		
132	No.132 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf l PERDA Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.		
133	No.133 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Huruf a angka 3, ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) PERDA Kab. Kutai Barat No.2 Th.2005 ttg Retribusi Ijin Usaha Perdagangan dan Ijin Industri.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
134	No.134 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 31 PERDA Kab. Kutai Barat No.12 Th.2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.		
135	No.135 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kutai Barat No.9 Th.2002 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan.		
136	No.136 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 4 PERDA Kab. Kutai Barat No.10 Th.2002 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk & Biaya Akte Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.		
137	No.137 Tahun 2009 24 Nopember 2009	Pembatalan Bab IV PERDA Kab. Dati II Kutai No.28 Th.1996 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri Kecil.		
138	No.138 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kotamadya Dati II Banjarmasin No.2 Th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan		
139	No.139 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tingkat II Tanah Laut No.3 Th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.		
140	No.140 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Minahasa Utara No.22 Th.2005 ttg Retribusi Usaha Perikanan.		
141	No.141 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No.13 Th.1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
142	No.142 Tahun 2009 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.40 Th.1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.		
143	No.143 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Kendari No.25/1996 ttg Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan Dalam Wil. Daerah Kab. Tingkat II Kendari.		
144	No.144 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kolaka No.10 Th.2004 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.		
145	No.145 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Polewali Mamasa No.9/1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.		
146	No.146 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Polewali Mamasa No 4 Th.1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.		
147	No.147 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Mamuju No.11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
148	No.148 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pahuwato No.5 Th.2005 tentang Pajak Hotel.		
149	No.149 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Daerah Tingkat II Kendari No.6 Th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.		
150	No.150 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bau Bau No.10/2007 ttg Retribusi Izin Usaha Hotel & Penginapan.		
151	No.151 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.12 Th.2003 tentang Pajak Restoran.		
152	No.152 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.12 Th.2001 ttg Izin Peredaran, Pertunjukan Film, dan Rekaman Video Komersial.		
153	No.153 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No.29 Th.2003 ttg Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.		
154	No.154 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Datit II Polewali Mamasa No.7/1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
155	No.155 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.9 Th.1999 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERDA Kab. Batanghari No.32 Th.2001.		
156	No.156 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.9/2002 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
157	No.157 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a Angka 1 PERDA Kab. Batanghari No.4 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan.		
158	No.158 Tahun 2009 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tebo No.7 Th.2002 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
159	No.159 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA kota Jambi No.20/2002 ttg Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.		
160	No.160 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.27/2002 ttg Penyelenggaraan Aktifitas Kapal-Kapal Sungai di Perairan Pedalaman dan Dermaga Pelabuhan.		
161	No.161 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.7 Th.1999 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.		
162	No.162 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.6 Th.2001 ttg Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Di Kabupaten Lampung Utara.		

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
163	No.163 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.4 Th.2002 ttg Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan.		
164	No.164 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.		
165	No.165 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.5 Th.2003 ttg Retribusi Sarang Burung Walet.		
166	No.166 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lampung Utara No.6 Th.2003 ttg Retribusi Pengawasan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
167	No.167 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Belitung No.18 Th.2001 ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.		
168	No.168 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Lampiran Angka 1 huruf a Perda Kab. Belitung No.12 Th.2005 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.		
169	No.169 Tahun 2009 10 Desember 2009	.Pembatalan Lampiran angka I Perda Kab. Belitung No.13/2005 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kab. Belitung.		
170	No.170 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (1) huruf a Angka 3 & 4 serta huruf b Angka 1 & 2 Perda Kab. Belitung no.14/2005 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.		
171	No.171 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.17 Th.2004 ttg Retribusi Leges.		
172	No.172 Tahun 2009 10 Desember 2009	Pembatalan Perda Batam No.15 Th.2001 ttg Ketentuan Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.		
173	No.173 Tahun 2009 11 Desember 2009	.Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.13 Th.2003 ttg Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.		
174	No.174 Tahun 2009 11 Desember 2009	.Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.14 Th.2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran.		
175	No.175 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.16 Th.2003 ttg Usaha Hotel.		
176	No.176 Tahun 2009 11 Desember 2009	.Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.19 Th.2003 tentang Usaha-usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.		
177	No.177 Tahun 2009 11 Desember 2009	.Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.20 Th.2003 ttg Usaha Perikanan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
178	No.178 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.21 Th.2003 ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.		
179	No.179 Tahun 2009 11 Desember 2009	.Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.02 Th.2004 ttg Izin Pengendalian dan Pengeluaran Komoditi Barang.		
180	No.180 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.03 Th.2004 ttg Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
181	No.181 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara Barat No.06 Th.2004 ttg Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.		
182	No.182 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara Barat No.07 Th.2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.		
183	No.183 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara Barat No.08/2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Atau Ternak, Bahan Asal Hewan Dan Bahan Ikutan Serta Penggunaan Kandang Peristirahatan Ternak.		
184	No.184 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tenggara Barat No.09/2004 ttg Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih.		
185	No.185 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) Huruf a PERDA Kab. Seram Bagian Barat No.26 Th.2007 tentang Pajak Hotel.		
186	No.186 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Perda Kab. Seram Bagian Barat No.34/2007 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.		
187	No.187 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seram Bagian Barat No.40 Th.2007 ttg Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.		
188	No.188 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf a PERDA Kab. Seram Bagian Barat No.46 Th.2007 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
189	No.189 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seram Bagian Barat No.48/2007 ttg Perizinan Pengusahaan Perikanan.		
190	No.190 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 huruf c angka 3 & Psl 8 Perda Kab.Seram Bagian Barat No.49/2007 ttg Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian dibidang Kesehatan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
191	No.191 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran.		
192	No.192 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seram Bagian Barat No.51 Th.2007 ttg Retribusi Ketatausahaan Peternakan.		
193	No.193 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seram Bagian Barat No.52 Th.2007 ttg Ketatausahaan Perdagangan.		
194	No.194 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seram Bagian Barat No.53/2007 ttg Retribusi Izin Perfilman dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola (TV Kabel).		
195	No.195 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Sragen No.10/2003 ttg Pajak Pengusahaan sarang Burung Walet.		
196	No.196 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Surakarta No.7 Th.1998 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan.		
197	No.197 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Surakarta No.4 Th.2007 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.		
198	No.198 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Temanggung No.5 Tahun 2000 ttg Retribusi Terminal.		
199	No.199 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karanganyar No.2 Th.2001 ttg Perubahan Atas Perda Kab. Dati II Karanganyar No.18 Th.1998 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
200	No.200 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Blora No.6 Th.1999 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kab. Blora No.8 Th.2005		
201	No.201 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banjarnegara No.5 Th.2008 ttg Perubahan atas Perda Kab. Banjarnegara No.4/2002 ttg Retribusi Izin Trayek		
202	No.202 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Semarang No.17 Th.2002 ttg Pajak Restoran atau Rumah Makan.		
203	No.203 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Semarang No.15 Th.2002 ttg Pajak Hiburan.		
204	No.204 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banjarnegara No.3 Th.2008 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Banjarnegara No.5 Th.2002 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
205	No.205 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Blora No.7/2005 ttg Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta.		
206	No.206 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Brebes No.12/2002 ttg Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Hutan.		
207	No.207 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.21/2007 ttg Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.		
208	No.208 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.20 TH.2002 tTg Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Ternate.		
209	No.209 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.2 Th.2008 ttg Pengawasan dan Pengendalian Kayu Olahan Dalam Daerah Kota Ternate.		
210	No.210 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.3/2008 ttg Perubahan PERDA Kota Ternate No.18/2000 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.		
211	No.211 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.9/2008 ttg Perubahan PERDA Kota Ternate No.11 Th.2000 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.		
212	No.212 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.14/2008 ttg Perubahan atas PERDA Kota Ternate No.16/2001 ttg Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak.		
213	No.213 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.17 Th.2008 ttg Perubahan Perda Kota Ternate No.4 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi, dan Hiburan Umum.		
214	No.214 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ternate No.16/2008 ttg Perubahan atas Perda Kota Ternate No.4 Th.2002 ttg Pedoman Pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi (IUK) dlm Daerah Kota Ternate.		
215	No.215 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Barito Utara No.9 Th.2003 ttg Usaha Peratambangan Umum di Kabupaten Barito Utara.		
216	No.216 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Barat No.4 Th.2001 ttg Izin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
217	No.217 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2001 ttg Pengusahaan Pertambangan Umum.		
218	No.218 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.1/2000 ttg Retribusi Pasar Grosir & atau Pertokoan.		
219	No.219 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.2 Th.2000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.		
220	No.220 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.3/2000 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.		
221	No.221 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.4 Th.2000 tentang Retribusi Izin Trayek.		
222	No.222 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.5 Th.2000 tentang Retribusi Terminal.		
223	No.223 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.6 Th.2000 tentang Retribusi Pasar.		
224	No.224 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.7/2000 ttg Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.		
225	No.225 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.8 Th.2000 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir.		
226	No.226 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.9 Th.2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.		
227	No.227 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.10 Th.2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.		
228	No.228 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Gorontalo no.12/2000 ttg Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.		
229	No.229 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.10 Th.2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Kepariwisataaan.		
230	No.230 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.		
231	No.231 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Aceh Selatan No.3 th.2003 ttg Retribusi Pengujian Kapal Perikanan		
232	No.232 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh No. 9 Th.2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
233	No.233 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa No.16/2008 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.		
234	No.234 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa No.8/2008 ttg Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan.		
235	No.235 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Aceh Jaya No.21/2004 ttg Pajak Penerangan Jalan Kab. Aceh Jaya.		
236	No.236 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.42 Th.2001 tentang Pajak Hotel.		
237	No.237 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.43 Th.2001 tentang Pajak Restoran.		
238	No.238 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bengkalis No.44 Th.2001 tentang Pajak Hiburan.		
239	No.239 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bengkalis No.11 Th.2003 tentang Retribusi Izin Trayek.		
240	No.240 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hilir No.7 Th.2005 tentang Pengawasan Angkutan dan Pemeliharaan Jembatan Kab. Indragiri Hilir		
241	No.241 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hilir No.15 Th.2005 tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.		
242	No.242 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hulu No.18 Th.2002 ttg Lalu lintas dan Angkutan Jalan.		
243	No.243 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hulu No.14 Th.2004 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair		
244	No.244 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kampar No.14 Th.2000 ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.		
245	No.245 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kampar No.5 Th.2003 tentang Pajak Restoran.		
246	No.246 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Kampar No.6 Th.2003 tentang Pajak Hotel.		
247	No.247 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Singingi No.23 Th.2001 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.		
248	No.248 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Singingi No.31 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.		
249	No.249 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pelalawan No.15 Th.2003 ttg Izin Pemanfaatan Kayu.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
250	No.250 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pelalawan No.9 Th.2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.		
251	No.251 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pelalawan No.16 Th.2003 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik.		
252	No.252 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pelalawan No.3 Th.2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.		
253	No.253 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Siak No.5 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pengendalian Limbah Cair.		
254	No.254 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Dumai No.4 Th.2003 tentang Izin Bangunan.		
255	No.255 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.4 Th.1998 tentang Pajak Reklame.		
256	No.256 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.6 Th.2000 tentang Retribusi Pasar.		
257	No.257 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.14 Th.2000 tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru.		
258	No.258 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.8 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah.		
259	No.259 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pekanbaru No.2 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.		
260	No.260 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Maluku Tengah No.22 Th.2007 ttg Izin Usaha Ketenagalistrikan.		
261	No.261 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.15 Th.2007 ttg Retribusi atas Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian di Bidang Kesehatan.		
262	No.262 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ambon No.11 Th.2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.		
263	No.263 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.05 Th.2007 tentang Pajak Hotel.		
264	No.264 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.19 Th.2007 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.		
265	No.265 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.06 Th.2007 tentang Pajak Restoran.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
266	No.266 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Maluku Tengah No.17 Th.2007 ttg Retribusi Tanda Daftar Industri.		
267	No.267 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Maluku Tengah No.10 Th.2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.		
268	No.268 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Maluku Tengah No.08 Th.2007 ttg Pajak Hiburan.		
269	No.269 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Ambon No.8 Th.2001 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
270	No.270 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Ambon No.5 Th.2001 tentang Pajak Reklame.		
271	No.271 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.3 Th.2000 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.		
272	No.272 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Bungo No.17/2002 ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.		
273	No.273 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.21 Th.2002 ttg Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, & Tukang Gigi.		
274	No.274 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.38 Th.2002 ttg Izin Pembuangan Limbah Cair.		
275	No.275 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.10 Th.2005 tg Perubahan atas Perda Kota Jambi No.10 Th.2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
276	No.276 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan Psl 15 Ayat (2) Huruf B PERDA Kab. Lampung Selatan No.21 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game.		
277	No.277 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Selatan No.14 Th.2002 tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.		
278	No.278 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Timur No.17 Th.2002 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur.		
279	No.279 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Timur No.11 Th.2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
280	No.280 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karimun No.11 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.		
281	No.281 Tahun 2009 11 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Daerah Tingkat II Polewali Mamasa No.5 Th.1998 ttg Pajak Hiburan.		
282	No.282 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.4 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
283	No.283 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b PERDA Tk. II Kotawaringin Barat No.4 Th.1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
284	No.284 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Lampiran Nomor 3,4,6 dan 10 PERDA Kota Makassar No.9 Th.2004 ttg Pengaturan, Perlindungan & Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar		
285	No.285 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Tarakan No.15/2000 ttg Pemberian Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan yang melebihi Batas Muatan Sumbu Terberat.		
286	No.286 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERDA Kab. Kep. Sula No.13 Th.2006 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.		
287	No.287 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Lampiran PERDA Kab. Kapuas Hulu No.3 Th.2008 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu.		
288	No.288 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf f PERDA Kab. Dati II Majene No.5 Th.1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
289	No.289 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 15 PERDA Kab. Daerah Majene No.3 Th.2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.		
290	No.290 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Pahuwato No.34/2005 ttg Retribusi Izin Usaha Televisi Kabel.		
291	No.291 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a Angka 1 dan Huruf b Angka 1, dan Pasal 13 PERDA Kab. Pahuwato No.26 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.		
292	No.292 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pahuwato No.25 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
293	No.293 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pahuwato No.16 Th.2005 tentang Retribusi Hasil Industri Bungkil Kelapa.		
294	No.294 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e, Huruf f dan Huruf g & Pasal 8 ayat (3) PERDA Kota Banjarbaru No.15 Th.2000 ttg Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan.		
295	No.295 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 11 PERDA Kota Banjarbaru No.14 Th.2000 ttg Retribusi Izin Gangguan.		
296	No.296 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Banjarbaru No.4 Th.2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C.		
297	No.297 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 25 PERDA Kab. Halmahera Utara No.9/2007 ttg Pedoman Penerbitan tanda daftar perusahaan (TDP) dalam Daerah Kab. Halmahera Utara.		
298	No.298 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) PERDA Kab. Halmahera Utara No.8 Th.2007 ttg Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.		
299	No.299 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 Perda Kab. Halmahera Utara No.6/2007 ttg Retribusi Izin Gangguan.		
300	No.300 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf c & Psi 9 ayat (2), ayat (3) & ayat (4) Perda Kab. Halmahera Utara No.24/2006 ttg Izin Usaha Pengusahaan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.		
301	No.301 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PERDA Kab. Halmahera Utara No.21 Th.2006 ttg Retribusi Izin Usaha Restoran.		
302	No.302 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Halmahera Utara No.20 Th.2006 ttg Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum Kabupaten Halmahera Utara.		
303	No.303 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (1) PERDA Kab.Halmahera Utara No.19 Th.2006 ttg Izin Usaha Hotel Kab.Halmahera Utara.		
304	No.304 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Peraturan Walikota Samarinda No.015 Th.2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
305	No.305 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Samarinda No.31 Th.2000 ttg Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dlm Wil. Kota Samarinda, sebagaimana telah diubah dg PERDA Kota Samarinda No.24 Th.2004.		
306	No.306 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bantaeng No.25 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan.		
307	No.307 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bantaeng No.21 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.		
308	No.308 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bantaeng No.18 Th.2001 tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian.		
309	No.309 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bantaeng No.9 Th.2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.		
310	No.310 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Bantaeng No.6 Th.2001 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.		
311	No.311 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan No.13 Th.2002 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan.		
312	No.312 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan No.5 Th.2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
313	No.313 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Banggai Kepulauan No.35 Th.2001 ttg Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.		
314	No.314 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan No.30 Th.2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.		
315	No.315 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan No.25 Th.2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.		
316	No.316 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Banggai Kepulauan No.22 Th.2001 tentang Pajak Hiburan.		
317	No.317 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan No.12 Th.2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
318	No.318 Tahun 2009 14 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banggai Kepulauan No.9 Th.2002 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
319	No.319 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bau Bau No.4 TH.2004 tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.		
320	No.320 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Cilacap No.6 Th.2006 ttg Retribusi Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kab. Cilacap		
321	No.321 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banyuwangi No.12 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.		
322	No.322 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Blitar No.6 Th.2004 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat.		
323	No.323 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Blitar No.4 Th.2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
324	No.324 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Jember No.17/2002 ttg Pengelolaan Pertambangan dan Energi.		
325	No.325 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Jember No.9 Th.2003 ttg Izin Usaha Kepariwisata.		
326	No.326 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Lamongan No.21 Th.1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kab. Lamongan No.12 Th.2004.		
327	No.327 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lamongan No.15 Th.2003 ttg Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.		
328	No.328 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lamongan No.4 Th.2004 ttg Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan.		
329	No.329 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Mojokerto No.4/2007 ttg Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.		
330	No.330 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Nganjuk No.5 Th.2003 tentang Ketentuan Izin Operasional Kendaraan Peralatan Produksi Pertanian Bermesin dan Sejenisnya.		
331	No.331 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pacitan No.6 Th.2002 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Milik/Hutan Rakyat.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
332	No.332 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pacitan No.11 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.		
333	No.333 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sampang No.2 Th.1999 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.		
334	No.334 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Malang No.11 Th.2004 ttg Retribusi Perizinan Bangunan.		
335	No.335 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Sengingi No.2 Th.2003 ttg Izin Pertambangan Energi.		
336	No.336 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Purbalingga No.4 Th.2005 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Dati II Purbalingga No.15 Th.1998 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.		
337	No.337 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Magelang No.12 Th.2003 ttg Perubahan Pertama Atas PERDA Kab. Magelang No.15 Th.2001 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Magelang.		
338	No.338 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lebong No.5 Th.2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet.		
339	No.339 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lebong No.7 Th.2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
340	No.340 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lebong No.17/2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.		
341	No.341 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.5 Th.2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.		
342	No.342 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.6 Th.2002 tentang Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.		
343	No.343 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.7 Th.2002 tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri.		
344	No.344 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.9 Th.2006 ttg Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum.		
345	No.345 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.15 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
346	No.346 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pangkalpinang No.16 Th.2004 tentang Retribusi Izin Lokasi.		
347	No.347 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kuantan Singingi No.3/2003 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		
348	No.348 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Pasaman No.4 Th.2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
349	No.349 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Batanghari No.11 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.		
350	No.350 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Banyuasin No.45 Th.2003 ttg Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kab. Banyuasin.		
351	No.351 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kabupaten Banyuasin No.21 Th.2005 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
352	No.352 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.5 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.		
353	No.353 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.14 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
354	No.354 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.18 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel.		
355	No.355 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.19 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Restoran.		
356	No.356 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.9 Th.2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.		
357	No.357 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.14 Th.2003 ttg Usaha Jasa Perjalanan Wisata.		
358	No.358 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seluma No.16/2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.		
359	No.359 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seluma No.13/2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
360	No.360 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kolaka No.4 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
361	No.361 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kolaka No.5 Th.2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.		
362	No.362 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kolaka No.6 Th.2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.		
363	No.363 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kolaka No.11 Th.2004 ttg Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone.		
364	No.364 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.13 Th.2004 ttg Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Tanah (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton.		
365	No.365 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.22 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.		
366	No.366 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.4 Th.2002 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air.		
367	No.367 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.10 Th.2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik		
368	No.368 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kendari No.12 Th.2002 ttg Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Jasa Titipan Pos.		
369	No.369 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Barito Timur No.5 Th.2004 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat.		
370	No.370 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banjar No.2 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan.		
371	No.371 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seruyan No.12 Th.2005 ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk.		
372	No.372 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kota Palangkaraya No.5/2009 ttg Retribusi Per- izinan Pendirian Agen & Pangkalan Minyak Tanah serta Liquid Petroleum Gas (LPG)		
373	No.373 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 angka 9 huruf b PERDA Kota Palangkaraya No.2 Th.2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
374	No.374 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (8) PERDA Kota Palangkaraya No.1 Th.2008 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.		
375	No.375 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.8 Th.2003 ttg Perubahan Pertama PERDA No.30 Th.2000 ttg Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.		
376	No.376 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Kotawaringin Timur No.9 Th.1991 ttg Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum/ Barang dalam Daerah Kab. Dati II Kotawaringin Timur.		
377	No.377 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Kotawaringin Barat No.3/2001 ttg Penataan dan Pendaftaran Gudang.		
378	No.378 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kapuas No.10 Th.2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Industri.		
379	No.379 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Barat No.3 Th.2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan.		
380	No.380 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Barat No.13/2007 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		
381	No.381 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Barito Selatan No.5 th.2002 ttg Retribusi Perizinan & Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.		
382	No.382 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Polewali Mamasa No.6 Th.2001 ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.		
383	No.383 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.7 Th.2002 ttg Perubahan Atas PERDA Kota Palangkaraya No.4 th.2000 ttg Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.		
384	No.384 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Polewali Mamasa No.5 Th.2001 ttg Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.		
385	No.385 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sumbawa No.29 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.		
386	No.386 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) PERDA Kota Mataram No.3 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
387	No.387 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bima No.7 Th.2004 ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
388	No.388 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Musi Banyuasin No.44 Th.2002 ttg Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di atas Air di Kabupaten Musi Banyuasin.		
389	No.389 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Aceh Timur No.9 Th.2001 ttg Pajak Pendaftaran Perusahaan.		
390	No.390 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Aceh Timur No.10 Th.2001 ttg Retribusi Pengadaan Barang/ Jasa Proyek-Proyek Pekerjaan yg Dibiayai APBN, APBD Prop. & APBD Kab. Aceh Timur.		
391	No.391 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 8 Ayat (2) Angka I & Angka II Qanun Kota Banda Aceh No.7 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.		
392	No.392 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kota Langsa No.4 Th.2003 ttg Pajak Pendaftaran Perusahaan.		
393	No.393 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Prov.Jambi No.3 Th.2004 tg Retribusi Perizinan Kapal Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Dalam Prov. Jambi.		
394	No.394 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 PERDA Kab. Banyumas No.3 Th.2008 ttg Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.		
395	No.395 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Cilacap No.16 Th.2003 ttg Pajak Atas Jasa Kepelabuhan.		
396	No.396 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) & Pasal 14 ayat (3) PERDA Kab.Pemalang No.18 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.		
397	No.397 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) PERDA Kab. Temanggung No.14/2002 ttg Retribusi Perijinan/Tanda Daftar di Bid. Perindustrian & Perdagangan.		
398	No.398 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sleman No.7 Th.2004 ttg Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.		
399	No.399 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 dan Pasal 13 PERDA Kota Blitar No.12 Th.2004 tentang Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP).		
400	No.400 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Tarakan No.9 Th.2002 ttg Pemberian Ijin Tempat Usaha.		
401	No.401 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Tarakan No.14/2004 ttg Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
402	No.402 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palu No.20/2001 ttg Retribusi Perdagangan antar Pulau melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi antar Pulau.		
403	No.403 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e & Pasal 10 PERDA Kota Palu No.8 Th.2003 ttg Perubahan Atas PERDA Kota Palu No.27 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.		
404	No.404 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 6 PERDA Kota Bima No.18 Th.2004 ttg Retribusi Tanda Daftar Industri.		
405	No.405 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Asahan No.23/2000 ttg Perubahan Atas PERDA No.25/1998 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Daerah Kab.Tk.II Asahan.		
406	No.406 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Deli Serdang No.20 Th.2000 tentang Retribusi Dokumen Lelang.		
407	No.407 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Deli Serdang No.23 Th.2000 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus.		
408	No.408 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Deli Serdang No.24 Th.2000 ttg Pajak Pengelolaan, Pengusahaan, dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.		
409	No.409 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karo No.12/2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan.		
410	No.410 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA No.51 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, dan Media Baru.		
411	No.411 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Langkat No.26 Th.2002 ttg Izin Usaha Perusahaan dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut.		
412	No.412 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Nias No.4 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
413	No.413 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Padangsidempuan No.9/2008 ttg Retribusi Pendaftaran Perusahaan.		
414	No.414 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Padangsidempuan No.12 Th.2008 ttg Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
415	No.415 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Padangsidempuan No.16 Th.2008 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan.		
416	No.416 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Padangsidempuan No.20 Th.2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat.		
417	No.417 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Bengkulu Utara No.14 Th.2000 tentang Izin Usaha Industri.		
418	No.418 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkulu Utara No.13 Th.2002 tentang Retribusi Produksi Minyak Kelapa Sawit.		
419	No.419 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bengkulu Utara No.10 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian/Perkebunan.		
420	No.420 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Rejang Lebong No.17 Th.2006 ttg Retribusi Izin Komoditi Perkebunan Keluar Masuk Daerah.		
421	No.421 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.4 Th.1997 ttg Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
422	No.422 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.8 Th.2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.		
423	No.423 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bengkulu No.23 Th.2003 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil.		
424	No.424 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seluma No.10 Th.2005 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
425	No.425 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Seluma No.12 Th.2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
426	No.426 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seluma No.14 Th.2005 tentang Retribusi Uang Leges.		
427	No.427 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Seluma No.23 Th.2005 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan.		
428	No.428 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lebong No.18/2005 ttg Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.		
429	No.429 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lebong No.22 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
430	No.430 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kepahiang No.14 Th.2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
431	No.431 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kaur No.9 Th.2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
432	No.432 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Dompu No.6 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
433	No.433 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dompu No.18 Th.1995 ttg Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati, dan PERDA Kab. Dompu No.8 Th.2002 ttg Perubahan Pertama PERDA Kab. Dompu No.18 Th.1995.		
434	No.434 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Dompu No.21/1995 ttg Usaha Rekreasi & Hiburan Umum, dan Perda Kab. Dompu No.7/2002 ttg Perubahan Pertama Perda Kab. Dompu No.21/1995.		
435	No.435 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dompu No.23 Th.1995 ttg Usaha Rumah Makan & PERDA Kab. Dompu No.9 Th.2002 ttg Perubahan Pertama PERDA Kab. Dompu No.23 Th.1995.		
436	No.436 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Lombok Timur No.34 Th.1997 ttg Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
437	No.437 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lombok Timur No.17 Th.2001 tentang Pajak Hotel.		
438	No.438 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lombok Timur No.19 Th.2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.		
439	No.439 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Lombok Timur No.20 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perfilman.		
440	No.440 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lombok Timur No.19 Th.2002 ttg Retribusi Jasa atas Transportasi Laut.		
441	No.441 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Alor No.4 Th.2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
442	No.442 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Ende No.7 Th.2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
443	No.443 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kupang No.3/2001 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
444	No.444 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Lembata No.9/2002 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C.		
445	No.445 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Manggarai No.3 Th.2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.		
446	No.446 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Ngada No.7 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.		
447	No.447 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Sikka No.6 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
448	No.448 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Sumba Timur No.15 Th.2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.		
449	No.449 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Dati II Timor Tengah Selatan No.2 Th.1998 ttg Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
450	No.450 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Dati II Gunung Kidul No.5 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
451	No.451 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pemalang No.27 Th.2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
452	No.452 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 4, Pasal 9 ayat (3), ayat (4) & ayat (5) Perda Kab. Manokwari No.19/2003 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
453	No.453 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) angka 1 dan Pasal 12 ayat (1) PERDA Kab.Lamandau No.14 th.2007 ttg Retribusi Sertifikat Kelaiikan Kapal, Kebangsaan Kapal sungai & Danau, Pendaftaran Kapal & Surat Tanda Kecakapan.		
454	No.454 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bogor No.12 Th.1998 ttg Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
455	No.455 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bogor No.16 Th.1998 tentang Pajak Hiburan.		
456	No.456 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bogor No.21/1998 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.		
457	No.457 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karawang No.17 Th.2001 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
458	No.458 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Majalengka No.14 Th.2000 ttg Retribusi Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Daging serta bahan lainnya asal ternak/hewan yang diperjualbelikan.		
459	No.459 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Majalengka No.10 Th.2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.		
460	No.460 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Purwakarta No.13 Th.2002 ttg Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.		
461	No.461 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Purwakarta No.14 Th.2007 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
462	No.462 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Subang No.8/2002 ttg Retribusi Pemberian Izin Usaha Telematika.		
463	No.463 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.6 Th.2002 tentang Izin Pemanfaatan dan Atau Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu.		
464	No.464 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.2 Th.2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataaan.		
465	No.465 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Sukabumi No.4/2003 ttg Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.		
466	No.466 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Sukabumi No.5/2003 ttg Retribusi Terminal Angkut Penumpang.		
467	No.467 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.6 Th.2003 tentang Izin Bongkar Muat Barang.		
468	No.468 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.7 Th.2003 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.		
469	No.469 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.9 Th.2003 tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor.		
470	No.470 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.15 Th.2003 tentang Izin Penebangan Pohon Kayu dan Bambu.		
471	No.471 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.7 Th.2004 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan.		
472	No.472 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.11 Th.2004 tentang Pajak Restoran.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
473	No.473 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukabumi No.12 Th.2004 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
474	No.474 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.5 Th.2003 tentang retribusi atas Usaha Komoditas Buah Manggis.		
475	No.475 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tasikmalaya No.3 Th.2005 ttg Izin Usaha Pariwisata & Budaya.		
476	No.476 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bekasi No.2 Th.2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan.		
477	No.477 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bekasi No.09 Th.2001 ttg Perubahan Pertama PERDA Kotamadya Dati II Bekasi No.73 Th.1999 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
478	No.478 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bekasi No.13 Th.2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.		
479	No.479 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Depok No.44 Th.2000 tentang Retribusi Terminal.		
480	No.480 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Depok No.4 Th.2003 ttg Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.		
481	No.481 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Barito Utara No.03 Th.2002 tentang Retribusi Label Penjualan Minuman Berakohol.		
482	No.482 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bekasi No.19 Th.2001 ttg Pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang & Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.		
483	No.483 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Musi Banyuasin No.5 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
484	No.484 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Blora No.2 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
485	No.485 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d PERDA Kab. Dati II Blora No.4 TH.1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
486	No.486 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf l & Pasal 5 huruf b, huruf j, huruf m, huruf n PERDA Kab. Dati II Blora No.7 Th.1998 tt Pajak Hiburan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
487	No.487 Tahun 2009 16 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Blora No.15 Th.2001 ttg Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan.		
488	No.488 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Blora No.13 th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
489	No.489 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 Huruf a PERDA Kab. Blora No.14 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.		
490	No.490 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 huruf a PERDA Kab. Blora No.15 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pergudangan.		
491	No.491 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Blora No.2 Th.2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
492	No.492 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Blora No.4 Th.2005 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Kebudayaan.		
493	No.493 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) PERDA Kab. Blora No.6 Th.2005 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan.		
494	No.494 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.41 Th.2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
495	No.495 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.9 Th.2002 ttg Pajak Hasil Usaha Budidaya Perikanan.		
496	No.496 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.10 Th.2002 tentang Pajak Hasil Tangkapan Ikan.		
497	No.497 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.2 th.2007 ttg Retribusi Penerbitan/perpanjangan Dokumen(Surat-Surat) Kapal Isi Kotor Kurang dari 7 GT Pemakaian Dataran Perairan Bawah Air (Salvage).		
498	No.498 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b PERDA Kota Balikpapan No.3 Th.2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
499	No.499 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Balikpapan No.25 Th.2000 ttg Perubahan Atas PERDA No.11 Th.2000 ttg Retribusi Izin Angkutan Umum.		
500	No.500 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Balikpapan No.3 Th.2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
501	No.501 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Toba Samosir No.15 Th.2002 ttg Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian.		
502	No.502 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2) PERDA Kab. Toba Samosir No.16 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang.		
503	No.503 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) PERDA Kab. Toba Samosir No.6 Th.2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.		
504	No.504 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Kapuas No.11/2002 ttg Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
505	No.505 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kapuas No.12 Th.2002 ttg Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Izin Ketenagakerjaan.		
506	No.506 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanah Datar No.1 TH.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
507	No.507 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanah Datar No.6 Th.2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller.		
508	No.508 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan Huruf d PERDA Kota Payakumbuh No.4 Th.2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
509	No.509 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Payakumbuh No.6 Th.2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan.		
510	No.510 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psi 10 ayat (2) & ayat (3) Perda Kota Payakumbuh No.14/2003 ttg Retribusi Atas Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
511	No.511 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Payakumbuh No.13 Th.2003 tentang Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan (advis Planning).		
512	No.512 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Karanganyar No.11 Th.1998 tentang Pajak Hiburan.		
513	No.513 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Karanganyar No.12 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
514	No.514 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Dati II Karanganyar No.6/1999 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
515	No.515 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pandeglang No.13 Th.2001 tentang Bangunan.		
516	No.516 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pandeglang No.9 Th.2004 ttg Retribusi Jasa Pelayanan Kapal.		
517	No.517 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kotamadya Dati II Padang No.6/1995 ttg Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging yang akan Dijual dalam Kotamadya Dati II Padang.		
518	No.518 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 PERDA Kota Padang No.2 Th.2004 ttg Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perfilman.		
519	No.519 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (6) huruf a PERDA Kab. Karo No.22 Th.2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Perizinan Trayek Angkutan Kendaraan Bermotor.		
520	No.520 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (2) Perda Kab.Karo No.24/2006 ttg Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.		
521	No.521 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Karo No.25/2006 ttg Retrib. Perizinan Penyelenggaraan Koperasi.		
522	No.522 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Barito Selatan No.13 Th.2002 ttg Retribusi Perizinan Usaha Perfilman dan Usaha Informasi Komunikasi.		
523	No.523 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Barito Selatan No.3 Th.2004 ttg Perubahan Pertama Atas Perda Kab. Barito Selatan No.5/2002 ttg Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.		
524	No.524 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2 & Pasal 10 ayat (2) PERDA Kota Padang Panjang No.13 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		
525	No.525 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 8 ayat (2) huruf e angka 1 & Psl 10 ayat (2) Perda Kota Padang Panjang No.15/2004 ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Industri, Perusahaan dan Gudang.		
526	No.526 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (4) PERDA Kab. Labuhanbatu No.41 Th.2002 ttg Izin Gudang, Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan.		
527	No.527 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Labuhanbatu No.57 Th.2002 ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dalam Kabupaten Labuhanbatu.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
528	No.528 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Cirebon No.6 Th.2002 ttg Izin Operasional Angkutan Becak.		
529	No.529 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Gorontalo No.5 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Peternakan.		
530	No.530 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 Huruf D dan Pasal 22 Ayat (2) PERDA Kab. Bogor No.39 Th.2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.		
531	No.531 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 13 Ayat (3) PERDA Kota Tanjung Balai No.18 Th.2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
532	No.532 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Aceh Barat No.3 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
533	No.533 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bekasi No.13 Th.1998 ttg Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
534	No.534 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Batam No.2/2002 ttg Ketentuan Bangunan di Kota Batam.		
535	No.535 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 30 PERDA Kab. Barito Timur No.3 Th.2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.		
536	No.536 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (2) PERDA Kab. Purwakarta No.11 Th.2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.		
537	No.537 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 16 dan Pasal 37 PERDA Kab. Bandung No.8 Th.2003 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.		
538	No.538 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 17 Perda Kab. Banjarbaru No.5/2002 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital ( Golongan A dan B).		
539	No.539 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Banjarbaru no.8/2002 ttg Retrib. Pengusahaan Minyak & Gas Bumi.		
540	No.540 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Manokwari No.25 Th.2003 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir.		
541	No.541 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 1 Angka 18, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, & huruf e PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No.6 Th.2005 ttg Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi.		
542	No.542 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 8 Perda Kab.Sambas No.9/2004 ttg Retrib. Pengujian Kend. Bermotor.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
543	No.543 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 9 huruf e angka 4 Perda Kota Madiun No.8/2007 ttg Terminal Penumpang.		
544	No.544 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e & Pasal 8 Perda Kota Yogyakarta No.10 Th.2006 ttg Retribusi Terminal Penumpang.		
545	No.545 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (4) Huruf f Angka 1 PERDA Kab. Boven Digoel No.17 Th.2007 ttg Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.		
546	No.546 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 1 Angka 8 & Psl 4 Perda Kab.Sanggau no.5/2004 ttg Retrib. Pelayanan Pelabuhan Dermaga Kapal/Motor air.		
547	No.547 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Situbondo No.37 Th.2002 ttg Biaya Jasa Kepelabuhan dan Penggunaan Perairan di Kab.Situbondo.		
548	No.548 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan huruf d PERDA Kab. Boven Digoel No.14 Th.2007 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
549	No.549 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 Huruf b dan huruf d PERDA Kab. Sintang No.4 Th.2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
550	No.550 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Dati II Sintang No.4 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
551	No.551 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Klungkung No.1 Th.1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.		
552	No.552 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 13 PERDA Kab.Tabanan No.6 Th.2002 ttg Retribusi Ijin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.		
553	No.553 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) PERDA Kota Pematang Siantar No.7 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Industri (IUI).		
554	No.554 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) PERDA Kota Tebing Tinggi No.7 Th.2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Gudang.		
555	No.555 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Cirebon No.6 Th.2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Kota Cirebon.		
556	No.556 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 8 ayat (2) huruf a, huruf b & huruf f PERDA Kab.Pemalang No.25 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
557	No.557 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 6 Perda Kab. Bulungan No.5 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.		
558	No.558 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Angka 1 Huruf b Perda Kab. Sumenep No.8/2000 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tih diubah dg Perda no.14/2004 ttg Perubahan kedua atas Perda Kab.Sumenep No.8/2000.		
559	No.559 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 7 PERDA Kota Palangkaraya No.11 th.2003 ttg Pengaturan, Penertiban & Pengawasan Pedagang Kaki Lima.		
560	No.560 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2) PERDA Kota Palangkaraya No.27 Th.2002 tentang Retribusi atas Ijin Perubahan Fungsi Perumahan dan Rumah Sewa di Kota Palangkaraya.		
561	No.561 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.21 Th.2005 tentang Retribusi Bongkar Muat.		
562	No.562 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.20/2005 ttg Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/ Kehutanan.		
563	No.563 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.22/2005 ttg Retrib. Pemindahan Limbah (Barng Bekas)		
564	No.564 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kab. Bireuen No.35 Th.2005 tentang Retribusi Izin Bengkel.		
565	No.565 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 11 Qanun Kab. Bireuen No.36 Th.2005 ttg Retribusi Izin Pergudangan.		
566	No.566 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 4 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) PERDA Kab.Deli Serdang No.11 Th.2000 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
567	No.567 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 13 ayat (1) PERDA Kab. Deli Serdang No.7 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		
568	No.568 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6, Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 20 huruf a, huruf d PERDA Kota Medan No.13 Th.2003 ttg Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan		
569	No.569 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pembatalan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERDA Kota Pematang Siantar No.5 Th.2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
570	No.570 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.35 Th.2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.		
571	No.571 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.30 Th.2001 tentang Retribusi Gambar Bangunan.		
572	No.572 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 PERDA Kab. Tanah Datar No.20 Th.2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.		
573	No.573 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bojonegoro No.17 th.2001 ttg Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu dari Tempat Penimbunan Kayu.		
574	No.574 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Muaro Jambi No.27 Th.2002 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Muaro Jambi No.16 Th.2001 ttg Retribusi Daerah Bagi Setiap Pemborong/Kontraktor Yang Beroperasi Dalam Kab. Muaro Jambi.		
575	No.575 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pandeglang No.8 Th.2004 tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan.		
576	No.576 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pandeglang No.6 Th.2003 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.		
577	No.577 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tana Toraja No.8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Ketenagakerjaan.		
578	No.578 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Malinau No.16/2002 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.		
579	No.579 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sukoharjo No. 31 Th.2001 ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.		
580	No.580 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 Perda Kab. Cianjur No.3 Th.2004 ttg Perijinan Bidang Usaha Industri.		
581	No.581 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k dan huruf l PERDA Kab.Bogor No.17 Th.2002 ttg Pajak Hiburan.		
582	No.582 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Perda Kab. Muaro Jambi No.2/2003 ttg Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.		
583	No.583 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c PERDA Kab. Pematang No.26 Th.2002 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
584	No.584 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k PERDA Kotamadya Dati II Bekasi No.42 Th.1998 ttg Pajak Hiburan.		
585	No.585 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Subang No.7/2002 ttg Retribusi Pelayanan Bid. Ketenagakerjaan.		
586	No.586 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9, nomor 10, nomor 12 dan nomor 13 PERDA Kab. Purwakarta No.18 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.		
587	No.587 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) PERDA Kota Pematang Siantar No.6 Th.2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI).		
588	No.588 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PERDA Kota Pematang Siantar No.4 Th.2002 ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG).		
589	No.589 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pematang Siantar No.3 Th.2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).		
590	No.590 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pematang Siantar No.19/2001 ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.		
591	No.591 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal I huruf d PERDA Kota Pematang Siantar No.18 Th.2001 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Kotamadya Dati II Pematang Siantar No.15 Th.1998 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.		
592	No.592 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bulungan No.4 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bulungan No.8 Th.2003.		
593	No.593 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bojonegoro No.27 Th.2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.		
594	No.594 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Sambas No.13 Th.2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.		
595	No.595 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sambas No.15 Th.2003 ttg Izin Pengelolaan & Pembuangan Limbah Cair.		
596	No.596 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1) Huruf a PERDA Kab. Melawi No.17 Th.2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
597	No.597 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.19/2000 ttg Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.		
598	No.598 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.88.45/12/HUK/2001 Th.2000 ttg Penetapan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kab. Kotawaringin Barat.		
599	No.599 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.30 Th.2000 ttg Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.		
600	No.600 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.4 Th.2002 tentang Retribusi Leges.		
601	No.601 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.5 Th.2002 tentang Usaha Rumah Makan.		
602	No.602 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2002 ttg Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati.		
603	No.603 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.8 Th.2002 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.		
604	No.604 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.15 Th.2002 ttg Retribusi Jasa Dermaga, Bongkar Muat, Tambat Labuh, dan Terminal Penumpang di Kotawaringin Timur.		
605	No.605 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2004 ttg Retribusi Hasil Perkebunan dan Hasil Penjualan Bibit Tanaman.		
606	No.606 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kotamadya Dati II Palangkaraya No.5/1998 ttg Pajak Penerangan Jalan		
607	No.607 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.17 Th.1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.		
608	No.608 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3/2000 ttg Izin Industri Kayu dari Barang dari Kayu.		
609	No.609 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 ttg Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.		
610	No.610 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11/2002 ttg Retrib. Surat Ijin usaha Perdagangan		
611	No.611 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.12 Th.2002 ttg Retribusi Ijin Tempat Usaha.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
612	No.612 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.3 Th.2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang.		
613	No.613 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2008 ttg Perubahan Atas PERDA Kota Palangkaraya No.34 Th.2004 ttg Pengelolaan Parkir & Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor		
614	No.614 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palangkaraya No.4 Th.2008 tentang Pajak Parkir.		
615	No.615 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 Huruf e dan f PERDA Kab. Sukamara No.6 Th.2005 ttg Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges.		
616	No.616 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Angka 1 PERDA Kab. Sukamara No.7 Th.2005 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Akta Catatan Sipil.		
617	No.617 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lamandau No.8 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha Konstruksi.		
618	No.618 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 23 ayat (1) Huruf a, Huruf b & Huruf e Perda Kab.Gunung Mas no.12/2004 ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.		
619	No.619 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Gunung Mas No.15/2004 ttg Retribusi Angkutan Penyeberangan Kendaraan Bermotor.		
620	No.620 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Gunung Mas No.16 Th.2004 tentang Pungutan Retribusi Bongkar Muat Barang.		
621	No.621 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Gunung Mas No.17 Th.2004 tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air.		
622	No.622 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Murung Raya No.20/2003 ttg Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Kab. Murung Raya.		
623	No.623 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Murung Raya No.27 Th.2003 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Murung Raya.		
624	No.624 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bone No.11 th.2000 ttg Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.		
625	No.625 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) a PERDA Kab. Bone No.4/2002 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
626	No.626 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bone No.6/2002 ttg Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.		
627	No.627 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bone No.8/2002 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.		
628	No.628 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bone No.7 Th.2002 tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chain saw).		
629	No.629 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Bone No.5/2003 ttg Retr. Izin Operasional Usaha Kepariwisataaan.		
630	No.630 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (6) Perda Kab.Bone No.6/2003 ttg Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.		
631	No.631 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bone No.8 Th.2003 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta.		
632	No.632 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bone No.18 Th.2003 ttg Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.		
633	No.633 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.23 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.		
634	No.634 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Buton No.24/2001 ttg Retribusi Izin Pendirian & Pelayanan Koperasi		
635	No.635 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Buton No.26 Th.2001 ttg Retribusi Wajib Daftar Perush..		
636	No.636 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.4/ 2006 ttg Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan.		
637	No.637 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Buton No.5 Th.2006 tentang Retribusi Izin Pemilikan Kayu Rakyat.		
638	No.638 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Buton No.31 Th.2006 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Alat Berat.		
639	No.639 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.08 Th.2004 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
640	No.640 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Batanghari No.21/2003 ttg Izin Pemungutan Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan.		
641	No.641 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Serdang Bedagai No.31/2005 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Skshh), Hasil Hutan, Hasil Hutan Hak/Rakyat Dan Perkebunan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
642	No.642 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.6 Th.006 ttg Retribusi Izin Pembuatan Kapal.		
643	No.643 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Metro No.17 Th.2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian.		
644	No.644 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Polewali Mamasa No.05 Th.2001 ttg Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.		
645	No.645 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.15 th.2002 ttg Retribusi Hasil Hutan.		
646	No.646 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.39 Th.2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengusahaan dan Pengoperasian Beca.		
647	No.647 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Polewali Mamasa No.08 Th.2001 ttg Retribusi Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kab.Polewali Mamasa.		
648	No.648 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karimun No.19 Th.2002 Tentang Retribusi Jasa Umum.		
649	No.649 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bulukumba No.35 Th.2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.		
650	No.650 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Humbang Hasundutan No.17 Th.2005 Tentang Izin Tempat Usaha.		
651	No.651 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.46 Th.2003 ttg Perizinan Dan Retribusi Izin Tempat Usaha.		
652	No.652 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Muko-Muko No.14 Th.2008 ttg Retribusi Izin Bongkar Muat.		
653	No.653 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Limapuluh Kota No.11 Th.1992 ttg Izin Mendirikan Bangunan.		
654	No.654 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Sibolga No.7 th.2000 ttg Retribusi Surat Izin Tempat Usaha Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERDA Kota Sibolga No.7 Th.2008		
655	No.655 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Tulang Bawang No.7 Th.2004 ttg Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri Dan Perusahaan Perdagangan.		
656	No.656 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.10/2002 ttg Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
657	No.657 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Gowa No.28 Th.2001 ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.		
658	No.658 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Kampar No.9 Th.1999 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.		
659	No.659 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.21 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.		
660	No.660 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.5 Th.2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.		
661	No.661 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Toli-Toli No.34 Th.2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu di Daerah Kabupaten Toli-Toli.		
662	No.662 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tapanuli Selatan No.15 Th.2007 ttg Pemanfaatan & Retribusi Hasil Hutan Kayu Rakyat Dalam Daerah Kab. Tapanuli Selatan.		
663	No.663 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sarolangun No.27 Th.2001 tentang Uang leges.		
664	No.664 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karimun No.21 Th.2002 ttg Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Karimun No.16 Th.2004.		
665	No.665 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karimun No.20 Th.2002 tentang Retribusi Jasa Usaha.		
666	No.666 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.11 Th.2001 tentang Uang Leges.		
667	No.667 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kerinci No.5 Th.2002 ttg Retribusi Leges sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kerinci No.6 Th.2005.		
668	No.668 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tebo No.50 Th.2001 tentang Uang Leges.		
669	No.669 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bulukumba No.34 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Kehutanan.		
670	No.670 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.30 Th.2002 ttg Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan.		
671	No.671 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Humbang Hasundutan No.3 Th.2005 tentang Pengusahaan Hutan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
672	No.672 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Merangin No.10/2005 ttg Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan Alam & Hutan Tanaman.		
673	No.673 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tapanuli Selatan No.13 Th.2004 ttg Retribusi Pengesahan, Perubahan, Pendaftaran Ulang Akta Anggaran Dasar & Pembentukan Unit Usaha Koperasi.		
674	No.674 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Toli-Toli No.5 Th.2002 ttg Retribusi Pendaftaran Koperasi.		
675	No.675 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.4 Th.2000 tentang PSDA atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik.		
676	No.676 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.13 Th.2005 ttg Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.		
677	No.677 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Humbang Hasundutan No.13/2006 ttg Pengesahan Akte Pendirian Koperasi.		
678	No.678 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Karimun No.27 Th.2001 tentang Pertambangan Daerah.		
679	No.679 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pakpak Barat No.19 Th.2006 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.		
680	No.680 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pakpak Barat No.42 Th.2004 tentang Pengesahan Akta dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.		
681	No.681 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.12 Th.2002 ttg Pertambangan Rakyat Bahan Galian emas.		
682	No.682 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hilir No.12 Th.2005 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Bumi dan Gas Bumi.		
683	No.683 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bangka No.23/2001 ttg Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan.		
684	No.684 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.2 th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.		
685	No.685 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kotamadya Dati II Pekanbaru No.7 Th.1998 ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.		
686	No.686 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.15/2004 ttg Pengusahaan Minyak & Gas Bumi.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
687	No.687 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Pakpak Barat No.20 Th.2006 ttg Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.		
688	No.688 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Binjai No.26 Th.2001 ttg Pemeriksaan Limbah Cair Industri.		
689	No.689 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Lahat No.20 Th.2001 ttg Sumbangan Pengusaha Kebun Kelapa Sawit kepada Pemerintah Kab. Lahat.		
690	No.690 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Muara Enim No.3 Th.2004 ttg Sumbangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung enim pada Pemerintah Kab. Muara enim.		
691	No.691 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Toli-Toli No.19 th.2002 ttg Retribusi Surat izin usaha industri.		
692	No.692 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Metro No.6 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Industri.		
693	No.693 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Langkat No.57 Th.2000 ttg Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dalam Kab. Langkat.		
694	No.694 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Tanjung Pinang No.6/2006 ttg Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.		
695	No.695 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.38 Th.2003 ttg Pemberian Izin Usaha Industri, Izin perluasan Industri, Tanda Daftar Industri,dan Retribusi Usaha Sektor Industri.		
696	No.696 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Palembang no.15/2002 ttg Pembinaan & Retribusi di Bidang Industri.		
697	No.697 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Tanjungbalai No.17 Th.2004 ttg Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri, SIUP, Izin Gudang/TDG dan Penge-sahan Badan Hukum Koperasi serta Tanda Daftar Perusahaan.		
698	No.698 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Samosir No.9/2005 ttg Retribusi Izin Usaha Industri,Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.		
699	No.699 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Humbang Hasundutan No.9 Th.2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang.		
700	No.700 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bandar Lampung No.3/2002 ttg Retribusi Izin Usaha & Pendaftaran Kegiatan Industri & Perdagangan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
701	No.701 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Timur No.7 Th.2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.		
702	No.702 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tulang Bawang No.8 Th.2004 ttg Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri & Perdagangan didalam Wilayah Kab. Tulang Bawang.		
703	No.703 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Metro No.7/2002 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
704	No.704 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanggamus No.23 th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.		
705	No.705 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Bungo No.8/2008 ttg Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.		
706	No.706 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Kerinci No.8/2004 ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.		
707	No.707 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.37 Th.2003 ttg Surat Izin Usaha Perdagangan.		
708	No.708 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.14/2004 ttg Pengawasan dan Pengendalian atas Pengedaran & Penjualan minuman beralkohol		
709	No.709 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Maros No.30/2002 ttg Retribusi Izin Pendaftaran Gudang.		
710	No.710 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.22/2008 ttg Penataan dan Pembinaan Pergudangan.		
711	No.711 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Langkat No.2 Th.2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Perda Kab. Langkat No.28 Th.2002 ttg Retribusi Pelayanan Pasar.		
712	No.712 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.3 Th.2002 ttg Pembinaan dan Retribusi Pemanfaatan Media Informasi & Komunikasi.		
713	No.713 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.16 Th.2002 ttg Pembinaan dibidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi.		
714	No.714 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Tanjungbalai No.9/2002 ttg Perubahan Pertama PERDA Kotamadya Dati II Tanjungbalai No.6 Th.1993 ttg Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
715	No.715 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Ogan Komering Ulu Timur No.24 Th.2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.		
716	No.716 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Pakpak Bharat No.17 Th.2007 ttg Usaha Angkutan Umum.		
717	No.717 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Humbang Hasundutan No.15/2005 tentang Usaha Angkutan Umum.		
718	No.718 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sarolangun No.21/2001 tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan.		
719	No.719 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Langkat No.20/2002 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Langkat No.46 Th.2000 ttg Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.		
720	No.720 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Pematangsiantar No.21 Th.2001 ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan dengan Kendaraan Umum.		
721	No.721 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Bungo No.20 Th.2008 ttg Izin Usaha Angkutan Barang dan Izin Beroperasi Angkutan Barang dalam Kabupaten Bungo.		
722	No.722 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Toli-Toli No.36 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang serta Izin Bagasi.		
723	No.723 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Prov.Jambi No.4 Th.2004 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus.		
724	No.724 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.39 Th.2002 ttg Pembinaan dan Retribusi Pengusahaan dan Pengoperasian Beca.		
725	No.725 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Batam No.9/2001 ttg Lalu Lintas & Angkutan Jalan di Kota Batam.		
726	No.726 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Samosir No.2 Th.2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.		
727	No.727 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA KotaTanjungbalai No.11 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan Darat.		
728	No.728 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.21 Th.2002 ttg Pambinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
729	No.729 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Samosir No.15 Th.2007 ttg Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.		
730	No.730 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.28 Th.2002 ttg Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran Kapal Pedalaman.		
731	No.731 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Tanjung Pinang No.11 Th.2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut.		
732	No.732 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Humbang Hasundutan No.23/2005 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
733	No.733 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Labuhan Batu No.06 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
734	No.734 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tapanuli Selatan No.19 Th.2006 tentang Pajak Listrik.		
735	No.735 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Indragiri Hilir No.11 Th.2005 tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan.		
736	No.736 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanggamus No.05 Th.2002 ttg Pajak Sarang Burung Walet.		
737	No.737 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bangka Tengah No.15 Th.2006 ttg Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet.		
738	No.738 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tulang Bawang No.14 Th.2008 ttg Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti.		
739	No.739 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Siak No.14 Th.2008 tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.		
740	No.740 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Tengah No.3 Th.2004 ttg Retribusi Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Kawasan Hutan.		
741	No.741 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Sibolga No.6/2000 ttg Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana tih diubah dengan PERDA Kota Sibolga No.6 Th.2008.		
742	No.742 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.28 Th.2002 ttg Pembinaan & Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
743	No.743 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.8 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
744	No.744 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Tapanuli Selatan No.9/2004 ttg Perizinan Usaha Perkebunan.		
745	No.745 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.11 Th.2005 tentang Izin Usaha Perkebunan.		
746	No.746 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Banggai No.13/2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan, dan Sertifikat Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.		
747	No.747 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kotamadya Dati II Sibolga No.22/1998 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.		
748	No.748 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.13 Th.000 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.		
749	No.749 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.11 Th.2004 ttg Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.		
750	No.750 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kotamadya Dati II Tanjung Balai no.8/1994 ttg Penertiban Hewan Ternak.		
751	No.751 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab. Toli-Toli No.23/2003 ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Daerah Kab. Toli-Toli.		
752	No.752 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Parigi Moutong No.7 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.		
753	No.753 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.40 Th.2003 tentang Retribusi Pertanian.		
754	No.754 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.10 Th.2008 tentang Izin Usaha Hotel.		
755	No.755 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sarolangun No.16 Th.2007 ttg Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
756	No.756 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.06 Th.2004 tentang Izin Usaha Hotel.		
757	No.757 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Lampung Selatan No.16/2001 ttg Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras di Kab. Lampung Selatan.		
758	No.758 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No.3/1998 ttg Pajak Hotel & Restoran.		
759	No.759 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Lubuklinggau No.07 Th.2004 ttg Izin Usaha Rumah Makan dan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
760	No.760 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.13 Th.2008 tentang Tempat Rekreasi.		
761	No.761 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.17 Th.2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.		
762	No.762 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Merangin No.9 Th.2005 ttg Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, & Tukang Gigi.		
763	No.763 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Humbang Hasundutan No.14 Th.2005 tentang Usaha Kesehatan.		
764	No.764 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.8 Th.2002 tentang Leges.		
765	No.765 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Tanjung Jabung Timur No.38 Th.2001 tentang Leges.		
766	No.766 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kota Batam No.2 th.2002 ttg Ketentuan Bangunan di Kota Batam.		
767	No.767 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Palembang No.13 Th.2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan.		
768	No.768 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Jambi No.6 Th.2002 tentang Bangunan.		
769	No.769 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Muaro Jambi No.08 Th.2006 ttg Izin Mendirikan Bangunan.		
770	No.770 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 huruf a angka 10 PERDA Kab. Dati II Sintang No.5/1998 ttg Pajak Hiburan.		
771	No.771 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf h & Pasal 6 huruf h PERDA Kab. Lamandau No.16 Th.2007 tentang Pajak Hiburan.		
772	No.772 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Dati II Probolinggo No.8 Th.1997 tentang Usaha Rumah Makan.		
773	No.773 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 Perda Kab. Banyuwangi No.43/2002 ttg Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.		
774	No.774 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan No.10 Th.2004 ttg Izin Operasional Rumah Makan atau Restoran.		
775	No.775 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan No.8 Th.2004 tentang Izin Operasional Hotel.		
776	No.776 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 PERDA Kab. Tuban No.21 Th.2001 ttg Pengaturan Usaha Hotel.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
777	No.777 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 14 PERDA Kab. Dati II Probolinggo No.9 Th.1997 ttg Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Kab. Dati II Probolinggo.		
778	No.778 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf d & huruf e PERDA Kab. Tegal No.27 Th.2001 ttg Perubahan Atas PERDA Kab. Dati II Tegal No.6 Th.1998 tentang Pajak Hiburan.		
779	No.779 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERDA Kota Denpasar No.9 Th.2002 tentang Usaha Pondok Wisata.		
780	No.780 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf h dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf h, huruf i PERDA Kota Yogyakarta No.7 Th.2000 tentang Pajak Hiburan.		
781	No.781 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 2 ayat (3) huruf i, huruf l, huruf m dan Pasal 5 huruf i, huruf l, huruf m PERDA Kab. Serang No.12 Th.2006 tentang Pajak Hiburan.		
782	No.782 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Bandung No.4 Th.2003 ttg Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan.		
783	No.783 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Sumedang No.52 Th.2001 tentang Pajak Rumah Sewaan.		
784	No.784 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (3) PERDA Kab. Tabanan No.7 Th.2002 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.		
785	No.785 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (1) PERDA Kab. Alor No.4 Th.2005 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
786	No.786 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Tarakan No.14 Th.2004 Tentang Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing.		
787	No.787 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf c PERDA Kab. Kutai No.10 Th.2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
788	No.788 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kepahiang No.3 Th.2006 tentang Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja.		
789	No.789 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan 789 Pasal 2 huruf e, huruf g dan Pasal 12 huruf e, huruf g PERDA Kota Probolinggo No.7 Th.2006 ttg Pajak Hiburan.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
790	No.790 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kepahiang No.4 Th.2006 ttg Retribusi Izin Lembaga Latihan Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.		
791	No.791 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d PERDA Kab. Kepahiang No.14 Th.2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.		
792	No.792 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) kolom 4 dan Pasal 11 PERDA Kab. Manokwari No.23 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum.		
793	No.793 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 29 ayat (2) PERDA Kab. Bantul No.4 Th.2005 ttg Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul.		
794	No.794 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 PERDA Kota Bandung No.11/2004 ttg Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.		
795	No.795 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan lampiran Perda Kab. Cianjur No.14/2001 ttg Retribusi Ijin Kepariwisataaan.		
796	No.796 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab.Manokwari No.20/2003 ttg Retribusi Pembinaan Bid. Informasi dan Komunikasi Serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika dan Penyiaran.		
797	No.797 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 2 butir b PERDA Kota Kediri No.13 Th.2007 ttg Perubahan atas PERDA Kota Kediri No.8 Th.2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.		
798	No.798 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 angka 1, angka 3 huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf o, huruf p & Pasal 10 PERDA Kota Yogyakarta No.11 Th.2002 ttg Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.		
799	No.799 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Banyuwangi No.42 Th.2002 tentang Izin Usaha Hotel.		
800	No.800 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf b PERDA Kab. Bojonegoro No.21 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Hotel di Kabupaten Bojonegoro.		
801	No.801 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) PERDA Kab. Manokwari No.21 Th.2003 ttg Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
802	No.802 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bantul No.2 Th.2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kab. Bantul.		
803	No.803 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (3) & Pasal 9 ayat (2) PERDA Kota Denpasar No.8 Th.2002 tentang Usaha Bar.		
804	No.804 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) PERDA Kab. Bojonegoro No.27 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Rumah Makan di Kabupaten Bojonegoro.		
805	No.805 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 ayat (2) dan lampiran PERDA Kab. Tangerang No.15 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Kebudayaan.		
806	No.806 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) PERDA Kab. Bandung No.25 Th.2001 ttg Ketentuan Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata.		
807	No.807 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 4 dan Pasal 11 PERDA Kab. Kuningan No.8 Th.2001 ttg Retribusi Ijin Usaha Pariwisata.		
808	No.808 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 huruf b angka 3, angka 5 dan huruf c angka 1 PERDA Kota Kediri No.14 Th.2007 ttg Perubahan atas PERDA Kota Kediri No.7 Th.2005 ttg Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.		
809	No.809 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) PERDA Kab. Bantul No.3 Th.2005 ttg Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kab. Bantul.		
810	No.810 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 PERDA Kab. Sumbawa No.17 Th.2002 ttg Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata.		
811	No.811 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 37 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) PERDA Kota Depok No.21/2003 ttg Izin Usaha Pariwisata.		
812	No.812 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (3) PERDA Kab. Ciamis No.20 Th.2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya Dalam Kabupaten Ciamis.		
813	No.813 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) huruf c & huruf d PERDA Kab. Sumenep No.9 Th.2004 tentang Usaha Kepariwisata.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
814	No.814 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 5, Pasal 6 ayat (3) kolom 4 PERDA Kota Banjar No.22 Th.2004 ttg Izin Usaha Kepariwisata Dan Budaya di Kota Banjar.		
815	No.815 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 8 angka 1.a), 1.b), angka 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.i), 3.j), 3.m), 3.q) dan Pasal 10 PERDA Kab. Ketapang No.18 Th.2004 ttg Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Kepariwisata.		
816	No.816 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 ayat (4) PERDA Kab. Bojonegoro No.22 Th.2005 ttg Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di Kab. Bojonegoro.		
817	No.817 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 9 ayat (3) PERDA Kab. Gresik No.8 Th.2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata.		
818	No.818 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Batu No.50 Th.2003 ttg Retribusi Ijin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.		
819	No.819 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kota Padang Panjang No.14 Th.2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akta Catalan Sipil.		
820	No.820 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.14 Th.2005 ttg Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.		
821	No.821 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bengkalis No.16 Th.2003 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.		
822	No.822 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.38 Th.2000 ttg Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bermotor dlm Kab.Bungo.		
823	No.823 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.34 Th.2005 ttg Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.		
824	No.824 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d PERDA Kab. Dati II Bima No.32 Th.1997 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
825	No.825 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Kab. Nganjuk No.6 Th.2003 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.		
826	No.826 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 PERDA Kab. Mimika No.27 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai.		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
827	No.827 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 6 huruf b dan huruf d PERDA Kotamadya Dati II Tarakan No.5 Th.1998 ttg Pajak Penerangan Jalan.		
828	No.828 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Kepahiang No.15/2006 ttg Retribusi Izin Keluar Masuk Hewan dan Bahan-Bahan Asal Hewan Kab. Kepahiang.		
829	No.829 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Psl 13 Perda Kab. Dati II Demak No.13/1998 ttg Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.		
830	No.830 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 18 angka 2 PERDA Kota Dumai No.8 Th.2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan.		
831	No.831 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 PERDA Kab. Kutai Kartanegara No.8 Th.2003 ttg Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah.		
832	No.832 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Kepahiang No.17 Th.2006 ttg Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
833	No.833 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan Perda Kab.Bungo No.11/2002 ttg Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.		
834	No.834 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.48/2000 tentang Retribusi Sertifikasi Tanah.		
835	No.835 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Batanghari No.42 Th.2001 ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan orang dan Barang.		
836	No.836 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.37/2000 ttg Izin Usaha Angkutan Barang Kendaraan Bermotor dalam Kab. Bungo.		
837	No.837 Tahun 2009 30 Desember 2009	Pembatalan PERDA Kab. Bungo No.39/2000 ttg Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor.		
<b>TAHUN 2010</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1A	No.1A Tahun 2010 5 Januari 2010	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : .. Hal.	Dicabut dg Permen No.3 Th.2011
1	No.1 Tahun 2010 8 Januari 2010	Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional.	L L : 106 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2010 12 Januari 2010	Perubahan atas Pemendagri No.30/2005 ttg Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otda dan Pakar Keuangan.	L L : 3 Hal.	
3	No.3 Tahun 2010 14 Januari 2010	Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.	L L : 2 Hal.	
4	No.4 Tahun 2010 15 Januari 2010	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	L L : 8 Hal.	
5	No.5 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kab.Semarang Provinsi Jawa	L L : 3 Hal.	
6	No.6 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah.	L L : 4 Hal.	
7	No.7 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.	L L : 6 Hal.	
8	No.8 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.	L L : 5 Hal.	
9	No.9 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.	L L : 3 Hal.	
10	No.10 Tahun 2010 25 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.	L L : 6 Hal.	
11	No.11 Tahun 2010 26 Januari 2010	Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.	L L : 13 Hal.	
12	No.12 Tahun 2010 26 Januari 2010	Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.	L L : 6 Hal.	
13	No.13 Tahun 2010 27 Januari 2010	Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	L L : 5 Hal.	
14	No.14 Tahun 2010 28 Januari 2010	Batas Daerah Kabupaten Banjar dgn Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.	L L : 8 Hal.	
15	No.15 Tahun 2010 28 Januari 2010 No.162/Menkes/PB/II/2010	Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.	L L : 5 Hal.	
16	No.16 Tahun 2010 30 Januari 2010	Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014.	L L : 122 Hal.	Diubah dg Permen No.46 Th.2011
17	No.17 Tahun 2010 8 Februari 2010 PER.04/MEN/II/2010	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri ttg Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.	L L : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 2010 9 Februari 2010	Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.	L L : 7 Hal.	
19	No.19 Tahun 2010 9 Februari 2010	Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	L L : 40 Hal.	
20	No.20 Tahun 2010 16 Februari 2010	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.	L L : 10 Hal.	
21	No.21 Tahun 2010 23 Februari 2010	Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.	L L : 6 Hal.	
22	No.22 Tahun 2010 24 Februari 2010 <i>No.3 Tahun 2010</i>	Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah & Angka Kreditnya.	L L : 18 Hal.	
23	No.23 Tahun 2010 4 Maret 2010	Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.	L L : 12 Hal.	
24	No.24 Tahun 2010 5 Maret 2010	Orientasi Kepemimpinan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.	L L : 5 Hal.	Dicabut dg Permen No.36 Th.2014
25	No.25 Tahun 2010 8 Maret 2010	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	L L : 7 Hal.	
26	No.26 Tahun 2010 25 Maret 2010	Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.	L L : 5 Hal.	
27	No.27 Tahun 2010 25 Maret 2010	Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.	L L : 10 Hal.	
28	No.28 Tahun 2010 31 Maret 2010 No.0199/M PPN/04/2010 No.PMK 95/PMK 07/2010	Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (BN No.229)	L L : 10 Hal.	
29	No.29 Tahun 2010 13 April 2010	Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.	L L : 5 Hal.	
30	No.30 Tahun 2010 15 April 2010	Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. (BN No.193)	L L : 10 Hal.	
31	No.31 Tahun 2010 15 April 2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (BN No.194)	L L : 33 Hal.	Diubah dg Permen No.42 Th.2013
32	No.32 Tahun 2010 30 April 2010	Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (BN No.276)	L L : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 2010 30 April 2010	Pedoman Pengelolaan Sampah (BN No.274)	L L : .. Hal.	
34	No.34 Tahun 2010 4 Mei 2010	Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.228)	L L : 3 Hal.	
35	No.35 Tahun 2010 14 Mei 2010	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (BN No.245)	L L : 7 Hal.	
36	No.36 Tahun 2010 22 Juni 2010	Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. (BN No.310)	L L : 8 Hal.	
37	No.37 Tahun 2010 22 Juni 2010	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. (BN No.309)	L L : 3 Hal.	
38	No.38 Tahun 2010 24 Juni 2010	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja. (BN No.315)	L L : 7 Hal.	
39	No.39 Tahun 2010 25 Juni 2010	Badan Usaha Milik Desa (BN No.316)	L L : 8 Hal.	
40	No.40 Tahun 2010 25 Juni 2010	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.311)	L L : 5 Hal.	
41	No.41 Tahun 2010 25 Juni 2010	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. (BN No.317)	L L : 118 Hal.	Diubah dg Permen No.14 Th.2011
42	No.42 Tahun 2010 8 Juli 2010	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. (BN No.337)	L L : 12 Hal.	
43	No.43 Tahun 2010 20 Juli 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 Th.2005 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. (BN No.357)	L L : 3 Hal.	
44	No.44 Tahun 2010 25 Agustus 2010	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. (BN No.436)	L L : 7 Hal.	
45	No.45 Tahun 2010 26 Agustus 2010	Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara. (BN No.420)	L L : 10 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No.46 Tahun 2010 1 September 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Th.2009 ttg Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010. (BN No.437)	L L : 5 Hal.	
47	No.47 Tahun 2010 3 September 2010	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah & Angka Kreditnya. (BN No.438)	L L : 84 Hal.	
48	No.48 Tahun 2010 17 September 2010	Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, ESDM, Menakertran, Kemendagei dan Menteri BUMN ttg Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa- Bali.	L L : 3 Hal.	
49	No.49 Tahun 2010 22 Sept. 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah. (BN No.455)	L L : 9 Hal.	
50	No.50 Tahun 2010 22 Sept. 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah. (BN No.456)	L L : 6 Hal.	
51	No.51 Tahun 2010 22 Sept. 2010	Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011. (BN No.457)	L L : .. Hal.	
52	No.52 Tahun 2010 1 Oktober 2010	Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.484)	L L : 7 Hal.	
53	No.53 Tahun 2010 No.186/PMK.07/2010 18 Oktober 2010	Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah. (BN No.510)	L L : 6 Hal.	Diubah dg Permen Dagri & Keu No.53/2012 & No.127/PMK.07/2012
54	No.54 Tahun 2010 21 Oktober 2010	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th.2008 ttg Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (BN No.517)	L L : 95 Hal.	
55	No.55 Tahun 2010 28 Oktober 2010	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.536)	L L : 32 Hal.	Diubah dg Permen No.42 Th.2011
56	No.56 Tahun 2010 29 Oktober 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Th.2007 ttg Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. (BN No.537)	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 2010 3 Nopember 2010	Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. (BN No.544)	L L : 6 Hal.	
58	No.58 Tahun 2010 30 Nopember 2010 No.:213/PMK.07/2010	Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri ttg Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. (BN No.581)	L L : 6 Hal.	Dicabut dg Permen No.10-2014 dan Permenkeu No. 15/PMK.07/2014
59	No.59 Tahun 2010 3 Desember 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Th.2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. (BN No.594)	L L : 4 Hal.	
60	No.60 Tahun 2010 20 Desember 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.648)	L L : 2 Hal.	
61	No.61 Tahun 2010 23 Desember 2010	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.  (BN No.655)	L L : 9 Hal.	
62	No.62 Tahun 2010 28 Desember 2010	Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. (BN No.674)	L L : 7 Hal.	
63	No.63 Tahun 2010 29 Desember 2010	Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah. (BN No.675)	L L : 8 Hal.	
64	No.64 Tahun 2010 31 Desember 2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.49 Th.2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. (BN No.684)	L L : 5 Hal.	
65	No.65 Tahun 2010 31 Desember 2010	Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. (BN No.695)	L L : 9 Hal.	
66	No.66 Tahun 2010 31 Desember 2010	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011. (BN No.716)	L L : 10 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>TAHUN 2011</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2011	<b>Batal/Kosong</b>	L L : .. Hal.	
2	No.2 Tahun 2011 7 Januari 2011	Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. (BN No.5)	L L : 9 Hal.	
3	No.3 Tahun 2011 10 Januari 2011	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.8)	L L : 22 Hal.	Dicabut dg Permen No.3 Th.2013
4	No.4 Tahun 2011 17 Januari 2011	Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.24)	L L : 10 Hal.	
5	No.5 Tahun 2011 21 Januari 2011	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011. (BN No.38)	L L : 39 Hal.	Diubah dg Permen No.72 Th.2011
6	No.6 Tahun 2011 21 Januari 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. (BN No.55)	L L : 7 Hal.	
7	No.7 Tahun 2011 28 Januari 2011 NO.188/MENKES/PB/2011	Peraturan bersama Menkes dan Mendagri ttg Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. (BN No.49)	L L : 6 Hal.	
8	No.8 Tahun 2011 31 Januari 2011	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Di Lingk. Kementerian Dalam Negeri. (BN No.50)	L L : 4 Hal.	
9	No.9 Tahun 2011 14 Februari 2011 28 Februari 2011	Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. (BN No.118)	L L : 10 Hal.	Diubah dg Permen No.69 Th.2014
10	No.10 Tahun 2011 14 Februari 2011 18 Februari 2011	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat. (BN No.79)	L L : 3 Hal.	
11	No.11 Tahun 2011 16 Februari 2011 18 Februari 2011	Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (BN No.60)	L L : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No.12 Tahun 2011 2 Maret 2011 7 Maret 2011	Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. (BN No.130)	L L : 10 Hal.	
13	No.13 Tahun 2011 7 Maret 2011	Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.131)	L L : 11 Hal.	
14	No.14 Tahun 2011 17 Maret 2011 23 Maret 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Th.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. (BN No.168)	L L : 4 Hal.	
15	No.15 Tahun 2011 31 Maret 2011 6 April 2011	Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Lingkup Kemendagri Tahun 2011. (BN No.210)	L L : 7 Hal.	
16	No.16 Tahun 2011 4 April 2011 6 April 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Th.2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. (BN No.211)	L L : 7 Hal.	
17	No.17 Tahun 2011 18 April 2011	Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah. (BN No.223)	L L : 11 Hal.	
18	No.18 Tahun 2011 2 Mei 2011 12 Mei 2011	Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah. (BN No.287)	L L : 6 Hal.	
19	No.19 Tahun 2011 2 Mei 2011 12 Mei 2011	Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. (BN No.288)	L L : 10 Hal.	
20	No.20 Tahun 2011 11 Mei 2011 12 Mei 2011	Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (BN No.289)	L L : 38 Hal.	
21	No.21 Tahun 2011 23 Mei 2011 25 Mei 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (BN No.310)	L L : 23 Hal.	Ps 329 (A,B,C,D,E, F,G & H) dicabut dg Permen No.62/2011
22	No.22 Tahun 2011 23 Mei 2011 25 Mei 2011	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. (BN No.311)	L L : 31 Hal.	
23	No.23 Tahun 2011 26 Mei 2011 27 Mei 2011	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.316)	L L : .. Hal.	Diubah dg Permen No.35,49,56 - 2011; Dicabut dg Permen No.29 Th.2012

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No.24 Tahun 2011 27 Mei 2011 14 Juni 2011	Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. (BN No.342)	L L : 13 Hal.	Diubah dg Permen No.18, 27 Th.2012; 17/2013 & 3/2014
25	No.25 Tahun 2011 21 Juni 2011 22 Juni 2011	Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (BN No.362)	L L : 33 Hal.	
26	No.26 Tahun 2011 5 Juli 2011 8 Juli 2011	Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang. (BN No.388)	L L : 635 Hal.	
27	No.27 Tahun 2011 7 Juli 2011 12 Juli 2011	Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.399)	L L : 4 Hal.	
28	No.28 Tahun 2011 7 Juli 2011 12 Juli 2011	Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan. (BN No.400)	L L : 8 Hal.	
29	No.29 Tahun 2011 15 Juli 2011 19 Juli 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. (BN No.430)	L L : 7 Hal.	
30	No.30 Tahun 2011 20 Juli 2011 29 Juli 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.459)	L L : 3 Hal.	
31	No.31 Tahun 2011 25 Juli 2011 26 Juli 2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.449)	L L : 8 Hal.	
32	No.32 Tahun 2011 27 Juli 2011 28 Juli 2011	Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (BN No.450)	L L : 17 Hal.	
33	No.33 Tahun 2011 4 Agustus 2011 10 Agustus 2011	Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (BN No.484)	L L : 12 Hal.	
34	No.34 Tahun 2011 5 Agustus 2011 10 Agustus 2011	Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.485)	L L : 34 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
35	No.35 Tahun 2011 10 Agustus 2011 12 Agustus 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Th.2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.492)	L L : 3 Hal.	
36	No.36 Tahun 2011 19 Agustus 2011 23 Agustus 2011	Perubahan Atas Permendagri No.16 Th.2007 ttg Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (BN No.525)	L L : 4 Hal.	
37	No.37 Tahun 2011 25 Agustus 2011 8 September 2011	Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah. (BN No.563)	L L : 9 Hal.	Diubah dg Permen No.28 Th.2012
38	No.38 Tahun 2011 26 Agustus 2011 16 September 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah. (BN No.583)	L L : 9 Hal.	
39	No.39 Tahun 2011 26 Agustus 2011 8 September 2011	Perubahan Atas Permendagri No.44 Th.2009 ttg Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. (BN No.564)	L L : 6 Hal.	
40	No.40 Tahun 2011 13 September 2011 20 September 2011	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (BN No.590)	L L : 9 Hal.	
41	No.41 Tahun 2011 13 September 2011 20 September 2011	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (BN No.591)	L L : 11 Hal.	
42	No.42 Tahun 2011 16 September 2011 20 September 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Th.2010 ttg Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.592)	L L : 6 Hal.	
43	No.43 Tahun 2011 29 September 2011 7 Oktober 2011	Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan. (BN No.624)	L L : 2 Hal.	Dicabut dg Permen No.53 Th.2014
44	No.44 Tahun 2011 29 September 2011 7 Oktober 2011	Wilayah Administrasi Pulau Berhala. (BN No.625)	L L : 2 Hal.	Dicabut dg Permen No.54 Th.2014
45	No.45 Tahun 2011 26 September 2011 7 Oktober 2011	Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. (BN No.626)	L L : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No.46 Tahun 2011 28 September 2011 7 Oktober 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16 Th.2010 ttg Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. (BN No.527)	L L : 70 Hal.	
47	No.47 Tahun 2011 29 September 2011 5 Oktober 2011	Kebijakan Pengawasan di Lingk. Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th.2012. (BN No.628)	L L : 11 Hal.	
48	No.48 Tahun 2011 No.05/X/PB/2011 No.SP/03/M.PAN-RB/10/2011 No.158/PMK.01/2011 No.11 Tahun 2011 3 Oktober 2011	Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. (BN No.610)	L L : .. Hal.	
49	No.49 Tahun 2011 4 Oktober 2011 5 Oktober 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.617)	L L : 4 Hal.	
50	No.50 Tahun 2011 14 Oktober 2011 2 Nopember 2011	Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.688)	L L : 7 Hal.	
51	No.51 Tahun 2011 14 Oktober 2011 2 Nopember 2011	Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Th.2007 Tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi. (BN No.689)	L L : 2 Hal.	
52	No.52 Tahun 2011 4 Nopember 2011 11 Nopember 2011	Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (BN No.704)	L L : 10 Hal.	
53	No.53 Tahun 2011 4 Nopember 2011 7 Nopember 2011	Pembentukan Produk Hukum Daerah. (BN No.694)	L L : 40 Hal.	
54	No.54 Tahun 2011 10 Nopember 2011 11 Nopember 2011	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. (BN No.705)	L L : 4 Hal.	
55	No.55 Tahun 2011 16 Nopember 2011 17 Nopember 2011	Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru. (BN No.712)	L L : 22 Hal.	
56	No.56 Tahun 2011 16 Nopember 2011 17 Nopember 2011	Perubahan Ketiga Atas Permendagri No.23 Th.2011 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.713)	L L : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 2011 23 Nopember 2011 24 Nopember 2011	Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (BN No.749)	L L : 8 Hal.	Diubah dg Permen No.34 Th.2013
58	No.58 Tahun 2011 30 Nopember 2011 6 Desember 2011	Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dgn Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. (BN No.783)	L L : 14 Hal.	
59	No.59 Tahun 2011 30 Nopember 2011 6 Desember 2011	Batas Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. (BN No.784)	L L : 6 Hal.	
60	No.60 Tahun 2011 30 Nopember 2011 6 Desember 2011	Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.785)	L L : 4 Hal.	
61	No.61 Tahun 2011 6 Desember 2011 7 Desember 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. (BN No.789)	L L : 7 Hal.	
62	No.62 Tahun 2011 8 Desember 2011 12 Desember 2011	Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. (BN No.807)	L L : 8 Hal.	
63	No.63 Tahun 2011 12 Desember 2011 22 Desember 2011	Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. (BN No.866)	L L : 7 Hal.	
64	No.64 Tahun 2011 20 Desember 2011 22 Desember 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. (BN No.877)	L L : 9 Hal.	Diubah dg Permen No.7 Th.2014
65	No.65 Tahun 2011 21 Desember 2011 28 Desember 2011	Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. (BN No.926)	L L : 7 Hal.	
66	No.66 Tahun 2011 23 Desember 2011 28 Desember 2011	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (BN No.934)	L L : 3 Hal.	
67	No.67 Tahun 2011 28 Desember 2011 28 Desember 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Th.2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. (BN No.927)	L L : 11 Hal.	
68	No.68 Tahun 2011 30 Desember 2011 .. Desember 2011	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012. (BN No.1)	L L : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
69	No.69 Tahun 2011 8 Desember 2011 .. Desember 2011	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012. (BN No.2)	L L : 11 Hal.	
70	No.70 Tahun 2011 30 Desember 2011 .. Desember 2011	Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah. (BN No.3)	L L : 6 Hal.	
71	No.71 Tahun 2011 30 Desember 2011 .. Desember 2011	Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. (BN No.4)	L L : 5 Hal.	
72	No.72 Tahun 2011 30 Desember 2011 .. Desember 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011. (BN No.9)	L L : 3 Hal.	
73	No.73 Tahun 2011 30 Desember 2011 .. Desember 2011	Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Th.2012. (BN No.10)	L L : 9 Hal.	Diubah dg Permen No.59 Th.2012
<b>TAHUN 2012</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2012 2 Januari 2012 26 Januari 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan. (BN No.104)	L L : 13 Hal.	
2	No.2 Tahun 2012 9 Januari 2012 11 Januari 2012	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.55)	L L : 3 Hal.	
3	No.3 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. (BN No.105)	L L : 5 Hal.	
4	No.4 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali. (BN No.106)	L L : 4 Hal.	
5	No.5 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. (BN No.107)	L L : 4 Hal.	
6	No.6 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. (BN No.108)	L L : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No.7 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.109)	L L : 5 Hal.	
8	No.8 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. (BN No.110)	L L : 9 Hal.	
9	No.9 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. (BN No.111)	L L : 5 Hal.	
10	No.10 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kab. Batang Prov. Jawa Tengah. (BN No.112)	L L : 3 Hal.	
11	No.11 Tahun 2012 16 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten. (BN No.113)	L L : 4 Hal.	
12	No.12 Tahun 2012 20 Januari 2012 26 Januari 2012	Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. (BN No.114)	L L : 12 Hal.	
13	No.13 Tahun 2012 20 Januari 2012	Monografi Desa dan Kelurahan (BN No.115)	LL : Hal	
14	No.14 Tahun 2012 25 Januari 2012 26 Januari 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Th.2009 ttg Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.116)	L L : 5 Hal.	
15	No.15 Tahun 2012 30 Januari 2012 6 Februari 2012	Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (BN No.172)	L L : 18 Hal.	
16	No.16 Tahun 2012 30 Januari 2012 6 Februari 2012	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. (BN No.173)	L L : 7 Hal.	
17	No.17 Tahun 2012 30 Januari 2012 6 Februari 2012	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur. (BN No.174)	L L : 8 Hal.	
18	No.18 Tahun 2012 31 Januari 2012 6 Februari 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Th.2011 ttg Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. (BN No.175)	L L : 7 Hal.	
19	No.19 Tahun 2012 2 Februari 2012 7 Februari 2012	Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah. (BN No.177)	L L : 102 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 2012 3 Februari 2012 7 Februari 2012	Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. (BN No.178)	L L : 9 Hal.	
21	No.21 Tahun 2012 16 Februari 2012	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.235)	LL : Hal	
22	No.22 Tahun 2012 5 Maret 2012 19 Maret 2012	Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. (BN No.319)	L L : 7 Hal.	
23	No.23 Tahun 2012 5 Maret 2012 19 Maret 2012	Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (BN No.320)	L L : 6 Hal.	
24	No.24 Tahun 2012 5 Maret 2012 19 Maret 2012	Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. (BN No.321)	L L : 6 Hal.	
25	No.25 Tahun 2012 5 Maret 2012 19 Maret 2012	Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. (BN No.322)	L L : 5 Hal.	
26	No.26 Tahun 2012 5 Maret 2012 19 Maret 2012	Pemberdayaan Masyarakat Yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia. (BN No.323)	L L : 8 Hal.	
27	No.27 Tahun 2012 9 Maret 2012 19 Maret 2012	Perubahan Kedua Atas Permendagri No.24 Th.2011 ttg Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. (BN No.324)	L L : 4 Hal.	
28	No.28 Tahun 2012 12 Maret 2012 19 Maret 2012	Perubahan Atas Permendagri No.37 Th.2011 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. (BN No.325)	L L : 28 Hal.	
29	No.29 Tahun 2012 16 Maret 2012 26 Maret 2012	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.341)	L L : 8 + .. Hal.	Diubah dg Permen No.38, 50 & 75 Th.2012, 24/2013, 46/2013 & 70/2013
30	No.30 Tahun 2012 26 Maret 2012 3 April 2012	Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pindahan Ibu Kota. (BN No.365)	L L : 7 Hal.	
31	No.31 Tahun 2012 29 Maret 2012 3 April 2012	Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalsel. (BN No.366)	L L : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No.32 Tahun 2012 16 April 2012 19 April 2012	Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. (BN No.422)	L L : 4 Hal.	
33	No.33 Tahun 2012 20 April 2012 23 April 2012	Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.446)	L L : 16 Hal.	
34	No.34 Tahun 2012 20 April 2012 23 April 2012	Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.447)	L L : 8 Hal.	
35	No.35 Tahun 2012 23 April 2012 3 Mei 2012	Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.483)	L L : 25 Hal.	
36	No.36 Tahun 2012 No.03 Tahun 2012 23 April 2012 3 Mei 2012	Penguatan Sistem Inovasi Daerah. (BN No.484)	L L : 14 Hal.	
37	No.37 Tahun 2012 10 Mei 2012 11 Mei 2012	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013. (BN No.508)	L L : 31 Hal.	Diubah dg Permen No.16 Th.2013
38	No.38 Tahun 2012 15 Mei 2012 21 Mei 2012	Perubahan Atas Permendagri No.29 Th.2012 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.535)	L L : 4 Hal.	
39	No.39 Tahun 2012 21 Mei 2012 22 Mei 2012	Perubahan Atas Permendagri No.32 Th.2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (BN No.540)	L L : 14 Hal.	
40	No.40 Tahun 2012 25 Mei 2012 1 Juni 2012	Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah. (BN No.562)	L L : 8 Hal.	
41	No.41 Tahun 2012 6 Juni 2012 13 Juni 2012	Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (BN No.607)	L L : 15 Hal.	
42	No.42 Tahun 2012 6 Juni 2012 13 Juni 2012	Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara. (BN No.642)	L L : 5 Hal.	
43	No.43 Tahun 2012 18 Juni 2012 20 Juni 2012	Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. (BN No.643)	L L : 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
44	No.44 Tahun 2012 18 Juni 2012 20 Juni 2012	Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah (BN No.644)	L L : 5 Hal.	
45	No.45 Tahun 2012 18 Juni 2012 20 Juni 2012	Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. (BN No.645)	L L : 5 Hal.	
46	No.46 Tahun 2012 18 Juni 2012 20 Juni 2012	Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. (BN No.646)	L L : 7 Hal.	
47	No.47 Tahun 2012 19 Juni 2012 20 Juni 2012	Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (BN No.647)	L L : 11 Hal.	
48	No.48 Tahun 2012 12 Juli 2012 20 Juli 2012	Batas Kota Balikpapan dg Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur (BN No.740)	L L : 5 Hal.	
49	No.49 Tahun 2012 12 Juli 2012 23 Juli 2012	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung. (BN No.741)	L L : 6 Hal.	
50	No.50 Tahun 2012 18 Juli 2012 23 Juli 2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.742)	L L : 3 Hal.	
51	No.51 Tahun 2012 18 Juli 2012 23 Juli 2012	Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (BN No.743)	L L : 6 Hal.	
52	No.52 Tahun 2012 20 Juli 2012 26 Juli 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. (BN No.754)	L L : 11 Hal.	
53	No.53 Tahun 2012 No.127/PMK.07/2012 26 Juli 2012 7 Agustus 2012	Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan No.53 Th.2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. (BN No.783)	L L : 4 Hal.	
54	No.54 Tahun 2012 6 Agustus 2012 13 Agustus 2012	Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. (BN No.810)	L L : 6 Hal.	
55	No.55 Tahun 2012 6 Agustus 2012 13 Agustus 2012	Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kab. Lebak Provinsi Banten (BN No.811)	L L : 9 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2012 6 Agustus 2012 13 Agustus 2012	Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. (BN No.812)	L L : 5 Hal.	
57	No.57 Tahun 2012 6 Agustus 2012 13 Agustus 2012	Batas Daerah Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Prov. Banten. (BN No.813)	L L : 6 Hal.	
58	No.58 Tahun 2012 6 Agustus 2012 13 Agustus 2012	Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. (BN No.814)	L L : 7 Hal.	
59	No.59 Tahun 2012 6 Agustus 2012 15 Agustus 2012	Perubahan Atas Pemendagri No.73 Th.2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kemendagri Tahun 2012. (BN No.827)	L L : 3 Hal.	
60	No.60 Tahun 2012 30 Agustus 2012 31 Agustus 2012	Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. (BN No.874)	L L : 16 Hal.	
61	No.61 Tahun 2012 4 September 2012	Pengukuhan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda. (BN No.890)	L L : 5 Hal.	
62	No.62 Tahun 2012 4 September 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Th.2011 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (BN No.929)	L L : 18 Hal.	
63	No.63 Tahun 2012 14 September 2012 1 Oktober 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Th.2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.963)	L L : 27 Hal.	
64	No.64 Tahun 2012 17 September 2012 19 September 2012	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (BN No.930)	L L : 11 Hal.	
65	No.65 Tahun 2012 24 September 2012 1 Oktober 2012	Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan e-KTP Secara Massal. (BN No.964)	L L : 6 Hal.	
66	No.66 Tahun 2012 2 Oktober 2012 3 Oktober 2012	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.23 Th.2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Th.2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. (BN No.975)	L L : 14 Hal.	
67	No.67 Tahun 2012 4 September 2012	Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (BN No.994)	L L : 51 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
68	No.68 Tahun 2012 15 Oktober 2012 19 Oktober 2012	Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (BN No.1028)	L L : 29 Hal.	
69	No.69 Tahun 2012 23 Oktober 2012 29 Oktober 2012	Perubahan Atas Permendagri No.62/2008 ttg Standar Pelayanan Minimal Bid.Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. (BN No.1058)	L L : 81 Hal.	
70	No.70 Tahun 2012 25 Oktober 2012 29 Oktober 2012	Kebijakan Pengawasan di Lingk. Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013. (BN No.1059)	L L : 13 Hal.	
71	No.71 Tahun 2012 29 Oktober 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (BN No.1060)	L L : 10 Hal.	
72	No.72 Tahun 2012 7 November 2012 12 November 2012	Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (BN No.1120)	L L : 7 Hal.	
73	No.73 Tahun 2012 14 November 2012 20 November 2012	Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. (BN No.1145)	L L : 6 Hal.	
74	No.74 Tahun 2012 14 November 2012 22 November 2012	Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing. (BN No.1154)	L L : 23 Hal.	
75	No.75 Tahun 2012 3 Desember 2012 5 Desember 2012	Perubahan Ketiga Atas Permendagri No.29 Th.2012 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.1222)	L L : 6 Hal.	
76	No.76 Tahun 2012 12 Desember 2012 14 Desember 2012	Pedoman Penegasan Batas Daerah. (BN No.1252)	L L : 54 Hal.	
77	No.77 Tahun 2012 13 Desember 2012 14 Desember 2012	Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. (BN No.1254)	L L : 21 Hal.	
78	No.78 Tahun 2012 18 Desember 2012 19 Desember 2012	Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.1282)	L L : 158 Hal.	
79	No.79 Tahun 2012 21 Desember 2012 27 Desember 2012	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri TA.2013. (BN No.1344)	L L : 12 Hal.	
79	No.79 Tahun 2012 21 Desember 2012 27 Desember 2012	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri TA.2013. (BN No.1344)	L L : 12 Hal.	
80	No.80 Tahun 2012 28 Desember 2012	Perubahan Atas Permendagri No.68 Th.2011 tentang Rencana Kerja Kemendagri Th.2012.	L L : 3 Hal.	

	4 Januari 2013	(BN No.34)		
81	No.81 Tahun 2012 28 Desember 2012 4 Januari 2013	Perubahan Atas Permendagri No.69 Th.2011 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri TA.2012. (BN No.35)	L L : 4 Hal.	
82	No.82 Tahun 2012 28 Desember 2012 4 Januari 2013	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013. (BN No.36)	L L : 4 Hal.	Diubah dg Permen No.89 Th.2013
83	No.83 Tahun 2012 28 Desember 2012 4 Januari 2013	Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kemendagri Tahun 2013. (BN No.37)	L L : 8 Hal.	
84	No.84 Tahun 2012 28 Desember 2012 9 Januari 2013	Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. (BN No.59)	L L : 12 Hal.	
<b>TAHUN 2013</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2013 2 Januari 2013 9 Januari 2013	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (BN No.60)	L L : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2013 4 Januari 2013 9 Januari 2013	Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (BN No.61)	L L : 56 Hal.	
3	No.3 Tahun 2013 8 Januari 2013 9 Januari 2013	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.62)	L L : 37 Hal.	
4	No.4 Tahun 2013 9 Januari 2013 14 Januari 2013	Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.84)	L L : 12 Hal.	Ps 4 Ayat (2) Permen No.4/2013 dicabut dg Permen No.41/2014
5	No.5 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah. (BN No.135)	L L : 4 Hal. Lamp. : 1 Hal	
6	No.6 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. (BN No.136)	L L : 4 Hal. Lamp. : 1 Hal	
7	No.7 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dgn Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. (BN No.137)	L L : 5 Hal. Lamp. : 1 Hal	
8	No.8 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.138)	L L : 4 Hal. Lamp. : 1 Hal	
9	No.9 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. (BN No.139)	L L : 6 Hal. Lamp. : 1 Hal	
10	No.10 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. (BN No.140)	L L : 5 Hal. Lamp. : 1 Hal	
11	No.11 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. (BN No.141)	L L : 4 Hal. Lamp. : 1 Hal	
12	No.12 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. (BN No.142)	L L : 5 Hal. Lamp. : 1 Hal	
13	No.13 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. (BN No.143)	L L : 5 Hal. Lamp. : 1 Hal	
14	No.14 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. (BN No.144)	L L : 5 Hal. Lamp. : 1 Hal	
15	No.15 Tahun 2013 10 Januari 2013 23 Januari 2013	Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.145)	L L : 4 Hal. Lamp. : 1 Hal	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
16	No.16 Tahun 2013 15 Januari 2013 23 Januari 2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Th.2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2013. (BN No.146)	L L : 3 Hal.	
17	No.17 Tahun 2013 23 Januari 2013 29 Januari 2013	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Th.2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. (BN No.167)	L L : 7 Hal.	
18	No.18 Tahun 2013 6 Februari 2013 13 Februari 2013	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (BN No.265)	L L : 3 Hal.	
19	No.19 Tahun 2013 11 Februari 2013 15 Februari 2013	Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. (BN No.286)	L L : 22 Hal.	
20	No.20 Tahun 2013 11 Februari 2013 18 Februari 2013	Perubahan Kedua Atas Permendagri No.44 Th.2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. (BN No.291)	L L : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2013 21 Februari 2013 1 Maret 2013	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (BN No.352)	L L : 6 Hal.	
22	No.22 Tahun 2013 4 Maret 2013 8 Maret 2013	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. (BN No.381)	L L : 196 Hal.	
23	No.23 Tahun 2013 22 Maret 2013 25 Maret 2013	Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. (BN No.471)	L L : 116 Hal.	
24	No.24 Tahun 2013 1 April 2013 3 April 2013	Perubahan Keempat atas Permendagri No.29 Th.2012 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.535)	L L : 5 Hal.	
25	No.25 Tahun 2013 18 April 2013 1 Mei 2013	Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi. (BN No.659)	L L : 13 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 2013 29 April 2013 7 Mei 2013	Perubahan Atas Permendagri No.24 Th.2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, & Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan ParPol. (BN No.681)	L L : 10 Hal.	Dicabut dg Permen No.77 Th.2014
27	No.27 Tahun 2013 8 Mei 2013 15 Mei 2013	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. (BN No.690)	L L : 35 Hal.	
28	No.28 Tahun 2013 24 Mei 2013 30 Mei 2013	Perubahan Atas Permendagri No.79 Th.2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri TA.2013. (BN No.766)	L L : 4 Hal.	
29	No.29 Tahun 2013 29 Mei 2013 5 Juni 2013	Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. (BN No.795)	L L : 8 Hal.	
30	No.30 Tahun 2013 29 Mei 2013 5 Juni 2013	Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. (BN No.796)	L L : 9 Hal.	
31	No.31 Tahun 2013 29 Mei 2013 5 Juni 2013	Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. (BN No.797)	L L : 7 Hal.	
32	No.32 Tahun 2013 29 Mei 2013 14 Juni 2013	Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. (BN No.798)	L L : 5 Hal.	
33	No.33 Tahun 2013 29 Mei 2013 14 Juni 2013	Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. (BN No.835)	L L : 25 Hal.	
34	No.34 Tahun 2013 10 Juni 2013 12 Juni 2013	Perubahan Atas Permendagri No.57 Th.2011 ttg Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (BN No.823)	L L : 3 Hal.	
35	No.35 Tahun 2013 11 Juni 2013 12 Juni 2013	Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. (BN No.824)	L L : 16 Hal.	Diubah dg Permen No.11 Th.2014 Dicabut dg Permen No.85 Th.2014
36	No.36 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kab. Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. (BN No.880)	L L : 5 Hal.	
37	No.37 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. (BN No.881)	L L : 7 Hal.	
38	No.38 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. (BN No.882)	L L : 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
39	No.39 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. (BN No.883)	L L : 5 Hal.	
40	No.40 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (BN No.884)	L L : 5 Hal.	
41	No.41 Tahun 2013 27 Juni 2013 5 Juli 2013	Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (BN No.885)	L L : 7 Hal.	
42	No.42 Tahun 2013 28 Juni 2013 5 Juli 2013	Perubahan Atas Permendagri No.31 Th.2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (BN No.886)	L L : 8 Hal.	
43	No.43 Tahun 2013 .. ..	Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan. (BN No....)	L L : .. Hal.	
44	No.44 Tahun 2013 8 Mei 2013 15 Mei 2013	Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. (BN No.989)	L L : .. Hal.	
45	No.45 Tahun 2013 15 Agustus 2013 20 Agustus 2013	Pelantikan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda. (BN No.1044)	L L : 7 Hal.	
46	No.46 Tahun 2013 20 Agustus 2013	Perubahan Kelima Atas Permendagri No.29 Th.2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.1045)	L L : 3 Hal.	
47	No.47 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. (BN No.1130)	L L : 6 Hal.	
48	No.48 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. (BN No.1131)	L L : 8 Hal.	
49	No.49 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kab. Seluma dengan Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. (BN No.1132)	L L : 6 Hal.	
50	No.50 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kab. Bengkulu Utara dengan Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. (BN No.1133)	L L : 7 Hal.	
51	No.51 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kab. Kepahiang dengan Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. (BN No.1134)	L L : 8 Hal.	
52	No.52 Tahun 2013 9 September 2013 17 September 2013	Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (BN No.1135)	L L : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No.53 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kab. Minahasa dengan Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.1259)	L L : 10 Hal.	
54	No.54 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. (BN No.1260)	L L : 5 Hal.	
55	No.55 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. (BN No.1261)	L L : 7 Hal.	
56	No.56 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kab. Lombok Timur dengan Kab. Lombok Utara Prov. Nusa Tenggara Barat. (BN No.1262)	L L : 5 Hal.	
57	No.57 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kab. Banyumas dengan Kab. Tegal dan Kab. Banyumas dengan Kab. Pemalang serta Kab. Banyumas dengan Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1263)	L L : 9 Hal.	
58	No.58 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1264)	L L : 8 Hal.	
59	No.59 Tahun 2013 23 Oktober 2013 28 Oktober 2013	Batas Daerah Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1265)	L L : 10 Hal.	
60	No.60 Tahun 2013 31 Oktober 2013 4 Nopember 2013	Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TH.2014 (BN No.1290)	L L : 10 Hal.	
61	No.61 Tahun 2013 11 Nopember 2013 13 Nopember 2013	Batas Daerah Kab. Rejang Lebong dengan Kab. Bengkulu Tengah dan Batas Daerah Kab. Rejang Lebong dengan Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (BN No.1330)	L L : 7 Hal.	
62	No.62 Tahun 2013 11 Nopember 2013 13 Nopember 2013	Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. (BN No.1331)	L L : 7 Hal.	
63	No.63 Tahun 2013 11 Nopember 2013 13 Nopember 2013	Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dgn Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu. (BN No.1332)	L L : 10 Hal.	
64	No.64 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (BN No.1425)	L L : 137 Hal.	
65	No.65 Tahun 2013 6 Desember 2013 11 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dgn Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. (BN No.1444)	L L : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
66	No.66 Tahun 2013 6 Desember 2013 11 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dgn Kabupaten Agam Prov. Sumatera Barat. (BN No.1445)	L L : 7 Hal.	
67	No.67 Tahun 2013 6 Desember 2013 11 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Prov. Sumatera Barat. (BN No.1446)	L L : 13 Hal.	
68	No.68 Tahun 2013 18 Desember 2013 19 Desember 2013	Pedoman Pakaian Dinas Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.1506)	L L : 41 Hal.	
69	No.69 Tahun 2013 .. ..	(..)	L L : .. Hal.	
70	No.70 Tahun 2013 19 Desember 2013 23 Desember 2013	Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29/2012 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (BN No.1532)	L L : 3 Hal.	
71	No.71 Tahun 2013 19 Desember 2013 23 Desember 2013	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA.2014. (BN No.1533)	L L : 49 Hal.	
72	No.72 Tahun 2013 23 Desember 2013 30 Desember 2013	Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu. (BN No.1563)	L L : 61 Hal.	
73	No.73 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kota Palangkaraya dgn Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. (BN No.1586)	L L : 8 Hal.	
74	No.74 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kota Palangkaraya dgn Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. (BN No.1587)	L L : 10 Hal.	
75	No.75 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kota Palangkaraya dgn Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (BN No.1588)	L L : 7 Hal.	
76	No.76 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Kapuas dg Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. (BN No.1589)	L L : 10 Hal.	
77	No.77 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Kapuas dgn Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. (BN No.1590)	L L : 9 Hal.	
78	No.78 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dgn Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1591)	L L : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
79	No.79 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dgn Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1592)	L L : 6 Hal.	
80	No.80 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Temanggung dgn Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1593)	L L : 7 Hal.	
81	No.81 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1594)	L L : 7 Hal.	
82	No.82 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali. (BN No.1595)	L L : 10 Hal.	
83	No.83 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta (BN No.1596)	L L : 24 Hal.	
84	No.84 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. (BN No.1597)	L L : 6 Hal.	
85	No.85 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. (BN No.1598)	L L : 9 Hal.	
86	No.86 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. (BN No.1599)	L L : 10 Hal.	
87	No.87 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. (BN No.1600)	L L : 9 Hal.	
88	No.88 Tahun 2013 27 Desember 2013 31 Desember 2013	Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.1601)	L L : 16 Hal.	
89	No.89 Tahun 2013 31 Desember 2013 9 Januari 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.82 Th.2012 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013. (BN No.29)	L L : 3 Hal.	
90	No.90 Tahun 2013 31 Desember 2013 9 Januari 2014	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014. (BN No.30)	L L : 156 Hal.	
<b>TAHUN 2014</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2014 7 Januari 2014 9 Januari 2014	Pembentukan Produk Hukum Daerah (BN No.32)	L L : 69 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2014 7 Januari 2014 9 Januari 2014	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.33)	L L : 7 Hal.	
3	No.3 Tahun 2014 7 Januari 2014 13 Januari 2014	Perubahan Keempat Atas Permendagri No.24 Th.2011 ttg Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. (BN No.51)	L L : 6 Hal.	
4	No.4 Tahun 2014 10 Januari 2014 16 Januari 2014	Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. (BN No.61)	L L : 7 Hal.	
5	No.5 Tahun 2014 10 Januari 2014 16 Januari 2014	Batas Daerah Kab. Aceh Selatan dengan Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh. (BN No.62)	L L : 7 Hal.	
6	No.6 Tahun 2014 10 Januari 2014 16 Januari 2014	Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh. (BN No.63)	L L : 7 Hal.	
7	No.7 Tahun 2014 21 Januari 2014 24 Januari 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Th.2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. (BN No.114)	L L : 4 Hal.	
8	No.8 Tahun 2014 21 Januari 2014 24 Januari 2014	Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (BN No.115)	L L : 29 Hal.	
9	No.9 Tahun 2014 22 Januari 2014 24 Januari 2014	Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. (BN No.116)	L L : 7 Hal.	
10	No.10 Tahun 2014 No.15/PMK.07/2014 24 Januari 2014	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. (BN No.117)	L L : 11 Hal.	
11	No.11 Tahun 2014 2 Februari 2014 6 Februari 2014	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.35 Th.2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. (BN No.183)	L L : 2 Hal.	Dicabut dg Permen No.85 Th.2014
12	No.12 Tahun 2014 7 Februari 2014 13 Februari 2014	Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.214)	L L : 12 Hal.	
13	No.13 Tahun 2014 25 Februari 2014 3 Maret 2014	Batas Daerah Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. (BN No.280)	L L : 15 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 2014 5 Maret 2014 25 Maret 2014	Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. (BN No.386)	L L : 4 Hal.	
15	No.15 Tahun 2014 5 Maret 2014 25 Maret 2014	Petunjuk Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (BN No.387)	L L : 119 Hal.	
16	No.16 Tahun 2014 11 Maret 2014 17 Maret 2014	Sistim Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.339)	L L : 17 Hal.	
17	No.17 Tahun 2014 18 Maret 2014 25 Maret 2014	Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. (BN No.388)	L L : 5 Hal.	
18	No.18 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kab.Subang dg Kab.Bandung Barat dan Kab.Subang dengan Kab.Bandung Prov.Jawa Barat. (BN No.520)	L L : 10 Hal.	
19	No.19 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. (BN No.521)	L L : 8 Hal.	
20	No.20 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kab. Pekalongan dengan Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan dengan Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. (BN No.522)	L L : 13 Hal.	
21	No.21 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. (BN No.523)	L L : 13 Hal.	
22	No.22 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. (BN No.524)	L L : 12 Hal.	
23	No.23 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. (BN No.525)	L L : 10 Hal.	
24	No.24 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. (BN No.526)	L L : 15 Hal.	
25	No.25 Tahun 2014 19 Maret 2014 21 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. (BN No.527)	L L : 15 Hal.	
26	No.26 Tahun 2014 8 April 2014 11 April 2014	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. (BN No.447)	L L : 8 Hal.	Diubah dg Permen No.67 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
27	No.27 Tahun 2014 8 April 2014 11 April 2014	Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. (BN No.470)	L L : 97 Hal.	
28	No.28 Tahun 2014 10 April 2014 11 April 2014	Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah. (BN No.471)	L L : 7 Hal.	
29	No.29 Tahun 2014 14 April 2014 25 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. (BN No.563)	L L : 6 Hal.	
30	No.30 Tahun 2014 14 April 2014 25 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. (BN No.564)	L L : 9 Hal.	
31	No.31 Tahun 2014 14 April 2014 25 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat. (BN No.565)	L L : 11 Hal.	
32	No.32 Tahun 2014 14 April 2014 25 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. (BN No.566)	L L : 7 Hal.	
33	No.33 Tahun 2014 14 April 2014 25 April 2014	Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. (BN No.567)	L L : 16 Hal.	
34	No.34 Tahun 2014 25 April 2014 2 Mei 2014	Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (BN No.590)	L L : 16 Hal.	
35	No.35 Tahun 2014 30 April 2014 6 Mei 2014	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.597)	L L : 9 Hal.	
36	No.36 Tahun 2014 13 Mei 2014 19 Mei 2014	Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (BN No.656)	L L : 8 Hal.	
37	No.37 Tahun 2014 19 Mei 2014 21 Mei 2014	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. (BN No.680)	L L : 47 Hal.	
38	No.38 Tahun 2014 2 Juni 2014 4 Juni 2014	Upacara Besar Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.738)	L L : 10 Hal.	
39	No.39 Tahun 2014 3 Juni 2014 4 Juni 2014	Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.739)	L L : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
40	No.40 Tahun 2014 3 Juni 2014 4 Juni 2014	Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BN No.740)	L L : 106 Hal.	
41	No.41 Tahun 2014 4 Juni 2014 11 Juni 2014	Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingk. Kementerian Dalam Negeri. (BN No.767)	L L : 10 Hal.	
42	No.42 Tahun 2014 17 Juni 2014 2 Juli 2014	Batas Daerah Kab.Asahan dengan Kab. Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. (BN No.893)	L L : 11 Hal.	
43	No.43 Tahun 2014 17 Juni 2014 2 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. (BN No.894)	L L : 6 Hal.	
44	No.44 Tahun 2014 18 Juni 2014 2 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Asahan dengan Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara. (BN No.895)	L L : 7 Hal.	
45	No.45 Tahun 2014 18 Juni 2014 2 Juli 2014	Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. (BN No.896)	L L : 8 Hal.	
46	No.46 Tahun 2014 18 Juni 2014 2 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur dg Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. (BN No.897)	L L : 22 Hal.	
47	No.47 Tahun 2014 18 Juni 2014 8 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Langkat dengan Kota Binjai dan Batas Daerah Kab. Deli Serdang dengan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. (BN No.935)	L L : 9 Hal.	
48	No.48 Tahun 2014 18 Juni 2014 8 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Prov. Sumatera Barat. (BN No.936)	L L : 14 Hal.	
49	No.49 Tahun 2014 18 Juni 2014 8 Juli 2014	Batas Daerah Kab. Langkat dengan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. (BN No.937)	L L : 8 Hal.	
50	No.50 Tahun 2014 .. Juni 2014 .. Juli 2014	Batas Daerah Kab. Musi Banyuasin dg Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan. (BN No.8..)	L L : 7 Hal.	Diubah dg Permen No.76 Th.2014
51	No.51 Tahun 2014 4 Juli 2014 11 Juli 2014	Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (BN No.950)	L L : 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
52	No.52 Tahun 2014 7 Juli 2014 11 Juli 2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (BN No.951)	L L : 5 Hal.	
53	No.53 Tahun 2014 8 Juli 2014 10 Juli 2014	Pencabutan Permendagri No.43 Th.2011 ttg Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan. (BN No.993)	L L : 2 Hal.	
54	No.54 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	Wilayah Administrasi Pulau Berhala. (BN No.994)	L L : 2 Hal.	
55	No.55 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Th.2013 ttg Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2014. (BN No.995)	L L : 3 Hal.	
56	No.56 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah. (BN No.1077)	L L : 11 Hal.	
57	No.57 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 September 2014	Batas Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.1245)	L L : 5 Hal.	
58	No.58 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 September 2014	Batas Daerah Kab. Bolaang Mongondow dengan Kab. Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.1246)	L L : 9 Hal.	
59	No.59 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 September 2014	Batas Daerah Kota Manado dengan Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.1247)	L L : 5 Hal.	
60	No.60 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 September 2014	Batas Daerah Kab. Bolaang Mongondow dengan Kab. Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.1248)	L L : 5 Hal.	
61	No.61 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 September 2014	Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten. (BN No.1249)	L L : 8 Hal.	
62	No.62 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 Sept. 2014	Batas Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Kab. Tebo Prov. Jambi. (BN No.1250)	L L : 10 Hal.	
63	No.63 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 Sept. 2014	Batas Daerah Kab. Banjar dengan Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. (BN No.1251)	L L : 11 Hal.	
64	No.64 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 Sept. 2014	Batas Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan dg Kab. Banjar dan Kab. Hulu Sungai Selatan dg Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan. (BN No.1252)	L L : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
65	No.65 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 Sept. 2014	Batas Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dgn Kab. Barito Kuala & Batas Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dgn Kab. Tapin Prov. Kalsel. (BN No.1253)	L L : 5 Hal.	
66	No.66 Tahun 2014 22 Agustus 2014 4 Sept. 2014	Batas Daerah Kab. Tabalong dengan Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. (BN No.1254)	L L : 14 Hal.	
67	No.67 Tahun 2014 16 Sept. 2014 23 Sept. 2014	Perubahan Atas Permendagri No.26 Th.2014 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. (BN No.1367)	L L : 4 Hal.	
68	No.68 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	(BN No.1077)	L L : 11 Hal.	
69	No.69 Tahun 2014 26 Sept. 2014 1 Oktober 2014	Perubahan atas Permendagri No.9/2011 ttg Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. (BN No.1449)	L L : 5 Hal.	
70	No.70 Tahun 2014 30 Sept. 2014 1 Oktober 2014	Pendelegasian Wewenang Penunjukkan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Th.2014. (BN No.1450)	L L : 37 Hal.	
71	No.71 Tahun 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1639)	L L : 8 Hal.	
72	No.72 Tahun 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Batas Daerah Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. (BN No.1640)	L L : 5 Hal.	
73	No.73 Tahun 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. (BN No.1641)	L L : 9 Hal.	
74	No.74 Tahun 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1642)	L L : 5 Hal.	
75	No.75 Tahun 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. (BN No.1643)	L L : 8 Hal.	
76	No.76 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Atas Permendagri No.50/2014 ttg Batas Daerah Kab. Musi Banyuasin dg Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan. (BN No.1694)	L L : 9 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
77	No.77 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (BN No.1744)	L L : 22 Hal.	
78	No.78 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th.2015. (BN No.1745)	L L : 13 Hal.	
79	No.79 Tahun 2014 17 Oktober 2014 Peraturan Bersama	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. (BN No.1719)	L L : 12 Hal.	
80	No.80 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Atas Permendagri No.11 Th.2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa. (BN No.1746)	L L : 10 Hal.	
81	No.81 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	(BN No.1077)	L L : 11 Hal.	
82	No.82 Tahun 2014 10 Juli 2014 16 Juli 2014	(BN No.1077)	L L : 11 Hal.	
83	No.83 Tahun 2014 21 Nov. 2014 24 Nov. 2014	Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. (BN No.1814)	L L : 8 Hal.	
84	No.84 Tahun 2014 28 November 2014	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (BN No.1837)	L L : 11 Hal.	
85	No.85 Tahun 2014 11 Desember 2014 12 Desember 2014	Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. (BN No.1906)	L L : 12 Hal.	
86	No.86 Tahun 2014 11 Desember 2014 12 Desember 2014	(BN No.10..)	L L : 11 Hal.	
87	No.87 Tahun 2014 11 Desember 2014 12 Desember 2014	(BN No.10..)	L L : 11 Hal.	
88	No.88 Tahun 2014 11 Desember 2014 12 Desember 2014	(BN No.10..)	L L : 11 Hal.	
89	No.89 Tahun 2014 11 Desember 2014 12 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Halmahera Tengah dgn Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara. (BN No.10..)	L L : 11 Hal.	

90	No.90 Tahun 2014 19 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Bone Bolango dengan Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo. (BN No.2057)	L L : 4 Hal.	
91	No.91 Tahun 2014 19 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara Prov. Gorontalo. (BN No.2058)	L L : 3 Hal.	
92	No.92 Tahun 2014 19 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Boalemo dengan Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. (BN No.2059)	L L : 3 Hal.	
93	No.93 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. (BN No.2060)	L L : 6 Hal.	
94	No.94 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. (BN No.2061)	L L : 7 Hal.	
95	No.95 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. (BN No.2062)	L L : 10 Hal.	
96	No.96 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. (BN No.2063)	L L : 11 Hal.	
97	No.97 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Cianjur dengan Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. (BN No.2064)	L L : 8 Hal.	
98	No.98 Tahun 2014 22 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten. (BN No.2065)	L L : 13 Hal.	
99	No.99 Tahun 2014 23 Desember 2014 30 Desember 2014	Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (BN No.2003)	L L : 11 Hal.	
100	No.100 Tahun 2014 24 Desember 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab.Bogor dengan Kab. Purwakarta dan Kab. Bogor dengan Kab. (BN No.2066)	L L : 5 Hal.	
101	No.101 Tahun 2014 31 Desember 2014	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. (BN No.2067)	L L : 8 Hal.	
102	No.102 Tahun 2014 31 Desember 2014	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015. (BN No.2068)	L L : 4 Hal.	
103	No.103 Tahun 2014 31 Desember 2014	Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kemendagri Tahun 2015 (BN No.2069)	L L : 10 Hal.	
104	No.104 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Ciamis dengan Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat. (BN No.2102)	L L : 5 Hal.	

105	No.105 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Tasikmalaya dengan Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat. (BN No.2103)	L L : 3 Hal.	
106	No.106 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Bogor dengan Kab.Bekasi Provinsi Jawa Barat. (BN No.2104)	L L : 5 Hal.	
107	No.107 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. (BN No.2105)	L L : 10 Hal.	
108	No.108 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Indramayu dengan Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat. (BN No.2106)	L L : 7 Hal.	
109	No.109 Tahun 2014 31 Desember 2014	Batas Daerah Kab. Tasikmalaya dengan Kab. Garut Provinsi Jawa Barat. (BN No.2107)	L L : 7 Hal.	
110	No.110 Tahun 2014 31 Desember 2014	(BN No.10..)	L L : 11 Hal.	
111	No.111 Tahun 2014 31 Desember 2014	Pedoman Teknis Peraturan di Desa. (BN No.2091)	L L : 16 Hal.	
112	No.112 Tahun 2014 31 Desember 2014	Pemilihan Kepala Desa. (BN No.2092)	L L : 15 Hal.	
113	No.113 Tahun 2014 31 Desember 2014	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (BN No.2093)	L L : 24 Hal.	
114	No.114 Tahun 2014 31 Desember 2014	Pedoman Pembangunan Desa. (BN No.2094)	L L : 34 Hal.	
<b>TAHUN 2015</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 2015 2 Januari 2015 7 Januari 2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri. (BN No.16)	L L : 39 Hal.	
2	No.02 Tahun 2015 2 Januari 2015 9 Januari 2015	Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA.2015. (BN No.33)	L L : .. Hal.	
3	No.03 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Buol dengan Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.127)	L L : 5 Hal.	
4	No.04 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.128)	L L : 4 Hal.	
5	No.05 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kab. Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.129)	L L : 6 Hal.	

6	No.06 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.130)	L L : 5 Hal.	
7	No.07 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.131)	L L : 6 Hal.	
8	No.08 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kab. Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.132)	L L : 7 Hal.	
9	No.09 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	Batas Daerah Kab.Tojo Una-Una dengan Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. (BN No.133)	L L : 8 Hal.	
10	No.10 Tahun 2015 20 Januari 2015 27 Januari 2015	(BN No.134)	L L : .. Hal.	
11	No.11 Tahun 2015 23 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kab. Minahasa dengan Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.144)	L L : 5 Hal.	
12	No.12 Tahun 2015 23 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara. (BN No.145)	L L : 5 Hal.	
13	No.13 Tahun 2015 23 Januari 2015 30 Januari 2015	(BN No.146)	L L : .. Hal.	
14	No.14 Tahun 2015 23 Januari 2015 30 Januari 2015	(BN No.147)	L L : .. Hal.	
15	No.15 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kab. Konawe dengan Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. (BN No.148)	L L : .. Hal.	
16	No.16 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. (BN No.149)	L L : 6 Hal.	
17	No.17 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. (BN No.150)	L L : 6 Hal.	
18	No.18 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. (BN No.151)	L L : 9 Hal.	
19	No.19 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kab. Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. (BN No.152)	L L : 11 Hal.	
20	No.20 Tahun 2015 26 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.	L L : 6 Hal.	

	30 Januari 2015	(BN No.153)		
21	No.21 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. (BN No.154)	L L : 7 Hal.	
22	No.22 Tahun 2015 26 Januari 2015 30 Januari 2015	(BN No.150)	L L : 6 Hal.	

39	No.39 Tahun 2015 4 Februari 2015	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (BN No.10..)	L L : 4 Hal.	
----	-------------------------------------	---	--------------	--